

Perbandingan Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah di Indonesia dan Sekolah Republik Indonesia Tokyo

Nurudin

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan,
Kementerian Agama Republik Indonesia
e-mail: *dklaros@yahoo.com*

DOI : 10.14421/jpi.2015.41.1-24

Diterima: 3 Maret 2015

Direvisi: 8 April 2015

Disetujui: 22 Juni 2015

Abstract

Religious education is a mandate of national legislation that should be implemented in every school based on the Legislation of National Education System, and as the right of every student to receive religious education in accordance with their own religion. This research is aimed to get sufficient data and information on the management of religious education in school of the Republic of Indonesia in Tokyo Japan. Specifically this study is expected to be a policy matter, Firstly, students' right fulfillment aspect to receive religious education as stated in Legislation Number 20/2003 About the National Education System Article 12 Verse (1) point a. Government Regulation Number 55/2007 about religious education and Religious affair education, and also the Minister of Religious Affairs Regulation Number 16/2010 on the Management of Religious Education in Schools; Secondly, the management of religious teachers and religious education learning in order to meet the Education National Standards as the authority of the Ministry of Religious Affairs that must be implemented optimally in every educational unit.

Keywords : *Religious Education, Management, Abroad School*

Abstrak

Pendidikan Agama merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan di setiap sekolah berdasarkan Undang-Undang sistem pendidikan Nasional, dan merupakan Hak setiap siswa mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang memadai terhadap pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah Republik

Indonesia di Tokyo Jepang. Secara khusus studi ini diharapkan menjadi bahan kebijakan, *Pertama*, Aspek pemenuhan hak siswa mendapatkan pendidikan agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat (1) poin a. Peraturan Pemerintah Nomor 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 16/2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah; *Kedua*, pengelolaan guru agama dan pembelajaran pendidikan agama dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagai kewenangan Kementerian Agama yang harus dilaksanakan secara optimal pada setiap satuan pendidikan.

Kata Kunci: *Pendidikan Agama, Pengelolaan, Sekolah Luar Negeri.*

Pendahuluan

Salah satu tanggungjawab Kementerian Agama Republik Indonesia di bidang pendidikan yang hingga kini belum memperoleh perhatian adalah pengelolaan pendidikan agama pada satuan pendidikan sekolah Indonesia luar negeri. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pasal 12 ayat (1) poin a dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.” Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa “pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Namun, hingga saat ini pendidikan agama pada satuan pendidikan sekolah di luar negeri diselenggarakan tanpa arahan, tanpa pembinaan, tanpa supervisi, dan tanpa adanya evaluasi dari Kementerian Agama. Pendidikan agama pada satuan pendidikan sekolah luar negeri selama ini berjalan sesuai dengan selera dari pimpinan atau guru masing-masing satuan pendidikan.

Kalau kebetulan satuan pendidikan sekolah luar negeri memperoleh pimpinan dan guru sekolah yang peduli terhadap pendidikan agama, maka sekolah tersebut akan memperoleh pelayanan pendidikan agama yang mungkin memadai. Namun apabila satuan pendidikan sekolah luar negeri tidak memperoleh pimpinan sekolah atau guru yang peduli terhadap pendidikan agama maka kemungkinan sekolah tersebut tidak memperoleh pelayanan pendidikan agama yang memadai. Jumlah peserta didik yang berada pada sekolah Indonesia luar negeri memang tidaklah besar, namun mereka adalah warga Indonesia, yang di masa depan ikut menentukan arah kemajuan bangsa Indonesia. Pada umumnya peserta didik sekolah Indonesia luar

negeri adalah anak-anak Indonesia yang orang tuanya bekerja di luar negeri. Orang tua peserta didik pada sekolah Indonesia luar negeri umumnya bekerja sebagai buruh, pegawai swasta dan sebagian lain sebagai pegawai-pegawai pemerintah Indonesia yang bekerja di kedutaan atau konsulat Indonesia di luar negeri. Dengan adanya sekolah Indonesia luar negeri anak-anak Indonesia di luar negeri dapat bersekolah dengan mengikuti kurikulum yang berlaku di Indonesia. Jumlah sekolah Indonesia luar negeri saat ini adalah 15 sekolah, yang tersebar di beberapa negara. Nama-nama sekolah Indonesia di luar negeri umumnya menggunakan nama negara tempat sekolah tersebut berada. Daftar Sekolah Indonesia luar negeri adalah: 1). Sekolah Indonesia Bangkok, 2). Sekolah Indonesia Beograd, 3). Sekolah Indonesia Cairo, 4). Sekolah Indonesia Damascus, 5). Sekolah Indonesia Davao. 6). Sekolah Indonesia Jeddah, 7). Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, 8). Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, 9). Sekolah Indonesia Makkah, 10). Sekolah Indonesia Moskow, 11). Sekolah Indonesia Wassenar, Belanda, 12). Sekolah Indonesia Riyadh, 13). Sekolah Indonesia Tokyo, 14). Sekolah Indonesia Singapura, 15) Sekolah Indonesia Yangon.

Sekolah-sekolah Indonesia luar negeri umumnya dibangun oleh komunitas Indonesia yang ada di luar negeri. Keberadaan sekolah ini dibantu oleh aparat kedutaan atau konsulat Indonesia yang berada di luar negeri dan selanjutnya didukung secara formal oleh pemerintah Indonesia di Jakarta melalui kementerian yang menangani pendidikan nasional. Dalam perkembangannya sekolah-sekolah Indonesia luar negeri ini, melalui kedutaan merekrut pendidik dan tenaga kependidikan yang akan melaksanakan kurikulum pendidikan. Sekolah-sekolah Indonesia luar negeri pada umumnya juga mengangkat atau mendatangkan guru agama yang akan memberikan pelajaran pendidikan agama pada anak-anak Indonesia yang belajar di sekolah Indonesia luar negeri. Para guru agama inilah yang kemudian akan ikut menentukan kearah mana corak warna kurikulum pendidikan agama pada sekolah tersebut. Melalui pengetahuan, pengalaman, paham atau aliran keagamaan yang dimiliki, guru agama akan ikut menentukan warna atau jenis paham dan aliran keagamaan para peserta didik.

Persoalannya hingga saat ini adalah bahwa Kementerian Agama, instansi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pendidikan agama secara teknis maupun substantif belum pernah melakukan penelitian terhadap pengelolaan pendidikan agama pada sekolah Indonesia di luar negeri. Secara teknis pertanyaan penelitiannya adalah: apakah penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah Indonesia luar negeri telah memenuhi ketentuan standar nasional pendidikan? Dan secara substantive pertanyaan penelitiannya adalah: apakah substansi kurikulum pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik sudah sesuai dengan fungsi pendidikan agama sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan

agama dan Pendidikan Keagamaan? Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini menyatakan: “Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.” Secara substansial peraturan pemerintah ini menghendaki bahwa pendidikan agama yang berlangsung di setiap satuan pendidikan tidak beraliran radikalisme, fundamentalisme dan tidak bersifat eksklusif.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Pertama, Bagaimana gambaran sistem pengelolaan pendidikan agama pada Sekolah Republik Indonesia Tokyo? Kedua, Bagaimana substansi kurikulum yang diajarkan di Sekolah Republik Indonesia Tokyo? Ketiga, Bagaimana kualifikasi dan kompetensi guru agama di Sekolah Republik Indonesia Tokyo?

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan pendidikan agama pada sekolah Indonesia luar negeri, baik dari segi teknis penyelenggaraan pendidikan maupun dari segi substansi kurikulum pendidikan agama. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Dalam studi kasus ini peneliti melakukan penelitian yang mendalam terhadap Sekolah Republik Indonesia Tokyo sebagai satu unit analisis. Sebagaimana umumnya studi kasus, penelitian ini bersifat kualitatif dimana data penelitian dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam dengan unsur komunitas sekolah. Masuk dalam unsur komunitas sekolah ini adalah para pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan masyarakat Indonesia yang ada di sekitar sekolah Indonesia luar negeri. Dalam hal ini peneliti adalah instrumen dari penelitian ini sendiri.

Sekolah Indonesia Luar Negeri

Sekolah Indonesia Luar Negeri merupakan sekolah Indonesia yang berada di luar teritori/wilayah Indonesia. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia yang berada di Luar Negeri. Pemerintah Indonesia telah memiliki 15 sekolah khusus bagi anak-anak Indonesia yang mengikuti orang tuanya yang bekerja di luar negeri. Aspek-aspek pendanaan dan kebijakan pendidikan di negara setempat, jumlah murid yang terbatas di tiap-tiap negara juga menyebabkan sekolah semacam ini perlu penanganan lebih khusus. Sekolah yang terakhir berdiri adalah Sekolah Indonesia di Kinabalu Sabah pada tahun 2012.¹

Sekolah Indonesia di luar negeri berstatus sebagai sekolah swasta berbantuan yang penyelenggaraan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya

¹ http://siln.unsd.org/2012_09_01_archive.html.

dari masyarakat Indonesia di negara setempat, tentu termasuk didalamnya, adalah pihak perwakilan Republik Indonesia (KBRI).

Sedangkan bantuan teknis diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) dalam bentuk pengadaan buku-buku pelajaran, pengadaan peralatan dan sarana pendidikan, penugasan PNS untuk diperbantukan sebagai kepala sekolah dan atau guru.

Eksistensi sekolah Indonesia di luar negeri pada hakekatnya mempunyai peran yang tidak berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya di dalam negeri, yaitu diharapkan untuk bisa turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam UUD 45. Lebih jauh tentunya SILN juga dituntut dapat mewujudkan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang sisdiknas bab II pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional yang antara lain untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Konstruksi Kebijakan Pendidikan Agama di Sekolah

Dari aspek konstruksi kebijakan perundangan, penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan formal merupakan bagian dari hak yang harus diberikan kepada peserta didik oleh setiap lembaga pendidikan formal sebagai penyelenggara pendidikan. Lebih spesifik ditegaskan pada Pasal 12 ayat (1) poin (a) UU Sisdiknas, bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Selanjutnya, regulasi ini menghasilkan turunan perundangan dibawahnya, yaitu PP No 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang secara organik menjabarkan berbagai ketentuan dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas terkait penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Beberapa kebijakan penting yang dapat digarisbawahi dalam konteks penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang termaktub dalam PP No 55/2007 tentang pendidikan agama, antara lain: 1. Kewajiban bagi setiap pendidikan formal pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agama (Pasal 3 ayat 1); 2. Setiap peserta didik pada pendidikan formal di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama (Pasal 4 ayat 2); 3. Pendidikan agama pada pendidikan formal diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran (Pasal 4 ayat 1), dan kurikulum pendidikan agama tersebut harus

dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (Pasal 5 ayat 1); 4. Penyelenggaraan pendidikan agama pada pendidikan formal, maupun pendidikan keagamaan (pendidikan berciri khusus keagamaan) dikelola oleh menteri agama (Pasal 3 ayat 1) dan karena itu, turunan kebijakan organik dari PP ini dibuat melalui Peraturan Menteri Agama (Pasal 7 ayat 3, Pasal 13 ayat 5, Pasal 19 ayat 2); 5. Pendidik (Guru) pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta) disediakan oleh sekolah yang bersangkutan, dan jika sekolah swasta tidak dapat menyediakannya, maka pemerintah (Kementerian Agama) dan/atau pemerintah daerah (bupati/walikota) wajib menyediakannya sesuai kebutuhan sekolah (Pasal 6 ayat 2 dan ayat 3).

Selanjutnya, PP No. 55/2007 menurunkan aturan organik berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Pada peraturan ini dijabarkan lebih terperinci bagaimana implementasi penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah seharusnya dilaksanakan. Termasuk di dalamnya aturan tentang implementasi kurikulum, proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, penilaian hasil belajar, evaluasi pengelolaan hingga sanksi-sanksi. Untuk mengetahui jalannya implementasi regulasi terhadap sasaran kebijakan (satuan pendidikan), niscaya dilihat terlebih dahulu bagaimana sekolah memenuhi serangkaian kewajiban kebijakan (*policy obligation*) yang diamanatkan kepadanya. Dalam konteks penjabaran terhadap UU Sisdiknas dan PP 55 diatas, PMA ini menguraikan secara lebih tegas kewajiban sekolah dalam mengimplementasi penyelenggaraan pendidikan agama sebagai berikut; Pasal 3 ayat (1) Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Ayat (2) Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Pasal 4 ayat (1) sampai (4): 1. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik dikelas; 2. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lainnya; 3. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut; 4. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

Regulasi perundangan dari UU hingga PMA tersebut, dengan demikian, mewajibkan bagi setiap satuan pendidikan formal (sekolah), baik negeri, swasta umum, maupun sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri, untuk menyelenggarakan pendidikan agama kepada siswa sesuai dengan agama yang dianutnya oleh guru yang seagama. Dengan kata lain, nihilnya pemberian mata pelajaran pendidikan agama sesuai agama yang dianut oleh peserta didik oleh pendidik seagama di sekolah tertentu merupakan pelanggaran terhadap kebijakan perundang-undangan, dan pada gilirannya akan dijatuhkan sanksi administratif sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Substansi Pendidikan Agama

Pendidikan agama diselenggarakan berkaitan utuh dengan iman dan perilaku, dengan demikian pendidikan agama berbasis pada: (1) sistem nilai keyakinan yang didalamnya didasari oleh hubungan iman antara hamba dan Tuhannya (transendental); (2) sistem nilai perilaku yang didasari oleh hubungan baik antar sesama manusia (horizontal). Dua variabel pokok dalam pendidikan agama ini disebut M.C. Kitshoff² sebagai garis agama (*religious lines*), sebagaimana penjelasannya:

“Religious education can be described as the process whereby situation is deliberately structured in order to modify learner behavior along desired religious lines.”

Berdasarkan pendalaman keyakinan (iman), Fuad³ menyorikan kategori definitif tentang pendidikan agama, antara lain:

Pertama, Pendidikan agama dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber ajaran dan nilai-nilai agama, yaitu kitab suci serta nilai kebaikan dan kebajikan dalam agama. Dalam pengertian ini, pendidikan agama dapat berupa teori dan pemikiran yang dikembangkan atau dibangun berlandaskan pada sumber-sumber dasar tersebut.

Kedua, Pendidikan agama dimaksudkan sebagai upaya mendudukkan agama dan nilai-nilainya agar agama menjadi *way of life* seseorang. Dalam pengertian ini pendidikan agama dapat berwujud: (1) aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk membantu peserta didik dalam menanamkan dan atau menumbuhkembangkan ajaran agama dan nilai-nilainya; (2) segenap fenomena atau peristiwa tertentu yang dampaknya ialah tertanamnya ajaran agama atau nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.

² M.C. Kitshoff, *Religious Education*, (Cape Town: Longman, 1996), hlm. 2.

³ Choirul Fuad Yusuf, *Op.Cit.* hlm. 46.

Ketiga, Pendidikan agama dipahami sebagai proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang selama ini berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat di masing-masing agama. Pendidikan agama dalam pengertian ini dipahami sebagai proses pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya dan peradaban penganut agama bagi generasi ke generasi sepanjang sejarahnya.

Paradigma pendidikan agama ini bersandar pada filsafat teosentris dan antroposentris sekaligus. Prinsipnya tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama. Artinya, ilmu tidak bebas nilai, namun bebas dinilai; mengajarkan agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan sisi tradisional, melainkan juga sisi rasional. Karena itu, pandangan pendidikan agama dalam hal ini, berbeda dengan konsep tabularasa dari John Locke (1632-1704) yang memandang jiwa manusia dilahirkan sebagai kertas putih bersih yang kemudian sepenuhnya tergantung pada tulisan yang mengisinya, yaitu kemana jiwa itu akan dibentuk dan dikembangkan tergantung pada tulisan yang mengisinya, maksudnya tergantung pada kepribadian macam apa yang ingin dikembangkan oleh pendidik dan masyarakat sekitarnya.

Kritik terhadap pandangan John Locke, bahwa sejak lahir, jiwa dan sifat kodrati manusia telah tertanamkan adanya nilai religius, dimana mereka sejak kelahiran mempunyai ketergantungan untuk menyandarkan dirinya kepada dzat yang maha kuasa, yaitu Tuhan. Hal ini, selain didasarkan pada kesucian jiwa manusia yang musti dimaknai sebagai jiwa religius, sisi kemanusiaan pada dirinya tidak akan berhenti bertanya dalam mencari kebenaran Tuhan.⁴

Menguatkan pengertian pendidikan agama diatas, terdapat lima prinsip ilmu pengetahuan agama. *Pertama*, tidak adanya kompartementalisasi bidang-bidang kehidupan manusia. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian integral kehidupan seorang penganut agama. *Kedua*, kehidupan manusia pada hakekatnya diabdikan untuk beribadat kepada Tuhan YME. *Ketiga*, ilmu dan teknologi haruslah sarat nilai dan *committed* pada kebahagiaan umat manusia dan kelestarian ekologi. *Keempat*, pengembangan ilmu dan teknologi harusnya berlandaskan pada prinsip etik dan moral yang jelas. Kelima, pengembangan keduanya haruslah berkorelasi positif dengan peningkatan iman kepada tuhan YME.⁵

Berdasarkan atas perspektif moral, pendidikan agama dimaknai pula sebagai pendidikan berbasis moral. Artinya, pendidikan agama dalam konteks ini mengatur, tidak hanya penanaman keyakinan di dalam satu agama tertentu, melainkan juga berkaitan dengan sejauhmana moralitas peserta didik dapat terbentuk dalam rangka

⁴ *Ibid.* hlm. 47.

⁵ *Ibid.* Hlm 47

berperan di tengah realitas sosial, utamanya terkait dengan penghargaan terhadap nilai-nilai agama lain. Sehingga pendidikan agama mempunyai peran menjadi apa yang disebut Lita sebagai ‘*to establish peaceful communities*’.

Dalam hal ini, Lita menegaskan:

*Education and religion are valuable instruments for addressing people's needs and share information with regards to differences in language, religion, race, and ethnicity. Education helps to establish better relationships among people. In order to understand each other we need to better understand the religious background of different belief systems in the community.*⁶

Pendidikan agama dalam pengertian pendidikan moral hakikatnya adalah pendidikan yang terkait dengan upaya menanamkan nilai-nilai dalam diri peserta didik agar menjadi manusia dewasa yang dalam tingkah lakunya berupaya untuk tidak melanggar kaidah hukum dalam masyarakat dan norma-norma yang berlaku dalam agama. Wujud keberhasilan pendidikan agama sebagai pendidikan moral adalah wujud tingkah laku yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma yang harus diikuti.⁷

Kaitannya dengan itu, maka pendidikan agama memiliki dua fungsi utama, *Pertama*, fungsi konservatif adalah bagaimana mewariskan dan mempertahankan cita-cita dan budaya suatu masyarakat kepada generasi penerus, dimana agama sebagai sumber inspirasi pengembangan budaya. *Kedua*, fungsi progresif, bagaimana aktifitas pendidikan dapat memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengembangannya, penanaman nilai-nilai berbasis agama dan bekal keterampilan mengantisipasi masa depan, sehingga generasi penerus mempunyai bekal kemampuan dalam kesiapan untuk menghadapi tantangan masa kini dan mendatang.

Mengingat pentingnya pendidikan agama sebagai pendidikan moral, Muhadjir⁸ menegaskan bahwa manusia dapat *survive* karena adanya komitmen pada nilai-nilai moral yang diambil dari ajaran agama. Bila semua orang tidak pernah menaati janjinya, tidak acuh pada tanggung jawab, curang, mempermainkan aturan-aturan moralitas, dapat dibayangkan hancurnya masyarakat manusia. Disinilah urgensi pendidikan moral agama yang dapat membangun karakter manusia. Dengan pendidikan agama, peserta didik dibantu memahami esensi dan arti penting nilai-

⁶ A. Lita, *Challenges Facing Religious and Moral education in Namibian Schools*, dalam *The Strategic Role of Religious Education in The Development of Culture of Peace*, (Jakarta: Balitbang Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 335.

⁷ Nurul Zuriyah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, (Bumi Aksara, 2007), hlm. VI.

⁸ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan sosial: Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Raka Sasarin, 1993), hlm. 12.

nilai moral agama dan mampu mengembangkan segala potensinya mewujudkan nilai-nilai moral itu dalam perilaku nyata, baik nilai-nilai *ilahi* maupun *insani*.

Lebih jauh, signifikansi pendidikan agama dalam rangka pembentukan kepribadian dan perilaku sebagai bekal peserta didik dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, ditegaskan pula oleh Kohlberg⁹, profesor pendidikan dan psikologi sosial dari Universitas Harvard. Berdasarkan penelitiannya, Kohlberg menyatakan bahwa proses perkembangan moral dan perilaku pada setiap manusia tidak pernah selesai, sejak dari dalam kandungan sampai akhir hayat.

Lebih jauh Adler¹⁰, mempergunakan pendekatan psikologi sosial dalam bahasanya tentang perkembangan moral dan perilaku seseorang. Menurutnya ada dua dorongan pokok di dalam diri manusia yang melatarbelakangi segala tingkah lakunya, yaitu dorongan keakuan dan dorongan kemasyarakatan. Dikemukakan bahwa konkretnya dorongan kemasyarakatan itu berbentuk kooperasi, hubungan sosial, hubungan antar pribadi, hubungan dengan kelompok, dan lainnya. Dalam arti yang lebih luas dorongan kemasyarakatan ini merupakan dorongan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan membantu masyarakat yang menjadi lingkungan seseorang guna mencapai tujuan yang sempurna.

Hal yang bersamaan dikemukakan Thorndike dalam Woodworth¹¹. Jika Adler memakai istilah “dorongan masyarakat”, Thorndike menonjolkan kata “belajar” di dalam menjelaskan latar belakang tingkah laku seseorang, yang menurutnya merupakan terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa dalam lingkungan seseorang yang disebutnya “stimulus” (S) dengan respons (R) yang diberikan terhadap stimulus tersebut.

Cukup jelas dari bahasan di atas, bahwa perkembangan moral dan perilaku individu-individu masyarakat manusia bukan sekedar proses-proses yang bersifat kodrati, tetapi ditopang oleh proses yang disebut proses belajar (*learning process*), yang menurut istilah teknis sosiologi disebut “proses sosiologis”. Perkembangan moral dan perilaku itu ditentukan oleh lingkungan seumur hidupnya yang menurut Koentjaraningrat serba berpranata, serba bersistem atau mengandung norma-norma sosial yang terorganisir dan mengatur setiap perilaku warga masyarakat. Salah satu di antara sekian banyak pranata sosial itu adalah pranata agama. Agama

⁹ L. Kohlberg, *Cognitive-Development Theory and the Practice of Collective Moral Education*, dalam M. Collins dan M. Gottesman (ed.), *Group Care: The Educational Path of Youth Aliyah*, (New York: Gordon and Breach, 1971).

¹⁰ Lihat bahasan rinci mengenai hal ini dalam Alfred Adler, *The Individual Psychology of Alfred Adler*; H.L. Ansbacher & R. Ansbacher (ed.), (New York: Harper Torchbooks, 1956).

¹¹ Robert S Woodworth, *A Biographical Memoar of Edwards Lee Thorndike 1874-1949*, (Washington DC: National Academy of Science, 1952), hlm. 209-215.

sebagai pranata sosial berperan sangat penting dalam memengaruhi perilaku para penganutnya dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Namun, pendidikan agama kerap kali dituduh sebagai penghambat kemajuan manusia, mempertinggi fanatisme, takhayul dan kesia-siaan. Tetapi sebagai salah satu pranata sosial, seperti dikemukakan di atas, peran agama sebagai sumber moral dan kaidah sosial tak dapat disangkal. Bahkan Emile Durkheim, dalam banyak tulisannya, berulang kali menegaskan sumbangan positif agama terhadap kesehatan moral masyarakat.¹³ Jelas bahwa nilai-nilai agama yang umumnya sangat disakralkan merupakan orientasi utama darimana sistem hukum dan kaidah sosial dibentuk dan dilembagakan masyarakat.

Pada posisi demikian, sebagaimana disampaikan Risnawati¹⁴, bahwa kualitas manusia yang ingin dicapai dalam pendidikan agama adalah kualitas seutuhnya yang mencakup tidak saja aspek rasio, intelek atau akal budinya dan aspek fisik atau jasmaninya, tetapi juga aspek psikis atau mentalnya maupun aspek sosial yaitu dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam masyarakat dan lingkungannya, serta aspek spiritual yaitu dalam hubungannya dengan Tuhan YME, Sang Pencipta. Kualitas manusia dalam spiritualitas (hubungan dengan Tuhan) dan dalam aspek sosial (hubungan dengan sesama dan lingkungannya), yang menjadi syarat tercapainya tujuan pembangunan, hanya dapat dicapai lewat partisipasi agama atau pendidikan agama.

Pengelolaan Pendidikan Agama Di Sekolah Republik Indonesia-Tokyo Profile SRIT- Sekolah Swasta Berbantuan Negeri

Saat ini Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT) terletak di 4-4-6 Meguro Meguro-ku Japan. Lembaga pendidikan inimenempati area tanah seluas 1.834,08 meter persegi, dengan bangunan tiga lantai. Bangunan sekolah ini dibangun seluruhnya atas biaya pemerintah. Namun untuk pembiayaan kegiatan pendidikannya pemerintah hanya menyumbang 30%, sedangkan yang lain 10% dari sumbangan BUMN yang ada di Tokyo, seperti Pertamina, Paruda, BNI dan Aneka Tambang, dan sisanya 60% dari sumbangan para murid. Besar sumbangan murid bervariasi antara 6000 yen sampai 35.500 yen, tergantung besar *income* orangtuanya.

¹² Herwanto Aryo Manggolo, *Pranata Sosial*, dalam J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 215-226.

¹³ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religions*, (New York: Free Press of Glencoe, 1961), hlm.52-63.

¹⁴ Risnawati Sinulingga, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Pendidikan Agama Kristen FISIP Universitas Sumatera Utara*, 15 November 2008.

Pendidik dan tenaga kependidikan di SRIT diangkat dengan sistem kontrak oleh BKS (Badan Kerja Sekolah) KBRI Tokyo. Kontrak diberlakukan, terutama pada kepala sekolah dan para guru, termasuk guru agama, yang di datangkan dari luar Jepang. Kini jumlah seluruh guru sebanyak 24 orang, dengan perincian 7 orang guru/karyawan tetap, dan 17 orang guru/karyawan tidak tetap. Diantara 7 orang guru/karyawan tetapnya, terdapat 4 orang guru berstatus sebagai PNS. Proses penerimaan guru tetap dan kepala sekolah ini dilakukan di Indonesia, umumnya melalui Kemendikbud, sedangkan untuk guru tidak tetap dilaksanakan di Jepang melalui BKS KBRI Tokyo. Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dibayar melalui anggaran KBRI.

Jenjang pendidikan yang di kembangkan adalah tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah ini bersifat *swasta berbantuan*, yang dikelola oleh BKSKBRI Tokyo Kementerian Luar Negeri. Meski mengalami liku-liku dan tantangan yang tidak ringan dalam mengelola sekolah ini, namun kini penyelenggaraan pendidikan SRIT dapat dikatakan relatif telah memadai. Indikasinya adalah bahwa sekolah ini telah memperoleh akreditasi BAN-SM yang baik dan Ijazahnya telah diakui setara dengan sekolah-sekolah di Jepang yang sejenis. Berdasarkan SK-BAN-SM Nomor : 185/BAN-SM/LL/XII/2011, tingkat akreditasi untuk satuan pendidikan TK mendapatkan akreditasi B. Sedangkan untuk tingkat SD, SMP, SMA, masing-masing telah mendapatkan akreditasi A.

Sistem Pendidikan Nasional Bermuatan Jepang

Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM) di SRIT secara formal berlangsung selama 7 jam sehari, yakni mulai dari pukul 09.00 s.d 16.00. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah Kurikulum 2006, atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), meskipun mereka pada tahun 2014 telah mempersiapkan diri untuk menggunakan Kurikulum 13. Struktur program kurikulum secara formal pada SRIT tergambar sebagai berikut: 1. Untuk tingkat SD kelas 1 sd 6 mendapat 10 mata pelajaran; 2. Untuk tingkat SMP kelas 1 sd 3 mendapat 11 mata pelajaran; 3. Untuk tingkat SMA kelas 1 sd 3 mendapat 16 mata pelajaran.

Sebagaimana yang berlangsung di Indonesia, mata pelajaran yang memperoleh perhatian lebih banyak di SRIT adalah mata pelajaran yang terkait dengan materi ujian nasional. Materi ujian nasional ini memperoleh penguatan, dengan tambahan pembelajaran extra sekolah. Harapannya adalah agar setiap siswa bisa lulus dengan nilai tinggi. Selain itu Sistem Proses Belajar Mengajar (PBM) di SRIT juga mengadopsi sebagian sistem PBM yang berjalan pada sekolah-

sekolah Jepang. Dalam proses belajar mengajar para siswa diberikan muatan bahasa Jepang mulai tingkat pendidikan dasar, sehingga alumni SRIT bisa masuk pada pendidikan tinggi Jepang. Sebagaimana berlangsung pada pendidikan dasar di Jepang, Sekolah Dasar pada SRIT juga sudah mulai mengembangkan budaya penelitian bagi para siswanya. Para siswa SD dilatih untuk melakukan pengamatan lapangan atau studi perpustakaan, dan menulis serta menyajikan laporan penelitian sebagaimana layaknya para peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Dalam penyajian laporan penelitian ini, para siswa SD SRIT juga dibiasakan dengan menggunakan instrumen teknologi komputer, sebagaimana dilakukan oleh para siswa Sekolah Dasar Jepang. Penyampaian laporan yang dikembangkan pada siswa SRIT dalam bentuk pointers, disampaikan dengan instrumen power point. SRIT juga mengembangkan kerjasama akademik dan non akademik dengan sekolah-sekolah Jepang di sekitarnya.

Dalam membangun kepribadian para siswa juga ditekankan untuk mempunyai kepribadian yang kuat berbasiskan nilai-nilai agama, moral dan wawasan kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai dan wawasan tersebut di disseminasikan melalui sejumlah kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas. Secara formal, materi pelajaran pada SD di ruang atau luar kelas untuk pendidikan agama diberikan selama tiga jam. Untuk materi kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 5 jam, bahasa Inggris 2 jam, bahasa Jepang 2 jam, matematika 5 jam, sains 4 jam, IPS 3 jam, seni budaya dan ketrampilan 4 jam, olahraga dan kesehatan 2 jam. Total materi pembelajaran setiap minggu 32 jam.

Sedangkan untuk Mata pelajaran SMP, materi pelajaran agama diberikan sebanyak 2 jam, kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, bahasa Jepang 2 jam, matematika 4 jam, sains/IPA 4 jam, IPS 4 jam, seni budaya dan ketrampilan 2 jam, olahraga dan kesehatan 2 jam, teknologi informasi dan komunikasi 2 jam. Total materi pembelajaran setiap minggu selama 32 jam.

Adapun untuk mata pelajaran SMA, materi pembelajaran agama diberikan sebanyak 2 jam, kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, bahasa Jepang 2 jam, matematika 4 jam, fisika 2 jam, kimia 2 jam, biologi 2 jam, geografi 1 jam, sejarah 1 jam, sosiologi 2 jam, seni budaya 2 jam, olahraga dan kesehatan 2 jam, teknologi informasi dan komunikasi 2 jam dan pengembangan diri 2 jam. Untuk SMA, jumlah jam pelajaran dalam setiap minggu sebanyak 36 jam.

Untuk memperluas wawasan dan pengalaman, para siswa SRIT setiap setahun mengikutilomba apresiasi SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri) yang tempatnya bergiliran. SILN seluruhnya ada 14 sekolah, yaitu Tokyo, Bangkok,

Yangon, Davao, Singapura, Kuala Lumpur, Belanda, Jeddah, Riyadh, Makkah, Damaskus, Kairo, Moskow dan Beograd. Materi yang diperlombakan dalam SLIN adalah: lomba karya ilmiah, lomba seni tari, lomba seni suara, lomba inovasi media pembelajaran guru dan lomba inovasi manajemen sekolah (kepala sekolah). Selain itu juga diadakan pelatihan guru SILN setiap setahun sekali yang tempatnya bergiliran juga.

Jumlah lulusan SRIT yang tercatat sejak tahun 1976 adalah 763 orang, sedangkan siswa-siswa sebelum tahun tersebut masih tercecer. Jumlah muridnya dari tahun ke tahun mengalami pasang surut, tergantung pada naik turunnya mobilitas orang-orang Indonesia yang menyekolahkan anaknya di SRIT. Namun secara kasar jumlah siswa antara 60 sampai dengan 120 orang. Pada tahun ini jumlah siswa sebanyak 61 orang. Para orang tua siswa yang menyekolahkan anak-anak mereka di SRIT pada umumnya adalah orang-orang Indonesia yang sedang bekerja pada: Kedutaan Republik Indonesia, cabang-cabang BUMN di Tokyo, dan mereka yang bekerja pada perusahaan di Jepang. Selain itu sebagian siswa juga berasal dari para orang tua yang sedang melanjutkan studi di Jepang. Sebagian siswa yang lain, meskipun jumlahnya tidak dominan adalah orang-orang yang berasal dari keturunan orang Indonesia yang kawin dengan orang Jepang yang tinggal di Jepang.

Dengan syarat tertentu, warga Indonesia di luar Tokyo, karena alasan seperti geografis dan pendanaan, dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan kelas khusus dan mendapatkan ijazah setara SRIT. Di antara syarat-syarat tersebut adalah: *Pertama* mereka perlu mengirimkan surat permohonan ke KBRI Tokyo untuk keperluan kelas khusus. *Kedua*, mereka harus menyediakan ruangan belajar yang representatif untuk menampung sejumlah siswa yang akan belajar. *Ketiga*, jumlah siswa yang akan belajar minimal 15 anak dalam satu jenjang tertentu. Contohnya ada 15 anak untuk jenjang SD, atau 15 anak untuk jenjang SMP. Perbedaan kelas tidak menjadi masalah. *Keempat*, sistem pembelajaran akan diatur oleh pihak SRIT, misalnya dengan mengirim gurunya seminggu sekali.

Lika Liku Sejarah SRIT dan Diplomasi Budaya untuk Mencapai Kesetaraan

Dari sudut historis, SRIT awalnya bernama Taman Pendidikan Indonesia di Jepang, yang didirikan oleh para pejabat KBRI Tokyo pada 21 April tahun 1962. Pelopor utama pendirian SRIT adalah Duta Besar Indonesia untuk Tokyo Bambang Sugeng. Nama Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT) secara resmi baru dipakai ketika upacara bendera tanggal 17 Agustus 1963. SRIT kemudian dikukuhkan sebagai sekolah yang statusnya disamakan dengan sekolah-sekolah

negeri di Indonesia dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 83 tertanggal 1 september tahun 1963. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi putra putri Indonesia yang berada di Jepang memperoleh pendidikan sebagaimana pendidikan yang berlangsung di Indonesia.

Pada awal berdirinya SRIT hanya memiliki tiga jenjang pendidikan yaitu TK,SD dan SMP dengan jumlah siswa seluruhnya 45 orang. Gedung sekolah pada saat itu berlokasi di Pondok OWIT (Organisasi Wanita Indonesia Tokyo). Lokasi tersebut merupakan tempat pendidikan darurat, sifatnya sementara dan fasilitasnya kurang memadai. Mulai tanggal 1 Februari 1965, SRIT yang berlokasi di Pondok OWIT ini kemudian pindah ke Wisma Indonesia. Di tempat yang baru ini SRIT memiliki fasilitas pendidikan yang relatif lebih lengkap dan bagus dari sebelumnya. Lokasinya terletak di daerah Setagaya. Pada saat perpindahan inilah jenjang satuan pendidikan SMA pada SRIT di buka, dengan jumlah siswa SMA sebanyak 5 orang siswa. Baru berjalan lima tahun, karena alasan satu dan lain hal, kemudian di tahun 1970 SRIT pindah lagi ke Minami Bamba, di sebuah gedung tua bekas Bank Mitsui, yang suasananya kurang memadai. Di Minami Bamba ini SRIT hanya berjalan satu tahun. Pada tahun 1971 SRIT pindah lagi dari Minami Bamba ke gedung Balai Indonesia yang baru dibangun di wilayah Meguro. Pada 2 Februari 1972 diresmikan berdirinya perpustakaan SRIT dan Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi.

Perkembangan pendidikan SRIT mengalami pasang surut, terutama dari segi pendanaan. Pada masa awal pasca reformasi (sekitar tahun 2000-an) SRIT mengalami masa yang paling sulit, terutama dari segi dukungan finansial, meskipun dari segi kualitas SRIT terus berusaha melakukan perbaikan. Berkat usaha yang gigih dari para penyelenggara sekolah, setelah lebih dari 40 tahun berjuang, yakni mulai tahun 2003 kualitas pendidikan SRIT telah resmi diakui oleh Departemen Pendidikan Jepang. Adanya pengakuan ini status SRIT meningkat menjadi setara dengan sekolah-sekolah Jepang. Pengakuan ini telah menempatkan lulusan SRIT bisa langsung mengikuti test masuk ke Universitas di Jepang. Pada masa sebelumnya SRIT harus mengikuti ujian persamaan dulu dengan SMA Jepang, dan bahkan para alumni SRIT juga harus mengikuti pendidikan lagi pada sekolah Jepang sebelum masuk pada pendidikan tinggi Jepang. Upaya SRIT untuk memperoleh kepercayaan pemerintah dan masyarakat Jepang ditandai adanya berbagai kegiatan kerjasama kelembagaan antara SRIT dengan sekolah dan organisasi sosial Jepang. Di antara kegiatan kerjasama dengan sekolah Jepang dan organisasi-organisasi di Jepang yang telah berjalan selama puluhan tahun yang dilakukan misalnya dalam kegiatan Kanto International School Festival, Ashikaga School Festival, Kokusai School Festival, Yoshida School, Yoron Adventure School & Fujiyama Camping

– KSKK, Takasaki International Junior Club dan Ski Trip & Competition). Hingga periode ini juga dilakukan kerjasama dengan sekolah Jepang lainnya seperti Nishi Tsuma School – Yokohama Prefecture dan dengan organisasi-organisasi internasional di Jepang seperti Japan Indonesia Association (Japinda), serta dengan sekolah asing lainnya antara lain dengan Korean School.

Sebagaimana dikisahkan dalam dokumen SRIT, di tahun 2004 hingga tahun 2005 kegiatan-kegiatan diplomasi budaya terus ditingkatkan termasuk membangun jaringan dengan sekolah-sekolah Jepang lainnya seperti: Kaminaka School – Fukui Prefecture, Daiichi Hino School, dan dengan lembaga-lembaga sosial budaya yang ada di Jepang. Berbagai kegiatan study lapangan juga terus ditingkatkan untuk mendekatkan siswa dengan dunia IPTEK Jepang secara lebih nyata dan aplikatif. Hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan studi lapangan ke MESCI (Museum of Emerging Science and Innovation) dan ke Maintenance Facility ANA Airplane – Haneda Airport. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler juga terus ditingkatkan antara lain dengan mengadakan ekstrakurikuler jurnalistik dan KIR (Kelompok Ilmiah Remaja), musik traditional, musik modern, tari tradisional, pencak silat & sport, dan kegiatan pramuka. Termasuk juga kegiatan OSIS dan kegiatan pembinaan kepemimpinan siswa. Misalnya dengan mengadakan latihan Dasar kepemimpinan Siswa dan Pelatihan Peduli Lingkungan di wilayah Hakone. Pembuatan majalah Sekolah dan ulang tahun sekolah (HUT SRIT) sebagai media diplomasi budaya.

Berbagai kegiatan kompetisi antar siswa terus dilakukan dalam rangka membiasakan siswa untuk berkompetisi termasuk dalam hal penguasaan bahasa asing. Pada akhir tahun 2004 diadakan kegiatan *Foreign Language Competition* yang memperlombakan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Jepang siswa siswi SRIT. Berbagai kompetisi dengan siswa Jepang dan komunitas Jepang lainnya juga dilakukan, antara lain dalam kompetisi *Floor Ball* dan Futsal. Pada periode ini juga dilakukan sejumlah perbaikan fasilitas terutama karena dukungan dari Departemen Pendidikan Nasional dalam bentuk subsidi dana pendidikan (*block grant*) untuk SRIT, sehingga sejumlah fasilitas sekolah seperti laboratorium komputer beserta jaringan internetnya, lab bahasa dan penambahan peralatan laboratorium fisika, biologi dan kimia bisa dilakukan.

Untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan nasionalisme, SRIT mengirimkan guru-gurunya untuk mengikuti pelatihan guru di Jakarta atas prakarsa Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Pelatihan ini kemudian diadakan secara rutin tiap tahun di Indonesia

Visi dan Misi SRIT yang Ideal dan Mengglobal

Sebagaimana umumnya sekolah-sekolah unggulan di Indonesia SRIT memiliki visi dan misi, yang sangat ideal dan mengglobal. Visi dan misi tersebut masuk dalam dokumentasi sekolah yang dinilai sangat penting untuk memberikan spirit pada para pendidik dan peserta didik. Visi tersebut dirumuskan dalam kalimat : *“ Terselenggaranya layanan prima pendidikan bagi seluruh siswa untuk mewujudkan mutu lulusan Sekolah Republik Indonesia Tokyo yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang mampu bersaing di era globalisasi.* Visi ini bermakna ideal, bersifat normatif yang tidak mudah untuk diukur. Visi ini juga bersifat *endless* atau tak berujung pangkal, berlaku sepanjang masa, karena pengertian kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan spiritual tidak ada batasnya. Demikian juga untuk kemampuan bersaing di era global merupakan jalan yang sangat panjang dan luas. Visi ini juga bersifat religius dan dinamis, karena harus selalu berubah untuk meningkatkan daya saingnya secara global.

Sedangkan misinya dirumuskan dalam poin-poin berikut: 1. *Mengimplementasikan proses belajar mengajar yang kreatif, aktif, inovatif dan menyenangkan;* 2. *Memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sekolah, terutama kepada siswa;* 3. *Melaksanakan pembelajaran, kepemimpinan dan manajemen yang berkualitas dalam menciptakan pendidikan yang efektif;* 4. *Mempersiapkan siswa untuk meraih prestasi yang lebih baik pada Ujian Nasional;* 5. *Memperlihatkan rasa hormat dan kerja sama yang baik dengan orang lain dalam konteks berkehidupan dengan masyarakat multikultural;* 6. *Memelihara dan meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan sekolah Jepang dan lembaga pendidikan lainnya.*

Misi ini adalah semacam konsep tugas dan langkah-langkah dari lembaga SRIT untuk menuju visi ideal yang tak berujung. Misi ini lebih operasional dan relatif dapat diukur ketercapaiannya. Orientasi dari misi ini dapat dikatakan bersifat kooperatif dan adaptif, karena lembaga sekolah dalam mendorong daya saing menggunakan pendekatan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat lingkungannya.

Selain itu dalam mencapai misi tersebut SRIT juga merumuskan strategi dan langkah-langkah yang relatif lebih konkrit, dengan rumusan sebagai berikut: 1. *Mengembangkan proses belajar mengajar yang kreatif dan inovatif untuk melatih siswa berfikir kritis, mampu menyelesaikan masalah dan memiliki daya juang;* 2. *Melaksanakan program akademik yang berkualitas untuk meraih hasil akademik yang lebih baik;* 3. *Merencanakan kegiatan dasar kepemimpinan dalam membentuk karakter dan disiplin;* 4. *Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada*

seluruh siswa untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya; 5. Menyelenggarakan kegiatan budaya secara berkala yang dapat mengembangkan rasa kebangsaan; 6. Membangun *school sister* untuk mempromosikan beraneka ragam budaya Indonesia.

Pengelolaan Pendidikan Agama yang Belum Lempang

Sejak awal berdirinya, SRIT merupakan sekolah yang menginduk dengan sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia. Salah satu kewajiban sekolah dalam proses belajar mengajar adalah mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada saat ini acuan pendidikan agama secara nasional adalah menjalankan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007. Dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal 12 menyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Kemudian dalam PP nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.” Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa “pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.”

Dalam kenyataan di SRIT Tokyo, sudah memberikan pelajaran pendidikan agama sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang. Hanya saja menurut pimpinan dan para guru sekolah ini,¹⁵ Kementerian Agama selama ini belum memberikan perhatian terhadap pengelolaan pendidikan agama yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini Kementerian agama, sesuai dengan peraturan pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan guru agama, sertifikasi, sumber belajar agama dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan agama. Pada sekolah ini terdapat sejumlah siswa yang beragama Islam, Kristen dan Hindu. Untuk siswa yang beragama Islam, karena jumlahnya mayoritas disediakan guru agama tetap yang diseleksi melalui kontrak kerja khusus. Seleksi dilakukan oleh BKS KBRI, dengan sistem kontrak kerja selama 3 tiga tahun. Setelah tiga tahun, guru agama dipulangkan dan direkrut guru agama kontrak baru selama tiga tahun lagi. Kontrak selama tiga tahun ini nampaknya berlaku umum di Jepang. Sedangkan untuk para siswa yang beragama Kristen dan Hindu, karena jumlahnya masing-masing hanya dua orang, tidak disediakan guru agama melalui kontrak kerja secara khusus. Pendidikan agama untuk siswa yang beragama Kristen dan Hindu dipercayakan kepada staf KBRI atau orang tua siswa yang beragama sesuai dengan agama para siswa tersebut.

¹⁵ Wawancara , 24 Desember 2014

Dalam proses untuk seleksi guru tetap dan kepala sekolah, seleksi dikoordinasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dasar proses seleksi tersebut adalah MOU antara Kementerian Luar negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun untuk guru tetap pendidikan agama Islam dilakukan oleh BKS- KBRI sendiri tanpa melibatkan Kementerian Agama selaku penanggung jawab pengelolaan pendidikan agama. Hal ini karena antara Kementerian Agama dengan Kementerian Luar Negeri belum pernah ada kerjasama atau MOU, sebagaimana telah dilakukan antara Kementerian Luar Negeri dan Kemendikbud.

Pada saat ini guru agama yang dipilih bernama Jamaluddin. Dari segi kualifikasi tingkat pendidikan, guru agama Jamaluddin ini telah memenuhi persyaratan. Dalam peraturan perundangan, untuk menjadi guru sekolah minimal berpendidikan S1. Jamaludin alumni Fakultas Tarbiyah dari IAIN Yogyakarta, tahun 1997. Pendidikan tingkat menengah atas berasal dari PGAN Tasik Malaya tahun 1989, MTSN Brebes Tahun 1986 dan alumni SDN di Brebes Tahun 1983. Jamaluddin memiliki pengalaman sebelumnya menjadi Kepala Sekolah, Waka Sek Humas dan Kesiswaan, Guru Agama /Guru Kelas pada SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta, dan guru Al Quran pada SDN Badran Yogyakarta. Data ini menunjukkan bahwa Jamaluddin memang telah memiliki kompetensi sebagai guru agama Islam. Namun dari sisi profesionalitas, guru agama ini belum memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pendidikan agama profesional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Berdasarkan peraturan yang berlaku, semua guru pada satuan pendidikan harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikasi untuk guru agama dilakukan oleh Kementerian Agama. Lebih jauh, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Sekolah, secara *formal* guru agama Jamaluddin merupakan guru kelas, karena sertifikat yang dimiliki adalah sertifikat guru kelas. Jamaluddin belum memiliki sertifikat guru agama, meskipun diakui ia berperan dan berfungsi sebagai guru agama. Sertifikat guru kelas yang dimiliki Jamaluddin diperoleh ketika yang bersangkutan mengajar pada sekolah swasta di Yogyakarta. Fakta ini menunjukkan bahwa secara formal, SRIT belum memiliki guru agama yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Guru, meskipun diakui oleh Kepala Sekolah, bahwa Jamaluddin telah memiliki kemampuan untuk mengajar pendidikan agama Islam

Guru Agama Islam SRIT Yang Dituntut Memiliki Fungsi Ganda.

Sejak masa-masa sebelumnya, guru agama Islam di SRITselalu memiliki fungsi ganda. Guru agama di SRIT tidak hanya dituntut untuk dapat melakukan kegiatan mendidik para siswa di sekolah, tetapi juga dituntut secara sosial untukmelakukan kegiatan sebagai religius leader. Guru agama dituntut agar

mampu memimpin penyelenggaraan Ibadah Sholat Jumat, sholat Tarwih, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha di lingkungan sekolah bersama masyarakat Islam Indonesia. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama. Hal ini dilakukan karena di Jepang tidak ada atase agama, yang bisa melayani kebutuhan masyarakat yang beragama. Selain itu pada masyarakat Indonesia di Jepang, yang jumlahnya terus meningkat juga masih sangat langka tokoh agama Islam, tidak ada penyuluh agama Islam dan tidak ada penghulu yang resmi. Karena itu, secara tradisi, guru agama di Tokyo juga didaulat untuk menjadi semacam penghulu, yang melayani pelaksanaan pernikahan masyarakat Islam di Jepang pada umumnya. Dalam hal ini guru agama yang menikahkan dan memberikan nasehat perkawinan. Kegiatan yang terakhir ini dilakukan, atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat Islam dan KBRI.

Atas dasar kenyataan itu, maka guru agama Islam pada sekolah Republik Indonesia (SRIT) dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih banyak jumlahnya dibanding dengan kompetensi guru di Indonesia pada umumnya. Kalau guru agama yang berada di Indonesia dituntut untuk menjadi guru agama yang profesional, guru agama di SRIT tidak hanya dituntut untuk menjadi guru profesional, tetapi juga dituntut untuk menjadi religious leader, penyuluh agama dan penghulu yang profesional. Sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, Kementerian Agama memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan pendidikan agama dan penyuluh agama.

SRIT; Embrio Pengembangan Budaya Keagamaan dan Ke-Indonesiaan

Proses belajar mengajar agama bagi para siswa SRIT tidak hanya berlangsung dalam kelas, tetapi juga berlangsung di luar kelas. Salah satu pusat pembelajaran keagamaan yang berlangsung di luar kelas adalah penggunaan ruang serba guna sebagai tempat penyelenggaraan Sholat Jumat. Ruang serba guna ini dalam waktu sehari-hari digunakan sebagai ruang olahraga, seperti tenis meja dan bulu tangkis. Selain itu pada waktu-waktu tertentu digunakan ruang pertemuan untuk masyarakat Indonesia. Pada hari Jumat, ruang serbaguna ini digunakan untuk sholat jumat yang jamaahnya para siswa dari SRIT dan masyarakat Indonesia sekitar Meguro. Dua jam sebelum mulai sholat Jumat, ruangan di gelar karpet sajadah untuk sholat, dan satu jam setelah selesai sholat Jumat karpet sajadah ini telah digulung dan disimpan pada ruang tertentu.

Sekolah ini juga menyelenggarakan kegiatan Sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jamaahnya adalah komunitas sekolah dan masyarakat Islam Indonesia. Tempat sholat Hari Raya tersebut di halaman sekolah.

Fakta-fakta di atas memberi makna bahwa SRIT telah menjadi embrio pengembangan budaya Keagamaan dan Keindonesiaan di Jepang. Makna ini muncul karena pada setiap minggu sekali masyarakat Islam Indonesia sekitar Tokyo, dari berbagai lapisan berkumpul dan melaksanakan ritual agama tiap hari jumat. Bahkan pada hari-hari raya Islam seperti Idul Adha, Idul Fitri, dan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj, masyarakat Islam Indonesia sekitar Tokyo juga berkumpul di SRIT untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Selain itu kegiatan pendidikan agama Islam bagi masyarakat yang tidak bersekolah di SRIT juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran agama Islam. Dengan menjadikannya lingkungan SRIT menjadi pusat budaya kegiatan keagamaan masyarakat, maka budaya kegiatan tersebut baik langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh positif terhadap sikap keberagaman siswa. Para siswa muslim secara sadar atau sadar dibiasakan dalam kegiatan keagamaan tersebut.

Imbas Pendidikan Karakter masyarakat Jepang terhadap SRIT

SRIT berada di lingkungan kehidupan masyarakat Jepang yang saat ini dikenal sebagai masyarakat yang memiliki karakter disiplin, tertib, gigih, pekerja keras, taat hukum dan santun. Karakter masyarakat ini diduga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama yang berkembang sejak masa lalu, terutama pada Budism dan Shinto. Sebagaimana dikisahkan oleh Nakamura dan Aiko,¹⁶ bahwa pendidikan agama Shinto pada masa lalu telah dijarkan pada sekolah-sekolah di Jepang. Namun pendidikan agama tersebut, hanya berlangsung sampai Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II berakhir, kebijakan pemerintah Jepang adalah menghapus kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah Jepang. Pendidikan agama hanya boleh di ajarkan pada sekolah-sekolah swasta, seperti pendidikan agama Kristen pada sekolah Kristen. Kebijakan ini nampaknya berdasarkan asumsi bahwa pendidikan agama tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat Jepang Pasca Perang Dunia. Pendidikan agama di sekolah negeri nampaknya dipandang sebagai mengandung potensi konflik dan mempertajam ketegangan, serta pembelahan kelompok masyarakat, terutama karena varian paham keagamaan di masyarakat yang beraneka ragam Agama.

Kebijakan melarang pendidikan agama di sekolah Jepang ini nampaknya selaras dengan perkembangan pemikiran pada dunia Barat, yang menilai bahwa agama merupakan urusan private dan, bukan urusan publik. Karena agama dipandang sebagai urusan private, maka pembinaan pendidikan agama diserahkan pada keluarga masing-masing dan organisasi keagamaan. Sebagai gantinya, nilai pendidikan karakter dikembangkan di sekolah. Nilai pendidikan karakter

¹⁶ Wawancara, Nakamura, di Loto Jepang, 24 Desember 20014, dan Aiko, di Meguro Tokyo, 28 Desember 2014. .

yang dimaksud adalah pendidikan tentang sikap dan perilaku yang dihargai oleh setiap komunitas dalam pergaulan hidup sehari-hari. Di antara nilai pendidikan karakter yang cukup menonjol Jepang adalah disiplin, jujur, tertib, keja keras, saling menghargai, sopan, dan prinsip tidak menyusahkan orang lain. Kualitas implementasi nilai-nilai karakter tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari di ruang publik, seperti di station kereta, stasiun bus, dalam kendaraan umum, di jalan raya.

Pada stasiun kereta api dan bus di berbagai tempat terlihat para penumpang yang antri untuk masuk dan keluar dari kendaraan secara tertib, meskipun pada jam-jam padat atau sibuk. Suasana penumpang dalam stasiun dan bus juga cenderung sangat tertib, tenang, tidak ada kegaduhan, tidak ada yang merokok, tidak ada yang menelepon, tidak ada orang yang membuang sampah dalam kendaraan atau membuang sampah dari dalam keluar kendaraan. Apabila penumpang ketinggalan, dompet, tas atau barang berharga lain dalam kereta atau Bus penumpang masih memiliki harapan besar bahwa barang yang tertinggal tersebut masih bisa diambil ditempat pengumpulan barang tercecer pada loka-lokasi tertentu. Masyarakat Jepang cenderung akan menyerahkan barang tercecer atau tertinggal dalam kendaraan umum tersebut pada petugas yang ada dalam kendaraan tersebut, yang selanjutnya barang tersebut akan diserahkan oleh petugas kepada kantor penyimpan barang-barang hilang atau tercecer. Menurut para informan, para siswa di sekolah Jepang sangat langka yang terlibat dalam dalam perkelahian massal antar pelajar, hura-hura, merokok dan narkoba. Kondisi lingkungan semacam ini dinilai ikut mempengaruhi para siswa SRIT memiliki karakter yang baik, seperti disiplin, tertib dan kerjakeras.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Pengelolaan pendidikan agama di sekolah Indonesia Luar Negeri belum dikelola oleh Kementerian Agama dalam hal pembinaan, perencanaan, supervisi maupun evaluasi. Pengadaan guru agama selama ini dilakukan oleh Badan Kerja Sekolah (BKS) dibawah Wakil Duta Besar RI pada Kedutaan besar bersangkutan dengan sistem penunjukkan sehingga guru agama memiliki kemampuan bervariasi dan belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan, hal ini berbeda dengan pola rekrutmen guru umum dan kepala sekolah melalui seleksi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, Pembelajaran agama di Sekolah RI Luar Negeri belum optimal, belum menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai dengan standar Kementerian Agama. *Ketiga*, Corak paham keagamaan siswa sangat dipengaruhi oleh paham

keagamaan yang dianut guru agama. Paham keagamaan eksklusif, fundamental, transnasional yang cenderung anti demokrasi dan anti nasionalisme akan lebih mudah masuk di sekolah-sekolah RI luar negeri.

Rekomendasi dapat diajukan sebagai acuan langkah Kementerian agama dalam membina dan mengembangkan pendidikan Agama khususnya di Sekolah Indonesia Luar Negeri: *Pertama*, Kementerian Agama segera terlibat aktif dalam pengelolaan pendidikan agama dan menyusun pedoman pendidikan agama bagi sekolah RI di luar negeri; *Kedua*, Kementerian Agama segera berkoordinasi dan turut dalam penyusunan MoU antara Kementerian luar negeri dan Kemdikbud tentang pengelolaan sekolah RI luar negeri pada tahun 2015; *Ketiga*, Kementerian Agama segera mendorong lahirnya atase agama pada kedutaan besar pada negara-negara dengan jumlah WNI yang besar sehingga layanan agama dapat diberikan sesuai mandat peraturan perundangan.

Rujukan

- Alfred Adler, *The Individual Psychology of Alfred Adler*, H.L. Ansbacher & R. Ansbacher (ed.), New York: Harper Torchbooks, 1956.
- Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religions*, New York: Free Press of Glencoe, 1961
- Herwanto Aryo Manggolo, *Pranata Sosial*, dalam J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Lita, *Challenges Facing Religious and Moral education in Namibian Schools*, dalam *The Strategic Role of Religious Education in The Development of Culture of Peace*, Jakarta: Balitbang Kementerian Agama RI, 2012
- L. Kohlberg, *Cognitive-Development Theory and the Practice of Collective Moral Education*, dalam M. Collins dan M. Gottesman (ed.), *Group Care: The Educational Path of Youth Aliyah*, New York: Gordon and Breach, 1971
- M.C. Kitshoff, *Religious Education*, Cape Town: Longman, 1996
- Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan sosial: Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Raka Sasarin, 1993).
- Nurul Zuriyah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, (Bumi Aksara, 2007).
- Risnawati Sinulingga, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Pendidikan Agama Kristen FISIP Universitas Sumatera Utara*, 15 November 2008.
- Robert S Woodworth, *A Biographical Memoar of Edwards Lee Thorndike 1874-1949*, (Washington DC: National Academy of Science, 1952).
- Wawancara, Nakamura, di Ioto Jepang, 24 Desember 20014, dan Aiko, di Meguro Tokyo, 28 Desember 2014.

Konsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia

Saifullah Isri

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: saiful.isri@gmail.com

DOI : 10.14421/jpi.2015.41.25-47

Diterima: 17 Februari 2015

Direvisi: 8 Mei 2015

Disetujui: 9 Juni 2015

Abstract

Education is always influenced by factors that enveloped it. So it is very likely to occur differences in product and quality of education between one institution and another institution or between one country to another. This difference initiate researcher to be open-minded and examine the system and education implementation in an institution or another country in order to absorb positive information for improvement and advancement of education. This encourages the emergence of comparative education studies. Indonesia, in an effort to increase the quality of its education, needs to conduct a similar study by examining and comparing Indonesian education with other countries, in this case, Germany and Australia that their quality of education is among the best in the World.

Keywords: *Comparative Education, Germany, Australia, the Quality of Education*

Abstrak

Pendidikan selalu dipengaruhi faktor-faktor yang meliputinya. Sehingga sangat mungkin sekali terjadi perbedaan hasil dan kualitas pendidikan satu lembaga dengan lembaga yang lain atau satu negara dengan negara yang lain. Perbedaan inilah yang mendorong peneliti untuk terbuka dan mengkaji sistem dan implementasi pendidikan di institusi atau negara lain guna menyerap informasi positif guna perbaikan dan kemajuan pendidikan. Inilah yang mendorong munculnya kajian pendidikan komparatif. Indonesia yang ingin meningkatkan kualitas pendidikannya perlu melakukan kajian yang sama dengan mempelajari dan mengkomparasikan

pendidikan Indonesia dengan negara lain yang dalam hal ini adalah Jerman dan Australia yang kualitas pendidikannya termasuk yang terbaik di dunia.

Kata Kunci: *Perbandingan Pendidikan, Jerman, Australia, Mutu Pendidikan*

Pendahuluan

Keyakinan akan urgensi pendidikan telah mengantarkan peradaban manusia kepada pembentukan sistem pendidikan, yang dipandang sebagai satu hal yang wajib ada dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan penyesuaian terhadap keunikan setiap komunitas yang umumnya terkait dengan nilai, ritual, teladan dan simbol.¹ Namun perbedaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat diberbagai belahan dunia, serta situasi politik menyebabkan perbedaan hasil yang dicapai. Akibatnya, studi tentang program pendidikan dan badan-badannya yang digunakan masyarakat dalam rangka memenuhi aspirasi tingginya, kian menjadi tujuan sorotan ilmiah di banyak tempat. Barangkali hasrat untuk mengetahui sebanyak-banyaknya tentang semua aktivitas kependidikan di semua tempat inilah yang menjadi ciri terbaik dari studi pendidikan komparatif di masa sekarang.

Studi komparatif dimulai di Barat dalam situasi yang pada dasarnya sama sekali berlainan. Selama berabad-abad, Gereja Katolik Roma mengklaim hak eksklusif (Baca: Monopoli) Penyelenggrakan sekolah. Namun setelah reformasi, monopoli gereja dalam pendidikan tak lagi diperkenalkan. Negara-negara merdeka yang bermunculan akibat kekalutan perang agama banyak yang memeluk agama protestan. Beberapa negara, khususnya Jerman memelopori pengembangan sistem pendidikan nasional yang hasilnya sangat memuaskan sehingga terus berkembang dan diikuti oleh negara-negara lain seperti Australia dan lain sebagainya.²

Studi perbandingan ini pada dasarnya diharapkan dapat mengembangkan sumber daya pribadi intelektual dengan melengkapinya dengan informasi tentang aspirasi, gagasan dan pengalaman orang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong para penggiat pendidikan untuk meninggalkan pola pandang sempit dalam mengembangkan sistem pendidikan. Pendidikan tidak lagi dilihat melalui kaca mata kuda, dimana para pengambil kebijakan di bidang pendidikan hanya terfokus pada sistem pendidikan sendiri. Semakin berkembang kesadaran bahwa pola pandang egosentris hanya akan menjadikan sistem pendidikan sebuah bangsa rentan terhadap resiko stagnasi pendidikan yang akan menyebabkan perkembangan ke arah yang lebih baik menjadi terhambat akibat tidak adanya upaya

¹ Agustiar Syahnur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, (Bandung: Lubuk Agung, 2001), hlm. 9

² Don Adams, *Educational Pattern In Contemporary Societies*, In. Thut (Eds.), *Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 2

benchmarking dengan sistem pendidikan yang dikembangkan pihak lain. Tanpa ada bandingan, kerap seseorang terjebak dalam pola pandang “baik sendiri”.

Oleh karena itu, dalam makalah ini kami mencoba membahas dan menguraikan bagaimana konsep pendidikan Jerman dan Australia serta pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia dalam peningkatan mutu dan kualitas. Mengingat ada beberapa faktor penting dalam mengkaji studi perbandingan pendidikan khususnya untuk mahasiswa, baik dalam perspektif sosial, religius, politik, ekonomi, bahkan letak geografis.³

Negara Jerman dan Australia dipilih karena keunggulan yang dimiliki dalam sistem pendidikannya. Saat ini, Jerman dan Australia merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tahun 1970 sistem pendidikan Jerman sudah mampu meraih tujuan-tujuan yang dicanangkan, “hanya” sekitar 25 tahun setelah Jerman rata dengan tanah akibat kekalahan dalam Perang Dunia II (Institut für Auslandsbeziehungen: 1986). Berbagai keunggulan Jerman dan Australia di bidang kedokteran, teknologi, sastra, dan seni merupakan keberhasilan sistem pendidikan yang secara gemilang telah mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada pasca kekalahan Perang Dunia II.

Sistem Pendidikan di Jerman

Secara geografis, Jerman terletak di tengah-tengah benua Eropa dengan luas daerah 356,957 km². Jerman berpenduduk 82 juta lebih, dan kira-kira 8% di antaranya adalah bukan berkebangsaan Jerman. Warga negara asing ini hijrah ke Jerman sekitar akhir tahun 1950-an, yang mayoritasnya adalah orang Turki.

Jerman pada masa Perang Dunia II merupakan negara yang kalah perang. Kondisi inilah yang mempengaruhi mental rakyatnya untuk melahirkan pemimpin/ anak negeri yang mampu membawa mereka menuju kejayaan dan hidup bermartabat.

Politik dan Tujuan Pendidikan

Dengan sejarah kelam yang bertumpu pada pengalaman kekalahan dalam dua perang dunia dan hancurnya negara Jerman, masyarakat Jerman mulai membangun sistem pendidikan yang terbebas dari potensi membuat kesalahan

³ Adapun faktor-faktor tersebut adalah; (1) Rasa persatuan nasional, (2) Situasi umum perekonomian, (3) Kepercayaan dan tradisi utama, termasuk peninggalan religius dan budaya, (4) Status pemikiran pendidikan progresif, (5) Persoalan bahasa, (6) Latar belakang politik: komunisme dan demokrasi, (7) Sikap terhadap kerja sama dan pemahaman internasional. Lihat; John Francis Cramer dan George Stephenson Browne, *Contemporary Education*, (New York: Harcourt Brace, 1956), hlm. 5

serupa, yaitu dengan memisahkan kekuasaan, termasuk dalam bidang pendidikan, agar tidak tertumpu pada satu lembaga atau satu orang saja. Hal ini dilakukan karena memandang pengaruh absolut Hitler yang membuat seluruh Jerman bergerak ke arah kehancuran.⁴ Pendidikan diarahkan kepada penanaman kemauan yang kuat untuk bangkit dan keahlian yang dibutuhkan untuk kembali berdiri sebagai negara yang kokoh dan mandiri. Di samping itu, terpecahnya Jerman menjadi dua bagian untuk waktu yang lama menjadikan isu persatuan sebagai salah satu isu penting dalam budaya pendidikan Jerman.

Pada mulanya, pendidikan di Jerman senantiasa dipengaruhi oleh dua lembaga besar, yaitu negara dan agama (gereja). Selain itu, negara bagian juga ikut mengklaim wewenang untuk mengatur sistem pendidikan secara mandiri. Sejak dikumandangkannya wajib belajar pada abad ke-17, masalah pendidikan lambat laun mulai beralih menjadi kewajiban negara.⁵

Undang-undang dasar menjamin hak setiap orang untuk secara bebas mengembangkan kepribadiannya dan memilih sekolah, pendidikan kejuruan dan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Berdasarkan tata negara federal Jerman, kewenangan pendidikan dibagi menjadi federasi dan negara bagian. Negara bagian terutama bertanggung jawab untuk sekolah umum dan sekolah kejuruan serta taman kanak-kanak.

Struktur dan Jenis Pendidikan: Pendidikan Dasar, Menengah serta Pendidikan Tinggi

Pendidikan di Jerman di mulai dari tahap pra sekolah yang disebut *Kindergarten* (Taman Kanak-Kanak) dimulai dari umur 3-6 Tahun. Pendidikan ini dinamakan "*Vorschulische Einrichtungen*", yang berarti "Persiapan sebelum Pendidikan". Konsep taman kanak-kanak di Jerman banyak ditiru oleh negara lain. Oleh sebab itulah, tingkatan sekolah ini di beberapa negara tetap mengadopsi nama Jermannya "*Kindergarten*". Penyelenggara taman kanak-kanak paling banyak adalah gereja-gereja, organisasi sosial dan komune, kadang-kadang juga perusahaan dan perkumpulan.⁶

Setelah *Kindergarten* dimulai pendidikan dasar pada usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Pendidikan ini dinamakan "*Grundschule*", yang berarti "Sekolah

⁴ Robert F. Lawson, *Reconstruction Education: East German School and Universities after Unification* by Rosalin M. O Princhard, (Book Review), In Comparative Education Review, Vol. 44 No. 1, Februari, 2000

⁵ Agustiar Syahnur, *Perbandingan Sistem Pendidikan...* hlm. 156

⁶ J. T. Fey, *System of Education of Federal Republic of Germany*. In F. Husen and Postlethwaite (Eds), *International Encyclopedia of Education*. (New York: Pergamon Press, 1985), hlm. 125

Dasar". Dari *Grundschule*, seseorang mempunyai 4 pilihan untuk melanjutkan sekolah. Pilihan tersebut :1. *Hauptschule* (kelas 5 – 9/10); 2. *Realschule* (kelas 5 – 10); 3. *Gesamtschule* (kelas 5 – 13); 4. *Gymnasium* (kelas 5 – 13).⁷

Untuk memasuki *Hauptschule*, *Realschule* atau *Gymnasium*, seseorang harus melalui “*Orientierungsstufe*” (Tahapan Orientasi). Di tahap ini diteliti bakat dan kemampuan dari anak, dan tahap ini menentukan kemana tujuan seorang anak selanjutnya. *Hauptschule* dan *Realschule* lebih ditekankan kepada anak yang ingin langsung kerja bila telah menyelesaikan sekolah. Tentu saja setelah melalui pendidikan di “*Berufsfachschule*” atau “*Fachoberschule*”. Bagi yang ingin melanjutkan ke Universitas, jalan tercepat adalah melalui *Gymnasium*. Jalan pendidikan lain juga dapat mengikuti kuliah di universitas, tapi dengan melalui jalan yang panjang. Misal harus melakukan praktek kerja dahulu selama sekian tahun.

Titel yang didapat dari Universitas di Jerman dan Indonesia hampir mirip, namun walaupun namanya sama berbeda tingkatannya. Diplom lulusan Jerman setara dengan S2 atau Master di Indonesia, dan dapat langsung mengikuti program Doktoran (Ph. D). Hal ini berarti S1 di Indonesia, pada dasarnya setara dengan *Vordiplom* di Jerman, tetapi hal ini tergantung dari *Anerkennung der Studienleistungen* (Penyamaan derajat Ijasah). Dengan demikian, bila seorang sarjana S1 lulusan Indonesia akan melanjutkan kuliah di Jerman, ada 3 kemungkinan studi yang akan ia jalani, yaitu: 1. Ijasah (*Studienleistungen*) dari Indonesia dianggap setara dengan *Vordiplom* (semester 5). Untuk mendapatkan Diplom, ia harus mengikuti semua mata kuliah dari semester 5 sampai dengan pembuatan *Diplomarbeit* (Penulisan Akhir untuk mendapatkan gelar Diplom); 2. Ijasah (*Studienleistungen*) dari Indonesia dianggap melebihi dari semester 5. Untuk mendapatkan Diplom, ia hanya diminta untuk mengikuti beberapa ujian untuk penyamaan derajat; 3. Ijasah (*Studienleistungen*) dari Indonesia dianggap sudah mencukupi untuk dapat langsung mengikuti program Doktoran. Berdasarkan hal tersebut, maka lulusan S1 dari Indonesia kalau mau melanjutkan sekolah ke Jerman, mempunyai kemungkinan untuk langsung promosi (S3). Biasanya kalau bidang studi dan kurikulum dari S1 ke promosi (S3) tidak menyimpang jauh, akan mendapat kemudahan pada saat *Anerkennung*.⁸

Di Jerman dikenal ada dua jenis pendidikan tinggi utama yaitu *Fachhochschule* dan *Universität*. *Fachhochschule* yang sering disebut juga FH ini mirip seperti

⁷ Frackman, dkk, *Higher Education policy in Germany: In Goedegebuure, Leo et al (Eds), Higher Education Policy: An International Comparative Perspective*, (Paris: Pergamon Press, 1993), hlm. 182

⁸ U. Teichler and B. Kehm, *System of Higher Education of Federal Republic of Germany*. In Clarke, B. R., and Neave, G. (Eds), *The Encyclopedia of Higher Education*, Vol. 1 (Oxford: Pergamon Press, 1992), hlm. 89

politeknik di Indonesia, yaitu lembaga pendidikan yang menekankan pada bidang aplikasi. Bidang teori lebih sedikit dibandingkan dengan praktek atau aplikasinya. Studi di *Fachhochschule* tak dapat mencapai gelar doktor dan pendidikan di sini ditujukan bagi mereka yang ingin terjun ke industri langsung. Jenis pendidikan tinggi lainnya adalah *Musikhochschule* (untuk bidang musik), *Pedagogische Hochschule* (untuk bidang pendidikan, mirip IKIP dahulu) dan *Kunsthochschule* (untuk bidang seni). Sistem *Universität* (Universitas) di Jerman, berbeda dengan di Indonesia, tidak ada “panduan” ketat per semesternya, dan urutan mata kuliah A, B, C, dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa mahasiswa dituntut harus dapat menentukan sendiri, kuliah, latihan, seminar, ujian yang akan diikutinya, dan lain sebagainya. Hal ini secara langsung memberikan “kebebasan yang sangat besar”, tapi bisa juga menjerumuskan mahasiswa ke kondisi kelewat santai (banyak beberapa mahasiswa Indonesia yang terjebak ke situasi ini, dimana sudah 8 tahun tapi belum ujian apa-apa, karena keasikan kerja atau kesibukan lainnya). Mahasiswa benar-benar dituntut untuk mandiri menentukan apa yang ingin dia pelajari, ujian yang dia ikuti, serta apa yang dia lakukan dan dia inginkan. Terkadang perkuliahan dilakukan dalam ruang auditorium besar (sampai 600 siswa), sehingga kesiapan “mental” mahasiswa untuk belajar mandiri perlu benar-benar dipertimbangkan bila memilih kuliah di Universitas. Kuliah rata-rata dilakukan dalam bahasa Jerman. Walau demikian di beberapa Universitas (seperti di Universitas Bielefeld, Universitas Bremen, dan lain-lain) ada juga beberapa kuliah yang dilakukan dalam bahasa Inggris.

Model perkuliahan tersusun dari *Vorlesung* (perkuliahan), *Seminar* (semacam diskusi dalam ukuran kecil atau dalam kelompok kecil), dan *Übung* (latihan). Ujian dilakukan langsung dengan Profesor yang bersangkutan. Rata-rata ujian bersifat lisan, walau ada juga yang diberikan secara tulisan. Sistem ujiannya juga bervariasi ada yang diperbolehkan mengulang (untuk mata kuliah yang tidak lulus), namun sering juga hanya sekali saja (boleh mengulang namun tahun berikutnya, bukan semester berikutnya).

Sistem *Fachhochschule* (nama internasionalnya sekarang sering disebut sebagai *University of Applied Science*) lebih diatur secara ketat mirip dengan sistem perkuliahan di Indonesia, misal urutan perkuliahan, praktek, dan lain sebagainya. Berdasarkan dua lembaga pendidikan tinggi tersebut, mana yang lebih baik dan cocok, ini bergantung dengan tujuan sekolahnya. *Fachhochschule* rata-rata disukai oleh orang Jerman yang ingin langsung bekerja di industri, sedangkan Universitas lebih disukai bagi mereka yang ingin berkarir di bidang riset dan pengembangan, atau di bidang akademik. Berdasarkan pemantauan dan perkenalan dengan beberapa mahasiswa dari Indonesia, sebagian besar mahasiswa Indonesia lebih suka mengambil pendidikan *Fachhochschule* ini. Hal ini selain alasan waktu serta biaya juga karena mereka ingin cepat bekerja.

Hal seperti inilah yang sulit ditemukan di Indonesia. atau bahkan dapat dikatakan sulit diwujudkan di dunia pendidikan di Indonesia. Padahal dalam kenyataannya potensinya sama dengan pendidikan di Jerman, sehingga pendidikan tinggi di Jerman, mempunyai suatu yang khas, hanya yang berbeda mekanisme pendidikan yang ditawarkan. Bagi yang suka “kebebasan” silahkan masuk ke Universitas, namun bagi yang suka “tuntunan” dipersilahkan masuk ke *Fachhochschule*, sehingga dapat segera bekerja dan mendapatkan gaji seperti yang diidam-idamkan. Beberapa *Fachhochschule* sekarang sudah menawarkan juga “*International Master*” yang menggunakan program berbahasa Inggris.

Manajemen Pendidikan

Konstitusi federal Jerman telah memberikan kewenangan pengaturan sistem pendidikan kepada negara bagian. Implikasi dari kebijakan ini adalah adanya otoritas penuh dari pemerintahan negara bagian untuk menentukan kebijakan sistem pendidikan. Pengaturan masalah pendidikan kemudian dirumuskan melalui lembaga legislatif tingkat negara bagian. Saat ini, negara bagian di Jerman memiliki sistem pendidikan yang berbeda, di antaranya perbedaan masa pendidikan. Kondisi ini kemudian mendorong pihak negara bagian untuk mengadakan satu standarisasi yang berlaku secara nasional, sehingga pada tahun 1969, sebagian wewenang negara bagian dalam masalah pendidikan dialihkan ke pemerintahan federal.⁹

Pendanaan pendidikan dibebankan kepada anggaran belanja negara bagian dan partisipasi masyarakat lokal. Pembagiannya meliputi pendanaan biaya personal yang dibebankan kepada negara bagian dan infrastruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahan federal utamanya bertanggungjawab atas pendanaan perluasan institusi pendidikan tinggi, sarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan dan kegiatan penelitian. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan tidak memungut biaya pendidikan. Sesungguhnya biaya kuliah di Jerman relatif rendah (hampir berarti tak perlu bayar SPP), baik untuk warga negara Jerman, ataupun mahasiswa asing. Biasanya mahasiswa hanya perlu membayar uang yang namanya “*Sozialgebühren*”.¹⁰ Ini untuk mendapatkan beberapa fasilitas bagi mahasiswa, misal agar bisa makan di MENSEA (kantin khusus mahasiswa yang ada di kampus-kampus di Jerman) dengan harga mahasiswa, di beberapa negara bagian, tiket kereta, bus dan trem tak perlu bayar. *Sozialgebühren* ini sekitar 100 Euro/semester. Sebagai gambaran di Universitas Bremen, kalau kita makan di MENSEA, sekali makan dengan tarif mahasiswa hanya membayar 1,3 Euro, tetapi bila kita sebagai pegawai Universitas atau orang luar yang ikut makan, dikenakan biaya 3,5 Euro.

⁹ Agustiar Syahnur, *Perbandingan Sistem Pendidikan...* hlm. 165-166

¹⁰ W.B Elley, *How in The World Do Student Read? IEA Study of Reading Literacy*, (The Hague: International Association for The Evaluation of Educational Achievement, 1992), hlm. 122

Kurikulum Pendidikan

Meteri-menteri pendidikan negara bagian menentukan kurikulum mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan itu melalui tiga jenis instrumen, yaitu: a). Tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan “grade” dan jenis sekolah; b). Pedoman kurikulum; c). Pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks.¹¹

Secara umum kurikulum pendidikan Jerman dapat diformulasikan sebagai berikut: a). Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah/sering dinyatakan pada *mukaddimah* suatu keputusan, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum; b). Silabus, rekomendasi metode mengajar dan model rencana pelajaran diputuskan oleh kementerian negara; c). Mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai tanpa ada persetujuan dari kementerian negara bagian dan guru boleh menggunakannya sejauh terdapat dalam daftar rekomendasi buku yang sah; d). Metode mengajar, bukan “*teacher centered*” tetapi “*student centered*” yang sifatnya “*open instruction*” (murid belajar atas dorongan sendiri).

Evaluasi dan Penelitian Pendidikan

Dalam sistem pendidikan Jerman, tidak ada evaluasi nasional yang dilakukan secara teratur mengenai hasil pendidikan sebagaimana di Indonesia. Evaluasi dalam pengertian evaluasi program, sangat terbatas pada penelitian yang ditugaskan pada suatu komisi/panitia.

Dengan beberapa pengecualian, evaluasi (tes formal) pada prinsipnya tidak digunakan untuk menilai keberhasilan anak di sekolah, akan tetapi hanya untuk keperluan diagnostik yang mengidentifikasi jenis-jenis *dyslexia* (kesulitan belajar akibat kondisi tertentu pada otak). Pendekatan yang dipakai untuk mengetahui pencapaian murid, sepenuhnya diserahkan kepada guru selama proses belajar berlangsung. Hasilnya digambarkan dalam bentuk laporan kemajuan tertulis (terutama pendidikan dasar). Adapun tes tidak resmi diberikan dengan ketentuan frekuensi minimum. Bobot yang lebih besar terletak pada partisipasi murid dalam ruangan kelas, tugas rumah juga dapat digunakan sebagai dasar penilaian.

Oleh karena prosedur penilaian bervariasi, maka nilai/skor murid sangat tergantung pada penilaian individu serta jenis tugas yang dinilai. Beberapa negara bagian di Jerman bahkan menetapkan kode-kode tersendiri yang bersifat sentral dan

¹¹ H. Mohle, *German Democratic Republic: System of Education*, In B. R. Clarke and Neave, (Eds), *The Encyclopedia of Higher Education*, Vol. 1 (Oxford: Pergamon Press, 1992), hlm. 82

standar guna memberikan umpan balik kepada guru agar penilaian yang diberikan benar-benar sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri.

Dalam hal sertifikat tamat belajar, itu menjadi tanggung jawab pejabat tingkat negara bagian, untuk menjamin tercapainya standar minimal. Prosedurnya bervariasi. Pada kebanyakan negara bagian, setelah menyelesaikan pendidikan di *Hauptschule* dan *Realschule* siswa menerima sertifikat yang diakui, sementara tugas yang disiapkan untuk ujian akhir di *Gymnasium* diserahkan dan disetujui oleh kementerian.

Perbedaan dan pengaruh Sistem Pendidikan Jerman dengan Sistem Pendidikan di Indonesia

Pendidikan selalu terkait erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang mampu memberikan implikasi besar bagi perubahan sebuah sistem pendidikan adalah ideologi. Ideologi sebagaimana diungkapkan oleh Lin-Huber (1998) merupakan salah satu hal yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam sebuah sistem budaya.¹² Ideologi ini tercermin dalam nilai yang dianut dan dipandang sebagai sebuah pedoman dalam bersikap dan berinteraksi satu sama lain.

Di samping ideologi banyak faktor lain yang turut mempengaruhi kebijakan pendidikan, misalnya tema kajian pendidikan di kawasan Asia yang mungkin lebih banyak mengarah kepada bidang manajemen sistem pendidikan dan kualitas pengajar. Sebagaimana dikemukakan oleh mantan presiden *Conference Comparative Education Society of Asia* (CESA) Fakry Gaffar pada saat pendeklarasian CESSIA di Universitas Negeri Jakarta bulan Februari 2009.¹³ Menunjukkan keterkaitan erat antara pendidikan dengan faktor-faktor yang meliputinya.

Landasan Filosofis dan Kebijakan Sistem Pendidikan

Filsafat yang dianut oleh satu komunitas akan mempengaruhi pendidikan dalam komunitas terkait. sehingga kurikulum pendidikan adalah cerminan filsafat yang dipercayai oleh masyarakatnya.¹⁴ Dengan demikian, penyusunan kurikulum akan senantiasa berkaitan dengan tiga bidang filsafat, yaitu *ontology* yang berkaitan dengan hakikat realita, *epistemology* yang membahas hakikat pengetahuan, dan *axiology*, bidang filsafat yang mengkaji permasalahan nilai.

¹² A. Margrith Lin-Huber, *Kulturspezifischer Spracherwerb*, (Bern: Verlag Hans Huber, 1998), hal. 56

¹³ Artikel "Indonesia's education equity goals 'moderate', UNESCO report shows". The Jakarta Post edisi Sabtu 12 Juni 2008.

¹⁴ Chaedar Alwasilah, *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2008), hlm. 15-16

Jerman pada masa Hitler mengusung Rasionalisasi fasis sebagai landasan sistem pendidikan Jerman saat itu. Pendidikan diarahkan kepada pembentukan sosok manusia yang unggul dalam berbagai bidang. Dalam bidang keilmuan, pendidikan diarahkan pada penemuan-penemuan ilmiah, utamanya yang bermanfaat bagi pembangunan kekuatan militer Jerman, bidang olahraga bertujuan memunculkan atlet-atlet yang superior seperti juara tinju dunia Max Schmelling. Dalam bidang seni, pembuatan karya seni ditujukan untuk membentuk figur ras Arya yang unggul.

Setelah kekalahan mutlak Jerman dalam Perang Dunia II dan bersatunya Jerman Barat dan Timur, Jerman mereformulasi ulang landasan falsafi yang dijadikan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Jerman kemudian memandang persatuan (*Einheit*), pembagian kekuasaan agar tidak tertumpuk pada satu orang (*die Macht verteilen*), dan kemampuan untuk membangun sebagai falsafah penting bagi bangsa Jerman yang tengah mengalami kehancuran. Dalam pandangan ini bisa kita lihat pengaruh filsafat *Eksistensialisme* yang menekankan kemampuan diri sendiri, filsafat *progresivisme* dengan proporsi sains dan perubahan yang terencana, juga pengaruh filsafat *critical pedagogy* dalam upaya memformulasi ulang kebenaran setelah kehancuran akibat ideologi nazi. Beragamnya landasan filsafat sangat mungkin terjadi di Jerman karena sistem negara yang menganut sistem federal. Dalam sistem ini, negara bagian mempunyai kewenangan untuk mengatur sistem pendidikannya sendiri. Itulah sebabnya lama masa pendidikan di beberapa negara bagian berbeda dengan satu sama lain.

Pengaruh dari perubahan landasan filsafat pendidikan ini pada gilirannya berimbas pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan federal maupun pemerintahan negara bagian dalam bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa kebijakan sistem pendidikan Jerman yang khas, yaitu: a). Pemerintah Jerman memandang pendidikan sebagai modal utama untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan keterpurukan ideologi. Untuk itu, pemerintah berusaha menjamin ketercapaian akses pendidikan bagi seluruh warga negara dengan membebaskan biaya pendidikan dari *Kindergarten* sampai tingkat pendidikan tinggi; b). Pemerintah federal/pemerintah pusat tidak “memonopoli” kewenangan pengaturan sistem pendidikan secara mutlak. Kewenangan pengaturan sistem pendidikan juga dimiliki oleh pemerintahan negara bagian; c). Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang berhasil cukup besar; d). Setelah *Wiedervereinigung* atau penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur, masyarakat Jerman bisa melihat ketimpangan antara dua wilayah ini dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Untuk itu pemerintah berupaya menyeimbangkan kondisi kedua wilayah dengan memberikan alokasi anggaran belanja negara yang lebih proporsional bagi pembangunan pendidikan di bekas Jerman Timur. Pemerataan kualitas

pendidikan di semua wilayah negeri merupakan kebijakan yang pada gilirannya akan menghilangkan potensi permasalahan di masa depan; e). Pemerintah Jerman sangat memperhatikan kualifikasi guru. Menjadi guru di Jerman mungkin sama sulitnya untuk menjadi dokter. Relevansi keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, kualitas pengajar dan kesejahteraan yang diperoleh guru merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam pengambilan kebijakan di Jerman. Rasanya orang Jerman akan menjadi sangat prihatin atau bahkan mungkin tidak percaya bila dikatakan bahwa di Indonesia masih ada guru yang *nyambal* menjadi tukang ojek karena kelemahan finansial yang dimilikinya.¹⁵

Kajian Kontrastif dengan Indonesia.

Secara falsafi, landasan sistem pendidikan Jerman dengan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Hal ini terjadi karena pendidikan di manapun adalah hal yang dianggap baik. Pendidikan sejak dulu sampai saat ini di manapun dipandang sebagai sesuatu yang mulia.¹⁶ Di samping itu, kemiripan latar belakang mestinya juga bisa menimbulkan keinginan yang sama. Kekalahan Jerman dan penjajahan di Indonesia menimbulkan dampak yang sama yaitu adanya ketidaksenangan karena pihak lain mengatur “rumah tangga” sendiri dan keinginan untuk mandiri atau merdeka.

Namun dari beberapa persamaan landasan pendidikan Indonesia dan Jerman dalam praktek pelaksanaan pendidikan ada perbedaan misalnya masalah Sentralisasi dan desentralisasi pendidikan di Indonesia masih merupakan pembicaraan yang melibatkan banyak perbedaan pemahaman. Persamaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan pendidikan di Indonesia belum terwujud dengan baik berbeda dengan Jerman. Sistem pendidikan tinggi (universitas) di Jerman mengakomodasi mereka yang menginginkan “kebebasan” untuk mengatur Studi mereka, hal ini mendorong kemandirian untuk memprogram belajar sesuai bidang yang diminati, sementara di Indonesia jarang ada yang demikian.

Indonesia harusnya bisa belajar dari Jerman yakni terkait dengan Pemerataan Pendidikan betapa pemerataan pendidikan begitu ditekankan di Jerman. Juga dalam masalah Guru, baik kualifikasi maupun kesejahteraannya yang masih jauh tertinggal dari Guru-guru di Jerman. Hal ini terjadi karena berbagai faktor yang ada, mulai dari lemahnya anggaran, pengawasan dan kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan.

¹⁵ Cecep Wahyu Hoerudin, dkk, *Makalah Studi Pendidikan Manca Negara Jerman dan Indonesia*, Universitas Pendidikan Bandung, 2009, hlm. 6-7

¹⁶ Chaedar Alwasilah, *Filsafat Bahasa...* hlm. 15

Namun seiring dengan jumlah alokasi anggaran pendidikan yang meningkat serta upaya memenuhi pemerataan akses kepada pendidikan melalui pembangunan desa tertinggal dan pembebasan biaya sekolah sampai tingkat menengah, dan sertifikasi guru serta dosen. Barangkali kita harapkan mampu menjadi *starting point* bagi pembentukan sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang.

Sistem Pendidikan di Australia

Sistem pendidikan Australia berstandar tertinggi dan menikmati pengakuan internasional. Sekolah adalah wajib di seluruh Australia, yang memberikan sumbangsih pada tingkat melek huruf 99 persen. Sekolah-sekolah mengembangkan keterampilan dan membangun kepercayaan diri para pelajar; lulusan universitas Australia unggul pada penelitian dan inovasi terdepan; serta pendidikan kejuruan dan teknik memajukan sektor industri yang sedang berkembang pesat.¹⁷

Australia juga salah satu penyelenggara pendidikan dan pelatihan terdepan di dunia bagi pelajar internasional, termasuk pelatihan bahasa Inggris. Lebih dari 400,000 pelajar dari sekitar 200 negara menerima pendidikan Australia setiap tahun. Kursus ditawarkan baik di Australia maupun di luar negeri.¹⁸

Tujuan Pendidikan

Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk departemen pendidikan negara bagian, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum ini biasanya dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih oleh badan-badan yang relevan. Tujuan pendidikan ini mengisyaratkan perlunya pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Pada level sekolah, tekanan adalah pada pengembangan potensimurid sebaik mungkin.¹⁹

Pada tingkat pendidikan tinggi, tekanan yang lebih besar diarahkan pada pencapaian kebutuhan pendidikan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan umum ini, berbagai sektor pendidikan tinggi harus mempunyai fokus program yang berbeda-beda. Misalnya, universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor pendidikan

¹⁷ L. Ingvarson and Chadbourne, (Eds.), *Valuing Teachers Work: New Direction In Teacher Appraisal*, (Melbourne: ACER, 194), hlm. 45

¹⁸ D' Cruz J and P. Langford (Eds.), *Issues in Australian Education*, (Melbourne: Longman Cheshire, 1990), hlm 89

¹⁹ <http://www.scribd.com/doc/8583903/Sistem-Pendidikan-Australia>, hlm. 4

teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memusatkan perhatian pada pendidikan kejuruan.

Pada dasarnya, pemerintah federal Australia tidak campur tangan langsung tentang tujuan pendidikan kecuali hanya melalui tujuan umum yang dinyatakan dalam undang-undang, tetapi pemerintah federal menyediakan hampir seluruh dana pendidikan, dan memberikan arah pendidikan.

Struktur dan Jenis Pendidikan

Di Australia, sekolah dimulai dengan *kindergarten* (taman kanak-kanak) dan dilanjutkan dari kelas 1 sampai kelas 12. Pada dasarnya sistem pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi lima strata (tingkatan), yaitu: a. Sekolah Dasar (*Primary School*); taman kanak-kanak sampai kelas 6 atau kelas 7. b. Sekolah Menengah (*Secondary or High School*); kelas 7 atau 8 sampai kelas 10. c. Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan (*Vocational Education and Training*) dan *senior high school/ senior secondary school/college* (sekolah menengah atas); kelas 11 sampai kelas 12.d. Pendidikan Tinggi (*University*).²⁰

Sebelum memasuki pendidikan tinggi di Australia, siswa harus menempuh pendidikan dasar dan pendidikan menengah terlebih dahulu, seperti halnya di Indonesia. Akan tetapi setelah menyelesaikan sekolah menengah, banyak pilihan bagi seorang siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

²⁰ Murid di Australia mulai sekolah pada umur 4,5 tahun sampai 5,5 tahun (*kindergarten*). Orang tua murid wajib menyekolahkan anaknya sampai dengan usia 15 atau 16 tahun (tergantung pada negara bagiannya). Jika anaknya tidak rajin masuk sekolah, orang tua dikenakan denda/sanksi. Pada tingkat *high school*, semakin tinggi tingkat sekolah, murid semakin bebas memilih mata pelajaran yang akan diambil. Pada tingkat *senior secondary school*, murid boleh memilih hampir semua mata pelajaran sesuai dengan keinginannya. Sebagian besar dari *high school* dan *senior secondary school* juga menawarkan mata pelajaran yang bersifat kejuruan, seperti perhotelan, turisme, muatan lokal; teknik kayu, teknik logam (*hospitality, tourism, woodworking, metal working*). Pada akhir kelas 12, murid sekolah mendapatkan *Year 12 certificate*. Piagam tersebut disertai transkrip nilai mata pelajaran yang telah diambil dengan nilai yang diraih. Untuk sebagian besar dari mata pelajaran pada tingkat kelas 12, nilai siswa dihitung dari tugas sekolah serta hasil ujian di negara bagian yang dilakukan pada akhir tahun. Nilai tersebut dapat langsung digunakan untuk mendaftar ke universitas, tanpa perlu diuji lagi. Di Australia, terdapat *public schools* (sekolah-sekolah negeri) dan *private schools* (sekolah-sekolah swasta). Kurang lebih dua pertiga dari murid bersekolah di sekolah negeri, sedangkan sisanya bersekolah di sekolah swasta. *Private schools* di Australia dibagi menjadi dua kelompok: yang berafiliasi pada agama (biasanya Katolik atau Protestan, tetapi ada juga sekolah Islam) dan yang tidak berafiliasi kepada agama (*independent schools*). Lihat: <http://www.atdiknas-canberra.org/sekolah-sd-sma/sistem-pendidikan-di-australia.html>; Education Attache; Embassy of Republic of Indonesia-Canberra, *Sistem Pendidikan Australia*, Rabu, 17 Maret 2011.

Manajemen Pendidikan

Otorita

Berdasarkan konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian, seorang Menteri Pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan adakalanya juga pendidikan prasekolah pada daerah itu. Departemen pendidikan merekrut dan mengangkat guru-guru, dan hampir semua staf/karyawan, menyediakan gedung-gedung, peralatan serta perlengkapan lainnya, dan menyediakan anggaran bagi sekolah-sekolah pemerintah.

Pada sektor pendidikan dasar dan TAFE, tugas departemen pendidikan berbeda-beda antara negara-negara bagian. Pada beberapa negara bagian, departemen pendidikan merupakan penyelenggara utama dan koordinator pendidikan dasar, sementara pada negara bagian lain tugas itu bukan menjadi tugas utama. Dalam penyelenggaraan TAFE, pola umumnya ialah ke arah pengadministrasian yang terpisah dari pendidikan dasar. Pada beberapa negara bagian, dibentuk badan koordinasi untuk memberikan saran kepada menteri pendidikan tentang prioritas-prioritas dalam sektor pendidikan.

Di samping bantuan dana umum yang diberikan kepada negara bagian, Commonwealth semenjak awal tahun 1970-an, telah pula menyediakan dana untuk tujuan-tujuan pendidikan khusus melalui Komisi Sekolah Commonwealth (*Commonwealth Schools Commission, disingkat CSC*) dan melalui Komisi Pendidikan Tinggi Commonwealth (*Commonwealth Tertiary Education Commission*), disingkat CTEC.²¹

Tanggung jawab politik ditingkat Commonwealth dijalankan oleh Menteri Pendidikan yang harus akuntabel kepada Parlemen Commonwealth. Menteri Pendidikan Commonwealth sering melakukan pertemuan dengan Menteri-menteri Pendidikan negara bagian melalui keanggotaan Dewan Pendidikan Australia atau *the Australian Education Council* (AEC). Dewan ini merupakan forum nasional yang akan membicarakan masalah-masalah prioritas dan kebijakan pendidikan.

Sekolah-sekolah yang statusnya bukan negeri merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan Australia, dan sekolah-sekolah swasta ini menampung 24% dari seluruh siswa dalam tahun 1982, jumlah yang terus meningkat semenjak awal 1970-an. Hampir semua sekolah swasta berkaitan erat dengan dewan-dewan gereja, di antaranya, sekolah-sekolah Katolik Roma memiliki jumlah sekolah yang paling banyak, menampung hampir 80% siswa- siswa swasta.

²¹ Agustiar Syahnur, *Perbandingan Sistem Pendidikan...* hlm. 61

Selain dari keharusan untuk mengikuti standar pendidikan minimal yang telah ditentukan untuk keperluan registrasi, sekolah-sekolah swasta pada umumnya bebas dari pengawasan pemerintah.

Universitas dan institusi CAE adalah lembaga-lembaga otonomi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Pendanaan bagi lembaga ini sepenuhnya menjadi beban Commonwealth dan dikelola melalui CTEC (*Commonwealth Tertiary Education Council*). Akan tetapi setiap negara bagian membentuk badan koordinasi untuk merencanakan dan mengkaji pendidikan tinggi mengonsultasikannya dengan CTEC.

Kurikulum dan Metodologi Pengajaran

Suatu kecenderungan pada semua sistem sekolah negeri semenjak awal 1970-an adalah pendelegasian tanggung jawab kurikulum kepada sekolah-sekolah. Tetapi kecepatannya sangat bervariasi. Pada beberapa negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Pada negara bagian yang lain, pejabat-pejabat yang relevan di pusat menyusun tujuan umum dan sekolah menjabarkannya ke dalam bentuk kurikulum yang rinci tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan umum yang telah ditetapkan. Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir; detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal. Pada kedua territories, *the Australian Capital Territory* (ACT) dan *the Northern Territory*, sekolah relatif memiliki otonomi yang lebih luas dan dapat mengembangkan kurikulumnya atas dasar tujuan umum yang ditentukan di tingkat sekolah.

Di pusat, penyusunan pedoman kurikulum serta objektif kurikulum secara umum biasa menjadi tanggung jawab seksi kurikulum dalam departemen pendidikan. Pedoman kurikulum pada dasarnya disusun oleh komisi-komisi kurikulum yang sudah ada untuk setiap bidang. Walaupun sekolah-sekolah swasta memiliki otonomi yang cukup luas dalam hal kurikulum, dalam banyak hal mereka mengikuti kurikulum yang sama yang dipakai di sekolah-sekolah negeri dalam negara bagian atau teritorinya.

Pusat Pengembangan Kurikulum (*Curriculum Development Centre, / CDC*) dibentuk oleh pemerintah Commonwealth dalam tahun 1975 untuk membantu mengkoordinasi dan mendiseminasikannya, serta menyiapkan materi kurikulum. Buku-buku pelajaran dan ujian disiapkan oleh berbagai badan termasuk seksi kurikulum, departemen pendidikan, Dewan Penelitian Pendidikan Australia (ACER), Pusat Pengembangan Kurikulum (CDC), penerbit buku-buku akademik yang komersial, dan asosiasi guru-guru bidang studi.

Curriculum Framework di Australia disusun dalam rangka menyongsong datangnya Abad XXI, dengan semboyan “*Educating our Children to succeed in the 21st Century*”. Prof. Lesley Parker, Chair of the Curriculum Council, menyatakan rasa bangganya, karena “*The Curriculum Framework was developed through a unique consultative process that involved almost 10.000 teachers, parents, academics, curriculum officers, students and other members of the community*”. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum di Australia telah melibatkan semua stakeholder pendidikan.

Ada beberapa hal yang menarik dalam *Curriculum Framework*:

Pertama, ada 8 kondisi yang melatarbelakangi pengembangan kurikulum di Australia, yaitu (1) cultural diversity, (2) changes in the family structure, (3) rapid pace of technological change, (4) global environmental issues, (5) changing nature of social conditions, (6) change in the workplace, (7) inter-dependence in the global economy, (8) uncertain standards of living.

Kedua, ada lima karakteristik nilai (*values*) yang akan dibangun melalui kurikulum tersebut, yaitu: (1) *pursuit of knowledge and commitment to achievement of potential*, (2) *self acceptance and respect of self*, (3) *respect and concern for others and their rights*, (4) *social and civic responsibility*, dan (5) *environmental responsibility*.²²

Curriculum Framework tidak menggunakan istilah “*student outcomes statement*” atau dikenal dengan “*overarching statement learning outcomes*”, yang rumusannya pada hakikatnya sama dengan rumusan kompetensi. Ada 13 (tiga belas) *student outcomes statement* yang akan dicapai melalui delapan mata pelajaran secara sinergis dengan menggunakan konsep “*links across the curriculum*”, yaitu: 1. *Students use language to understand, develop and communicate ideas and information and to interact with others*; 2. *Students select, integrate and apply numerical and spatial concepts and techniques*; 3. *Students recognize when and what information is needed, locate and obtain it from a range of sources and evaluate, use and share it with others*; 4. *Students select, use and adapt technologies*; 5. *Students describe and reason about patterns, structures and relationship in order to understand, interpret, justify and make patterns*; 6. *Students visualize consequences, think laterally, recognize opportunity and potential and are prepared to test options*; 7. *Students understand and appreciate the physical, biological and technological world and have the knowledge and skills and values to make decision in relation to it*; 8. *Students understand their cultural, geographic and historical context and have the knowledge, skills and values necessary for active participation in life in Australia*; 9. *Students interact with other people and cultures other than their own and are equipped to contribute to the global community*; 10. *Students participate in creative activity of their own and understand*

²² Australian Bureau of Statistics, *Schools, Australia 1993*, (Canberra: ABS, 1993), hal. 8

*and engage with the artistic, cultural and intellectual work of others; 11. Students value and implement practices that promote personal growth and well being; 12. Students are self-motivated and confident in their approach to learning and are able to work individually and collaboratively; 13. Students recognize that everyone has the right to feel valued and be safe, and, in this regard, understand their rights and obligations and behave responsibly.*²³

Konsep Evaluasi

Selama bertahun-tahun sistem pendidikan Australia menggunakan sistem evaluasi eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat atau diploma. Sesudah Perang Dunia II hampir semua ujian eksternal ini dihapuskan, dan pada pendidikan dasar dan menengah, yang paling banyak dilakukan ialah kenaikan kelas siswa atas dasar usia. Hampir pada semua sistem, sekolah punya tanggung jawab melakukan ujian untuk setiap level setiap tahun kecuali pada tingkat akhir pendidikan menengah di saat ujian eksternal dilaksanakan. Pada hampir seluruh sistem sekolah, sertifikat pertama yang diterima siswa adalah pada akhir tahun pendidikan ke-10 berdasarkan penilaian internal sekolah.

Pemberian sertifikat yang lebih tinggi diberikan pada tahun pendidikan ke-12, pada umumnya berdasarkan ujian eksternal. Pada ACT dan negara bagian Queensland, ujian internal sekolah yang sudah terakreditasi adalah sebagai pengganti ujian eksternal pada tahun pendidikan ke-12.

Untuk masuk ke universitas dan CAE pada umumnya diperlukan kualitas performansi tertentu pada tahun pendidikan ke-12, walaupun kebanyakan institusi memberikan kriteria tersendiri bagi orang-orang dewasa yang kebetulan tidak memenuhi persyaratan formal. Masuk ke TAFE dimungkinkan setelah menamatkan pendidikan 10 tahun dengan hasil yang memuaskan. Masalah yang terdapat dalam sistem ujian dan kenaikan kelas antara lain adalah mendapatkan keseimbangan antara ujian internal sekolah dan kesulitan belajar- mengajar yang mungkin muncul dalam kenaikan kelas otomatis berdasarkan usia.

Perbedaan dan pengaruh Sistem Pendidikan Australia dengan Sistem Pendidikan di Indonesia

Baik Indonesia maupun Australia sama-sama menerapkan Wajib belajar di Australia wajib belajar diterapkan selama 10 tahun, sedangkan Indonesia mencanangkan wajib belajar 9 tahun, yang akan ditingkatkan menjadi 12 tahun. Kebijakan kedua negara tentang wajib belajar relatif sama.

²³ D' Cruz J and P. Langford (Eds.), *Issues in Australian...*, hlm. 88

Di Australia lama pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbeda-beda pada setiap negara bagian dan wilayah daratan, dikarenakan diberikannya kewenangan seluas-luasnya (otorita penuh) dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan di Indonesia, lama pendidikan dasar dan pendidikan menengah relatif sama untuk setiap daerah (propinsi/kabupaten/kota).

Singgungan pendidikan Australia dan Indonesia banyak terjadi melalui banyaknya pelajar dari Indonesia yang belajar di universitas yang ada di Australia. Selain itu, pemerintah Australia juga membantu pemerintah Indonesia di dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Mengingat hubungan Indonesia dengan Australia sangat dekat dan dari segi letak geografisnya pun Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat.

Pengaruh Konsep Pendidikan Jerman dan Australia terhadap Pendidikan di Indonesia

Dalam tataran konsep Pendidikan, baik Indonesia, Jerman maupun Australia memiliki konsep yang hampir sama. Misalkan dari Penjenjangan pendidikan sama-sama dimulai dari pendidikan dasar, menengah dan Tinggi. Bahkan Indonesia dan Australia menerapkan wajib Belajar, Australia 10 Tahun sedangkan Indonesia 9 Tahun dan akan ditingkatkan menjadi 12 Tahun.

Sedangkan otoritas pendidikan di Indonesia tampaknya lebih sentralistik meskipun tidak mengabaikan peranan daerah dalam mengelola pendidikan, namun Kebijakan Pemerintah melalui Menteri Pendidikan lebih Dominan dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia, hal ini hampir mirip dengan Jerman yang kebijakan Pendidikan ada pada Menteri Pendidikan yang berkoordinasi dengan menteri Negara Bagian, Termasuk Juga dalam Pendanaan Pendidikan ditanggung Pemerintah Pusat serta didukung Pemerintah daerah di Indonesia sementara di Jerman Pemerintah Pusat dalam Pendanaan pendidikan dibantu Masyarakat. Sedangkan di Australia kebijakan Pendidikan dan pendanaan ada pada Masing-Masing Menteri negara Bagian. Otoritas ini juga berimplikasi pada penyusunan kurikulum pendidikan. Indonesia yang kebijakan pendidikan cenderung sentralistik, maka kurikulum pendidikan juga dirancang dari pusat, sedangkan di Jerman dan Australia lebih memberi Peluang pada Negara bagian maupun sekolah untuk turut merancang Kurikulum dengan tidak menafikan peran pemerintah. Sementara dari sisi evaluasi sepertinya Indonesia lebih baik dengan adanya sistem evaluasi yang terencana dan teratur, sedangkan Australia lebih menekankan pada penilaian eksternal yang ekstensif, meskipun ada juga ujian nasional yang dilaksanakan.

Berdasar perbandingan ketiga negara di atas masing-masing memiliki konsep dan sistem pendidikan masing-masing yang dalam banyak hal ada kemiripan. Namun yang perlu kita cermati adalah mengapa kualitas pendidikan di Indonesia Masih tertinggal dibandingkan Australia dan Jerman. Maka dari perbandingan pendidikan ini kita bisa petakan kelemahan dan keunggulan pendidikan dari masing-masing negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sebenarnya secara undang-undang Indonesia sudah sama dengan kedua negara, Australia dan Jerman menyediakan layanan pendidikan dan pendidikan Gratis sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 dan 4, namun yang menjadi persoalan adalah dalam realisasinya.

Poin penting yang bisa kita ambil dari Pendidikan di Jerman adalah pemerataan pendidikan yang dilaksanakan dengan baik, kebijakan pemerintah terkait pemerataan pendidikan ini berimbas pada terjangkaunya akses pendidikan yang relatif sama di semua wilayah dari semua warga negara, termasuk juga dalam pengalokasian anggaran pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah atau negara bagian. Bandingkan dengan Indonesia yang masih banyak terjadi kesenjangan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terpencil, belum lagi alokasi anggaran pendidikan yang kurang tepat sasaran, sehingga pendidikan gratis belum sepenuhnya terwujud. Karena tidak sedikit warga negara Indonesia yang merasakan beban biaya Pendidikan menjadi beban yang sangat berat sehingga tak jarang berakhir dengan keputusan tidak melanjutkan sekolah. Hal ini tentunya semakin menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia.

Disamping itu apresiasi pemerintah terhadap prestasi pendidikan dirasa sangat kurang, sehingga tidak sedikit putra bangsa yang berprestasi justru enggan untuk pulang dan berkarya di Indonesia karena minimnya Apresiasi, dampaknya adalah motivasi belajar pelajar Indonesia menjadi tereduksi.

Lemahnya kualitas pendidikan Indonesia, dan minimnya apresiasi prestasi ini tampak dari besarnya minat pelajar-pelajar Indonesia untuk belajar ke Australia dan Jerman, hal ini setidaknya dipengaruhi beberapa fakta antara lain: 1. Jerman dan Australia adalah salah satu negara paling maju di Dunia, bahkan Jerman menduduki peringkat ke-3 setelah Amerika dan Jepang dalam bidang ekonomi; 2. Kualitas Pendidikan dan penelitian sangat baik, dan 3. Biaya pendidikan murah. Pemerintah dan masyarakat di Australia menganut sistem sosial demokrat yang menjamin semua warganya mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Tiga hal ini menunjukkan kualitas pendidikan di kedua negara tersebut, setidaknya

sistem pendidikan di Jerman dan Australia sangat mendukung untuk pengembangan keilmuan dan penelitian. Tingkat akses pendidikan di kedua negara tersebut juga sangat terjangkau. Disamping apresiasi yang tinggi atas prestasi pendidikan.

Berdasarkan dari beberapa pandangan di atas, kita menyadari bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini memang berada di peringkat yang kurang membanggakan. Namun kondisi ini bukan merupakan alasan untuk terus merasa terpuruk, karena sistem pendidikan Indonesia juga telah menghasilkan juara-juara olimpiade di bidang Matematika, Fisika dan Biologi. Artinya, Indonesia masih mempunyai potensi yang apabila dikelola dengan baik akan berubah menjadi kekuatan yang mampu mengimbangi negara-negara maju seperti Jerman dan Australia tersebut.

Salah satu upaya yang bisa dijadikan *starting point* bagi upaya perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan Indonesia adalah dengan memenuhi menganalisa kelemahan dan kelebihan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan kaji banding (*Study Comparative*) dengan sistem negara lain yang lebih baik, seperti halnya Jerman dan Australia misalnya, sehingga bisa menjadi gambaran bagi kita, bagaimana kita bisa memperkuat dan meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Melalui peningkatan kualitas sistem pendidikan Indonesia, kelak Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan berada di barisan terdepan dalam usaha mewujudkan dunia yang lebih baik.

Dan yang tak kalah penting adalah peran pemerintah sebagai pembuat keputusan pendidikan di Indonesia, yakni kesungguhan niat pemerintah untuk membenahi pendidikan Indonesia, artinya apa yang telah diamanatkan Undang-Undang hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya, baik dalam pembiayaan dan akses pendidikan yang merata.

Simpulan

Studi perbandingan pendidikan merupakan studi yang sangat penting demi mewujudkan generasi bangsa yang lebih berkualitas sehingga dapat memajukan Negara Indonesia kelak. Kemiskinan dan kebodohan adalah faktor utama ketertinggalan negara Indonesia, artinya dengan melihat pola/ Sistem pendidikan di Jerman dan Australia, kiranya dapat termotivasi dan dapat mengevaluasi dari sejumlah kekurangan sehingga kedepan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat tumbuh dengan lebih baik, karena selain SDA yang melimpah, Indonesia juga harus mempersiapkan SDM yang handal dan berkualitas.

Keseriusan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia mutlak ditingkatkan bila Indonesia tidak ingin semakin jauh tertinggal dari Jerman dan Australia, Jaminan akses Pendidikan yang menjadi Hak setiap warga negara sebagaimana amanat Undang-undang harus dipenuhi. Begitu juga alokasi anggaran pendidikan harus direalisasikan dan tepat sasaran. Hal ini mengingat ketertinggalan Indonesia dari negara lain khususnya Jerman dan Australia adalah dalam tataran Aktualisasi dan implementasi konsep pendidikan Nasional dalam praktek Pendidikan di lapangan yang belum berjalan secara maksimal.

Rujukan

- Agustiar Syahnur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Bandung: Lubuk Agung, 2001
- Artikel “Indonesia’s education equity goals ‘moderate’, UNESCO report shows”. The Jakarta Post edisi Sabtu 12 Juni 2008
- A. Margrith Lin-Huber, *Kulturspezifischer Spracherwerb*, Bern: Verlag Hans Huber, 1998
- Australian Bureau of Statistics, *Schools; Australia 1993*, Canberra: ABS, 1993
- Chaedar Alwasilah, *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2008
- Cecep Wahyu Hoerudin, dkk, *Makalah Studi Pendidikan Manca Negara Jerman dan Indonesia*, Universitas Pendidikan Bandung, 2009
- Don Adams, *Educational Pattern In Contemporary Societies*, In. Thut (Eds.), *Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- D’ Cruz J and P. Langford (Eds.), *Issues in Australian Education*, (Melbourne: Longman Cheshire, 1990
- Frackman, dkk, *Higher Education policy in Germany: In Goedegebuure, Leo et al (Eds), Higher Education Policy: An International Comparative Perspective*, Paris: Pergamon Press, 1993
- H. Mohle, *German Democratic Republic: System of Education*, In B. R. Clarke and Neave, (Eds), *The Encyclopedia of Higher Education*, Vol. 1, Oxford: Pergamon Press, 1992
- <http://www.scribd.com/doc/8583903/Sistem-Pendidikan-Australia>
- <http://www.atdiknas-canberra.org/sekolah-sd-sma/sistem-pendidikan-di-australia.html>; Education Attace; Embassy of Republic of Indonesia-Canberra, Sistem Pendidikan Australia, Rabu, 17 Maret 2011.
- John Francis Cramer dan George Stephenson Browne, *Contemporary Education*, New York: Harcourt Brace, 1956
- J. T. Fey, *System of Education of Federal Republic of Germany*. In F. Husen and Postlethwaite (Eds), *International Encyclopedia of Education*. New York: Pergamon Press, 1985

- L. Ingvarson and Chadbourne, (Eds.), *Valuing Teachers Work: New Direction In Teacher Appraisal*, Melbourne: ACER, 194
- Robert F. Lawson, *Reconstruction Education: East German School and Universities after Unification* by Rosalin M. O Princhard, (Book Review), In *Comparative Education Review*, Vol. 44 No. 1, Februari, 2000
- U. Teichler and B. Kehm, *System of Higher Education of Federal Republic of Germany*. In Clarke, B. R., and Neave, G. (Eds), *The Encyclopedia of Higher Education*, Vol. 1 (Oxford: Pergamon Press, 1992
- W.B Elley, *How in The World Do Student Read? IEA Study of Reading Literacy*, The Hague: International Association for The Evaluation of Educational Achicvenment, 1992

Perbandingan Sistem Pendidikan di Tiga Negara; Mesir, Iran dan Turki

M Nurul Ikhsan Saleh

PIC Peace Generation Yogyakarta

Email: mnurulikhsansaleh@gmail.com

DOI : 10.14421/jpi.2015.41.49-70

Diterima: 14 Januari 2015

Direvisi: 6 April 2015

Disetujui: 26 Mei 2015

Abstract

This article discusses a comparative analysis of education in three countries where the population is predominantly of a Muslim background; Egypt, Iran and Turkey, and explains about the system of education in primary schools, secondary schools and colleges. Additionally, this article clarifies the latest education policy, curriculum, subjects, and assessment systems in schools and universities. The three countries have some similarities; each country is implementing the policy of compulsory education with it split into three levels. The other similarity being that is the students have a high interest for further study in foreign universities with some destination countries being: the United States of America, United Kingdom, Germany, Saudi Arabia, Canada, Ukraine, Malaysia, France, and Austria. Due to unfavorable politics in both countries of Egypt and Turkey, as well as Iran, education has been effected by a foreign policy that is often contradictory.

Keywords: *Comparative Education, Egypt, Iran, Turkey*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang perbandingan pendidikan di tiga negara yang penduduknya banyak dari masyarakat muslim; Mesir, Iran dan Turki, dan menjelaskan seputar sistem pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi. Selain itu, artikel ini mengkaji kebijakan pendidikan mutakhir, kurikulum, mata pelajaran, dan sistem penilaian di tingkat sekolah dan universitas. Ketiga negara tersebut memiliki beberapa kesamaan, masing-masing negara menerapkan kebijakan wajib belajar dan membagi jenjang pendidikan menjadi tiga

jenjang. Persamaan lainnya adalah para siswa memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi luar negeri dengan beberapa negara tujuan; Amerika Serikat, Britania Raya dan Irlandia Utara (UK), Jerman, Arab Saudi, Kanada, Ukraina, Malaysia, Prancis, dan Austria. Akibat perpolitikan yang kurang baik di dalam negeri baik di negara Mesir dan Turki, juga di Iran, dengan kebijakan politik luar negeri yang sering bertentangan, dunia pendidikan terkena imbasnya.

Kata Kunci: Perbandingan Pendidikan, Mesir, Iran, Turki

Pendahuluan

Sejarah awal lahirnya studi perbandingan pendidikan digambarkan seperti kisah seorang wisatawan yang melakukan pengamatan tentang bagaimana orang-orang muda dididik atau dilatih dalam masyarakat yang berbeda. Misalnya, orang-orang Yunani dan Romawi kuno mengagumi disiplin pendidikan bangsa Sparta. Bangsa Romawi mengagumi perdebatan di Persia kuno tentang apakah pegawai pemerintah di masa mendatang harus berpendidikan tinggi dan bagaimana mereka harus dinilai. Ada banyak cerita di masa lalu tentang topik tertentu yang dialami beberapa negara, salah satunya di Italia dari periode abad pertengahan awal, tertarik dengan cerita yang dibuat oleh Marco Polo (1254-1324) dari bagaimana Cina mengajar anak-anak mereka dan cerita tentang negaranya yang luas. Codex Mendoza mengungkapkan bagaimana anak-anak Meksiko memiliki kurikulum yang berbeda untuk anak laki-laki dan perempuan. Ibnu Batutah (1304-1368), seorang wisatawan dari Maroko, membuat tulisan menarik tentang masyarakat di abad keempat belas tentang Islam Afrika Utara dan Timur Tengah.¹

Itulah diantara beberapa kisah yang menggambarkan perkembangan awal dan wawasan tentang prasejarah tentang kemunculan perbandingan pendidikan, dimana banyak orang ingin mengetahui kejadian dan peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia lain.² Banyak orang kemudian saling mengunjungi negara lainnya untuk mempelajari lebih mendalam seputar isu-isu global.³ Hal ini menjadi

¹ Michael Crossley and Keith Watson, *Comparative and International Research in Education; Globalisation, Context and Difference*, (London and New York: RoutledgeFalmer, 2003), hlm. 12.

² Menurut Little, dengan semakin banyaknya kajian perbandingan pendidikan di abad ke duapuluh ini, baik dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dalam organisasi pendidikan di antar negara yang berbeda, baiknya kajian perbandingan pendidikan juga meliputi lintas komunitas, budaya, nilai dan cara belajar. Angela W. Little, *International and Comparative Education: What's in A Name?*, (France: Routledge, 2010), hlm. 846.

³ Secara umum menurut Stromquist perbandingan pendidikan menekankan pemahaman tentang dinamika perubahan pendidikan dan berusaha untuk mendeteksi pola perubahan dalam suatu negara, sedangkan dalam menelaah, ia meminjam teori, konsep dan metode penelitian dari ilmu-ilmu sosial. Nelly P. Stromquist, *Comparative and International Education: A Journey Toward Equality and Equity*, (New York: Spring, 2005) hlm. 89.

perhatian yang serius di kala salah satu negara ingin belajar tentang perkembangan pendidikan di negara lain yang lebih maju. Sejak awal kemunculan Islam, Nabi Muhammad SAW sempat menyerukan agar umat Islam mencari ilmu ke negara lain bahkan sampai ke negara Cina sekalipun. Selanjutnya muncul studi-studi tentang perbandingan pendidikan di bermacam negara. Bahkan perbandingan pendidikan menjadi salah satu kajian tersendiri dalam mata kuliah di beberapa negara, seperti yang terjadi di Indonesia sendiri. Dalam literatur Barat secara luas menyatakan bahwa perbandingan pendidikan secara sistematis memiliki asal-usul yang berkaitan dengan usulan Marc-Antoine Jullien pada tahun 1817 bahwa pemerintah harus memberikan informasi statistik tentang semua aspek yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Hal ini termasuk data keuangan pendidikan, pendaftaran siswa, jumlah guru dan sebagainya, dengan tujuan sebagai studi banding dengan sistem pendidikan di tempat lainnya.⁴

Beberapa kalangan penulis Barat mengakui bahwa Jullien adalah salah satu orang yang pertama kali menggunakan istilah perbandingan pendidikan. Ia dipandang sebagai peletak pertama istilah perbandingan pendidikan. Salah satu ide cemerlang dari seorang Jullien adalah ketika ia mendirikan sebuah Biro Pendidikan Internasional di Jenewa pada tahun 1925. Hal ini diikuti pada periode pasca-Perang Dunia II⁵ dengan pembuatan data statistik internasional bidang pendidikan oleh badan-badan seperti United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Program Pembangunan PBB (UNDP), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Bank Dunia.⁶ Berbagai laporan dan catatan statistik oleh lembaga tersebut telah menjadi alat penting untuk analisis, pembuat kebijakan dan praktisi di bidang perbandingan pendidikan secara internasional. Lembaga-lembaga tersebut telah dikelola dengan baik untuk melihat perbandingan pendidikan antar negara di belahan dunia.

Melakukan kajian perbandingan pendidikan membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena sistem pendidikan sendiri dalam suatu negara sangatlah kompleks, ia terhubung ke berbagai sistem lainnya, setidaknya berkaitan dengan dunia politik, ekonomi, geografi, dan lain-lain.⁷ Salah satu alasan yang

⁴ Edmund J. King, *The Purpose of Comparative Education* dalam Michael Crossley, *Changing Educational Contexts, Issues and Identities: 40 Years of Comparative Education*, (London and New York: Routledge, 2007) hlm. 21.

⁵ Setelah Perang Dunia II, kajian seputar perbandingan pendidikan menggunakan teori-teori dari ilmu Sosiologi, Ekonomi dan Psikologi. Lihat Brian Homes, *Conceptual Analysis and Empirical Enquiry*, dalam Reginald Edwards, *Relevant Methods in Comparative Education*, (Jerman: UNESCO Institute for Education, 1973), hlm. 41.

⁶ Michael Crossley and Keith Watson, *Comparative and International Research in Education; Globalisation, Context and Difference*, (London and New York: RoutledgeFalmer, 2003, hlm. 13.

⁷ Wolfgang Muskens dan Anke Hanft, *Design of the International Comparative Study* dalam Michaela

melatarbelakangi kenapa harus melakukan perbandingan pendidikan adalah karena pendidikan menjadi satu penggerak modal sosial masyarakat meskipun pendidikan bukanlah jalan satu-satunya akan tetapi diakui memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk menciptakan masyarakat yang bisa berkompetisi dengan masyarakat lainnya di negara lain.⁸ Beberapa kalangan mengungkapkan bahwa kajian perbandingan pendidikan masih terfokus di ranah perguruan tinggi. Namun kenyataan di lapangan sekarang menunjukkan bahwa kajian seputar perbandingan pendidikan telah terjadi di luar universitas, bahkan di lembaga penelitian khusus yang otonom. Memang ada juga negara-negara di mana universitas masih memainkan peranan yang belum besar dalam pengembangan perbandingan pendidikan misalnya di Prancis, dimana masih lebih banyak lembaga otonom lainnya yang konsentrasi di bidang kajian perbandingan pendidikan.⁹ Selanjutnya, di banyak negara, penelitian perbandingan pendidikan telah dilakukan oleh individu yang terkait dengan organisasi non-pemerintah nasional dan internasional di luar universitas.

Tentu sangat banyak sekali manfaat yang didapat dari proses membandingkan pendidikan antar negara, salah satunya yaitu negara yang pendidikannya belum maju bisa belajar dari negara lain yang sistem pendidikannya sudah maju. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah dengan mengadaptasi model standar pendidikan di negara lain, telah memberikan pengaruh besar terhadap beberapa negara yang didiami oleh banyak masyarakat muslim dan menjadikan sistem pendidikannya berkembang menjadi lebih baik, baik dari segi sistem pendidikan, kurikulum, mata pelajaran, jenjang pendidikan dan sistem penilaian.¹⁰ Namun begitu, masih banyak pula negara berpenduduk agama Islam dimana dunia pendidikannya masih belum menunjukkan kualitas yang baik. Jalan keluarnya untuk memperbaiki dunia pendidikan di negaranya, banyak negara di Timur Tengah mengadopsi model pendidikan di Barat.¹¹ Dengan begitu, belakangan sistem pendidikan di Timur Tengah menjadi lebih baik dan terbukti telah meningkatkan mutu pendidikannya. Tiga negara yang masih kental dengan dunia Islam seperti Mesir, Iran dan Turki adalah tiga contoh negara yang dalam beberapa hal mengadopsi sistem pendidikan

Knust, *Continuing Higher Education and Lifelong Learning: An International Comparative Study on Structures, Organisation and Provisions*, (London dan New York: Springer, 2009), hlm. 22.

⁸ Andy Green (eds.), *Education, Equality and Social Cohesion; A Comparative Analysis*, (New York: Palgrave Macmillan, 2006), hlm. 19.

⁹ Marianne A. Larsen, *New Thinking in Comparative Education; An Introduction* dalam Marianne A. Larsen (ed.) *New Thinking in Comparative Education*, (Taipei: Sense Publishers, 2010), hlm. 7

¹⁰ Alexander W. Wiseman, *The Institutionalization of Mass Schooling as Marginalization or Opportunity in Islamic Nation-States* dalam Joseph Zajda (eds.), *Education and Social Inequality in The Global Culture*, (New York: Springer, 2008), hlm. 181.

¹¹ Iika dikaji lebih mendalam, dunia pendidikan di negara Barat seperti Amerika sekalipun pada abad kesembilan belas telah dipengaruhi sistem pendidikan luar negeri. I. K. Kandel, *Comparative Education as A Subject of Professional Study*, (New York City: Bureau of Publication, 1930), hlm. 2.

di dunia Barat dan dalam artikel ini secara khusus fokus mengkaji perbandingan pendidikan di tiga negara tersebut,¹² dengan harapan dapat memperkaya kajian bidang pendidikan Islam.

Sistem Pendidikan di Mesir

Negara Mesir sebagian besar wilayahnya berada di kawasan Afrika bagian timur laut, mencakup Semenanjung Sinai dan kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidensial multipartai. Empat tahun silam, tepatnya pada awal-awal bulan di tahun 2011, ratusan ribu pemuda Mesir turun ke jalan untuk menuntut reformasi dan demokrasi untuk sistem pemerintahan di sana serta menuntut pemimpin tertinggi Hosni Mubarak turun dari tampuk kekuasaan. Mereka frustrasi dengan sistem pendidikan tinggi yang sangat kekurangan dana dan 40 persen dari lulusan perguruan tinggi tidak terserap oleh pasar tenaga kerja, sehingga pemuda Mesir dan universitas menuntut perubahan. Dari situlah kemudian lambat laun muncul reformasi pendidikan meskipun bisa dibilang sangat lambat dan dalam implementasi kebijakan masih belum merata disebabkan oleh kerusuhan politik, sosial dan ekonomi yang tidak berkesudahan. Persoalan dunia pendidikan seperti sudah menjadi catatan panjang yang tiada henti-hentinya di negara tersebut.¹³ Di pihak lain, persoalan ini sempat menyebabkan banyaknya mahasiswa di Mesir berusaha untuk mendapatkan perguruan tinggi di luar negeri dan beberapa mahasiswa dari luar negeri mulai turun minatnya untuk melanjutkan studi di Mesir akibat sistem pemerintahannya belum membaik walaupun sebenarnya negara tersebut sudah dari dulu kala sangat terkenal bagi mahasiswa internasional untuk studi di sana. Namun, ketika pimpinan diktator Mesir, Mubarak turun dari tampuk kepemimpinan, kondisi pendidikan berangsur mengalami perubahan.

Saat Mubarak terguling dari kekuasaannya, dengan begitu cepat universitas baru telah dibuka, yang sebelumnya hanyalah sebagai kampus cabang dari universitas-universitas yang ada di pusa-pusat perkotaan. Perguruan tinggi baru tersebut terletak di wilayah-wilayah terluar untuk memudahkan mahasiswa di daerah mendapatkan perguruan tinggi, tanpa harus ke perkotaan. Langkah pemerintah ini sebagai bagian untuk terus mendorong siswa lulusan dari sekolah menengah atas agar melanjutkan ke perguruan tinggi karena tingkat partisipasi melanjutkan ke perguruan tinggi

¹² Hanya ada beberapa aspek saja yang dibandingkan dalam artikel ini, karena jika akan membandingkan secara mendalam menurut Kandel, perbandingan pendidikan seharusnya meliputi kajian bidang administrasi, metode pembiayaan, jumlah dan jenis sekolah beserta kelebihan dan kekurangannya, jumlah dan ukuran kelas, kurikulum dan metode belajar, jadwal pelajaran, standar ujian, perencanaan pembelajaran, gaji, dan status guru. Lebih lanjut lihat I. L. Kandel, *The Methodology of Comparative Education*, (New York: Springer, 1959), hlm. 271.

¹³ Alan Richards, *Higher Education in Egypt*, (The World Bank, Population and Human Resources Department, 1992), hlm. 2.

masih sangat minim, yaitu hanya 25-28 persen dari seluruh lulusan sekolah menengah atas. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi membludaknya dan terfokusnya mahasiswa hanya pada universitas-universitas besar di perkotaan. Di tahun 2010, total ada 2.646.000 siswa yang terdaftar di semua tingkat pendidikan. Di antara mereka, satu persatu memasuki salah satu dari 23 universitas negeri, termasuk Universitas Al-Azhar, yang menjadi kampus tertua di dunia. Selain masuk di universitas negeri, mereka juga masuk di 19 universitas swasta, 18 lembaga publik pendidikan tinggi dan 81 lembaga tinggi swasta. Pemerintah di Mesir, berkomitmen untuk meningkatkan jumlah siswa yang mendaftar di perguruan tinggi dari 2,5 juta menjadi 2,8 juta pada tahun berikutnya. Namun, keadaan pemerintahan yang belum cukup membaik di negara itu telah menciptakan sebuah lingkungan di mana perubahan yang berarti dan reformasi sulit untuk dicapai. Antara Maret 2011 dan Juni 2013, perombakan kabinet mengakibatkan pengangkatan dan pemberhentian dari tujuh menteri pendidikan yang berbeda. Menteri Mahmoud Abo El-Nasr, diangkat sebagai bagian dari kabinet Perdana Menteri Hazem El-Beblawi setelah penggulingan militer terhadap Mohamed Morsi, presiden pertama negara itu yang dipilih secara demokratis.¹⁴

Sebenarnya meskipun bisa dibilang kekacauan politik dan kerusuhan di beberapa tahun belakangan sangat mempengaruhi sistem pendidikan,¹⁵ beberapa reformasi telah dilakukan di Mesir. Ada peningkatan 33 persen dalam pendanaan publik untuk pendidikan antara tahun 2011 dan 2012. Namun, kenaikan dana untuk pendidikan tidak berbanding lurus dengan peningkatan gaji pada akademisi sehingga beberapa kalangan di tahun 2012 mengatakan bahwa banyak kalangan ilmuwan dan peneliti yang aktif di universitas memilih menjadi peneliti di luar negaranya dengan harapan bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Di saat keinginan untuk menjadikan sistem pemerintahan yang demokratis tercapai, para pemuda Mesir juga menyerukan reformasi pemenuhan lapangan kerja sehingga para lulusan dari perguruan tinggi bisa memenuhi pasar tenaga kerja dimana kondisi yang ada adalah para sarjana sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga akhirnya hanya menjadi pengangguran. Pada tahun 2012, sebanyak 21,3 juta orang Mesir yang berusia 15 sampai 29, tingkat penganggurannya berada di level 77,5 persen, sementara tingkat pengangguran secara keseluruhan naik menjadi 12,6 persen menurut statistik dari CAPMAS, lembaga statistik Negara di sana. Pengangguran dari perguruan tinggilah yang menjadi salah satu penyebab terbesar semakin melonjaknya jumlah pengangguran di negara tersebut dalam statistik.

¹⁴ Nick Clark (eds), "Education in Egypt." WENR (*World Education News and Reviews*). 2013. <http://wenr.wes.org>, [29 Mei 2015]

¹⁵ Louisa Loveluck, *Education in Egypt; Key Challenges*, (London: Chatham House, 2012), hlm. 4.

Data statistik menunjukkan bahwa minat siswa dari Mesir untuk melanjutkan studi di luar negeri meningkat, sedangkan minat mahasiswa luar negeri untuk sekolah di Mesir belum menunjukkan peningkatan signifikan. Menurut data pemerintah di Mesir, jumlah mahasiswa yang belajar di luar negeri memang tidak menunjukkan jumlah yang besar, namun menurut data dari UNESCO Institute for Statistics ada 25 persen lebih siswa dari Mesir yang belajar di luar negeri, yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2010.¹⁶ Lebih-lebih lagi, akibat pergolakan politik setelah periode tersebut, kemudian mengakibatkan mahasiswa Mesir lebih tertarik melanjutkan studi ke perguruan tinggi di luar negaranya agar juga kemudian mendapatkan kesempatan kerja di luar negeri.

Ada 2.201 mahasiswa Mesir pada tahun 2012 yang melanjutkan ke lembaga pendidikan tinggi di Amerika Serikat, lebih dari 20 mahasiswa dibanding pada tahun 2011 dan kurang beberapa ratus dari rekor tertinggi tahun 2002 yang berjumlah 2.409. Pada saat Amerika Serikat mendapatkan serangan teroris pada tanggal 11 September 2001, pendaftar dari Mesir mengalami penurunan drastis ke posisi terendah dalam tiga dekade sampai pada tahun 2006 dan kemudian kembali meningkat sejak tahun 2007 sampai tahun 2010. Sedangkan jika dilihat dari data mobilitas mahasiswa Mesir yang melanjutkan studi ke luar negeri di belahan dunia, studi mahasiswa Mesir yang berbasis di AS terutama di tingkat pascasarjana, dengan lebih dari 50 persen belajar untuk master atau doktor dan lebih seperempat di tingkat sarjana.¹⁷

Program pendidikan wajib belajar di Mesir adalah dari kelas 1 sampai kelas 9. Sistem mengikuti pola 6 + 3 + 3, dengan enam tahun sekolah dasar, tiga tahun sekolah menengah dan tiga tahun sekolah menengah atas. Rasio partisipasi kasar semua siswa yang terdaftar pada sekolah menengah, tanpa memandang usia, pada tingkat menengah adalah 72 persen, sedangkan rasio partisipasi murni pada siswa usia sekolah menengah adalah 70 persen. Tanggung jawab umum untuk pendidikan di Mesir dibagi antara Departemen Pendidikan dan Departemen Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan mengawasi prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan persiapan dan menengah, sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi mengawasi pendidikan tinggi. Sedangkan Dewan Tertinggi Universitas bertugas menetapkan kebijakan secara keseluruhan dan mengawasi pembentukan lembaga baru. Pendidikan Al-Azhar berada di bawah kewenangan Kementerian Kebijakan Al-Azhar. Di Mesir, Sekolah Dasar berlangsung enam tahun untuk

¹⁶ Lebih lanjut bisa dilihat UNESCO Institute for Statistics 2010 di <http://www.uis.unesco.org>, [31 Mei 2015]

¹⁷ Lebih lanjut bisa dilihat di Institute of International Education <http://www.iie.org>, [31 Mei 2015]

siswa berusia enam sampai 12.¹⁸ Pendidikan dasar merupakan tahap pertama dari sembilan tahun siklus wajib belajar pendidikan dasar. Departemen Pendidikan menetapkan kurikulum, dan semua sekolah harus mengikuti kurikulum yang ditetapkan. Materi belajar selama enam tahun pendidikan dasar meliputi: Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Matematika, Musik, Studi Agama dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di kelas 4, Pertanian diperkenalkan dan di kelas 5 Seni, Ekonomi Rumah Tangga, dan Ilmu Sosial ditambahkan. Di sekolah-sekolah Al-Azhar, kurikulum yang ada umumnya menitikberatkan pada studi Islam. Negara ini juga melaksanakan sekolah internasional yang mengikuti kurikulum Amerika, Inggris atau Kanada.

Selanjutnya setelah pendidikan dasar, para siswa akan melanjutkan ke jenjang berikutnya yang berlangsung tiga tahun, tingkatan ini untuk siswa berusia 12 sampai 15. Kurikulum pada tahap ini meliputi: Bahasa Arab, Pertanian, Seni, Bahasa Inggris, Pendidikan Industri, Matematika, Musik, Studi Agama dan Ilmu Sosial. Banyak sekolah juga menawarkan bahasa-bahasa Eropa lainnya, umumnya Perancis atau Spanyol. Sedangkan sekolah menengah atas berlangsung selama tiga tahun untuk siswa berusia 15 sampai 18. Ada tiga jenis sekolah menengah atas: *Pertama*, Sekolah Menengah Umum, yang menawarkan program akademik dalam persiapan untuk pendidikan tinggi. *Kedua*, Sekolah Menengah Al-Azhar, yang menawarkan program akademik dengan penekanan pada pengajaran agama Islam. *Ketiga*, Sekolah Menengah Teknik, yang menawarkan program teknik dan kejuruan dimana siswa mengkhususkan diri dalam salah satu dari tiga aliran yang berlangsung tiga sampai lima tahun: Teknik, Industri atau Pertanian.¹⁹

Agar berhasil lulus dari tingkat pendidikan menengah atas, siswa harus lulus ujian akhir agar mendapatkan Sertifikat Pendidikan Menengah Umum. Selain ujian akhir, siswa juga dinilai oleh penilaian terus-menerus selama dua tahun terakhir sekolah menengah. Di sekolah-sekolah menengah teknik, siswa dapat mengejar salah satu dari dua kualifikasi: Diploma Teknik Pendidikan Menengah dan Sertifikat Teknik Lanjutan. Penerimaan didasarkan pada Sertifikat Pendidikan Dasar. 50 persen dari kurikulum dikhususkan untuk mata pelajaran pendidikan umum, wajib pada tingkat ini, termasuk bahasa Arab dan bahasa Inggris, dengan 40 persen dari waktu kelas dihabiskan belajar mata pelajaran spesialisasi dan 10 persen pilihan. Bahasa Arab adalah bahasa resmi instruksi di semua tingkat pendidikan. Beberapa sekolah swasta dan universitas mengajar dalam bahasa Inggris dan Perancis.

¹⁸ UNESCO Institute for Statistics, *Global Education Digest 2010: Comparing Education Statistic Across The World*, (Canada: UNESCO Institute for Statistics, 2010), hlm. 108.

¹⁹ Nick Clark (eds), "Education in Egypt." WENR (*World Education News and Reviews*). 2013. <http://wenr.wes.org>. [29 Mei 2015]

Sistem Pendidikan di Iran

Negara Iran berada di kawasan Timur Tengah tepatnya wilayah Asia Barat Daya dan di masa awal Iran dikenal dengan nama Persia meskipun belakangan setelah adanya Revolusi Iran kemudian menjadi Republik Islam Iran. Selama abad kesembilan belas, pendidikan secara bertahap menjadi salah satu fokus utama reformasi di sana, bukan hanya mengirimkan mahasiswa ke luar negeri akan tetapi banyak mendatangkan instruktur dari Eropa utamanya untuk mengajar para militer setelah kekalahannya dalam perang melawan Rusia.²⁰ Sampai sekarang pun, banyak pelajar atau mahasiswa dari Iran menimba ilmu di luar negaranya dengan bermacam alasan. Menurut laporan pemerintah Iran yang diterbitkan oleh UNESCO Institute for Statistics (UIS), lebih dari 38.000 mahasiswa Iran yang belajar di luar negeri pada tahun 2010, sedang pada tahun 2008 berjumlah 26.927.²¹ Jumlah pada tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah mahasiswa internasional dari Iran dibandingkan tahun 2008 ketika hanya ada di bawah 27.000 mahasiswa di lembaga pendidikan tinggi di luar negeri. Dengan terus meningkatnya persaingan untuk mendapatkan universitas tertentu di Iran,²²

Di Iran sendiri, pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan, bertanggung jawab untuk pembiayaan dan mengontrol administrasi pendidikan dasar dan menengah. Di tingkat lokal, pendidikan diawasi melalui pemerintah provinsi dan kantor kecamatan. Selain itu, Departemen Pendidikan mengawasi ujian nasional, memonitor standar, menyelenggarakan pelatihan guru, mengembangkan kurikulum dan materi pendidikan, mendanai pembangunan dan pemeliharaan sekolah. Sedangkan Dewan Tinggi Pendidikan adalah badan legislatif yang menyetujui semua kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan pendidikan. Sekolah swasta (non-profit) sebagian didanai oleh pemerintah dan beroperasi di bawah pengawasan Departemen Pendidikan.

Pendidikan wajib belajar berlangsung sampai kelas 8 dan dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat. Tingkatan pada pendidikan dasar dibagi menjadi lima tahun pada tingkat pertama dan tiga tahun untuk tingkat lanjutan. Pada tingkat dasar, siswa melakukan proses pembelajaran sebanyak 24 jam per minggu. Kurikulum mencakup studi Islam, membaca sejarah Persia, menulis dan memahami

²⁰ Soli Shahvar, *The Forgotten Schools; The Baha'is and Modern Education in Iran, 1899-1934*, (London and New York: I.B. Tauris Publishers, 2009), hlm. 11.

²¹ UNESCO Institute for Statistics, *Global Education Digest 2010; Comparing Education Statistics Across The World*, (Canada: UNESCO Institute for Statistics, 2010), hlm. 180

²² Jika sedikit menarik ke masa lalu, pendidikan di Iran sempat banyak mempelajari ilmu keagamaan. Al-Ghazali (1058-1112) kelahiran Iran menulis seputar Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama pada tahun 1106. Lihat Reza Arasteh *Education and Social Awakening in Iran*, (Leiden: E.J. Brill, 1962), hlm. 2-17.

Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sedangkan pada tingkat bimbingan, siswa melakukan 28-31 jam pembelajaran per minggu. Ada kurikulum nasional yang seragam untuk semua sekolah, dan mata pelajaran yang dibahas adalah sama seperti pada tingkat dasar. Tingkat bimbingan mempersiapkan siswa untuk naik ke jenjang pendidikan selanjutnya.²³

Para siswa akan menghadapi ujian akhir pada tingkat kelas 5 dan 8, apabila siswa gagal dalam ujian, harus mengulang dan dapat mengambil ujian lagi tahun berikutnya. Jika siswa gagal untuk kedua kalinya, mereka harus mengikuti pelatihan kejuruan dasar. Pemeriksaan yang diadakan pada bulan Juni di akhir setiap tahun akademik, dilakukan oleh otoritas pendidikan provinsi.

Pada tahun 2010 rasio partisipasi kasar pada tingkat pendidikan dasar di Iran adalah 115 persen, yang berarti bahwa tidak hanya siswa usia SD yang mendaftar ada di tingkat yang sangat tinggi (99,75 persen pada tahun 2011), tapi juga siswa tambahan yang tidak mendaftar di kelas pertama di usia enam tahun. Statistik tersebut menunjukkan bahwa tingkat melek huruf di Iran di semua tingkat terus meningkat dari 98,7 persen di antara umur 15-24 tahun dan 85 persen di antara populasi umum lebih dari 15 tahun. Tingkat kelulusan secara umum pada kelas 5 adalah 98,1 persen (persentase kelompok usia yang relevan menyelesaikan kelas 5). Secara keseluruhan, angka partisipasi pendidikan dasar di Iran relatif tinggi dibanding negara lain pada tingkat yang pembangunan sama, dengan 97 persen siswa SD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pada tahun 2010. Tingkat partisipasi keseluruhan 86 persen di tingkat menengah. Tingkat kelulusan di tingkat menengah adalah 80 persen di antara semua siswa, dengan didominasi oleh siswa perempuan yang kelulusannya mencapai 91 dan siswa laki-laki 70 persen.²⁴

Di sekolah, sistem penilaian didasarkan pada ujian akhir dan penilaian berkelanjutan di semua tingkat selama tiga tahun sekolah menengah atas. Ujian diadakan dua kali setahun, tapi yang paling penting adalah ujian akhir. Siswa dari jurusan umum dan teknik diberikan *Diplom-e Motevaseteh* (Sertifikat Penyelesaian Sekolah Menengah) setelah berhasil menyelesaikan studi dan setelah melewati ujian nasional (kelas 11.) Berikut sajian data di bawah seputar materi pembelajaran yang berlangsung untuk sekolah menengah atas di Iran.²⁵

²³ Lebih lanjut lihat UNESCO Institute for Statistics, *Global Education Digest 2010; Comparing Education Statistics Across The World*, (Canada:UNESCO Institute for Statistics, 2010), hlm. 114.

²⁴ Nick Clark (eds), "Education in Iran." WENR (*World Education News and Reviews*). 2013. <http://wenr.wes.org>, [29 Mei 2015]

²⁵ Lebih lanjut bisa dilihat pada United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan International Bureau of Education, *World Data on Education*, VII Ed. 2010/2011, hlm. 11-12.

Tabel 5. Beban Materi Umum Sekolah Menengah Atas

Upper Secondary Course Load in Common Courses by Stream			
Subject	Number of Units by Stream		
	Academic	Technical	Vocational/ Skills
Holy Qu'ran	3	3	2
Religious Education	6	6	4
Persian Literature	6	4	4
Arabic	6	6	4
Grammar and Writing	6	4	4
Foreign Language	6	6	4
Social Science	2	2	2
Economics	1	1	1
Physics	3	3	3
Chemistry	3	3	3
Physics Lab	1	1	1
Chemistry Lab	1	1	1
Mathematics	8	8	4
History of Iran	3	3	3
Biology, Hygiene and Environment	4	-	-
Physical Education	3	3	1
Defense Preparation	1	1	1
Total # Credits	66	58	45

Tabel 6. Beban Materi Sekolah Menengah Atas Bidang Spesifikasi

Upper Secondary Course Load in Specialized Courses for the Academic Stream			
Subject	Number of Units by Specialization		
	Humanities and Literature	Mathematics and Physics	Experimental Sciences
Persian Literature	2	-	-
Literary Essays	2	-	-
History of Persian Literature	3	-	-
Geography	2	-	-
Economic and Political Geography	2	-	-
History of Iran	2	-	-
History of Islamic and Iranian Culture and Civilization	2	-	-
Economics	2	-	-
Arabic	3	-	-
Logic	1	-	-
Philosophy	1	-	-
Sociology	3	-	-
Psychology	2	-	-
Physics	-	6	4
Physics Lab	-	1	1
Chemistry	-	4	4
Chemistry Lab	-	1	1
Geometry	-	5	2
Arithmetic	-	4	-
Algebra and Probability	-	2	-
Mathematics	-	-	2
Computer Science	-	3	-
Biology	-	-	2
Botanical Biology	-	-	2
Animal Biology	-	-	3
Biology Lab	-	-	1
Geology	-	-	2
Total # Credits	27	26	24

Kompetisi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di Iran sangatlah ketat dan penentuan kelulusan didasarkan pada hasil ujian masuk universitas. Pendaftaran dilakukan di bulan Juni setiap tahun, dengan hanya 10 persen kursi yang disediakan dari sekitar 1,5 juta peserta untuk lolos di salah satu perguruan tinggi negeri. Semua perguruan tinggi swasta, selain Islamic Azad University (IAU), juga menggunakan tes untuk masuk di dalamnya. Namun begitu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dengan memperbesar universitas yang ada. Semua lembaga pendidikan tinggi, kecuali lembaga medis berada di bawah pengawasan Departemen Ilmu Pengetahuan, Riset dan Teknologi. Universitas medis diawasi oleh Departemen Kesehatan, Pengobatan dan Pendidikan Kedokteran. Pada tahun 2009, ada 103 universitas yang beroperasi di Iran, dan total menyerap 3.350.000 siswa, 51 persen di antaranya menempuh studi di universitas swasta. Sebagian besar siswa di sektor swasta menempuh studi di kampus Islamic Azad University. Kampus ini didirikan pada tahun 1981, menjadi lembaga negara terbesar dengan lebih dari 1,6 juta siswa.²⁶ Saat ini kampus tersebut memiliki cabang internasional di Dubai, Lebanon, Oxford, Afghanistan, Tanzania dan Armenia, di samping ada 350 kampus di seluruh Iran. Universitas swasta terkemuka lainnya adalah Shahrood University bidang Ilmu Kedokteran dan Qom University. Total ada 29 perguruan tinggi swasta pada tahun 2009.

Skala penilaian berkisar antara 0-20 dan digunakan di semua tingkat pendidikan di seluruh Iran. Kelulusan minimum untuk program sekolah adalah 7 (kecuali untuk Persia yang 10), dengan nilai kumulatif keseluruhan dari 10 yang dibutuhkan untuk kelulusan. Siswa pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi dinilai dengan pemeriksaan pada akhir setiap semester. Kelulusan minimum untuk program sarjana adalah 10, untuk program pascasarjana 12, dan untuk doktor 14.

Sistem Pendidikan di Turki

Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekuler, bersatu dan wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa tenggara. Ibu kota Turki berada di Ankara namun kota terbesar berada di Istanbul. Sistem pendidikannya terpusat, dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk setelah berdirinya Republik Turki Modern pada tahun 1923. Atatürk menjabat sebagai presiden pertama dan menciptakan sistem kenegaraan yang sekuler,²⁷ dimana pendidikan dirancang untuk

²⁶ Perguruan tinggi IAU dinilai menjadi universitas terbesar ketiga di dunia dengan 600 sekolah, 11 rumah sakit, 400 cabang akademik, 34.000 anggota akademik dan meluluskan sarjana sebanyak 2.400.000. Kampus IAU telah memainkan peran penting dalam mengembangkan pengetahuan dan budaya di Iran. Lihat Hamid Mirzadeh, *Islamic Azad University*, (Iran: Medical Sciences Division, 2014), hlm. 4.

²⁷ Konflik seputar sekularisme menjadi salah satu isu sentral bagi kehidupan masyarakat Turki di

menghasilkan kelas pekerja terampil, produktif dan menjadi individu yang kreatif di era yang serba informatif.²⁸ Sampai saat ini, pendidikan telah menjadi medan pertempuran politik dan filosofis antara sekularis, yang didukung oleh aparat militer, dan konservatif agama, yang membentuk fondasi lewat Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang pada akhirnya bisa merebut kekuasaan tertinggi. Pada tahun 2012, AKP mendorong perubahan melalui reformasi undang-undang, yang kemudian beberapa kalangan mengkritisnya. Meski demikian, salah satu langkah yang dicanangkan, yaitu memperpanjang wajib belajar selama empat tahun dinilai cukup baik.²⁹

Perdebatan para penentu kebijakan di bidang pendidikan setidaknya dalam 20 tahun terakhir tetap terjadi. Langkah AKP yang mencoba melakukan perubahan melalui reformasi pendidikan, salah satunya yang paling menonjol adalah dengan menambahkan empat tahun untuk pendidikan wajib sekolah, meningkatkan periode wajib belajar yang semula delapan tahun menjadi 12 tahun. Di permukaan, ini tampak seperti perubahan positif, namun, undang-undang baru telah banyak dikritik karena bermotif politik dan berlawanan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari pada mendorong siswa untuk tetap bersekolah lagi, kritikus mengatakan bahwa struktur 4 + 4 + 4 tahun dapat mengakibatkan siswa memilih jalur pendidikan kejuruan. Di bawah undang-undang baru pemerintah, 12 tahun wajib belajar telah dibagi menjadi tiga tingkatan empat tahun: dasar, menengah pertama dan menengah atas.

Di Turki, Departemen Pendidikan Nasional bertanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap administrasi semua tahapan dan jenis pendidikan pra-sekolah. Perencanaan dan koordinasi pendidikan berada di bawah lingkup dari Yükseköğretim Kurulu (Dewan Pendidikan Tinggi, yang biasa disingkat dengan YOK). Dewan bertanggung jawab untuk negosiasi anggaran universitas, secara keseluruhan dan kelembagaan, dan pedoman kurikulum inti di tingkat sarjana. Setelah dilarang pada awal 1970-an, lembaga pendidikan tinggi swasta kembali diizinkan beroperasi di Turki pada tahun akademik 1981-1982, tetapi hanya atas dasar non-profit. Kurikulum lembaga-lembaga ini harus disetujui oleh YOK. Di beberapa provinsi, urusan pendidikan diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan

pertengahan tahun 1990. Studi tentang sekularisme tidak dapat dipisahkan dari studi negara di sana. Sekularisme bukan lagi sebagai paradigma netral, akan tetapi menjadi ideologi negara serta menjadi wacana publik Turki kontemporer. Lihat Yael Navaro Yashin, *Faces of The State: Secularism and Public Life in Turkey*, (United Kingdom: Princeton University Press, 2002), hlm. 6.

²⁸ United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan International Bureal of Education, *World Data on Education*, Turkey, VII Ed. 2010/2011. hlm. 1.

²⁹ Nick Clark (eds), "Education in Turkey." WENR (*World Education News and Reviews*). 2012. <http://wenr.wes.org>, [29 Mei 2015]

Nasional yang ditunjuk oleh Menteri, tetapi bekerja di bawah arahan gubernur provinsi.

Secara kualitatif, sekolah di Turki berkinerja kurang baik jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di negara-negara OECD lainnya.³⁰ Menurut hasil dari Program OECD for International Student Assessment (PISA),³¹ rata-rata siswa di Turki sangat rendah dalam Literasi, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari rata-rata OECD. Maka, karena bermacam kendala kualitas sistem pendidikan di Turki, siswa dari Turki memiliki sejarah panjang dalam memilih belajar ke luar negeri di jenjang pendidikan tinggi. Menurut angka terbaru dari OECD, lebih dari 65.000 mahasiswa Turki yang belajar di luar negeri pada tahun 2010 dan lima negara tujuan adalah: Jerman (37,8 persen dari seluruh mahasiswa internasional), Amerika Serikat (15,6 persen), Britania Raya dan Irlandia Utara (UK) (5,6 persen), Austria (3,7 persen) dan Perancis (2,9 persen).

Pendaftaran mahasiswa dari Turki di institusi pendidikan tinggi Amerika Serikat berada dalam jumlah yang stabil yaitu berkisar 10.000 dan 12.500, hal ini menjadikan mahasiswa internasional dari Turki menduduki peringkat sepuluh tertinggi menurut data dari Institut Pendidikan Internasional. Pada 2010-2011, ada 12.184 mahasiswa Turki di pendidikan tinggi AS, dengan 6.435 mahasiswa pascasarjana (52 persen), 3.532 mahasiswa (29 persen), 1.193 program lain (10 persen), dan 1.024 non-gelar (8 persen). Selain itu, Turki membuat etnis minoritas terbesar di Jerman, setelah migrasi besar-besaran dari Turki ke Jerman pada tahun 1960 karena kekurangan tenaga kerja di Jerman. Mayoritas orang Turki di Jerman tetap memiliki kewarganegaraan Turki karena aturan kewarganegaraan Jerman yang ketat, yang berarti bahwa banyak penduduk asing dari Turki di Jerman yang lahir di sana atau telah melalui sistem sekolah di Jerman, tapi masih menjadi warga negara Turki. Ada 1.629.000 warga Turki yang tinggal di Jerman pada tahun 2010; diperkirakan 30,000-70,000 mengambil kewarganegaraan Jerman setiap tahun. Di tahun yang sama, ada sejumlah 26.089 orang Turki belajar pada perguruan tinggi di Jerman.³²

³⁰ OECD adalah singkatan dari Organisation for Economic Co-Peration and Development. Organisasi tersebut menjadi sebuah forum yang terdiri dari 30 negara yang berkomitmen untuk penerapan sistem demokrasi dan pasar bebas. Lihat William A. Wings, *Education as An Investment in Turkey's Human Capital: A Work in Progress*, Eurasian Journal of Businnes and Economics 2012, 5 (10), hlm. 46.

³¹ Lebih lanjut lihat OECD, *Education Policy Outlook: Turkey*, Turkey, 2013, hlm. 5.

³² Turki adalah negara berkembang yang penduduknya meningkat dengan cepat, maka pemerintah Turki sangat fokus untuk meningkatkan pendidikan kejuruan di tingkat sekolah menengah agar lulusannya bisa terserap dunia kerja. Ali Yildirim dan Hasan Simsek, *A Qualitative Assessment of The Curriculum Development Process at Secondary Vocational Schools in Turkey*, (Turkey: Middle East Technical University, 1997), hlm. 19.

Negara Turki, sebagai salah satu tujuan untuk mahasiswa internasional, pada 2010-2011, ada 31.170 mahasiswa asing yang belajar di sana. Hal tersebut, merupakan peningkatan lebih dari 100 persen sejak 2005-2006 ketika hanya ada 15.481 mahasiswa asing di perguruan tinggi Turki. Jumlah mahasiswa di Turki dari negara-negara mayoritas Muslim pada tahun 2010-2011 berjumlah lebih dari 18.000. Mahasiswa dari negara Azerbaijan menduduki peringkat teratas dengan lebih dari 4.200 siswa, diikuti oleh Turkmenistan dengan 4.110, dan Siprus Utara dengan 3.800. Iran dan Bulgaria yang keempat dan kelima. Sebanyak 1.552 siswa dari 44 negara-negara Afrika belajar di Turki di 2011-2012, lebih meningkat empat kali lipat dibandingkan dengan 2005-2006. Universitas Anadolu di Eskişehir menjadi tempat mahasiswa internasional paling banyak, diikuti oleh Universitas Istanbul, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Universitas Ankara, dan Universitas Marmara. Penggunaan bahasa Inggris di banyak universitas Turki juga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa asing dikombinasikan dengan biaya kuliah yang relatif murah. Belakangan sistem pendidikan tinggi di Turki mengalami perkembangan yang pesat, setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir.³³

Departemen Pendidikan Nasional di Turki selain menetapkan kurikulum sekolah dasar, menyiapkan dan menyetujui buku pelajaran dan alat peraga. Sebelum reformasi, mata pelajaran antara lain; seni dan kerajinan, kewarganegaraan dan hak asasi manusia, bimbingan karir, bahasa asing (Inggris, Perancis atau Jerman dari kelas empat), Matematika, Musik, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Agama dan Etika, IPA, IPS, Sejarah Turki, Bahasa dan Sastra Turki, dan keselamatan lalu lintas dan pertolongan pertama. Sebelum reformasi pendidikan tahun 1997, siswa melakukan lima tahun pendidikan dasar dan tiga tahun menengah (mirip dengan yang struktur baru 4 + 4). Siswa lulus dari pendidikan menengah dianugerahi *Ortaokul Bitirme Diploması* (Penyelesaian Diploma SMP). Dalam sistem pendidikan sebelum tahun 2012, siswa bisa memulai studi lanjutan setelah lulus dari delapan tahun sekolah dasar pada usia 14. Di bawah struktur baru, siswa masuk sekolah menengah lanjutan setelah empat tahun sekolah dasar dan empat tahun sekolah menengah. Di bawah kedua struktur, sekolah menengah atas berlangsung empat tahun (kelas 9 sampai 12). Dalam era setelah tahun 2012, sekolah menengah atas adalah wajib. Sebelum tahun akademik 2005-2006, sekolah menengah atas berjalan selama tiga tahun (kelas 9 sampai 11). Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, siswa dapat belajar di sebuah sekolah tinggi umum, teknik atau kejuruan. Beberapa sekolah tinggi memiliki satu tahun tambahan kelas persiapan dalam bahasa asing.³⁴

³³ Sachi Hatakenaka, *Higher Education in Turkey for 21st Century: Size and Composition*, (Turkey, 2006), hlm. 10.

³⁴ Nick Clark (eds), "Education in Turkey." WENR (*World Education News and Reviews*). 2012. <http://wenr.wes.org>. [29 Mei 2015]

Pada tabel di bawah ini, semua kurikulum mengacu pada jam kelas mingguan. Ada beberapa materi yang ditandai dengan dua angka pada materi pilihan, diperuntukkan bagi siswa yang tidak berkonsentrasi dalam bidang tertentu, dan yang kedua bagi siswa dengan konsentrasi tertentu. Secara keseluruhan, siswa menghabiskan 30 jam seminggu di kelas tanpa konsentrasi yang spesifik. Mereka diminta untuk menyelesaikan 30 kredit per tahun untuk lulus.

Tabel 8. Kurikulum Umum Sekolah Menengah Atas di Turki

General Academic High School Weekly Curriculum						
Course Categories	Courses	Grade 9	Grade 10	Grade 11	Grade 12	
Common Courses	Language and Expression	2	2	2	2	
	Turkish Literature	3	3	3	3	
	Religion and Ethics	1	1	1	1	
	History	-	-	-	-	
	History of Turkish Revolution and Kemalism	2	2	2	-	
	Geography	2	-	-	-	
	Mathematics	4	-	-	-	
	Geometry	2	-	-	-	
	Physics	2	-	-	-	
	Chemistry	2	-	-	-	
	Biology	2	-	-	-	
	Health	1	-	-	-	
	Philosophy	-	-	2	-	
	Foreign Language	3	2	2	2	
	Physical Education	2	2	2	2	
	Visual Arts/Music	1	1	1	1	
	National Security	-	1	-	-	
	Traffic and First Aid	-	-	-	1	
		Total	29	16	15	12

Elective Courses	Language and Expression	-	(2)	(2)(3)	(2)(3)
	Turkish Literature	-	(1)	(1)	(1)
	Mathematics	-	(2)(4)	(2)(4)	(2)(4)
	Geometry	-	(1)(2)	(2)(3)	(1)(2)
	Physics	-	(2)(3)	(2)(4)	(2)(3)
	Chemistry	-	(2)(3)	(2)(4)	(2)(3)
	Biology	-	(2)(3)	(2)(4)	(2)(3)
	History	-	(2)	(2)(4)	-
	Modern Turkish and World History	-	-	-	(2)(4)
	Geography	-	(2)	(2)(4)	(2)(4)
	Psychology	-	(2)	-	-
	Sociology	-	-	(2)	-
	Logic	-	-	-	(2)
	Foreign Language	-	(2)(4)	(2)(4)	(2)(4)
	Second Foreign Language	-	(2)(4)	(2)(4)	(2)(4)
Other Elective Course	-	(1)	(1)	(2)	
Total	-	13	14	17	
Counseling and Guidance	1	1	1	1	
Total Hours	30	30	30	30	

Sumber: Ministry of National Education

Untuk skala penilaian yang disetujui di Turki, pada tingkat sekolah menengah, sebagian besar sekolah menggunakan angka dari 1 sampai 5. Pemberian nilai pada pendidikan menengah di Turki cukup ketat. Angka 4 dan 5 sama-sama akan mendapatkan nilai A dan biasanya angka 5 sangat jarang diberikan untuk siswa di sekolah.

Simpulan

Silang sengkabut perpolitikan yang tidak berkesudahan di Mesir sangat mempengaruhi kebijakan pada dunia pendidikan. Lebih-lebih para pemegang kekuasaan tertinggi di sana belum sepenuhnya memiliki perhatian yang besar, meskipun belakang ini ada beberapa perbaikan dilakukan termasuk pendirian universitas baru sejak kepemimpinan Mubarak runtuh, akan tetapi belum benar-benar mendorong kemajuan lembaga pendidikan di sana. Bukan hanya mahasiswa yang kemudian lebih tertarik untuk mengenyam pendidikan di luar negeri, akan tetapi banyak kalangan akademisi di sana yang lebih memilih karir di luar negeri.

Para akademisi masih mengeluhkan belum adanya peningkatan gaji meskipun anggaran di bidang pendidikan mulai ditingkatkan. Di antara beberapa negara yang menjadi tujuan mahasiswa dari Mesir untuk melanjutkan studi adalah Amerika Serikat, Britania Raya dan Irlandia Utara (UK), Jerman, Prancis, Kanada dan Arab Saudi. Jenjang pendidikan di Mesir mengikuti pola enam tahun sekolah dasar, tiga tahun sekolah menengah dan tiga tahun sekolah menengah atas, selanjutnya baru bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Begitu pun dengan negara Iran, banyak mahasiswa dalam negeri yang memilih melanjutkan studi perguruan tinggi di negara lain, dengan harapan untuk mendapatkan sarana pendidikan yang lebih baik, ditambah lagi apabila mahasiswanya lulus dari universitas terkenal di luar negeri, maka akan mendapatkan nilai lebih di negaranya ketika kembali. Di antara beberapa negara tujuan mahasiswa dari Iran dengan jumlah yang cukup besar adalah Malaysia, Amerika Serikat, Britania Raya dan Irlandia Utara (UK), Jerman, Kanada dan Ukraina. Belakangan, karena hubungan luar negeri antara Iran dan Amerika Serikat kurang baik, akhirnya berdampak juga terhadap besarnya minat mahasiswa Iran untuk kuliah di negara Paman Sam tersebut. Di Iran, pendidikan dasar berlangsung delapan tahun, lima tahun untuk tingkat pertama dan tiga tahun untuk tingkat lanjutan. Tingkat partisipasi pendidikan di Iran tergolong relatif tinggi dengan jumlah lebih banyak kaum perempuan dibanding laki-laki, begitupun dengan tingkat kelulusan yang didominasi oleh siswa perempuan. Setelah lulus dari pendidikan dasar maka siswa berhak melanjutkan ke sekolah menengah. Sebelum menempuh perguruan tinggi, para siswa diwajibkan menempuh pendidikan persiapan menuju perguruan tinggi dengan kembali mempelajari beberapa mata pelajaran.

Sedangkan di Turki, hampir mirip dengan di negara Mesir, perebutan kekuasaan kerap terjadi antara yang setuju sistem kenegaraan yang sekuler dengan kubu yang konservatif agama. Sehingga pendidikan tidak luput dari ajang pertempuran politik yang melibatkan aparat militer dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Setidaknya perdebatan ini cukup memanas dalam 20 tahun terakhir. Kebijakan pemerintah terbaru adalah menjadikan wajib belajar yang semula delapan tahun, menjadi dua belas tahun dengan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah dan tingkat sekolah tinggi. Beberapa negara yang menjadi tujuan mahasiswa dari Turki untuk melanjutkan sekolah di perguruan tinggi yaitu negara Jerman, Amerika Serikat, Britania Raya dan Irlandia Utara (UK), Austria dan Prancis. Di samping banyak mahasiswa Turki yang belajar di luar negaranya, negara Turki sendiri menjadi salah satu tempat tujuan mahasiswa internasional, pada tahun 2010-2011 setidaknya ada lebih dari tiga puluh satu ribu mahasiswa yang sekolah di sana, hal tersebut merupakan peningkatan lebih dari 100 persen dibanding pada tahun 2005-2006.

Rujukan

- Arasteh, Reza, *Education and Social Awakening in Iran*, Leiden: E.J. Brill, 1962.
- Clark, Nick (eds), "Education in Egypt." WENR *World Education News and Reviews*. 2013. <http://wenr.wes.org>, [29 Mei 2015]
- Clark, Nick (eds), "Education in Iran." WENR *World Education News and Reviews*. 2013. <http://wenr.wes.org>, [29 Mei 2015]
- Clark, Nick (eds), "Education in Turkey." WENR (*World Education News and Reviews*). 2012. <http://wenr.wes.org>, [29 Mei 2015]
- Crossley, Michael and Keith Watson, *Comparative and International Research in Education; Globalisation, Context and Difference*, London and New York: RoutledgeFalmer, 2003.
- EP-Nuffic, *Educational System Iran*, Version 2, Januari 2015.
- Green, Andy (eds.), *Education, Equality and Social Cohesion; A Comparative Analysis*, New York: Palgrave Macmillan, 2006.
- Hatakenaka, Sachi, *Higher Education in Turkey for 21st Century: Size and Composition*, Turkey, 2006.
- Homes, Brian, *Conceptual Analysis and Empirical Enquiry*, dalam Reginald Edwards, *Relevant Methods in Comparative Education*, Jerman: UNESCO Institute for Education, 1973.
- Institute of International Education <http://www.iie.org>, [31 Mei 2015]
- Kandel, I. K., *Comparative Education as A Subject of Professional Study*, New York City: Bureau of Publication, 1930.
- Kandel, I. L., *The Methodology of Comparative Education*, New York: Springer, 1959.
- King, Edmund J., *The Purpose of Comparative Education* dalam Michael Crossley, *Changing Educational Contexts, Issues and Identities; 40 Years of Comparative Education*, London and New York: Routledge, 2007.
- Larsen, Marianne A., *New Thinking in Comparative Education; An Introduction* dalam Marianne A. Larsen (ed.) *New Thinking in Comparative Education*, Taipe: Sense Publishers, 2010.

- Little, Angela W., *International and Comparative Education: What's in A Name?*, France: Routledge, 2010.
- Loveluck, Louisa, *Education in Egypt; Key Challenges*, London: Chatham House, 2012.
- Mirzadeh, Hamid, *Islamic Azad Univeristy*, Iran: Medical Sciences Division, 2014.
- Muskens, Wolfgang dan Anke Hanft, *Design of the International Comparative Study* dalam Michaela Knust, *Continuing Higher Education and Lifelong Learning: An International Comparative Study on Structures, Organisation and Provisions*, London dan New York: Springer, 2009.
- OECD, *Education Policy Outlook: Turkey*, Turkey, 2013.
- Richards, Alan, *Higher Education in Egypt*, The World Bank, Population and Human Resources Department, 1992.
- Shahvar, Soli, *The Forgotten Schools; The Baha'is and Modern Education in Iran, 1899-1934*, London and New York: I.B. Tauris Publishers, 2009.
- Stromquist, Nelly P., *Comparative and International Education: A Journey Toward Equality and Equity*, New York: Spring, 2005.
- UNESCO Institute for Statistics, *Global Education Digest 2010; Comparing Education Statistic Across The World*, Canada: UNESCO Institute for Statistics, 2010.
- UNESCO Institute for Statistics, *Global Education Digest 2011; Comparing Education Statistics Across The World*, Canada: UNESCO Institute for Statistics, 2011.
- UNESCO Institute for Statistics, *Global Education Digest 2012; Comparing Education Statistics Across The World*, Canada: UNESCO Institute for Statistics, 2012.
- United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan International Bureal of Education, *World Data on Education*, VII Ed. 2010/2011.
- UNESCO Institute for Statistics 2010 <http://www.uis.unesco.org>, [31 Mei 2015]
- Wings, William A., *Education as An Investment in Turkey's Human Capital: A Work in Progress*, Eurasian Journal of Businnes and Economics 2012.

Wiseman, Alexander W., *The Institutionalization of Mass Schooling as Marginalization or Opportunity in Islamic Nation-States* dalam Joseph Zajda (eds.), *Education and Social Inequality in The Global Culture*, New York: Springer, 2008.

Yashin, Yael Navaro, *Faces of The State; Secularism and Public Life in Turkey*, United Kingdom: Princeton University Press, 2002.

Yildirim, Ali dan Hasan Simsek, *A Qualitative Assessment of The Curriculum Development Process at Secondary Vocational Schools in Turkey*, Turkey: Middle East Technical University, 1997.

Kurikulum Komunikasi dan Jurnalistik Dakwah Perbandingan dan Rekomendasi Pembaruan

Masduki

Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
e-mail: masduki@hotmail.com

DOI : 10.14421/jpi.2015.41.95-114

Diterima: 17 Maret 2015

Direvisi: 24 April 2015

Disetujui: 16 Juni 2015

Abstract

This paper attempts to elaborate current existence of Islamic Communication curriculum, particularly Dakwah Journalism as one of the Islamic communication education pillars, either on state or private Islamic universities in Indonesia. Departing from an explanation of empirical phenomenon of the technological revolution and globalization of communication that brought significant impacts on the communication industry and social-global behavior, this paper wants to criticize backwardness content of Dakwah Journalism curriculum that failed to adopt both dynamics as genial formulation to form new scholar competency of Islamic Communications in modern world.

The curriculum focus for journalism ethical values only shows another fact that there is a weakness on scientific exploration of the journalism science in Islamic tradition. This paper will be concluded with my analysis for the differences of vision and mission addressed by Islamic Communication Departments (KPI) in PTAI that aggravate above conditions. This problem represents only one example of the complexity of the problems in the PTAI teaching system amidst of migration policy from IAIN into State Islamic University (UIN). To establish competitive graduates with holistic competency, it is necessary for PTAI managers to develop new framework, vision, mission and curriculum content at large. The initiatives can be started by changing Dakwah Journalism curriculum.

Keywords: *Islamic Communications, Curriculum, PTAI, Dakwah Journalism*

Abstrak

Tulisan ini mencoba memotret keberadaan kurikulum Komunikasi Penyiaran Islam khususnya Jurnalistik Dakwah sebagai salah satu pilar pendidikan Komunikasi pada perguruan tinggi Islam negeri dan swasta (PTAI) di Indonesia. Berangkat dari fenomena empirik revolusi teknologi dan globalisasi komunikasi yang berdampak luas terhadap industri komunikasi dan perilaku sosial di masyarakat, tulisan ini ingin mengkritisi ketertinggalan muatan isi pada kurikulum Jurnalistik Dakwah yang seharusnya mengadopsi kedua dinamika tersebut sebagai formulasi genial untuk melahirkan sarjana Komunikasi Islam yang kompeten.

Dominasi muatan isi kurikulum pada aspek tata nilai etis dalam Komunikasi Jurnalistik menunjukkan fakta lain masih lemahnya eksplorasi khazanah keilmuan jurnalistik dalam Islam. Tulisan ini diakhiri uraian perbandingan visi dan misi pada Jurusan KPI di PTAI yang saling bertolakbelakang dan memperparah kondisi diatas. Problem ini hanya mewakili satu contoh dari kompleksitas problematika sistem pengajaran di PTAI pasca kebijakan migrasi IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Jika ingin melahirkan lulusan yang kompetitif dengan standar kompetensi yang holistik, maka perlu perubahan kebijakan yang simultan dari pengelola PTAI dalam kerangka integrasi interkoneksi terhadap visi, misi dan muatan kurikulum untuk Jurusan KPI yang bisa dimulai dari perkuliahan Jurnalistik Dakwah.

Kata Kunci: *Komunikasi Islam, Kurikulum, PTAI, Jurnalistik Dakwah*

Pendahuluan

Salah satu problematika serius dunia pendidikan di Indonesia khususnya manajemen perguruan tinggi Islam adalah bagaimana merespon secara kreatif perkembangan teknologi mutakhir ke dalam muatan kurikulum. Model kurikulum pada perguruan tinggi dunia barat yang menempati ranking 100 besar dunia cenderung cepat dan fleksibel mengintegrasikan ikon-ikon modernitas yang bertumpu pada kekuatan inovasi teknologi, sedangkan perguruan tinggi di Indonesia termasuk perguruan tinggi Islam, masih berkuat pada penyemaian nilai-nilai kultural dan karakter yang berpijak pada kekuatan makro transendental-keagamaan. Tradisi membangun keterpaduan antara visi, misi dan muatan pada kurikulum sebagai fondasi untuk melahirkan *output* dan *outcome* kompetensi lulusan yang disertai pengembangan metodologi berpikir kritis-holistik belum mampu diadopsi pengelola pendidikan tinggi di Indonesia.

Kurikulum disini bisa dilihat dalam dua pendekatan. Pertama, pendekatan perencanaan sebagai usaha menyeluruh dan responsif dari pengelola perguruan

tinggi Islam dalam membimbing mahasiswa memperoleh refleksi dan aksi intelektual dari mata kuliah yang ditentukan. Kedua, pendekatan empirik, suatu pengalaman pembelajaran yang terarah dan terstruktur, melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman dibawah pengawasan pengajar berkompoten sehingga mahasiswa termotivasi terus belajar. Kurikulum menuntut kombinasi antara konstruksi pengetahuan, pengalaman dan aksi-refleksi kritis terhadap fenomena empirik yang sejalan dengan dinamika perubahan budaya.

Tulisan ini akan fokus menguraikan perkembangan teknologi komunikasi, jurnalistik dan industri media selaku subjek pembelajaran penting dalam disiplin ilmu Komunikasi di seluruh dunia dimana pengkajian atas ketiganya bersifat holistik. Dari perspektif teknologi, komunikasi adalah alat atau peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses dan saling tukar informasi dengan individu yang lain.¹ Definisi ini menggambarkan bahwa teknologi komunikasi tidak dengan sendirinya lahir, tetapi benda yang dibentuk sebuah struktur ekonomi, sosial dan politik, membawa nilai-nilai yang berasal dari struktur ekonomi, sosial dan politik tertentu yang muaranya meningkatkan kemampuan indera manusia.

Teknologi Komunikasi dan Informasi digunakan oleh manusia, pada saat yang sama ia memerlukan manusia, suatu relasi mutualisme yang kompleks. Eleuze Guattari menyebut relasi tersebut sebagai jaringan *Rizhomatic*, yaitu jaringan percabangan yang sedemikian rumit sehingga mana sebab dan mana akibat menjadi tidak jelas lagi. Tiga bidang besar kehidupan modern, yaitu sains, teknologi, dan budaya bukan sebagai entitas terpisah. Sains dibentuk oleh teknologi dan budaya; teknologi dibentuk oleh kultur dan sains; kultur dibentuk oleh sains dan teknologi. Masing-masing saling membentuk dan dibentuk. Jika kultur sudah menjadi tekno-kultur, maka sains menjadi tekno-sains, dan seterusnya.² Studi terkait relasi yang kompleks ini akan memperkuat basis material kajian Komunikasi Jurnalistik sebagai industri global dalam transaksi berita dan pengaruh politik-ekonomi yang terkait kontrol teknologi dan kepemilikan media (*media and technology ownership and control*).

Studi Komunikasi Jurnalistik tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi dan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) pada PTAI tidak dapat mengabaikan dimensi ini. Secara khusus tulisan ini akan mengupas mata kuliah jurnalistik dakwah sebagai contoh nyata problem lemahnya adopsi kurikulum terhadap modernitas teknologi dan dampaknya terhadap revolusi interaksi manusia.

¹ Rogers, Everett M. *Communication Technology: The New Media in Society*. (New York: The Free Press, 1986), hlm. 2.

² Yuliar, Soni. dkk (ed). *Memotret Telematika Indonesia, Menyongsong Masyarakat Informasi Nusantara*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 266

Teknologi mengubah pengalaman dan pemahaman kerja profesional. Konsepsi tentang model *e-government* hingga *e-business* banyak dipengaruhi dan dibentuk oleh teknologi. Pelayanan birokrasi pemerintah dan partisipasi politik dipengaruhi tidak hanya oleh tayangan kampanye dan iklan politik televisi tetapi dua formula teknologi terkini: media baru dan media sosial. Perilaku sosial baru terbentuk lewat telepon, *e-mail* dan *chatting*. Kepemilikan benda teknologi juga membangun citra diri baru manusia: mobil yang dimiliki, merk perangkat *home theater* yang dimiliki, gadget terbaru apa yang digunakan.

Secara khusus, tulisan menyajikan dan menawarkan model kurikulum Jurnalisme yang dielaborasi tim UNESCO, badan internasional untuk pendidikan dan kebudayaan dibawah PBB yang dapat dijadikan inspirasi program studi Ilmu Komunikasi atau program studi Komunikasi Penyiaran Islam pada UIN/IAIN dan perguruan tinggi Islam swasta (PTIS) secara umum. Pada dasarnya, disain kurikulum Ilmu Komunikasi perguruan tinggi sebagaimana disiplin ilmu lain di seluruh dunia, memiliki dua tujuan yang saling melengkapi: membentuk karakter pemikir dan membangun perspektif tentang jati diri manusia intelektual pada peserta didik disertai sikap kritis atas situasi sosial. Di sisi lain, sarjana lulusan Komunikasi diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan nyata industrialisasi dan globalisasi media, masyarakat dan berkiprah membangun inovasi yang mendorong kemampuan praksis Komunikasi.

Teknologi Baru dan Globalisasi

Revolusi sektor teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (*information and communication technology*) telah membangun peta baru interaksi manusia secara global (*new world information order*) dan membentuk lingkungan yang digambarkan pemikir komunikasi keturunan Perancis Marshall McLuhan dalam Genosko sebagai kampung global (*global village*).³ Secara historis, Irving Fang mencatat ada 6 bentuk revolusi informasi. Pertama, revolusi media tulisan yang dimulai di Yunani abad ke 6. Kedua, revolusi cetak di Eropa pada pertengahan abad ke 15. Ketiga, revolusi media massadi Eropa Barat dan Amerika pertengahan abad ke 19. Keempat, revolusi dunia hiburan pada akhir abad ke 19. Kelima, revolusi teknologi kreasi layanan komunikasi dalam rumah seperti home cinema, broadcasting, mail dll. Keenam, revolusi informasi yang bertumpu pada teknologi *mobile*, ditandai hadirnya teknologi satelit, internet, produksi multimedia dan bergemanya media sosial.⁴

³ Gary Genosko, *McLuhan and Baudrillard, the Masters of Implosion*. (London: Routledge, 1999), hlm. 10

⁴ Irving Fang, *A History of Mass Communication*, Boston USA: Focal Press, 1997, hlm. xvii-xviii

Teknologi bergerak *smartphone* yang sangat populer di Indonesia merupakan inovasi lanjutan dari telepon kabel (*wireless telephone*) dengan keunggulan sebagai media interaktif dan saat ini menjadi pusat segala bentuk jejaring dan koneksi. Media-media analog seperti televisi layar lebar mengalami transformasi bentuk fisik, sifat atau karakter layanannya. Jika sebelum ini penonton televisi bersikap pasif, dalam arti hanya bisa “pasrah” memilih saluran yang tersedia, kini mereka bisa bersikap proaktif. Munculnya IPTV (*internet protocol television*) atau televisi internet sejak tahun 2006 menandai integrasi TV analog dengan internet.⁵ IPTV berkembang di Eropa dan Amerika yang memiliki infrastruktur komunikasi pita lebar. Di dua kawasan itu sudah 4 juta rumah tangga tersambung IPTV, dan diperkirakan jumlah pelanggan akan mencapai 50 juta di tahun 2015. Di Indonesia, hambatan struktural bagi penyelenggaraan IPTV adalah belum merata dan tercukupinya saluran komunikasi *broadband*.

Globalisasi media komunikasi dan penetrasi ICT yang agresif merombak pola relasi sosial politik antarbangsa dan manusia dan pada akhirnya menuntut adaptasi sektor pendidikan sebagai pembentuk karakter para aktor pelaku/subjek dalam dinamika kebudayaan. Pertumbuhan ICT yang berpusat pada internet dan terjadinya konvergensi teknologi ditandai lahirnya beragam media baru (*new media*). Relevansi program studi/jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yang masih merujuk kategorisasi format media lama atau media analog seperti cetak dan elektronik dipertanyakan. Perkembangan mutakhir di atas menuntut pembaruan kurikulum pendidikan tinggi Ilmu Komunikasi pada perguruan tinggi di Indonesia termasuk perguruan tinggi agama Islam (PTAI). Kegagalan akademisi dan pengelola merespon perubahan eksternal pemicu tertinggalnya pendidikan tinggi Islam dalam menghasilkan lulusan yang kompetitif.

Gejala globalisasi komunikasi tidak hanya bertendensi ingin menjadikan dunia sebagai pasar tunggal tetapi dalam kerangka ini, menjadikan seluruh entitas media komunikasi sebagai kekayaan kapital dan cultural pada kepemilikan dan kontrol terpusat. Globalisasi komunikasi umumnya berupa pergerakan bebas gagasan, informasi, mobilitas tenaga kerja, produk dan jasa di tingkat global yang melampaui batas-batas teritorial antarnegara dan keterikatan kultural (*interconnectiveness*) antar etnik. Globalisasi di sektor teknologi komunikasi tidak hanya ditandai maraknya program televisi asing untuk ditonton oleh publik Indonesia, tapi eksistensi profesional media berstandar global dan hadirnya modal asing dalam industri media di Indonesia seperti pembelian sebagian saham ANTV oleh Star TV tahun 2000-an, bagian dari imperium media News Corp milik taipan asal Australia

⁵ Satrio Arismunandar, Masa Depan Profesi Komunikasi di dalam Kurikulum Pendidikan Komunikasi, (Paper Seminar Jurusan Ilmu Komunikasi, FIKOM, Universitas Kristen Petra, 10 Maret 2007 Surabaya), hlm. 3

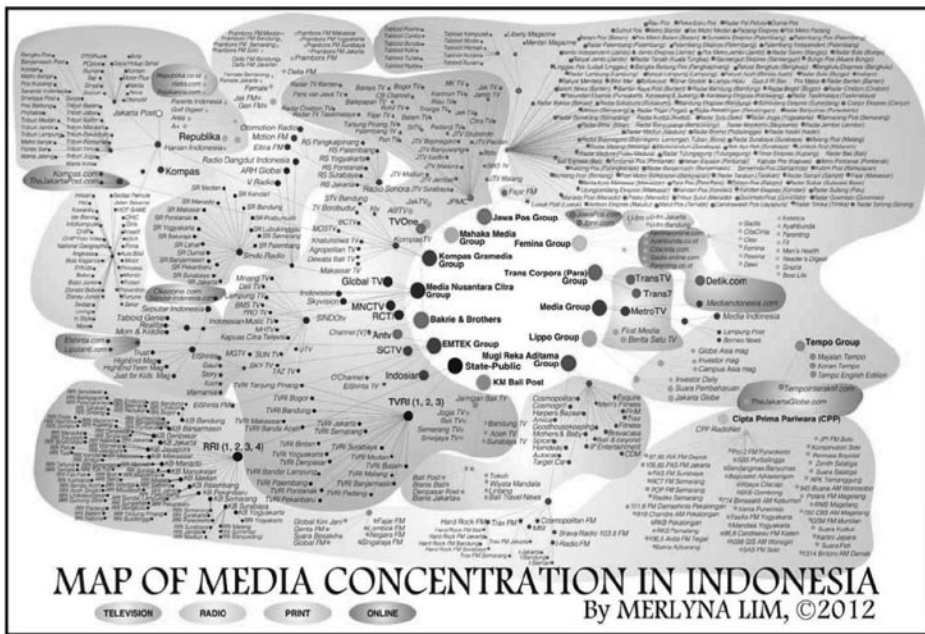
Rupert Murdoch. Juga aliansi televisi lokal dengan jaringan MTV dan pembelian brand CNN oleh grup TransTV tahun 2014 untuk dikembangkan menjadi CNN Indonesia. Tekanan globalisasi kepemilikan dan brand (*global ownership and brand*) ini semakin memicu kompetisi di dalam arsitektur media modern.

Secara teoritis terdapat dua model dalam pengorganisasian institusi media. Pertama, pendekatan pasar bebas liberal. Media massa dikelola penuh oleh sektor swasta (*private enterprise*). Kedua, pendekatan negara, yakni institusi media diorganisir oleh negara. Di samping itu, ada juga pendekatan ketiga yakni pengorganisasian institusi media yang tidak berdasarkan mekanisme pasar dan pengelolaan negara. Ini sering disebut sebagai pelayanan publik (*public service*). Model ini bertujuan menghindari kelemahan-kelemahan pada model pengorganisasian dengan pendekatan pasar dan negara. Keuangan untuk pengelolaan model ketiga berasal dari pajak yang dipungut pemerintah, tetapi pemerintah secara relatif tidak berhak campur tangan dalam pengelolaan institusi media tersebut.⁶ Tekanan globalisasi dengan agenda utama privatisasi media milik negara merubah tata kelola media di Indonesia. Misalnya kemunculan kebijakan merubah TVRI menjadi badan usaha milik negara (BUMN) yang secara diametral bertentangan dengan prinsip institusi itu sebagai lembaga penyiaran publik.

Pasca globalisasi, sedikitnya dua sisi dalam perkembangan media dan komunikasi perlu mendapat perhatian di Indonesia. Pertama, revolusi perangkat keras (*hardware*) atau produk teknologi informasi dan komunikasi dari analog ke digital. Segala bentuk teknologi bergerak (*mobile technology*) yang saat ini berkembang dalam masyarakat telah menjelma menjadi medium baru penyampaian pesan. Kedua, pergeseran struktur dan mekanisme kerja dalam tata kelola industri media yang membawa perubahan manajemen institusi media. Perubahan ini terjadi sebagai konsekuensi arus kapitalisme dan ekonomi liberal yang ditandai konvergensi dan monopoli kepemilikan media secara global. Konsentrasi kepemilikan media di Indonesia bahkan di seluruh dunia menurut Lim dan Nugroho adalah konsekuensi dari kapitalisme media yang kemudian diboncengi pula oleh kepentingan individual pemilik media untuk meraih kekuasaan politik.⁷ Fenomena kepemilikan media yang memusat di Indonesia digambarkan secara tepat oleh Merlyna Lim berikut ini:

⁶ Ngurah Putra, Gusti, *Demokrasi Dalam Komunikasi Terprivatisasi*. (Jurnal ISKI, No. 6 November 2001), hlm. 89.

⁷ Nugroho, Yanuar, dkk, *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia*. (Jakarta: CIPG-Ford Foundation, 2012), hlm.4-5



(Sumber: Lim, 2002)⁸

Di sektor SDM komunikasi jurnalistik, revolusi ICT telah merubah habitus profesional para pelaku industri ini. Internet dan media sosial seperti Facebook, Twitter dan Youtube menghadirkan ruang ekspresi bagi bentuk jurnalisme baru yang berpusat pada konsep jurnalisme warga (*citizen journalism*). Dengan biaya operasional yang relatif murah, setiap pengguna internet bisamenciptakan dan mengelola media tersendiri. Mereka dapat melakukan semua fungsi jurnalistik secara individual, dari merencanakan liputan, melakukan reportase, menulis, mengedit berita hingga memuatnya di berbagai situs berita gratis. Berkembang numenkatur baru kajian jurnalistik, seperti *mobile journalism* dan *hashtag journalism*.

Setiap orang yang memiliki akses terhadap internet bisa menjadi jurnalis meski *output* kualitas jurnalistik mereka memicu kontroversi. Jurnalisme warga ini pernah populer saat berita pertama soal bencana Tsunami di Aceh, pada Desember 2005 yang justru muncul dan diketahui publik lewat blog pribadi di Internet. Kontribusi jurnalisme warga sangat membantu dalam tata kelola lalu lintas di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kehadiran „jurnalisme warga“ ini juga telah menjadi tantangan bagi jenis “jurnalisme analog” yang diterapkan di media-media konvensional seperti: surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Pada tahapan ini,

⁸ Lim, Merlyna, *The League of Thirteen: Media concentration in Indonesia*, http://www.public.asu.edu/~m4/les/Lim_IndoMediaOwnership_2012.pdf (diakses tanggal 15 Mei 2014), hlm. 2

muncul gugatan terhadap kompetensi lulusan dari program studi Ilmu Komunikasi atau sekolah tinggi jurnalistik. Kinerja „jurnalisme warga“ yang bisa dikelola oleh semua orang dari berbagai disiplin ilmu menguatkan perlunya penajaman terhadap kompetensi lulusan.

Saat ini kita bisa menyaksikan fenomena yang disebut Pavlik (1996: 1-5) sebagai konvergensi empat fungsi utama teknologi: produksi (*production*), distribusi (*distribution*), menampilkan (*display*), dan penyimpanan (*storage*) dalam satu platform media yang dikenal dengan telepon seluler pintar. Fenomena penggunaan teknologi ini mempercepat terbentuknya masyarakat informasi global, masyarakat yang menjadikan informasi sebagai komoditas yang bernilai ekonomis; berhubungan dengan masyarakat lain dalam sistem komunikasi global; dan masyarakat yang mengakses informasi *superhighway*.⁹

Masyarakat terdampak ICT bercirikan tiga hal, yaitu demassifikasi, adaptasi diri, terjadi peningkatan interaksi. Terjadi perubahan kontrol pesan. Jika pada massifikasi pengontrol pesan adalah produser informasi, seperti penerbit koran dan pengelola TV, maka dalam demassifikasi pengontrol pesan adalah khalayak. Mobilitas komunikasi lebih mudah, cepat, ada kebebasan memilih informasi dan mitra transaksi informasi. Di sisi lain, pengguna teknologi tidak berarti dapat bebas memakainya, ia harus menyesuaikan diri dengan berbagai standar komunitas, mulai dari petunjuk teknis pemakaian alat, nilai-nilai kemanusiaan hingga standar makna pesan. Dalam komunikasi interaktif menggunakan internet dan media sosial misalnya dikenal istilah netiket (etiket berinternet). Dalam jurnalistik dikenal etika berita media siber.

Akibat tekanan kompetisi bisnis berskala global, serta dorongan meningkatkan efisiensi operasional dengan modus menurunkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan, dalam 10 tahun terakhir, muncul aksi korporasi berupamerger atau aliansi antara berbagai institusi media, khususnya di mediatelevisi siaran di Indonesia. Diawali dari mengelompoknya RCTI, TPI, dan Global TV di bawah payung MNC (PT. Media Nusantara Citra), kemudian disusul PT. Bakrie Brothers (Grup Bakrie) yang membawahi dua stasiun ANTV dan TVOne. Kelompok ketiga dikendalikan Chairul Tanjung dengan payung PT. Trans Corpora (Grup Para) yang mengakuisisi TV7 dan menggabungkan menjadi Trans TV dan Trans-7. Konglomerasi media juga mendorong percepatan konvergensi antar platform media dan integrasi ruang pemberitaan (*newsroom*) serta praktek monetisasi informasi melalui modus: memanfaatkan materi-materi berita *instant* yang sama untuk disebar ke berbagai jenis media berbeda dalam satu grup.

⁹ Abrar, Ana Nahdya. *Teknologi Komunikasi: Perspektif Ilmu Komunikasi*. (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 12

Sebuah grup media dapat mengelola produk media surat kabar, majalah, radio, televisi dan situs Internet sekaligus melalui ruang produksi terpusat. Model produksi ini mengurangi biaya operasi dan meningkatkan keuntungan, karena berita karya seorang jurnalis profesional disatu media bisa dimanfaatkan untuk media-media lain dalam satu grup media yang sama. Praktek yang sudah lama dilakukan di jaringan surat kabar Grup Jawa Pos. Konvergensi teknologi dalam produksi dan distribusi ini makin menempatkan konten yang berkualitas sebagai produk utama sekaligus menuntut peningkatan kompetensi jurnalis.

Berangkat dari fenomena konglomerasi dan integrasi *newsroom* ini, maka kompetensi jurnalis lulusan jurusan Ilmu Komunikasi atau alumni manapun yang memilih profesi jurnalistik memerlukan penajaman. Pekerja yang dulu disebut kuli tinta kini berubah, karena dituntut untuk memiliki kemampuan membuat berita dengan format yang berbeda-beda. Karyanya tidak lagi akan dimuat di satu jenis media, tetapi pada jenis media lain pada waktu bersamaan. Di sisi lain, konvergensi ICT membukapeluang baru bisnis informasi dan hiburan yang dapat dikerjakan secara individual diluar korporasi media dan menjual kontennya secara independen. Yaitu berupa penyediaan data multimedia atau *news agency/provider*.

Berdasarkan perkembangan teknologi media, pergeseran struktur dan pola operasional institusi media serta tekanan kompetisi yang ketat di tingkat lokal dan global, jenis pelaku media yang dibutuhkan bergeser jauh. Kompetensi lulusan bermodal pemahaman nilai-nilai ideologis, orientasi intelektual dan ketrampilan analog tidak memadai. Pemilahan ketrampilan berdasarkan kategori media cetak, elektronik dan media online sudah tidak relevan. Pembagian pengajaran jurnalistik untuk media cetak, media elektronik, dan media online yang berlaku dalam kurikulum program Ilmu Komunikasi di sejumlah perguruan tinggi umum dan Islam perlu ditinjau ulang dengan memperkenalkan mahasiswa pada perkembangan teknologi multimedia dan tipe jurnalis yang memiliki kompetensi holistik berbasis media sosial. Sampai di tahap ini, kiranya menarik mencermati respon kurikulum khususnya Jurnalistik Dakwah.

Kurikulum Jurnalistik Dakwah

Salah satu rumpun dalam kajian komunikasi yang kamin populer dalam 10 tahun ini adalah komunikasi profetik atau pengintegrasian kajian komunikasi yang bersifat sekuler dengan studi Islam khususnya sifat sifat kenabian. Sebagai ikutannya, kajian jurnalistik selaku salah satu rumpun komunikasi memperkenalkan "Jurnalistik Islami" atau *Jurnalistik dakwah*. Didalamnya terkandung makna dan posisisarjana muslim, yakni wartawan dan penulis beragama Islam yang berkewajiban menjadikan Islam sebagai rujukan etik dan praktis dalam profesinya, baik yang bekerja di media umum maupun media Islam. Jurnalistik dakwah

sudah lebih dari 20 tahun dipelajari di perguruan tinggi Islam negeri dan swasta, sebagai mata kuliah tersendiri maupun materi khusus perkuliahan jurnalistik dasar. Keberadaan mata kuliah ini turut mencerminkan posisi kajian jurnalistik dalam relasinya dengan studi Islam.

Bagaimana akademisi memetakan jurnalistik dakwah? Asep M. Romli mendefinisikan Jurnalisme dakwah sebagai proses pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal yang sarat dengan muatan nilai-nilai Islam.¹⁰ Suf Kasman memberi definisi yang lebih lengkap untuk Jurnalisme dakwah, yaitu proses meliputi, mengolah, dan menyebarkan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam dengan mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik dan norma-norma yang bersumber dari AL-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.¹¹ Pendapat ini sejalan dengan rumusan beberapa akademisi lain bahwa jurnalisme dakwah adalah proses meliputi, mengolah, dan menyebarkan peristiwa yang terkait umat dan ajaran Islam dengan mengemban misi *amar makruf nahi munkar* sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. 3:104.

Dalam konteks profesi jurnalisme, wartawan muslim dilihat sebagai sosok juru dakwah (da'i) di bidang pers, yakni mengemban *da'wah bil qalam*. Secara spiritual, jurnalis adalah khalifah (wakil) Allah di media massa dengan memperjuangkan tegaknya nilai-nilai, norma, etika, dan syariat Islam. Ia memiliki tanggung jawab profetik: mengupayakan agar ajaran Islam tetap dan selalu fungsional serta aktual dalam kehidupan, ibarat "penyambung lidah" para nabi dan ulama. Dalam skala yang lebih luas, jurnalis muslim bukan saja berarti para wartawan yang beragama Islam tetapi cendekiawan muslim, ulama yang mampu berkarya di media massa. Studi etika dalam jurnalistik dakwah kerap kali merujuk pada keharusan jurnalis memiliki sifat-sifat kenabian, yaitu *Shiddiq, Amanah, Tabligh*, dan *Fathonah*. Penjelasan sifat-sifat tersebut dalam ranah kerja jurnalis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sifat Kenabian bagi Jurnalis Muslim

No	Sifat Nabi	Penjelasan
1	<i>Shiddiq</i>	Perkataan <i>al-shidq</i> mengacu kepada pengertian jujur dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Dalam konteks jurnalistik <i>shiddiq</i> adalah menginformasikan sesuatu yang benar dan membela serta menegakkan kebenaran itu. Standar kebenarannya tentu saja kesesuaian dengan ajaran Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah).

¹⁰ Asep Syamsul Ramli, *Jurnalisme Dakwah, Visi dan Misi Dakwah bil Qalam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 8

¹¹ Suf Kasman, *Jurnalisme Universal*. (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 10

No	Sifat Nabi	Penjelasan
2	<i>Amanah</i>	Artinya terpercaya, dapat dipercaya, karenanya tidak boleh berdusta, merekayasa, memanipulasi atau mendistorsi fakta.
3	<i>Tabligh</i>	Artinya menyampaikan, yakni menginformasikan kebenaran, bukan malah memutarbalikkan kebenaran.
4	<i>Fathonah</i>	Artinya cerdas dan berwawasan luas. Jurnalis muslim dituntut mampu menganalisis dan membaca situasi, termasuk membaca apa yang diperlukan umat dengan meneladani kecerdasan Nabi Muhammad SAW (<i>prophetic intelligence</i>)

(Sumber: diadaptasi dari Romli 2003: 38-39)

Studi jurnalisme di perguruan tinggi Islam selama ini cenderung memperkuat pandangan yang menempatkan jurnalisme sebagai profesi yang tidak bebas nilai. Sehingga pengajaran atas aspek yang bertautan dengan ideologi Islam, cara berpikir dan tata nilai serta norma sosial etis ditempatkan sebagai pilar kurikulum. Langkah ini antara lain mengerucut pada tekanan prinsip untuk melaksanakan dua kode etik. Pertama, menyampaikan informasi dengan benar, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, yang merujuk firman Allah QS. Al-Hajj: 30: “Demikianlah (perintah Allah). dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya.... Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”.

Kedua, keharusan jurnalis melakukan riset fakta/cek-ricek. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku berita yang akan ditulis, jurnalis muslim meneliti kebenaran fakta di lapangan dengan informasi awal yang ia peroleh agar tidak terjadi *kidzb*, *ghibah*, *fitnah* dan *namimah*. Merujuk QS. Al-Hujarat 6: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”¹² Diluar beberapa aspek ini, pembelajaran terkait mata kuliah jurnalistik dakwah nyaris serupa dengan mata kuliah jurnalistik umum yang diajarkan untuk seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi.

Studi jurnalistik dakwah diposisikan sebagai bentuk *counter* wacana atasproblem jurnalistik pasca globalisasi dan komersialisasi, yaitu arus informasi yang tidak seimbang dan menempatkan kawasan non-Islam sebagai subyek, penentu “kebenaran” dan selera, sedangkan kawasan Islam sebagai obyek sekaligus penerima

¹² Amir, Mafri, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*. (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 65

selera semata. Media massa Islam (media yang berideologi dan mengambil idiom-wacana Islam) relatif terpinggirkan akibat problem kultural (manajemen pengelolaan media) dan struktural (konspirasi kekuasaan untuk merelokasi ranah ekonomi dan politik dari kelompok Islam). Dominasi media hiburan dan informasi oleh Barat (Amerika dan sekutunya) memunculkan perang psikologis (*psy-war*) yang berakibat pendiskriminasian ummat. Pasca perang dingin, isu Islam sebagai musuh utama dikelola media Barat sebagai amunisi untuk meminggirkan komunitas muslim.

Jurnalistik Dakwah berangkat dari upaya kritik terhadap pendekatan komunikasi model otoritarian dan liberalistic yang tumbuh di dunia sekuler Eropa dan negara-negara komunis. Komunikasi pada dua pendekatan tersebut bersifat *top down*, vertikal, mekanistik dan banyak dipakai rezim kapitalis memanipulasi pesan untuk tujuan dominasi kekuasaan politik. Media dipakai sebagai bentuk doktrinasi akibat pemusatan informasi dan kewenangan pada segelintir media besar yang notabene berpusat di Barat. Jurnalistik Dakwah strategi membangkitkan Islam dari keterpurukan, modal sosial untuk bersikap kritis terhadap media Barat, sekaligus jurnalistik yang bervisi Islam dibayangkan menjadi alternatif metodologis baru bagi jurnalistik yang pluralis. Ahli komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Dedi Jamaludin Malik, dikutip Asep Syamsul Hadi menyebut Jurnalistik Islami sebagai *persade journalism* atau jurnalistik yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu, berupa ajaran Islam.

Mencermati uraian definitif dan orientasi studi jurnalistik dakwah diatas, bisa dimengerti jika terdapat eksplorasi dan pendekatan yang sempit serta normatif terhadap jurnalistik dakwah. Upaya eksplorasi yang belum tuntas terhadap tradisi jurnalistik dalam Islam menempatkan studi Jurnalistik Dakwah bersifat reaktif dan masih berjarak dengan studi jurnalistik pada umumnya. Selanjutnya, pendekatan studi yang fokus pada nilai-nilai ini mengkonfirmasi kritik yang dilontarkan penggagas gerakan integrasi interkoneksi dalam studi Islam, Prof. Amin Abdullah. Menurut Abdullah, pandangan bahwa ilmu keislaman adalah ilmu agama masih kuat di kalangan masyarakat Islam sendiri, sehingga ilmu keislaman bagi mereka adalah ilmu-ilmu agama seperti yang ada di IAIN yaitu Ushuluddin, Dakwah, Syariah, Adab dan Tarbiyah. Sedangkan ilmu-ilmu di luar studi agama termasuk jurnalistik adalah bukan ilmu keislaman.¹³ Selama Islam masih dianggap hanya sebagai agama, bukan kebudayaan, eksplorasi sains dan ICT sebagai bagian dari kebudayaan akan sulit berkembang di perguruan tinggi.

Ibarat gunung es, problematika dalam perumusan kurikulum dan materi

¹³ Abdullah, Amin, *Praksis Paradigma Integrasi Interkoneksi Ilmu dan Transformasi Islamic Studies*, (Paper Seminar Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 22-23 Oktober 2014), hlm. 3-4

ajar Jurnalistik Dakwah adalah contoh temuan atau indikator mikro dari persoalan makro yang sedang terjadi. Pengkajian atas dinamika industri media Islam dan fenomena teknologi baru masih minimal. Fenomena lain terjadi ketika dilakukan elaborasi irisan antara Komunikasi dalam terminologi umum yang berlaku dan dirumuskan oleh akademisi komunikasi dengan kajian Dakwah yang dikembangkan interpretasinya dari rumusan dalam ayat suci Al-Quran.

Jika komunikasi dimaknai sebagai aktifitas penyampaian pesan dengan menggunakan berbagai jenis media pada semua tingkatan sejak individu hingga kolektif (massa), maka dakwah dimaknai sebagai aktifitas menyeru manusia untuk berbuat baik dan menjauhi keburukan. Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan. Dakwah sebagai usaha manusia muslim yang dilakukan dengan sengaja dan berencana, melalui lisan dan tulisan untuk merubah suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat posisinya bersifat pro-pemberdayaan, mengikat dalam kerangka propaganda ajaran agama. Sedangkan komunikasi pada umumnya bersifat bebas nilai dan universal.

Sebagai suatu jalan keluar akademis, penawaran pemberlakuan paradigma integratif dan interkonektif di UIN menjadi sangat penting dan fundamental dalam merumuskan kajian-kajian keislaman, posisi Islam tidak hanya menjadi nilai dasar, tetapi secara sosiologis bertalian dengan berbagai aspek kebudayaan, baik kebudayaan sebagai sistem nilai, produk maupun eksistensi manusia dalam perjalanan hidupnya yang kompleks.

Model Kurikulum UNESCO

Dalam upaya mengatasi kesenjangan kemajuan pendidikan jurnalistik antarnegara dan antar pendidikan tinggi di dunia, UNESCO sebagai badan dunia dibawah PBB pada tahun 2005 merancang model kurikulum pendidikan jurnalistik yang dapat menjadi acuan perguruan tinggi di Indonesia. Kurikulum ini juga sebagai respon atas posisi media di negara-negara berkembang dan demokrasi baru yang tumbuh dengan pesat dan pengakuan yang luas terhadap jurnalistik dalam memajukan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Model UNESCO ini pantas menjadi rujukan karena ruang lingkungannya komprehensif dan memberi ruang kajian merespon dinamika teknologi mutakhir yang disinggung dibagian awal tulisan ini.

Menurut UNESCO, pendidikan jurnalistik harus memberikan kepada para mahasiswa pengetahuan dan kemampuan yang membuat mereka memahami

etika dan praktek profesional yang terbaik, peran jurnalisisme dalam masyarakat, sejarah jurnalisisme, hukum media, dan politik-ekonomi dari media (termasuk kepemilikan, organisasi dan persaingan). Pendidikan jurnalisisme memastikan para mahasiswa dapat mengembangkan dirinya untuk dua hal, yaitu pengetahuan umum dan landasan untuk bidang pengetahuan khusus yang dipilihnya. Pendidikan jurnalisisme mempersiapkan para mahasiswa untuk bisa menyesuaikan diri dengan teknologi dan berbagai perkembangan lain terkait pemberitaan, memastikan bahwa mereka beradaptasi terhadap tugas jurnalistik media baru, termasuk mahir menggunakan bahasa lokal.¹⁴

Model kurikulum pendidikan jurnalistik secara sederhana diorientasikan dalam tiga garis besar, yaitu (1) *Education about Journalism*, (2) *Education for Journalism*, (3) *Education in Journalism*. Selengkapnya bisa dicermati dalam tabel berikut:

No		Teori	Praktik	Output
1	<i>Education about Journalism</i>	Jurnalistik hanya dianggap sebagai objek studi ilmiah. Peserta didik dibekali teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi ilmiah berkaitan dengan perkembangan jurnalistik.	Praktikum tidak dianggap sebagai komponen utama, bahkan cenderung tidak ada praktikum.	Lulusan hanya menguasai kerangka teoritik, sebagai ahli mereka hanya memahami konsep-konsep tentang pers dan jurnalistik, namun tidak memiliki kemampuan praktis.
2	<i>Education for Journalism</i>	Diajarkan berbagai aspek dan landasan teoritis.	Diberikan bekal kemampuan kerja praktis dalam bidang pers dan jurnalistik	Disamping menguasai pengetahuan teoritik, lulusan juga memahami sekaligus terampil melakukan kegiatan praktis di dunia jurnalistik

¹⁴ Tim Kurikulum Jurnalisisme UNESCO, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Jurnalisisme*. (Jakarta: Unesco Jakarta Office, 2007), hlm. 4-6

3 <i>Education in Journalism.</i>	Tidak ada porsi memadai untuk aspek teoritis	Menitikberatkan program pendidikan pada aspek praktis-teknis dalam profesi jurnalistik.	Lulusan memiliki ketrampilan dan kesiapan terjun langsung sebagai praktisi dalam profesi jurnalistik, namun tidak memiliki kerangka berpikir teoritis secara kuat.
-----------------------------------	--	---	--

Menurut UNESCO, ada tiga poros muatan pengetahuan jurnalisme, yakni: (1) poros yang mengajarkan norma-norma, nilai-nilai, perangkat, standar, dan praktek jurnalisme; (2) poros yang menekan pada aspek-aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum dan etika dari praktek jurnalisme, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan (3) poros yang terdiri dari pengetahuan umum dunia dan tantangan intelektual dalam jurnalisme.

Materi ajar yang diberikan dalam poros yang pertama di atas akan membuat mahasiswa siap untuk melaporkan, menulis dan menyunting untuk berbagai jenis media. Bahan tersebut juga mewakili inti dari setiap program yang dirancang untuk menyiapkan mahasiswa berkarir di dunia jurnalisme. Keterampilan profesional jurnalisme melibatkan metode atau cara mengetahui dan berpikir, merekam dan menyajikannya kembali. Di sisi lain, mahasiswa jurnalisme memerlukan pelatihan dalam hal teknis jurnalisme dan kiat-kiat yang diperoleh melalui sebuah pelatihan yang diberikan oleh jurnalis senior. Setiap subyek kuliah harus dilengkapi dengan program magang (atau penempatan kerja) di kantor dan perusahaan berita, dan sekolah-sekolah jurnalisme harus membangun kemitraan dengan lembaga berita setempat.

Bahan pengajaran yang tercakup dalam poros kedua menerangkan dengan lebih rinci konteks kelembagaan dan masyarakat dimana para jurnalis berperan dan menghubungkan praktek jurnalisme dengan kegiatan-kegiatan masyarakat. Studi poros ini akan memperkokoh jatidiri profesional, nilai-nilai dan tujuan-tujuan profesi lewat cara memahami fungsi-fungsi demokratis, serta batasan-batasan moral dan hukum. Bahan pengajaran tersebut juga akan menekankan pada sikap etis dan profesional, serta pengetahuan dan pentingnya jurnalisme yang independen bagi perkembangan demokrasi. Bahan pengajaran yang diberikan pada poros ketiga menempatkan jurnalisme bukan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Ia harus dipadukan dengan pendidikan dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Poros ini

mendorong para pengajar jurnalisme untuk mengarahkan para mahasiswa menuju studi yang memperluas dan memperkaya bahasa kehidupan publik, mendorong pendidik jurnalisme untuk bekerjasama dengan kolega-kolega mereka dari disiplin ilmu lain yang berkaitan.¹⁵

Dalam pandangan tim UNESCO, pendidikan jurnalisme harus memasukkan fondasi yang dirancang untuk mempromosikan keterampilan teknis dan prasyarat intelektual. Fondasi ini adalah kemampuan berpikir kritis, mencakup pula kemampuan untuk memahami, menganalisis, melakukan sintesis, dan menelaah bahan yang tidak dikenal, dan pemahaman dasar mengenai pembuktian dan metodologi riset, kemampuan untuk menulis jernih dan padu, menggunakan gaya naratif, deskriptif, dan metode-metode analitis, pengetahuan tentang politik internasional, ekonomi, budaya, agama, dan lembaga-lembaga sosial, pengetahuan tentang masalah-masalah mutakhir, dan pengetahuan umum tentang sejarah dan geografi.

Problematika Visi Misi Jurusan

Benturan yang terjadi dan dialami oleh model pendidikan dan format kurikulum yang mengkaji ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam di IAIN/UIN belakangan ini antara lain berakar pada belum tuntasnya pemahaman pada aspek paradigmatis yang dianut atas bagaimana sesungguhnya relasi studi Islam dengan studi akademik dan praktek pada disiplin ilmu Komunikasi. Manusia adalah makhluk komunikasi dan dalam Islam dikenal istilah Dakwah sebagai pilar aktifitas komunikasi yang tidak hanya bersumbu pada kepentingan *duniawi*, tetapi *ukhrawi*. Diskursus konsepsi komunikasi di kalangan akademisi komunikasi IAIN/UIN masih menunjukkan perbedaan pandangan terkait kompetensi komunikasi.

Jika mencermati sekilas uraian visi, misi, kompetensi lulusan dan struktur kurikulum yang dimiliki beberapa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di UIN/ IAIN bahkan Universitas Islam swasta di Indonesia, terdapat sedikitnya tiga irisan yang nyaris serupa untuk tidak mengatakan bertubrukan, terutama dengan Jurusan Ilmu Komunikasi di kampus yang sama. Pertama, visi dan misi. Kedua, struktur kurikulum. Ketiga, kompetensi lulusan. Dari kenyataan ini, maka bisa diperkirakan adanya potensi krisis di masa depan terkait lemahnya kompetensi lulusan akibat tidak adanya rumusan tunggal yang disepakati.

Berikut ini beberapa contoh rumusan visi, misi dan kompetensi pada beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia: (1) Jurusan KPI di IAIN Sunan

¹⁵ Tim Kurikulum Jurnalisme UNESCO, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Jurnalisme* (Jakarta: Unesco Jakarta Office, 2007), hlm. 4-6

Gunung Djati Bandung memiliki visi menjadi program studi profesional dalam bidang tabligh (komunikasi dan penyiaran) untuk turut membangun nilai-nilai sosial dan institusional sesuai dengan utama dakwah Islam. Jurusan KPI UIN Sunan Gunung Djati memusatkan pengkajian dakwah *biahsan al-qaul* berupa tabligh dengan pendekatan wahyu, interdisipliner (*iqtibas*) dan kajian sosial (*istiqna*), sehingga tidak memandang adanya dikhotomi ilmu (agama dan umum) melainkan sebagai entitas yang integral, sehingga diharapkan dapat menghasilkan lulusan (sarjana dakwah) yang beriman dan bertakwa, serta memiliki daya tawar yang diperhitungkan di masyarakat.

(2) Jurusan KPI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki visi terdepan dan mencerahkan di bidang Komunikasi & Penyiaran Islam dengan kompetensi plus di bidang konseling berbasis *Islamic world-view* pada tahun 2020 di kawasan Asia Tenggara. Misi mendidik dan menghasilkan lulusan pendidikan tinggi Sarjana Komunikasi Penyiaran Islam yang berilmu, beradab dan berdaya-guna dengan kompetensi plus di bidang Konseling Islam untuk kemaslahatan ummat. Tidak berbeda dengan jurusan Komunikasi di kampus yang salam, lulusan dibekali berbagai kemampuan profesional Jurnalis, Penyiar, Konselor Keagamaan, Trainer Dakwah, Peneliti, Fasilitator, Interpreter.

Contoh lain yang kurang lebih serupa adalah (3) kurikulum Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Ibnu Chaldun menawarkan studi Ilmu Komunikasi yang terintegrasi dengan penyiaran dan dakwah Islam. Kurikulum memasukkan semua mata kuliah wajib yang ada di jurusan Ilmu Komunikasi umum seperti Ilmu Komunikasi, Teori Komunikasi, Filsafat dan Etika Komunikasi, Komunikasi Politik dan Desain Komunikasi Visual sehingga kompetensi lulusan KPI sejajar dengan lulusan Jurusan Ilmu Komunikasi pada umumnya. Nilai lebih lulusan KPI adalah penguasaan ilmu dan pendekatan keagamaan yang bermanfaat untuk memahami objek studi Indonesiaselaku negara dengan penduduk mayoritas muslim.

(4) Jurusan KPI IAIN Salatiga, Jawa Tengah merumuskan tujuan pembelajaran agar mahasiswa mampu menguasai teori-teori komunikasi dan teknologi komunikasi dan penyiaran Islam serta memiliki kecakapan mengelola media massa, secara komprehensif yang sangat diperlukan sebagai calon intelektual dalam penyiaran Islam. Wawasan komunikasi ini meliputi wawasan filosofik, sejarah manajemen teori dan aliran komunikasi dan hal-hal terkait dengan komunikasi dan penyiaran dalam pengelolaan media massa. Lebih lanjut mahasiswa menguasai ilmu-ilmu komunikasi, ilmu jurnalistik, boardcasting dan *public relations*, menguasai ilmu komunikasi, jurnalistik, boardcasting, dan public relation bagi lulusan.

Simpulan

Secara khusus, pasca bertransformasi dari model Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ke Universitas Islam Negeri (UIN), muncul berbagai dampak akademis dan manajerial sebagai resiko dari terobosan yang dilakukan pengelola IAIN di Indonesia dan konsekuensi dari perubahan status dan 'kenaikan kelas' menjadi universitas Islam mengacu standar pendidikan tinggi umum Indonesia. Adopsi sejumlah jurusan/program studi baru yang *non-Islamic studies* dan *notabene* lebih dahulu populer di perguruan tinggi umum tanpa eksplorasi internal yang signifikan menjadi salah satu ciri perubahan yang memicu kontroversi, karena beririsan bahkan berpotensi mendiskriminasi jurusan/program studi serupa yang ada sebelumnya. Memperhatikan dinamika ICT dan tata kelola media di Indonesia dan di tingkat global, perombakan kurikulum layak menjadi agenda sebagai respon kebutuhan internal dan tantangan eksternal yang berubah dinamis agar PTAI menjadi bagian dari komunitas dunia yang terus bergerak.

Sebagai rekomendasi, kiranya perlu penataan ulang program studi/jurusan yang masih bertubrukan di IAIN/UIN terutama Program Studi Ilmu Komunikasi dan KPI, baik pada aspek visi, misi maupun luaran kompetensi yang berimplikasi pada struktur kurikulum. Pengelola dapat mengambil inspirasi dari model kurikulum jurnalisme yang ditawarkan UNESCO diatas. Perlu upaya yang lebih agresif dan serentak untuk akselerasi ke arah integrasi dan interkoneksi kajian keilmuan pada dua Program Studi Komunikasi di kampus yang sama, sehingga di masa depan menghasilkan kebijakan penyatuan diantara keduanya, atau pemisahan sebagaimana selama ini, tetapi dengan perbedaan basis kompetensi yang lebih tajam. Jurnalistik Dakwah, baik sebagai mata kuliah maupun materi dalam perkuliahan jurnalistik dapat menjadi *pilot project* untuk eksplorasi nilai, tata kelola dan orientasi jurnalisme Islam yang universal.

Rujukan

- Abdullah, Amin, *Praxis Paradigma Integrasi Interkoneksi Ilmu dan Transformasi Islamic Studies*, Paper Seminar Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 22-23 Oktober 2014
- Abrar, Ana Nahdya. *Teknologi Komunikasi: Perspektif Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: LESFI, 2003
- Amir, Mafri, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Logos, 1999
- Arismunandar, Satrio, *Masa Depan Profesi Komunikasi di dalam Kurikulum Pendidikan Komunikasi*, Paper Seminar oleh Jurusan Ilmu Komunikasi, FIKOM, Universitas Kristen Petra, 10 Maret 2007 Surabaya.
- Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003
- Fang, Irving, *A History of Mass Communication*, Boston USA: Focal Press, 1997
- Gary Genosko, *McLuhan and Baudrillard, the Masters of Implosion*, London: Routledge, 1999
- iainsalatiga.ac.id
- Kasman, Suf, *Jurnalisme Universal*, Jakarta: Teraju, 2004
- Lim, Merlyna, *The League of Thirteen: Media concentration in Indonesia*, http://www.public.asu.edu/~mlim4/files/Lim_IndoMediaOwnership_2012.pdf (diakses tanggal 15 Mei 2014)
- Ngurah Putra, Gusti, *Demokrasi Dalam Komunikasi Terprivatisasi*, Jurnal ISKI, No. 6 November 2001, hal. 89.
- Nugroho, Yanuar, dkk, *Mapping the Landscape of the Media Industry in Centemporary Indonesia*, Jakarta: CIPG-Ford Foundation, 2012
- Rogers, Everett M. *Communication Technology: The New Media in Society*. New York: The Free Press, 1986
- Romli, Asep Syamsul, *Jurnalisme Dakwah, Visi dan Misi Dakwah bil Qalam*, Situs Internet:
- Tim Kurikulum Jurnalisme UNESCO, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Jurnalisme*, Jakarta: Unesco Jakarta Office, 2007

www.uika-bogor.ac.id

www.uinsgd.ac.id

www.umy.ac.id

Yuliar, Soni. dkk (ed). *Memotret Telematika Indonesia, Menyongsong Masyarakat Informasi Nusantara*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001

Pendidikan Islam di Masjid Kampus; Perbandingan Majelis Ta'lim di Masjid Kampus Yogyakarta

Moh. Mizan Habibi

Pusat Studi Pendidikan Islam Transformatif Yogyakarta

Email : habibimizan@yahoo.co.id

DOI : 10.14421/jpi.2015.41.115-139

Diterima: 10 Maret 2015

Direvisi: 16 Mei 2015

Disetujui: 26 Juni 2015

Abstract

This research is an effort in developing study in Islamic education toward wider area, especially by touching the implementation of Islamic education outside mainstream educational activities –Madrasah, Islamic Boarding School, and Islamic Higher Education- When Islamic education is defined as learning process based on islamic values, the logic consequence is that the discussion of its actualization should convey the whole educational process framed by islamic system and values. Majelis ta'lim activity in university-based mosques in Yogyakarta (Sunan Kalijaga Mosque, UGM Mosque, and KH Ahmad Dahlan Mosque in UMY) made by researcher as a research object, because of their part in Islamic education application form and their existance under a university as a bases of wide scientific development.

Keyword: *University-based Mosque, Majelis Ta'lim, Material Aspect*

Abstrak

Penelitian ini merupakan upaya pengembangan kajian Pendidikan Islam ke arah yang lebih luas, khususnya dengan menyentuh implementasi Pendidikan Islam di luar kegiatan pendidikan *meinstrem* –Madrasah, Pondok Pesantren, dan Perguruan Tinggi Agama Islam-. Ketika Pendidikan Islam didefinisikan sebagai proses pembelajaran berbasis nilai-nilai keislaman, maka konsekuensi logisnya adalah pembahasan aktualisasinya harus mampu menyentuh seluruh proses pendidikan yang dibingkai dengan sistem dan nilai-nilai keislaman. Kegiatan majlis ta'lim di Masjid Kampus Yogyakarta (Masjid Sunan Kalijaga, Masjid Kampus UGM, dan

Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY) penulis jadikan sebagai objek penelitian karena merupakan bagian dari bentuk aplikasi Pendidikan Islam dan keberadaannya di bawah naungan perguruan tinggi yang merupakan basis pengembangan keilmuan secara luas.

Kata Kunci: *Masjid Kampus, Majelis Ta'lim, Aspek Materi*

Pendahuluan

Nana Rukmana berasumsi bahwa masjid merupakan sentral dalam upaya pembinaan umat dan mengembangkan dakwah Islamiyah¹. Sejarah juga mencatat bahwa masjid juga merupakan lembaga pendidikan Islam kala itu dengan model pembelajaran berbentuk *halaqah-halaqah*. Merespon fenomena tersebut, sudah selayaknya masjid harus dikembangkan sebagai sarana penyelenggaraan Pendidikan Islam untuk umat yang pada masa lalu telah mencatatkan sejarah gemilang dengan terwujudnya integrasi keilmuan dengan Islam. Dari asumsi atas, selain berfungsi sebagai sarana pelaksanaan ibadah ritual, masjid juga mempunyai fungsi sentral sebagai media umat Islam untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan atau yang biasa dikenal sebagai kegiatan majlis ta'lim.

Tutty Alawiyah mengungkapkan bahwa berdasarkan tempat penyelenggaraannya, majlis ta'lim dapat dilakukan di masjid atau di musala². Muhaimin mengungkapkan bahwa Pendidikan Islam tidak hanya berpusat pada lembaga pendidikan formal, namun juga dalam keluarga atau ditempat-tempat ibadah, dan/ atau di forum-forum kajian keislaman, majlis ta'lim, dan institusi-institusi lainnya yang sekarang sedang digalakkan oleh masyarakat.³ Majelis ta'lim menjadi sarana bagi pengembangan pembelajaran bagi umat Islam secara luas untuk mendalami ajaran agamanya. Terlebih lagi majlis ta'lim dapat dijadikan ruang untuk belajar segala aspek bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, dan bidang keilmuan yang lainnya. Hal tersebut menggugah semangat baru untuk memanfaatkan ruang majlis ta'lim bagi perwujudan belajar yang tak kenal henti. Oleh karenanya, umat Islam dapat memperdalam pengetahuan tentang ajaran agama secara komprehensif atau *kaffah* melalui kegiatan majlis ta'lim yang dilakukan di masjid dengan materi dan metodologi yang dibingkai dengan nuansa *rohmatan lil 'alamin*.

Namun dalam prakteknya masih dijumpai implementasi pembelajaran yang menggunakan kerangka ideologi Pendidikan Islam yang cenderung bersifat eksklusif

¹ Nana Rukmana, *Masjid dan Dakwah*. (Jakarta: Al-Mawardi, 2002), hlm.142

² *Ibid.*, hlm. 77

³ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9-10.

dan tekstual. H.A.R Tilaar menilai bahwa pelaksanaan pembelajaran yang semacam itu sering kali masih terpaku pada model konvensional yang lebih menekankan penggunaan metode ceramah yang cenderung monolog dan doktrinatif, lebih mementingkan memori dibandingkan analisis dan dialog serta lebih mementingkan materi daripada metodologi.⁴ Lebih lanjut, Tilaar mengungkapkan hal itu terjadi karena penyampaianya bukan dalam bentuk “proses secara demokratis” yang mengapresiasi pemahaman, penalaran, kebebasan berpikir dan pelatihan, melainkan bentuk “produk” yang menekankan hafalan dan menganggap ilmu sebagai hasil final. Ironisnya, masalah ini dinilai sudah menjadi bagian dari budaya praksis pendidikan secara umum di Indonesia yang menurutnya disebut dengan budaya intelektualisme dan verbalisme. Pendekatan dalam metodologi pengajaran dan pendidikan yang semacam itu dapat dikategorikan sebagai model pendekatan yang doktriner-literal-formal.⁵

Di samping dari sisi pola metodologi dan pendekatan pengajaran, secara isi kajian kegiatan majlis ta'lim di masjid juga sudah muncul beraneka ragam aspek materi. Selama ini, jika melihat atau mengamati kegiatan majlis ta'lim yang diselenggarakan di masjid, termasuk masjid kampus maka yang terbayangkan aspek-aspek materi yang ditransformasikan adalah materi fiqih, tauhid, akhlak, tafsir Al-Qur'an, hadist, dan sejarah Islam. Padahal pada kenyataannya berbeda dengan yang berkembang saat ini. Banyak tema-tema kajian ilmu pengetahuan umum dan isu-isu kontemporer menjadi bahan yang dikaji dalam kegiatan majlis ta'lim di masjid.

Berlandaskan kegelisahan akademik di atas, penelitian ini akan difokuskan terhadap pengembangan Pendidikan Islam di Masjid Kampus Yogyakarta. Pemilihan objek penelitian masjid kampus didasarkan pada eksistensi masjid kampus yang selama ini masih dijadikan sebagai sarana untuk menggali ilmu pengetahuan agama oleh sebagian kalangan mahasiswa. Memang cukup ideal mendengarnya. Namun banyak berkembang isu bahwa pengembangan kajian ke-Islaman yang dibingkai dalam kegiatan majlis ta'lim di masjid kampus seringkali diwarnai oleh upaya-upaya perebutan doktrinasi ajaran-ajaran kelompok-kelompok tertentu.

Untuk mencermati kegelisahan di atas, penelitian ini diorientasikan untuk menganalisa dan memetakan aspek materi dan pola pembelajaran yang diimplementasikan dalam kegiatan majlis ta'lim yang dikembangkan di masing-masing masjid kampus. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya analisis apakah kegiatan majlis ta'lim yang dilakukan di masjid kampus murni berorientasi pada

⁴ H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad XXI*, (Magelang: Indonesia Tera, 1998), hlm. 26-28.

⁵ *Ibid.*, hlm. 30

kajian pengembangan keilmuan ataukah ada misi yang lainnya, seperti halnya intervensi “politik” keagamaan. Pada wilayah metodologis, proses tranformasi keilmuannya apakah menggunakan pendekatan *naqly oriented* atau juga melibatkan proses rasionalisasi melalui pendekatan keilmuan yang lainnya. Lebih lanjut, analisa terhadap tema-tema kajian ditujukan untuk mengidentifikasi bidang materi apa saja yang diajarkan pada kegiatan majlis ta'lim di masing-masing masjid kampus. Sedangkan analisa terhadap pola pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui identitas corak melalui hasil analisa terhadap aspek materi, metode, dan tujuan proses pembelajaran.

Dua rumusan masalah di atas, peneliti bidik di tiga sampel masjid kampus yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Masjid Sunan Kalijaga, Masjid Kampus UGM, dan Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY. Pemilihan tiga objek penelitian tersebut dilatar belakangi oleh keberadaan masjid yang dinaungi oleh tiga institusi yang memiliki ciri khas yang berbeda. Masjid Sunan Kalijaga berada di bawah naungan kampus UIN Sunan Kalijaga yang merupakan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang dikenal dengan jargon *integratif-interkonektif* dan *inklusif-continous improvement*. Masjid Kampus UGM berada di bawah naungan kampus Universitas Gajah Mada yang merupakan Perguruan Tinggi Negeriyang didominasi oleh pengembangan pengetahuan saintifikdan *skill-oriented*. Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY yang berada di bawah nanungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berafiliasi dengan organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah.

Tinjauan Tentang Majelis Ta'lim

Majlis ta'lim mempunyai pengertian pertemuan sekelompok orang yang mengkaji tentang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lain. Dalam hal ini majlis ta'lim dikategorikan sebagai sebuah kelompok yang melakukan komunikasi kelompok. Majlis ta'lim sebagai media dakwah dan bentuk komunikasi kelompok, dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu majlis terseleksi dan majlis heterogen⁶.

Majlis Terseleksi

Robert F. Bales (dalam onong Ucjana Efendi, 1984) mendefinisikan kelompok kecil adalah sejumlah orang yang terlibat dalam interaksi satu sama lain dalam suatu pertemuan yang bersifat tatap muka (*face to face meeting*) dimana setiap peserta mendapat kesan/ penglihatan antara satu sama lain yang kentara, sehingga disampaikan baik pada saat timbulnya pertanyaan maupun sesudahnya dapat

⁶ Djamaludin Abidin, *Komunikasi dan Bahasa Dakwah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 38

memberi tanggapan pada pesan-pesan⁷. Individu dalam komunikasi kelompok bersifat rasional, sehingga setiap pesan bisa ditanggapi secara kritis.

Ferdinand Tonnies (dalam onong Uchjana Efendi, 1984) seorang pakar psikologi Jerman, memisahkan antara *gameinschaft* yaitu masyarakat yang diikat oleh nilai-nilai tradisional, genealogis, atau hubungan keluarga dalam rumah tangga dan *gesellschaft* sebagai ikatan yang disebabkan oleh tujuan, cita-cita yang sama dan rasional. Dalam hal ini majlis ta'lim digolongkan pada kelompok *gesellschaft*, sehingga diperlukan komunikator atau da'i yang dapat mengidentifikasi komunikan/ *mad'u* yang akan dihadapi dan kebudayaan serta kebiasaan yang dianut. Sehingga komunikasi dakwah dapat terlaksana dengan efektif, salah satu dengan *communicator talk with the people* bukan *the communicator talk to the people*. Sehingga diharapkan terjadi proses integrasi dialogis dan menimbulkan *feedback* (umpan balik)⁸.

Majlis Heterogen

Dalam ilmu komunikasi, majlis heterogen disebut dengan komunikasi kelompok besar (*large group communication*) yang cenderung satu arah sehingga rawan dengan unsur emosi yang dapat timbul dari pihak komunikator maupun pihak komunikan. Onong Uchjana Effendy, menyebutkan situasi yang demikian sebagai *contagion mental* yaitu emosi yang menjadi wabah dengan ciri khalayak terbawa arus⁹. Dalam komunikasi ini kata-kata komunikator bisa memicu tindakan-tindakan yang sangat mungkin berbau kekerasan, pengrusakan, dan lain-lain. Sebagai bagian dari dakwah Islam, komunikator atau da'i harus waspada dengan situasi komunikasi ini, karena sudah tidak sesuai dengan prinsip dakwah Islam yang persuasive dan damai, bukan dengan pemaksaan (koersif) dan pengrusakan (destruktif). Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu konformitas, fasilitasi sosial, dan polarisasi¹⁰.

Konformitas

Adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju (norma) kelompok sebagai akibat tekanan kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas adalah factor situasional yaitu kejelasan situasi, konteks situasi, cara penyampaian penilaian, karakteristik sumber pengaruh, ukuran kelompok, dan tingkat kesepakatan kelompok. Sedangkan factor lain yang juga mempengaruhi konformitas adalah situasi personal yaitu usia, jenis kelamin, stabilitas emosional, otoritarianisme, kecerdasan, motivasi, dan harga diri.

⁷ Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), hlm. 127

⁸ *Ibid.*, hlm. 38

⁹ *Ibid.*, hlm. 40

¹⁰ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 149

Fasilitasi Sosial

Fasilitasi berasal dari kata *facile* (bahasa perancis) yang berarti “mudah” menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok, dalam hal ini kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga terasa lebih “mudah”.

Polarisasi

Tindakan kelompok yang cenderung ke arah posisi yang ekstrem. Deskripsinya adalah apabila sebelum diskusi kelompok para anggota memiliki sikap agak mendukung setelah diskusi mereka lebih kuat mendukung tindakan itu, begitu pula sebaliknya. Polarisasi menimbulkan beberapa implikasi negatif, di antaranya: *Group think* yaitu proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif dimana anggota-anggotanya berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif lagi, serta akan mendorong ekstrimisme dalam kelompok gerakan sosial atau politik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa majlis ta'lim dikategorikan sebagai kelompok yang melakukan komunikasi kelompok dimana komunikasi ini menjadi bagian dari komunikasi tatap muka yang sifatnya dua arah timbale balik dan menimbulkan arus balik seketika.¹¹ Onong Uchjana juga menambahkan bahwa komunikasi kelompok sangat ampuh untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku komunikasi, karena dengan mengetahui reaksi komunikasi pada saat komunikasi, karena dengan mengetahui reaksi komunikasi pada saat komunikasi sedang dilancarkan, komunikator dapat mengatur komunikasi sehingga berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Latar Belakang Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Majelis Ta'lim Di Masjid Kampus

Latar belakang ini penting untuk dibedah untuk mengetahui apa saja alasan mendasar dan landasan yang digunakan sehingga melahirkan gagasan untuk melaksanakan kegiatan majlis ta'lim. Secara ideal, latar belakang kegiatan majlis ta'lim ini mempunyai implikasi terhadap pelaksanaannya di masjidnya masing-masing, karena latar belakang menjadi *grand desain* untuk menentukan konsep pelaksanaan, aspek materi yang akan disajikan, tujuan utamanya, siapa saja target jama'ahnya dan siapa pemateri yang akan menyampaikan. Berikut ini adalah masing-masing latar belakang yang melandasi pelaksanaan kegiatan majlis ta'lim di Masjid Sunan Kalijaga, Masjid Kampus UGM, dan Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY.

¹¹ Onong Uchjana, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 9

Latar belakang Kegiatan Majelis Ta'lim di Masjid Sunan Kalijaga

Masjid Sunan Kalijaga sebagai Laboratorium Agama sejatinya memberikan konsekuensi untuk menjadikan masjid sebagai basis pengembangan kajian keislaman. Laboratorium Agama secara sederhana dapat dimaknai sebagai tempat untuk mempelajari, meneliti, mengkaji, dan mengeksplorasi segala sesuatu yang berkaitan dengan topik-topik agama. Salah satunya melalui kegiatan majlis ta'lim yang diorientasikan untuk mengkaji dan mempelajari ajaran agama Islam. Berangkat dari alur pemikiran sederhana di atas, menjadikan masjid yang mempunyai label Laboratorium Agama sebagai salah satu latar belakang utama mengapa kegiatan majlis ta'lim harus diadakan di Masjid Sunan Kalijaga. Hal ini bertujuan agar label Laboratorium Agama tidak hanya sebuah istilah yang melekat pada diri masjid, namun mempunyai implikasi praksis dalam aktualisasi fungsi masjid sebagai basis pengembangan Pendidikan Islam.

Maka kegiatan majlis ta'lim yang dikemas dalam *Islamic Short Course* merupakan salah satu cerminan dari fungsi masjid sebagai laboratorium Agama. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam rangka memberikan sarana bagi civitas akademika dan masyarakat umum untuk mempelajari, mengkaji, dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan teks-teks agama atau problematika dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping karena alasan menunjukkan eksistensi masjid sebagai Laboratorium Agama, kegiatan majlis ta'lim yang diselenggarakan di Masjid Sunan Kalijaga juga didasari oleh keinginan pihak pengelola masjid untuk memberikan ruang bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan kepada masyarakat khususnya civitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Sebagaimana pernyataan langsung dari salah satu pelaksana harian Masjid Sunan Kalijaga berikut ini:

“Sebenarnya kegiatan kajian ini sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun. Kegiatan seperti ini (majlis ta'lim) dilaksanakan karena melihat kebanyakan aktivitas mahasiswa yang tidak mempunyai kegiatan yang dalam tanda kutip bermanfaat setelah maghrib. Maka melihat kenyataan seperti itu kita mengadakan acara semacam kajian ini. Mungkin dari situ kita dapat mengalokasikan kegiatan mahasiswa ke arah yang lebih bermanfaat. Itung-itung kita juga bisa belajar bareng.”¹²

“Terlepas dari itu, kegiatan ini juga dilaksanakan untuk meramaikan masjid. Kalu dulu biasanya setelah sholat maghrib dan menjelang isya' masjid sepi tapi kegiatan apapun. Kadang tidak ada orang. Karena ini masjid kampus

¹² Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pelaksana harian Masjid Sunan Kalijaga pada tanggal 15 April 2015

ya kita mencoba untuk menjadikan masjid ini dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan mahasiswa. Baik dari ilmu pengetahuan. Jadi kajiannya tidak hanya terfokus pada persoalan agama, tapi juga masalah sehari-hari.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa kegiatan majlis ta'lim yang diselenggarakan di Masjid Sunan Kalijaga juga dilatar belakangi oleh fenomena bahwa banyak kecenderungan sebagian mahasiswa yang beraktifitas alakadarnya pada malam hari (khususnya antara maghrib dan isya'). Sehingga hal itu memunculkan ide bagi pelaksana harian masjid untuk mengadakan kegiatan positif berupa kegiatan majlis ta'lim yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang kemudian dibuka untuk masyarakat umum. Selain itu, kegiatan ini juga dilatar belakangi oleh tidak adanya kegiatan rutin yang diselenggarakan di masjid selepas sholat maghrib. Sehingga terkesan masjid menjadi sepi yang hanya dikunjungi lima kali sehari pada waktu sholat saja. Maka dari itu, kegiatan majlis ta'lim mempunyai peran penting untuk lebih menghidupkan masjid dan memberikan sarana belajar bagi mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat umum tentang pengetahuan-pengetahuan agama Islam.

Darisisitargetjama'ah, pihakpelaksanakegiatanmajlιστα'limmerpersembahkan kegiatan ini untuk civitas akademika UIN Sunan Kalijaga dan masyarakat umum. Meskipun pada awalnya yang melatar belakangi kegiatan majlis ta'lim dikarenakan melihat beberapa fenomena aktivitas mahasiswa yang alakadarnya, namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini diperuntukkan untuk masyarakat luas. Hal tersebut didasari oleh keinginan untuk menunjukkan masjid sebagai milik umat Islam secara luas. Maka dari itu, kegiatan majlis ta'lim dibuka secara umum agar tidak terkesan bahwa Masjid Sunan Kalijaga eksklusif hanya untuk kalangan terbatas dan tertutup untuk umum. Berdasarkan hasil observasi peneliti, memang kegiatan majlis ta'lim di Masjid Sunan Kalijaga diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswai UIN Sunan Kalijaga, mahasiswa dari luar kampus UIN, dan beberapa jama'ah bapak-bapak dari kalangan masyarakat umum.¹⁴ Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Masjid Sunan Kalijaga terbuka untuk semua kalangan dan tidak melihat identitas jama'ah dari golongan apapun selama jama'ah memang berniat murni untuk belajar tentang agama Islam.

Kegiatan majlis ta'lim yang bertajuk *Islamic short course* diorientasikan untuk memberikan sarana bagi para jama'ah mendalami pengetahuan tentang Islam. Layaknya mengikuti kegiatan perkuliahan, meskipun secara singkat. Karena proses

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hasil observasi peneliti pada kegiatan *Islamic Short Course* di Masjid Sunan Kalijaga pada tanggal 9 Maret 2015

pembelajarannya juga didesain sebagaimana proses perkuliahan yang berlangsung di kelas formal. Bagi mahasiswa dan mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, mengikuti kegiatan *Islamic short course* ini berarti memperdalam dan memperluas materi kajian keislaman, karena dimungkinkan materi yang didapatkan di bangku kuliah masih banyak yang harus diperdalam secara mandiri diluar waktu kuliah. Sehingga kegiatan *Islamic short course* dijadikan sebagai media alternatif untuk memperdalam materi tentang keislaman.

Latar belakang Kegiatan Majelis Ta'lim di Masjid Kampus UGM

Sama halnya seperti Masjid Sunan Kalijaga, kegiatan majlis ta'lim di Masjid Kampus UGM yang dikelola oleh UKM Jama'ah Sholahuddin mempunyai beberapa latar belakang yang menjadi alasan diselenggarakannya kegiatan tersebut. Sebagai masjid yang berada dilingkungan kampus umum, Jama'ah Sholahuddin yang juga merupakan UKM Kerohanian Islam di UGM ingin menjadikan masjid sebagai basis kajian keislaman untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan agama Islam kepada civitas akademika dan masyarakat umum. Hal tersebut sesuai dengan visi, misi, dan program kegiatan yang telah dicanangkan oleh Jama'ah Sholahuddin untuk merealisasikan beberapa kegiatan yang bernuansa kajian dan dakwah. Maka untuk mewujudkannya, Jama'ah Sholahuddin menjadikan Masjid Kampus UGM menjadi pusat kajian keislaman dilingkungan kampus UGM.

Meskipun kegiatan majlis ta'lim yang dikelola oleh Jama'ah Sholahuddin ini sudah berjalan sejak lama, namun dalam perjalanannya mengalami perubahan secara dinamis, khususnya terkait aspek materi yang disajikan. Untuk mengetahui kegiatan majlis ta'lim yang dilaksanakan pada periode ini Jama'ah Sholahuddin mengemasnya dalam bingkai *Iclamic Lecturer*. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Umum Jama'ah Sholahudiin berikut ini:

“Kalau kajian yang diadakan kayak minggu pagi itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 80-an mas. Sejak berdirinya Jama'ah Sholahuddin. Tapi kalau dulu namanya telaah ahad pagi yang dilaksanakan di gelanggang mahasiswa, karena memang waktu itu masjid kampus belum ada. Dan semenjak adanya masjid kampus pada tahun 2000-an baru pindah ke sini (masjid).”¹⁵

“Untuk yang sekarang ini yang melatarbelakangi adalah untuk melanjutkan kontinuitas aktivitas kajian yang telah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. tapi kemudian juga sebagai wadah bagi mahasiswa ketika punya waktu kosong di akhir pekan. Karena kalau dipaksakan hari biasa itu kadang tidak menentu juga.”¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Umum Jama'ah Sholahuddin UGM pada tanggal 29 Maret 2015.

¹⁶ *Ibid.*

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat diketahui bahwa memang kegiatan majlis ta'lim yang dikelola oleh Jama'ah Sholahuddin sudah berjalan sejak tahun 1980-an ketika masa-masa kelahiran UKM tersebut. Meskipun dari segi nama kajian dan lokasinya berbeda. Dari hal tersebut selayaknya patut diapresiasi bahwa mempertahankan eksistensi kegiatan majlis ta'lim di zaman yang serba diwarnai oleh unsur modernitas merupakan wujud kesetiaan atau keistiqomahan organisasi untuk memberikan layanan berupa sarana pembelajaran agama bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Mempertahankan sesuatu biasanya lebih sulit dari pada melahirkan sesuatu. Namun dengan masih berjalannya kegiatan majlis ta'lim di Masjid Kampus UGM ini menunjukkan bahwa Jama'ah Sholahuddin mempunyai tekad untuk selalu melestarikan peninggalan positif dari para pendahulunya.

Selain itu, sama halnya dengan Masjid Sunan Kalijaga, kegiatan majlis ta'lim yang diselenggarakan di Masjid Kampus UGM juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberikan wadah atau media bagi mahasiswa di waktu-waktu yang tidak disibukkan dengan aktivitas perkuliahan. Sebagai UKM Kerohanian Islam, Jama'ah Sholahuddin berupaya untuk memanfaatkan masjid sebagai pusat kegiatan kajian untuk mengisi waktu luang bagi mahasiswa, meskipun pada pelaksanaannya kegiatan majlis ta'lim ini juga diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Dengan diadakannya kegiatan majlis ta'lim ini juga memberikan gambaran bahwa Jama'ah Sholahuddin mampu menjaga amanah yang telah diberikan oleh dewan pengurus Yayasan Masjid Kampus UGM untuk secara langsung mengelola kegiatan-kegiatan berupa kajian, diskusi, dan yang lainnya guna menghidupkan masjid.¹⁷ Hal ini menunjukkan sikap amanah yang melekat pada diri Jama'ah Sholahuddin secara keorganisasian. Sehingga tercipta kondisi saling berbagi. Pengurus takmir mengelola kegiatan yang bersifat manajerial dan ibadah ritual, seperti halnya shalat. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kajian dipercayakan kepada Jama'ah Sholahuddin. Secara tidak langsung, hal ini memberikan ruang bagi anggota Jama'ah Sholahuddin untuk berkarya, berinovasi, belajar, berlatih dan bertanggung jawab untuk mempersembahkan produk-produk kajian keislaman kepada civitas akademika UGM dan khalayak masyarakat umum.

Dari sisi target jama'ah, sebagai pelaksana, jama'ah Sholahuddin mengemas kegiatan majlis ta'lim ini untuk civitas akademika Universitas Gajah Mada dan masyarakat umum. Meskipun pada awalnya yang melatar belakangi kegiatan majlis ta'lim adalah keinginan untuk melanjutkan estafet dan memberikan ruang belajar bagi mahasiswa ketika tidak ada kesibukan kuliah, namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini juga diperuntukkan untuk masyarakat luas. Hal tersebut didasari oleh

¹⁷ Informasi yang diberikan oleh Ketua Takmir Masjid Kampus UGM kepada peneliti pada saat pre-riset.

keinginan untuk menunjukkan masjid sebagai milik umat Islam secara luas dan tidak membedakan dari unsur organisasi keagamaan apapun. Maka dari itu, kegiatan majlis ta'lim dibuka secara umum agar tidak terkesan bahwa Masjid Kampus UGM eksklusif hanya untuk kalangan terbatas dan tertutup untuk umum sesuai dengan desain arsitektur masjidnya yang menjadi simbol keterbukaan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, memang kegiatan majlis ta'lim di Masjid Sunan Kalijaga diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi UGM (khususnya anggota Jama'ah Sholahuddin), mahasiswa dari luar kampus UGM, dan beberapa jama'ah bapak-bapak dan ibu-ibu dari kalangan masyarakat umum.¹⁸ Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Masjid Kampus UGM terbuka untuk semua kalangan dan tidak melihat identitas jama'ah dari golongan apapun selama jama'ah memang berniat murni untuk belajar tentang agama Islam dan tidak menyebarkan paham ideologi tertentu. Maka dari sisi ini, latar belakang kegiatan majlis ta'lim ini yang merupakan langkah meneruskan program kepengurusan sebelumnya dan untuk memberikan ruang belajar bagi mahasiswa mempunyai relevansi dengan gerakan dakwah dan menginternalisasikan nilai-nilai tauhid yang menjadi misi utama Jama'ah Sholahuddin.

Kegiatan *Islamic Lecturer* tersebut berlangsung dikarenakan hampir seluruh materi perkuliahan di kampus Universitas Gajah Mada bernuansa keilmuan saintifik yang mempunyai kecenderungan berorientasi pada pengembangan skill mahasiswa. Untuk itu, *Islamic lecturer* hadir sebagai penambah aspek materi perkuliahan yang berorientasi pada pemberian bekal pengetahuan dasar-dasar keislaman yang diharapkan bisa berimplikasi positif terhadap keimanan dan akhlak pada jama'ahnya. Sehingga kegiatan *Islamic lecturer* bisa dijadikan sebagai penyeimbang bagi para mahasiswa, khususnya yang beragama Islam untuk mendalami kajian keislaman yang sudah selayaknya dilakukan oleh seorang figur yang beragama.

Latar belakang Kegiatan Majelis Ta'lim di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY

Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY merupakan masjid ketiga dalam penelitian ini. Masjid ini mempunyai perbedaan dengan masjid sebelumnya. Jika Masjid Sunan Kalijaga dan Masjid Kampus UGM sama-sama berada di bawah lembaga perguruan tinggi negeri dan tidak berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan apapun, maka perbedaannya adalah jika Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY berada di bawah naungan lembaga perguruan tinggi swasta dan berafiliasi dengan organisasi keagamaan Muhammadiyah. Perbedaan ini perlu disampaikan untuk mengetahui apakah dengan keberadaan Masjid KH. Ahmad Dahlan yang berdiri di lingkungan Kampus Muhammadiyah mempunyai pengaruh dalam setiap penentuan kebijakan

¹⁸ Hasil observasi peneliti pada kegiatan *Islamic Lecturer* di Masjid Kampus UGM pada tanggal 9 Maret 2015

yang diputuskan, termasuk salah satunya mengenai latar belakang kebijakan diadakannya kegiatan majlis ta'lim di masjid tersebut.

Sebagai masjid yang berada di bawah naungan kampus Muhammadiyah tentunya niatan untuk menjadikan masjid sebagai pusat kajian merupakan alasan utama. Karena hal tersebut juga bisa menjadi sarana bagi organisasi untuk mengembangkan misi dakwahnya. Namun secara khusus kegiatan majlis ta'lim di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY yang dilaksanakan rutin setiap selesai sholat dhuhur dihidupkan untuk menjadikan masjid sebagai salah satu pusat peradaban kegiatan keislaman di kampus UMY yang merupakan wujud aktualisasi nyata dari visi dan misi masjid. Sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh salah seorang pengelola kegiatan yang ada di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY berikut ini:

“Kajian ini, itu sudah ada semenjak masjid ini berdiri. Tapi ada beberapa materi kajian yang baru berjalan tiga tahun. Sebenarnya takmir itu menyelenggarakan kajian kayak tafsir, hadist, dan lainnya memang untuk memanfaatkan momentum kumpulnya civitas akademika, baik dari mahasiswa, dosen, dan karyawan. Dan kebetulan pas dhuhur itu adalah waktu kumpulnya semua civitas akademika. Dan dengan melihat momentum itu akhirnya diadakan kajian seperti ini.”¹⁹

“Ya memang sesuai dengan visi masjid sebagai pusat peradaban umat, meskipun kelihatan terlalu besar, ini menjadi titik awal untuk mengasah ranah intelektualitas jama'ah. Karena ini masjid kampus, tentu berbeda dengan masjid yang ada di masyarakat. Makanya masjid ini perlu dikembangkan untuk mengasah ranah intelektualitas itu untuk mewujudkan visi dan misi masjid. Selain kajian juga ada program gema ramadhan, gebyar muharrom, dan kajian-kajian yang diselenggarakan oleh lembaga di luar takmir.”²⁰

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat diketahui bahwa memang kegiatan majlis ta'lim yang dikelola oleh takmir Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY sudah berjalan sejak berdirinya masjid tersebut dan terus mengalami inovasi dan modifikasi. Meskipun dari segi nama kajian dan waktunya berbeda. Dari hal tersebut selayaknya patut diapresiasi bahwa mempertahankan eksistensi kegiatan majlis ta'lim di zaman yang serba diwarnai oleh unsur modernitas merupakan wujud kesetiaan atau keistiqomahan pengelola untuk memberikan layanan berupa sarana pembelajaran agama bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan. Mempertahankan sesuatu biasanya lebih sulit dari pada melahirkannya. Namun dengan masih berjalannya kegiatan majlis ta'lim di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY ini

¹⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Pelaksana kegiatan yang diselenggarakan Takmir Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY pada tanggal 25 Maret 2015.

²⁰ *Ibid.*

menunjukkan bahwa takmir masjid mempunyai tekad untuk selalu melestarikan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif bagi para civitas akademika UMY.

Kegiatan majlis ta'lim yang diselenggarakan di Masjid KH. Ahmad Dahlan juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk memanfaatkan momentum berkumpulnya civitas akademika UMY baik dari kalangan mahasiswa, dosen, dan karyawan. Waktu yang paling tepat untuk melihat momentum tersebut adalah pada saat selesai ba'da sholat dhuhur. Karena di UMY, ketika waktu sholat dhuhur tiba semua civitas akademika dianjurkan untuk meninggalkan segala aktivitas perkuliahan dan yang lainnya untuk melakukan sholat dhuhur berjama'ah di masjid.²¹ Meskipun tidak semua bisa hadir, namun setidaknya hal tersebut menjadi kebijakan penting guna menumbuhkan semangat beribadah dan kebersamaan di antara warga kampus UMY. Melihat momentum tersebut, nampaknya takmir masjid ingin memafa'atkannya untuk sekalian diisi dengan kajian setelah selesai sholat dhuhur. Hal tersebut dilakukan guna memberikan pengetahuan tambahan tentang dasar-dasar agama bagi seluruh warga kampus, meskipun belum berjalan dengan maksimal. Nampaknya kebijakan seperti ini layak ditiru bagi kampus-kampus yang lainnya guna memberikan satu ruang dan waktu bagi warga kampus untuk berkumpul dan menimba ilmu bersama.

Dengan diadakannya kegiatan majlis ta'lim ini juga memberikan gambaran bahwa takmir Masjid KH. Ahmad Dahlan mampu mewujudkan visi, misi, dan program kegiatan yang telah disusun. Artinya visi, misi, dan program kerja tidak hanya sebagai unsur normatif yang kadangkala hanya berfungsi sebagai pemanis semata. Hal ini menunjukkan sikap profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengembangkan dan menghidupkan masjid. Menurut salah satu pengelola kegiatan di Masjid KH. Ahmad Dahlan, kegiatan kajian yang dilakukan setelah selesai sholat dhuhur merupakan titik awal bagi pengembangan masjid sebagai pusat peradaban dan pembentukan karakter Islam. Melalui kegiatan kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran religius bagi pada warga kampus UMY.

Terlebih, Rektor UMY juga menerapkan kebijakan bagi setiap unsur di lingkungan UMY, baik mahasiswa, karyawan, maupun dosen untuk melakukan bimbingan agar mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Program tersebut dilatar belakangi dengan adanya kegelisahan banyaknya mahasiswa, karyawan, atau dosen yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Program tersebut merupakan terobosan yang baik untuk memberikan stimulus agar selalu mempelajari Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup dan sumber hukum umat Islam.²²

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Dari sisi target jama'ah, takmir Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY mengemas kegiatan kajian hanya diprioritaskan untuk civitas akademika UMY. Karena pada era ini yang melatar belakangi kegiatan majlis ta'lim salah satunya ingin memanfaatkan momentum berkumpulnya civitas akademika UMY dengan memberikan ruang belajar dasar-dasar agama Islam bagi mahasiswa, karyawan, maupun dosen. Namun bukan berarti kegiatan majlis ta'lim ini tertutup bagi masyarakat umum ketika ada yang ingin singgah di masjid untuk melaksanakan sholat dan mengikuti kegiatan majlis ta'lim. Yang menjadi dasar prioritas untuk civitas akademika adalah dipilihnya waktu setelah selesai sholat dhuhur yang dianggap sebagai waktu berkumpulnya mayoritas civitas akademika. Di samping itu, alasan lain adalah karena keterbatasan akses pintu keluar dan masuk bagi masyarakat umum.²³ Berdasarkan hasil observasi peneliti, memang kegiatan majlis ta'lim di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY hanya diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi UMY, karyawan, dan dosen setelah selesai sholat dhuhur berjama'ah.²⁴

Menurut pengelola kegiatan masjils ta'lim, diprioritaskannya kegiatan masjils ta'lim bagi civitas akademika UMY bukan berarti masjid menutup diri dan bersikap eksklusif dari masyarakat umum. Hal tersebut hanya dikarenakan persoalan teknis semata. Pihak takmir masjid juga dengan senang hati untuk bermitra ketika ada unsur dari masyarakat ingin menggunakan fasilitas masjid untuk kegiatan yang positif dan membantu upaya dari pengembangan masjid sebagai pusat peradaban Islam.

Jika dikaitkan dengan kebijakan rektor UMY yang mewajibkan seluruh warga kampus untuk melakukan bimbingan membaca Al-Qur'an bagi yang belum mampu, maka kegiatan kajian ba'da dhuhur ini juga merupakan upaya pihak pimpinan kampus melalui takmir masjid untuk memberikan media atau sarana pembelajaran dasar-dasar kajian keislaman. Pimpinan kampus UMY mempunyai harapan bahwa seluruh civitas akademika mempunyai bekal pengetahuan dan pemahaman tentang dasar-dasar ajaran Islam. Salah satu yang juga patut diapresiasi adalah kebijakan yang menysasar kepada dosen dan karyawan ini menyiratkan bahwa dosen dan karyawan tidak hanya melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola dan pemberi layanan kegiatan di kampus, namun juga diberikan ruang dan waktu untuk belajar membaca Al-Qur'an dan menimba ilmu pengetahuan Islam. Meskipun secara proses hanya dilakukan melalui kajian ba'da dhuhur yang berjalan secara singkat dan searah, setidaknya hal ini menjadi pintu awal untuk melakukan langkah-langkah strategis berikutnya yang bermanfaat untuk pengembangan keilmuan warga kampus UMY.

²³ *Ibid.*

²⁴ Hasil observasi peneliti pada kegiatan kajian setelah selesai sholat dhuhur di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY pada tanggal 25 Maret 2015

Pada pembahasan mengenai latar belakang yang menjadi alasan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan majlis ta'lim dapat diketahui ada beberapa latar belakang pada masing-masing masjid. Namun yang perlu diperhatikan adalah latar belakang ini harus menjadi pijakan untuk menentukan desain kegiatan, aspek materi, target jama'ah, metode pembelajaran, pemilihan pemateri dan tujuan yang ingin dicapai. Relevansi antar beberapa unsur tersebut yang akan menentukan berhasil tidaknya tujuan yang ditentukan. Dari beberapa latar belakang di atas jika diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

Tabel Pemetaan Latar Belakang Kebijakan Pelaksanaan Majelis Ta'lim

No	Masjid	Latar Belakang Kebijakan
1	Masjid Sunan Kalijaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsekuensi dari label Laboratorium Agama yang melekat pada identitas masjid. 2. Memberikan ruang pengembangan pengetahuan dan keilmuan kepada masyarakat khususnya civitas akademika UIN Sunan Kalijaga.
2	Masjid Kampus UGM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualisasi visi dan misi untuk mengembangkan kajian dan dakwah Islam. 2. Memberikan wadah dan media untuk belajar agama Islam bagi mahasiswa di luar waktu perkuliahan. 3. Melanjutkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan majlis ta'lim dari para pendahulunya.
3	Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualisasi visi dan misi untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam. 2. Memanfaatkan momentum waktu berkumpulnya civitas akademika UMY. 3. Memberikan wadah untuk belajar untuk belajar dasar-dasar agama Islam.

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui secara garis besar latar belakang diadakannya kegiatan majlis ta'lim adalah sebagai wujud aktualisasi dari visi dan misi yang menghendaki adanya kegiatan kajian keislaman di masjid. Hal tersebut didorong oleh tujuan untuk menjadikan masjid sebagai basis pengembangan dakwah dan pusat peradaban Islam. Data tersebut memberikan informasi bahwa kegiatan majlis ta'lim di masjid betul-betul adanya niatan murni untuk pengembangan

keilmuan agama Islam dan tidak diorientasikan untuk menyebarkan paham ideologi tertentu, meskipun masjid yang melaksanakan kegiatan berbasis organisasi keagamaan layaknya Muhammadiyah. Namun beberapa perbedaan latar belakang yang menjadi landasan dilaksanakannya kegiatan majlis ta'lim dikarenakan oleh kondisi, karakteristik pengelolaan, orientasi, dan target jama'ah yang berbeda.

Aspek Materi Kegiatan Majelis Ta'lim di Masjid Kampus

Pemaparan aspek materi masing-masing masjid ini menjadi bagian penting untuk mengetahui materi apa saja yang disajikan dalam pelaksanaan majlis ta'lim. Pemaparan aspek materi dimaksudkan untuk memetakan apa fokus kajian yang ingin diprioritaskan oleh masing-masing pengelola. Apakah hanya fokus terhadap aspek materi yang bernuansa *perennial*²⁵ ataukah juga yang bernuansa *acquired*²⁶. Pemetaan aspek materi pada pembahasan ini mengacu pada materi-materi yang biasa dikelompokkan sebagai materi Pendidikan Agama Islam yang mengandung unsur *duniawi*, *ukrowi*, dan hubungan *duniawi* dan *ukhrowi*. Berikut ini adalah aspek materi yang disajikan dalam pelaksanaan kegiatan majlis ta'lim di Masjid Sunan Kalijaga, Masjid Kampus UGM, dan Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY:

Aspek Materi Majelis Ta'lim di Masjid Sunan Kalijaga

Kegiatan majlis ta'lim di Masjid Sunan Kalijaga pengelola mengemasnya dalam tajuk *Islamic Short Course*. Dinamakan *Islamic Short Course* dikarenakan kegiatan ini menyajikan materi-materi keislaman dan hanya berlangsung dengan waktu yang pendek yakni antara setelah selesai sholat maghrib hingga menjelang waktu sholat isya'. Adapun aspek materi yang disajikan dalam kegiatan majlis ta'lim di Masjid Sunan Kalijaga di antaranya adalah Tafsir Al-Qur'an Kontemporer, Shiroh Nabawiyah, Tasawuf, Pemikiran Islam, bahasa arab, dan Fikih Wanita.

Menurut pemaparan dari salah seorang pelaksana harian Masjid Sunan Kalijaga, di samping karena materi-materi tersebut menjadi dasar-dasar keilmuan Islam, hal yang melatar belakangi lahirnya enam aspek materi di atas dikarenakan menyesuaikan dengan disiplin keilmuan masing-masing pengelola Laboratorium Agama yang diberi amanah untuk menjadi pemateri dalam kegiatan *Islamic Short Course*²⁷. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola Laboratorium Agama tidak hanya difokuskan dalam persoalan manajemen kelembagaan. Namun juga diperankan

²⁵ *Perennial* dimaknai sebagai ilmu-ilmu abadi yang akan senantiasa dibutuhkan manusia untuk mengabdikan kepada Tuhan.

²⁶ *Acquired* dimaknai sebagai ilmu-ilmu yang merupakan hasil penelitian dan pencairan manusia untuk melangsungkan kehidupannya di dunia.

²⁷ Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pelaksana harian Masjid Sunan Kalijaga pada tanggal 15 April 2015

sebagai pengampu kajian sesuai dengan disiplin keilmuannya masing-masing. Tugas ganda tersebut menjadi terobosan yang efektif selama tidak mengganggu salah satu tugasnya.

Enam aspek materi pada pelaksanaan *Islamic Short Course* di Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta seluruhnya bersifat *perennial*. Meskipun demikian, penyajian enam materi di atas yang dikemas layaknya proses perkuliahan di kelas formal memberikan makna bahwa materi-materi di atas sudah selayaknya menjadi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi jama'ah yang mayoritas mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Kajian keislaman yang didapatkan di bangku perkuliahan dirasa kurang begitu mendalam atau bahkan belum pernah didapatkan, sehingga menjadikan motivasi bagi para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan *Islamic short course* yang diselenggarakan di masjid kampusnya.

Kajian tafsir Al-Qur'an dapat memberikannya wawasan mengenai isi atau pesan-pesan yang terkandung di dalam sumber hukum Islam tersebut. Pengetahuan tentang Shiroh Nabawiyah memberikan gambaran dan informasi penting mengenai sekilas tentang sejarah peradaban Islam bagi mahasiswa yang mengemban peran sebagai intelektual muslim. Kajian Tasawuf menjadi media bagi mahasiswa untuk mendalami keilmuan tentang tata cara mensucikan diri lahir dan batin, yang juga merupakan bagian dari kebutuhan hidupnya sebagai seorang muslim untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah. Kajian Pemikiran Islam mempunyai kontribusi penting dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk mengetahui dasar-dasar yang menjadi landasan pemikiran Islam, konsep berfikir dalam Islam, serta produk pemikiran para pemikir-pemikir Islam klasik dan kontemporer. Kajian Bahasa arab menjadi media bagi mahasiswa untuk menekuni ilmu bahasa arab yang menjadi bahasa sumber hukum Islam, bahasa pengantar pada beberapa referensi perkuliahan, dan bahasa komunikasi internasional tatkala mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan jenjang berikutnya ke negara timur tengah yang sebagian besar menggunakan komunikasi bahasa arab. Fikih wanita menjadi ilmu yang harus dimiliki seorang muslim, terlebih muslimah, karena banyaknya hukum-hukum Islam yang mengatur kehidupan seorang wanita dan harus menjadi pengetahuan seorang laki-laki tatkala berperan sebagai seorang suami dan ayah. Dengan demikian keenam aspek materi tersebut di atas menjadi pengetahuan yang harus dimiliki oleh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Kegiatan *Islamic short course* yang diselenggarakan di masjid memberikan kontribusi penting dalam upaya transformasi ilmu-ilmu agama Islam yang menjadi peran dan fungsi UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus yang beridentitaskan nilai-nilai keislaman.

Aspek Materi Majelis Ta'lim di Masjid Kampus UGM

Kegiatan majlis ta'lim di Masjid Kampus UGM pengelola mengemasnya dalam tajuk *Islamic Lecturer (I-Lecturer)*. Dinamakan *Islamic Lecturer* dikarenakan kegiatan ini didesain dengan format layaknya kegiatan perkuliahan dengan alokasi waktu pada hari minggu pagi dan kamis sore. Selain itu, kegiatan *Islamic lecturer* juga merupakan bagian dari proses perkuliahan non-formal bagi mahasiswa muslim yang menjadi media pokok untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam di lingkungan kampus UGM. Adapun aspek materi yang disajikan dalam kegiatan majlis ta'lim di Masjid Kampus UGM di antaranya adalah Kajian Tafsir Al-Qur'an dan Kajian Tauhid. Menurut pemaparan dari ketua umum Jama'ah Sholahuddin yang menjadi pelaksana kegiatan majlis ta'lim mengatakan bahwa sebenarnya banyak pilihan aspek materi yang akan disajikan dalam kegiatan *Islamic Lecturer*, namun karena keterbatasan waktu maka dipilihlah dua jenis aspek materi di atas. Keduanya merupakan hasil analisa pelaksana yang menganggap bahwa kajian Tafsir Al-Qur'an dan kajian tauhid menjadi prioritas utama dalam kegiatan *Islamic Lecturer*. Hal yang menjadi pertimbangan adalah bahwa kedua aspek materi tersebut merupakan materi pokok yang harus dimiliki seorang muslim. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pedoman hidup, sedangkan penegakan tauhid menjadi visi utama dalam kehidupan seorang muslim. Alasan lainnya adalah meneruskan program kepengurusan sebelumnya, meskipun secara konsep penyajian materi terdapat perbedaan.²⁸ Hal ini merupakan satu langkah konkrit yang ditunjukkan oleh Jama'ah Sholahuddin untuk merealisasikan visi dan misinya dalam program kegiatan yang nyata. Sebagai mana disebutkan di atas bahwa visi dan misi dari Jama'ah Sholahuddin berorientasi kepada upaya internalisasi nilai-nilai tauhid dalam segala dimensi kehidupan manusia. Maka aspek materi Tafsir Al-Qur'an dan Tauhid menjadi sarana untuk mempelajari dan meningkatkan pemahaman mengenai pesan-pesan Tuhan dalam Al-Qur'an dan nilai-nilai tauhid yang menjadi pedoman hidup manusia.

Berdasarkan pemaparan mengenai aspek materi di atas, dapat disimpulkan bahwa dua aspek materi pada pelaksanaan *Islamic Lecturer* di Masjid Kampus UGM yang diselenggarakan oleh Jama'ah Sholahuddin seluruhnya bersifat *perennial*. Meskipun demikian, hal ini menjadi langkah yang paling efektif untuk memberikan keilmuan dasar Islam secara bertahap. Jika melihat karakteristik mahasiswanya, jama'ah di Masjid UGM yang mayoritas diikuti oleh mahasiswa UGM menjadikan kegiatan *Islamic Lecturer* sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan tentang pengetahuan agamanya. Karena bekal pengetahuannya lebih didominasi oleh pengetahuan tentang disiplin keilmuannya di kampus. Oleh karenanya, kajian tafsir

²⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Umum Jama'ah Sholahuddin UGM pada tanggal 29 Maret 2015.

Al-Qur'an dan Tauhid menjadi aspek materi fundamental yang harus dimiliki dan merupakan pondasi untuk mempelajari dan mendalami keilmuan yang lainnya.

Kedua aspek materi yang disajikan dalam kegiatan *Islamic Lecturer* merupakan bentuk aktualisasi dari visi dan misi Jama'ah Sholahuddin sebagai lembaga dakwah yang mempunyai cita-cita untuk menegakkan dan mengokohkan tauhid atau keimanan seorang muslim. Sejarah lahirnya Jama'ah Sholahuddin salah satunya berangkat dari kegelisahan mahasiswa muslim yang pada saat itu melihat kenyataan bahwa mereka terhegemoni oleh intrik-intrik politik yang kontradiksi dengan nilai-nilai Islam. Sehingga fenomena tersebut menjadi pemacu para mahasiswa muslim UGM untuk membentuk sebuah organisasi yang berorientasi mendakwahkan nilai-nilai Islam dalam bingkai ukhuwah, tanpa terkotak-kotak pada perbedaan ideologi keagamaan masing-masing. Prioritas aspek materi tafsir Al-Qur'an dan tauhid di atas merupakan sepeinggal upaya untuk mentransformasikan nilai-nilai tauhid yang menjadi dasar keislaman seorang muslim. Ketika pengetahuan dasar tentang tauhid sudah dikuasai, baru dikembangkan keilmuan lainnya untuk mengembangkan nilai-nilai Islam secara universal.

Aspek Materi Majelis Ta'lim di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY

Kegiatan majlis ta'lim di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY takmir masjid mengemasnya dalam tajuk Kajian Ba'da Dhuhur. Dinamakan Kajian Ba'da Dhuhur dikarenakan kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap hari setelah selesai sholat dhuhur. Adapun aspek materi yang disajikan dalam kegiatan majlis ta'lim di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY di antaranya adalah kajian tafsir Al-Qur'an, tafsir hadist, fikih dan hukum Islam, tasawuf dan kajian tematik. Menurut pemaparan pelaksana kegiatan majlis ta'lim di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY bahwa pemilihan terhadap empat aspek kajian tersebut didasarkan pada analisis kebutuhan fundamental yang dibutuhkan oleh civitas akademika dalam mengembangkan pengetahuannya mengenai kajian keislaman. Tafsir Al-Qur'an dan hadits sebagai pembelajaran terhadap sumber hukum Islam dan pedoman hidup, fikih dan hukum Islam sebagai pembelajaran terhadap tata cara beribadah dan hukum-hukum Islam. Kajian tasawuf sebagai pembelajaran untuk membangun kepribadian seorang muslim. Sedangkan untuk kajian tematik sebagai pembelajaran terhadap tema-tema *up to date* untuk menjadi pengetahuan bersama. Materi-materi tersebut di atas dianggap penting untuk ditransformasikan kepada warga kampus UMY untuk menambah wacana keislaman dan wacana kontemporer dalam rangka mewujudkan visi dan misi Masjid KH. Ahmad Dahlan sebagai salah satu pusat peradaban Islam. Wujud sederhana dari peradaban Islam adalah dengan menjadikan masjid sebagai pusat belajar bersama mengenai tema-tema keislaman yang diperuntukkan bagi kaum muslim.

Berdasarkan pemaparan mengenai aspek materi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima aspek materi yang seluruhnya bersifat *perennial* pada pelaksanaan *Kajian Ba'da Dhuhur* di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY. Penyajian materi-materi di atas merupakan bentuk upaya aktualisasi visi dan misi Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam dan pembentukan karakter seorang muslim, khususnya di internal kampus UMY. Sehingga kegiatan momentum kajian ba'da dhuhur merupakan salah satu langkah konkrit yang dilakukan oleh takmir masjid untuk memberikan bekal pengetahuan fundamental Islam kepada seluruh civitas akademika UMY.

Tafsir Al-Qur'an dan hadits merupakan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan pedoman bagi kehidupan seorang muslim. Fikih dan hukum Islam merupakan pengetahuan yang menjadi bekal untuk melaksanakan kegiatan ibadah, baik secara vertikal maupun horisontal. Tasawuf menjadi keilmuan yang mengandung pengetahuan tentang proses penyucian diri seorang muslim untuk mendekatkan diri pada Allah. Kajian tematik berisi motivasi dan strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan karakter Islami. Dengan beragamnya karakter jama'ah kajian yang terdiri dari unsur dosen, karyawan, dan mahasiswa UMY menjadikan aspek-aspek materi di atas sudah selayaknya dimiliki oleh civitas akademika UMY, terlebih UMY sebagai kampus yang dikembangkan dengan basis nilai-nilai keislaman.

Tabel Pemetaan Corak Materi Kegiatan Majelis Ta'lim

No	Nama Masjid	Aspek Materi yang Disajikan	Corak Materi
1	Masjid Sunan Kalijaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tafsir Al-Qur'an Kontemporer 2. Shiroh Nabawiyah 3. Tasawuf 4. Pemikiran Islam 5. Bahasa arab 6. Fikih Wanita 	<i>Perennial</i>
2	Masjid Kampus UGM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tafsir Al-Qur'an 2. Tauhid 	<i>Perennial</i>
3	Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tafsir Al-Qur'an 2. Tafsir hadist 3. Fikih dan hukum Islam 4. Tasawuf 5. Kajian tematik 	<i>Perennial</i>

Pola Pembelajaran Majelis Ta'lim di Masjid Kampus Yogyakarta

Metode dan Model pembelajaran merupakan unsur yang terpenting dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini metode dan model pembelajaran dimaknai sebagai suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh pemateri agar proses penyampaian materi kepada para jama'ah tercapai sesuai dengan tujuan. Oleh karenanya, metode dan model pembelajaran mempunyai peranan penting untuk metransformasikan pengetahuan kepada si belajar. Metode dan model pembelajaran juga memiliki fungsi sebagai penghubung antara materi ajar dengan tujuan pembelajaran. Materi yang baik jika ditransformasikan secara baik pula akan menghantarkan pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Jika dilihat dari media pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan majlis ta'lim di Masjid Sunan Kalijaga, Masjid Kampus UGM, dan Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY nampak akan berimplikasi terhadap penggunaan metode dan model yang berbeda.

Metode dan Model Pembelajaran Majelis Ta'lim di Masjid Sunan Kalijaga

Pada prosesnya, pembelajaran majlis ta'lim di Masjid Sunan Kalijaga menggunakan media LCD, *white board*, dan laptop. Media-media pembelajaran tersebut membantu proses penyampaian materi kepada jama'ah. Secara teknis kegiatan proses pembelajaran majlis ta'lim untuk seluruh penyampaian kajian aspek materi menggunakan metode ceramah, cerita, dan tanya jawab.

Sedangkan dalam pengemasan penyampaian materi, pemateri menyampaikannya dengan menggunakan metode deduktif dan reflektif. Metode deduktif didasarkan pada upaya menjelaskan konsep materi secara teoritik, dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan contoh faktual yang relevan dengan konsep materi yang disampaikan. Metode reflektif didasarkan pada upaya pemateri mengajak para jama'ah untuk *muhasabah* diri. Untuk model pembelajaran menggunakan model kontekstual sebagaimana yang dilakukan dengan metode deduktif dan model kuantum dengan menggunakan media pembelajaran yang memadai..

Secara keseluruhan, dari sisi metode dan model pembelajaran, kegiatan majlis ta'lim di Masjid Sunan Kalijaga sudah memanfaatkan media pembelajaran untuk memudahkan pemateri dalam menyampaikan materi dan jama'ah dalam merespon materi yang disampaikan. Metodepun digunakan secara variatif dan melibatkan jama'ah secara aktif sebagai subjek belajar. Terlebih keberadaan teh hangat dan sebugkus roti menjadi penghangat bagi para jama'ah untuk lebih menikmati materi yang disampaikan. Hal ini mengindikasikan ada perhatian khusus dalam proses

pembelajaran, sehingga selaras dengan tujuan yang diinginkan. Meskipun terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan lagi, semisal pengadaan buku panduan bagi para jama'ah agar pembelajaran berjalan lebih efektif.

Metode dan Model Pembelajaran Majelis Ta'lim di Masjid Kampus UGM

Pada prosesnya, pembelajaran majlis ta'lim di Masjid Kampus UGM menggunakan media Al-Quran pada kajian tafsir Al-Qur'an dan buku panduan pada kajian Tauhid. Media-media pembelajaran tersebut membantu jama'ah dalam merespon materi yang disampaikan. Secara teknis kegiatan proses pembelajaran majlis ta'lim untuk seluruh penyampaian kajian aspek materi menggunakan metode ceramah, cerita, dan tanya jawab.

Dari sisi pengemasan materinya pemateri menggunakan metode deduktif dan reflektif. Metode deduktif nampak pada penyajian materi yang dilakukan dengan cara menyampaikan isi dan substansi materi yang disampaikan, kemudian memberikan contoh-contoh yang relevan baik dari cerita sejarah maupun contoh yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk metode reflektif digunakan pemateri untuk mengajak jama'ah menemukan kasus-kasus nyata yang terkait dengan ayat yang disampaikan. Pengembangan model kajian tersebut di atas, mampu memberikan pengalaman bagi para jama'ah untuk merangsang keingintahuannya, daya imajinasinya, dan kepekaannya dalam merespon fenomena yang terjadi di masyarakat.

Untuk model pembelajaran pemateri lebih cenderung menggunakan model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemateri mengkaitkan pokok bahasan dengan realita yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat. Sedang dari sisi penggunaan media pelaksanaan kegiatan kajian tauhid hanya memperhatikan gaya belajar auditorial.

Secara keseluruhan, dari sisi metode dan model pembelajaran, kegiatan majlis ta'lim di Masjid Kampus UGM sudah melibatkan jama'ah dengan cara memberikan kesempatan untuk bertanya maupun memberikan argumen melalui tulisan. Terlebih keberadaan teh hangat menjadi penghangat bagi para jama'ah untuk lebih menikmati materi yang disampaikan. Hal ini mengindikasikan ada perhatian khusus dalam proses pembelajaran, sehingga selaras dengan tujuan yang diinginkan. Meskipun terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan lagi, semisal pengadaan media visual yang dapat membantu pemateri dan jama'ah untuk lebih mudah merespon materi yang disampaikan.

Metode dan Model Pembelajaran Majelis Ta'lim di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY

Pada prosesnya, pembelajaran majlis ta'lim di Masjid KH. Ahmad Dahlan dilaksanakan layaknya memberikan khotbah Jum'at di atas mimbar. Media yang digunakan adalah lembar materi yang dibagikan kepada para jama'ah. Secara teknis kegiatan proses pembelajaran majlis ta'lim untuk seluruh penyampaian kajian aspek materi menggunakan metode ceramah dan cerita. Dalam penggunaan media dan metode sebenarnya kelima kajian yang diselenggarakan di Masjid KH. Ahmad Dahlan dilakukan dengan cara yang sama.

Dari sisi pengemasan materinya pemateri menggunakan metode deduktif. Metode deduktif nampak pada penyajian materi yang dilakukan dengan cara menyampaikan inti isi materi, kemudian memberikan contoh-contoh tentang cerita orang yang dianggap sukses. Untuk model pembelajaran pemateri lebih cenderung menggunakan model pembelajaran kontekstual. Sedang dari sisi penggunaan media pelaksanaan kegiatan kajian tematik hanya memperhatikan gaya belajar auditorial.

Secara keseluruhan, dari sisi metode dan model pembelajaran, kegiatan majlis ta'lim di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY berlangsung secara searah. Hal ini ditandai oleh aktiitas kajian yang hanya penyampaian materi, tanpa adanya ruang dan waktu bagi jama'ah untuk bertanya dan menyampaikan argumennya. Meskipun di saat-saat tertentu pelaksana majlis ta'lim menyediakan minuman dan makanan ringan, kajian dengan sistem searah terkadang kurang menarik minat jama'ah untuk fokus mengikuti kajian. Namun setidaknya dengan lembar materi yang dibagikan kepada para jama'ah bisa membantu untuk menyerap dan memahami apa yang telah disampaikan oleh pemateri.

Berdasarkan hasil pemaparan masing-masing metode dan model pembelajaran pada pelaksanaan majlis ta'lim dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai penggunaan metode dan model pembelajaran. Terlepas dari perbedaan di atas, kegiatan majlis ta'lim di masjid kampus harus memberikan inspirasi bagi pengembangan kegiatan majlis ta'lim di masjid-masjid lainnya. Gaya belajar dogmatif dan monolog sudah tidak relevan diberbagai sisi. Jama'ah harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karenanya penggunaan media dan impelentasi metode serta model pembelajaran yang variatif memberi kesan yang baik dari sisi metodologis bahwa kegiatan majlis ta'lim memang seharusnya didesain dengan memperhatikan gaya belajar audio-visual dan bersifat interaktif. Sehingga jama'ah dapat merespon materi dengan mudah dan dapat memposisikan dirinya sebagai jama'ah yang aktif dan mempunyai ruang untuk mengemukakan pertanyaan atau argumennya terkait materi yang sedang dibahas.

Berikut ini adalah pemetaan mengenai implementasi metode dan model pembelajaran pada kegiatan majlis ta'lim di ketiga masjid kampus di atas:

Tabel Pemetaan Metode dan Model Pembelajaran

No	Nama Masjid	Metode Pembelajaran	Model Pembelajaran
1	Masjid Sunan Kalijaga	- Ceramah, Cerita, dan tanya jawab - Deduktif dan reflektif	- Kontektual dan Kuantum
2	Masjid Kampus UGM	- Ceramah, cerita, dan tanya jawab - Deduktif dan reflektif	- Kontekstual
3	Masjid KH. Ahmad Dahlan UMY	- Ceramah, cerita - Deduktif dan induktif	- Kontekstual

Simpulan

Eksistensi masjid kampus diharapkan dapat menjadi media alternatif bagi mahasiswa untuk mendalami ilmu keislaman yang sedikit atau tidak didapatkan dibangku perkuliahan formal. Mahasiswa dalam pergumulannya pada proses perkuliahan membutuhkan asupan materi keagamaan untuk menjadi stimulus dan pengetahuan bagi pengembangan rasa religiusitas di tengah arus pembelajaran di kampus yang lebih diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan kognitif dan psikomotorik. Untuk itu, pembelajaran keagamaan layaknya majlis ta'lim menjadi ruang yang harus diimplementasikan di masjid kampus untuk memenuhi dahaga mahasiswa akan ilmu agama. Pelaksanaan kegiatan majlis ta'lim di masjid kampus harus benar-benar diorientasikan murni untuk pendalaman keilmuan dan keislaman, bukan untuk propaganda kepentingan ekspansi ideologi keagamaan tertentu. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran dalam kegiatan majlis ta'lim di masjid kampus harus didesain secara proporsional dan efektif yang mencerminkan nuansa demokratis-dialogis.

Rujukan

- Rukmana, Nana, *Masjid dan Dakwah*. Jakarta: Al-Mawardi, 2002.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tilaar, H.A.R., *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad XXI*, Magelang: Indonesia Tera, 1998.
- Abidin, Djamaludin, *Komunikasi dan Bahasa Dakwah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Uchajana, Onong, *Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984.
- Rahmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Uchjana, Onong, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

Perbandingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, Standard BAN-PT dan Total Quality Management di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Hasyim Asy'ari

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: hasyim.asyari@uinjkt.ac.id

DOI : 10.14421/jpi.2015.41.141-157

Diterima: 5 Januari 2015

Direvisi: 18 Maret 2015

Disetujui: 7 Mei 2015

Abstract

Implementation of ISO Quality Management System (QMS) at UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang shows the spirit of the modernization of the campus management system. Application of ISO QMS is intended to facilitate the leaders of the campus to meet Standard of BAN-PT while building TQM. This research is focused on the comparative analysis of the implementation of ISO QMS, the role of Standard of BAN-PT and application of TQM in UIN Maliki Malang. The approach used is qualitative research, with data collection techniques such as interviews, observation and document study. This research finds that, among others, UIN's leaders and internal stakeholders have sought to implement the clauses of ISO QMS correctly and consistently; and increase the involvement of academicians in sustainable campus quality improvement efforts. Implementation of QMS ISO becomes a medium to fulfill the Standard of BAN-PT as well as the foundation for the implementation of TQM.

Keywords: Higher Education Quality, ISO QMS, TQM

Abstrak

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO di UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang menunjukkan semangat modernisasi sistem manajemen kampus. Penerapan SMM ISO tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pimpinan kampus dalam memenuhi Standard BAN-PT sekaligus membangun TQM. Riset ini difokuskan pada analisis komparasi penerapan SMM ISO, peran Standard BAN-PT dan penerapan TQM di UIN Maliki Malang. Pendekatan penelitian

yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian antara lain pimpinan dan stakeholder internal UIN telah berupaya menerapkan klausul-klausul SMM ISO secara benar dan konsisten, dan meningkatkan keterlibatan sivitas akademika dalam upaya pembenahan mutu kampus secara berkelanjutan. Penerapan SMM ISO menjadi media dalam upaya pemenuhan Standar BANT-PT sekaligus fondasi dalam penerapan TQM.

Kata Kunci : Mutu Perguruan Tinggi, SMM ISO, TQM.

Pendahuluan

Arus globalisasi yang telah bergulir di semua sektor kehidupan selama ini telah banyak mengubah paradigma berpikir masyarakat. Hal ini tentunya akan membawa peningkatan harapan dan kebutuhan di semua sektor kehidupan. Salah satu yang diinginkan oleh masyarakat adalah produk dan layanan yang berkualitas, tidak terkecuali pendidikan tinggi. Bagi pimpinan Perguruan Tinggi pengaruh globalisasi merupakan tantangan sekaligus peluang untuk membenahi institusi serta menunjukkan kapasitasnya untuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat tersebut.

Pada kenyataannya pemerintah dan Perguruan Tinggi diperhadapkan pada sejumlah permasalahan yang sangat kompleks yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan secara tuntas. Permasalahan dimaksud dan terus menjadi agenda utama kebijakan pendidikan tinggi adalah mutu Perguruan Tinggi (PT), relevansi, daya saing dan jumlah sarjana yang menganggur sebagai eksekutif negatif sistem PT. Akibat dari kompleksitas permasalahan tersebut PT dinilai belum mampu menghasilkan output sesuai tuntutan *customer*, dan belum mampu memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan bangsa dalam berbagai bidang, termasuk menghadapi kompetisi global.¹

Hal senada juga dinyatakan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kemenag bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain adalah belum adanya master plan (HELTS PTI), kualitas SDM, mutu kurikulum, kuantitas dan kualitas penelitian. Terdapat 3 Agenda penting yang menjadi fokus kebijakan Ditjen Pendidikan Islam yaitu peningkatan dan pemerataan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan peningkatan tata kelola pemerintahan (*governance*), akuntabilitas dan pencitraan; termasuk dalam hal ini target 13 PTAIN pada tahun 2014 sudah memenuhi standar ISO 9001.² Dalam Renstra Depdiknas 2010-

¹ *Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (HELTS) 2003 – 2010*, Jakarta: Depdiknas.

² *Perencanaan Pembangunan Pendidikan Islam, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, 2010*, h.16-20.

2014 (2009:86) juga dinyatakan secara tegas terkait pentingnya penerapan SMM ISO di lingkungan PT dengan menyebutkan target 300 PTN dan 200 PTS pada tahun 2012.³Permasalahan mendasar sebagaimana fokus kebijakan tersebut sudah seharusnya menjadi pusat perhatian bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga PT bisa menjadi lebih mudah dalam mengatasi masalah internal yang krusial sekaligus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai tuntutan yang berkembang di masyarakat.

Indikator lain terkait mutu PT khususnya PTAI bisa dilihat dari hasil akreditasi BAN PT terhadap prodi-prodi PTAI sebagaimana data berikut:

Tabel 1 Prosentase Akreditasi Prodi PTAIN
 (Data Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2014)

Lembaga PTAIN	Jumlah Prodi	Terakreditasi						Belum Terakreditasi		Belum terakreditasi + Kedaluarsa		
		Berlaku			Kedaluarsa			Total	%	total	%	
		A	B	C	Total	%	Total					%
UIN	367	66	133	71	270	73.57	35	9.54	62	16.89	97	26.43
IAIN	361	10	181	83	274	75.9	36	9.97	52	14.4	88	24.38
STAIN	244	4	93	66	163	66.8	15	6.15	67	27.46	82	33.61
Total	972	80	407	220	707	72.74	86	8.85	181	18.62	267	27.47

Dari data di atas dapat diketahui jumlah prodi PTAIN yang sudah diakreditasi 707 dari 972 atau sekitar 72.74%, kedaluarsa 267 prodi (27.47%) dan belum terakreditasi 181 prodi (18.62%). Jumlah prodi yang mendapat akreditasi A hanya 81 prodi (atau berkisar 8.33%), mendapat nilai B sebanyak 407 prodi (43.07%) dan nilai C 221 prodi (23.73%). Penyebaran nilai akreditasi tersebut menunjukkan perlunya pemerintah dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan pimpinan kampus untuk terus mengupayakan pembenahan mutu institusi secara konsisten, sehingga pencapaian nilai akreditasi maksimal bisa diraih. Perhatian serupa juga harus diberikan untuk pembenahan mutu kampus PTAIS yang tersebar di seluruh wilayah dengan kompleksitas problem yang mereka hadapi, sehingga tidak terjadi diskriminasi sebagai target kebijakan. Peran pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk mendorong dan menggerakkan perubahan PTAIS. Penyebaran hasil akreditasi PTAIS dapat dilihat dalam tabel berikut:

³ Renstra Depdiknas 2010-2014, 2009, h. 86.

Tabel 2 Prosentase Akreditasi PRODI PTAIS
(Data Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2014)

Lembaga PTAIS	Jumlah Prodi	Terakreditasi								Belum Terakreditasi		Belum terakreditasi + Kedaluarsa	
		Berlaku				Kedaluwarsa				Total	%	Total	%
		A	B	C	Total	%	Total	%					
INSTITUT	153	3	50	47	101	66.01	20	13.07	32	20.92	52	33.99	
STAIS	964	0	138	417	554	57.47	70	7.26	339	35.17	409	42.43	
FAI	310	14	99	77	190	61.29	53	17.1	67	21.61	120	38.71	
Total	1430	17	287	541	845	59.09	143	10	441	30.84	584	40.84	

Data di atas menunjukkan problem mutu PTAIS yang sangat mendasar. Jumlah prodi PTAIS yang sudah diakreditasi sebanyak 845 dari 1430 atau hanya 59.09%, kedaluarsa 584 prodi (40,84%) dan belum terakreditasi 441 prodi (30.84%). Jumlah prodi yang mendapat akreditasi A hanya 17 prodi (atau hanya 1.18%), mendapat nilai B sebanyak 287 prodi (20.06%) dan nilai C 541 prodi (37.83%). Penyebaran prosentase akreditasi PTAIS tersebut lebih rendah dibanding angka yang diperoleh PTAIN. Data tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan pimpinan PTAIS untuk melakukan pembenahan lebih serius dengan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong semangat perubahan di dalam PTAIS. Minimal dalam hal ini pemerintah memperhatikan aspek SDM dan fasilitas yang dibutuhkan PTAIS, jangan sampai mutu PTAIS tertinggal jauh dibanding PTAIN apalagi dibanding PTN.

Terkait uraian di atas, pimpinan UIN Maliki Malang telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan mutu institusi dengan cara menerapkan SMM ISO, yang persiapannya sudah dilakukan sejak April tahun 2008. Implementasi SMM ISO merupakan kebijakan pimpinan UIN untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan. Penerapan SMM ISO sekaligus menjadi sistem penjaminan mutu institusi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Maliki Malang Nomor: UN.3/PP.00.11/017/2008 dan dalam pelaksanaannya dikelola oleh unit Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas dan Komite Jaminan Mutu (KJM) Fakultas. Penerapan SMM ISO di UIN Maliki Malang merupakan satu-satunya model manajemen mutu yang diberlakukan di institusi tersebut, dengan harapan mampu memberikan layanan dan produk PT yang terbaik.

Permasalahan mendasar PT sebagaimana diuraikan di atas yakni mutu, relevansi dan daya saing yang rendah yang berimbas pada banyaknya jumlah pengangguran sarjana mendorong perlunya pemerintah dan para pimpinan PT untuk serius menangani problem tersebut. Dalam hal ini pimpinan UIN Maliki Malang telah mengambil kebijakan penting yakni menerapkan SMM ISO sebagai sistem penjaminan mutu institusi untuk meningkatkan mutu layanan dan mutu institusi sekaligus untuk menjamin kepuasan *customer*. Penelitian ini difokuskan pada implementasi SMM ISO, peran Standard BAN-PT dan penerapan TQM di UIN Maliki Malang.

Masalah utama yang menjadi fokus dalam penelitian adalah "bagaimana implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM-PT) di UIN Maliki Malang." Adapun pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan adalah: Bagaimana implementasi SMM ISO di UIN Maliki Malang? Bagaimana peran Standard BAN-PT dalam Sistem Penjaminan Mutu di UIN Maliki Malang? Bagaimana pencapaian TQM di UIN Maliki Malang?

Sistem Penjaminan Mutu

Mutu Pendidikan Tinggi (PT) menjadi sangat penting bagi sivitas akademika dan stakeholder PT. Untuk memperoleh label institusi yang bermutu bahkan membanggakan diperlukan Sistem Penjaminan Mutu yang benar-benar *applicable* disamping dukungan biaya dan sumberdaya yang tidak sedikit. Sistem Penjaminan mutu yang ideal harus difokuskan pada tridharma PT, sistem internal dan pemenuhan sistem nasional seperti akreditasi BAN-PT. Metodologi yang bisa digunakan menurut Billing antara lain evaluasi diri, *peer-review*, eksternal *peer-review*, indikator kinerja, dan survey.⁴ Al Bandary (2005:181) dalam hal ini menyebutkan metode penjaminan mutu di Oman sebagai sebuah siklus yang mencakup evaluasi diri, *review* eksternal, *feedback*, dan monitoring perubahan/perkembangan.⁵

Penjaminan mutu melalui SMM ISO telah berkembang pesat dan menyentuh pada hampir semua jenis aktivitas produksi dan jasa termasuk institusi pendidikan. Fokus perhatian SMM ISO berkaitan dengan seluruh aspek dan kegiatan institusi pendidikan baik bidang pengajaran, riset, pengabdian masyarakat maupun layanan lain, seperti perpustakaan dan pusat-pusat studi. Penerapan SMM ISO dalam institusi pendidikan sudah menjadi kebijakan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama sebagaimana tertuang

⁴ David Billing, *International Comparisons and Trend in External Quality Assurance of Higher Education*. Springer (Online), Vol. 47, 26 halaman. 2004, Tersedia: <http://www.jstor.org/4151559>.

⁵ Mohammed Sulaiman Al Bandary, *Meeting the challenges: The development of quality assurance in Oman's Colleges of Education*. Springer, 2005, h. 181. Tersedia: .

dalam RENSTRA Kemendiknas dan Kementerian Agama. Penerapan SMM ISO dimaksudkan untuk memperbaiki mutu layanan institusi pendidikan yang mengedepankan tata kelola yang baik, dan akuntabilitas yang tinggi.

Mutu Pendidikan Tinggi

Dalam satu dekade terakhir mutu pendidikan tinggi menjadi wacana publik dan menjadi konsern pemerintah. Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen RENSTRA tahun 2009-2014 kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan diarahkan pada pembenahan mutu secara menyeluruh. Mutu menjadi agenda penting dalam upaya memperbaiki kondisi institusi pendidikan yang ada saat ini. Mutu PT berkaitan erat dengan kemampuan institusi untuk menghadapi tantangan nasional dan global, termasuk membantu masyarakat dalam menangani problem kehidupan mereka. Mutu PT juga yang menunjukkan dan menentukan kemampuan kompetisi antar institusi pendidikan baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Mutu PT merupakan kemampuan menghasilkan layanan dan produk institusi dalam batas maksimal. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dicirikan dengan antara lain kemampuannya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki karakter dan jati diri yang berintegritas tinggi; menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi; meningkatkan kemampuan penelitian; menghasilkan lulusan dan insan peneliti yang secara berkelanjutan berhasil meningkatkan kesehatan masyarakat, kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan umum.⁶ Sisi penting lain adalah terkait apa yang diminta *stakeholder*, terutama mahasiswa umumnya berharap output pendidikan yang benar-benar mengacu pada standar yang dipandang ideal. Salah satu tantangan pendidikan tinggi adalah kompetisi yang berkembang di antara universitas.⁷ Saat ini kompetisi universitas bukan lagi pada level lokal dan nasional akan tetapi sudah menjangkau dimensi global. Kompetisi pada semua level tersebut dapat memacu usaha-usaha perbaikan mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pimpinan dan sivitas akademika kampus mampu menyediakan program dan layanan yang bermutu sehingga mendorong pada peningkatan pemanfaatan output PT. Faktor kunci untuk dapat memenangkan kompetisi dimaksud adalah keseriusan pimpinan dan *stakeholder* terkait untuk membenahi problematika institusional dan personal kampus dalam kerangka mendorong terwujudnya layanan yang bermutu.

Pandangan tentang mutu sangat bervariasi dan pada prinsipnya mengacu pada karakteristik produk dan layanan yang memiliki keunggulan tertentu. Mutu berkaitan erat dengan keunggulan produk dan layanan yang dirasakan

⁶ *Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (HELTS) 2003 – 2010*, (Jakarta: Depdiknas, 2004), h. 49.

⁷ Jerold W. Apps, *Higher Education in a learning society*, (London: Jossey-Bass, 1988), h. 35.

memuaskan *customer*. Juran mendefinisikan mutu sebagai "*fitnes for uses*". Kano mendefinisikan mutu terkait produk atau layanan yang dapat memenuhi harapan *customer*.⁸Harvey dan Green memaknai mutu sebagai hasil yang sempurna, kinerja luar biasa, kemampuan merubah pengetahuan dan pengembangan kepribadian mahasiswa, kemampuan untuk memberi nilai efisiensi dan efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan, kesesuaian produk dan layanan dengan tujuan.⁹

Mutu PT juga harus dilihat dari dimensi internasional seperti proyek-proyek kerjasama antar Negara antara lain pertukaran pengetahuan, jaringan interaktif, mobilitas dosen dan mahasiswa dan proyek-proyek penelitian internasional, termasuk publikasi hasil riset dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai budaya nasional dan lingkungan. Dimensi internasional menjadi salah satu ukuran penting jika institusi PT ingin berkiprah di tingkat global. PT seperti ini tidak lagi unggul di dalam negeri akan tetapi unggul dan akan menjadi referensi pengembangan keilmuan serta aspek-aspek terkait dalam perspektif dunia.¹⁰Wacher menyebut dimensi internasional PT sebagai proses integrasi sistematis dimensi-dimensi internasional ke dalam bentuk pengajaran, riset, dan layanan publik PT.¹¹ Jika konsep ini diterapkan maka akan lahir PT yang berkelas global dengan aktivitas akademik, fungsi-fungsi lain yang ideal serta segudang prestasi sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat global. Sebagai contoh integrasi kurikulum nasional dan kurikulum global, teknik pengajaran, sumber daya dan IT yang berkelas dunia. Jika ini menjadi acuan, maka tidak ada lagi PT yang minus fasilitas, minus kreativitas dan minus prestasi serta minus penyerapan lapangan kerja bagi alumninya.

Pandangan-pandangan terkait filosofi mutu PT di atas memberikan gambaran bahwa mutu PT merupakan kemampuan institusi untuk memberikan layanan dan output terbaik yang dapat menjamin kepuasan seluruh *customer* dan *stakeholder* institusi. Filosofi mutu berkembang mengikuti pemikiran dan harapan ideal masyarakat serta dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai idealisme tersebut maka dibutuhkan manajemen yang benar dalam arti efisien dan efektif, juga dibutuhkan tipe kepemimpinan yang visioner. Di sinilah letak pentingnya penerapan SMM ISO dalam membantu pengelolaan mutu institusi yang ideal.

⁸ Majid Konting, *et al.*, *Quality Assurance in Higher Education Institution: Exist Survey among University Putra Malaysia Graduating Student*, (International Educational Studies (online), 2009), Vol.2. Tersedia: <http://www.cosenet.org/journal/html/>, h. 25.

⁹ David Lim, *Quality Assurance in Higher Education*, (Sydney, Ashgate, 2001), h. 4.

¹⁰ Digumarti Bhaskara Rao, *Higher Education in The 21st Century (Vision and Action)*, (New Delhi: Discovery Publishing House, 2003), h.25.

¹¹ Dirk Van Damme, *Quality Issues in the Internationalisation of Higher Education*, (Springer (Online), Vol. 41, 28 halaman. Tersedia: <http://www.jstor.org/stable/3448132>, 2001, h. 417.

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO

Penerapan SMM ISO merupakan trend yang berkembang dalam dunia industri dan sudah merambah ke dunia pendidikan. Banyaknya lembaga pendidikan yang berusaha untuk mendapatkan sertifikasi ISO tidak terlepas dari adanya keinginan untuk berkiprah di kancah nasional bahkan internasional. Menang dalam kompetisi dan memiliki reputasi yang membanggakan merupakan bagian penting untuk mempertahankan eksistensi institusi. Pemikiran seperti ini tidak salah mengingat tantangan global perlu diantisipasi secara cepat dan tepat. SMM ISO bisa menjadi salah satu pilihan untuk membangun institusi pendidikan yang kuat dan adaptif terhadap perubahan. Meskipun demikian memperoleh sertifikat ISO bukanlah langkah akhir dan tidak secara otomatis institusi menjadi bermutu. Penerapan SMM ISO merupakan pintu masuk untuk penerapan manajemen mutu terpadu (TQM) yang tujuan akhirnya adalah untuk memberikan kepuasan terhadap *customer*, dengan cara melakukan perbaikan mutu berkelanjutan pada semua aspek dan semua aktivitas institusi.

ISO (International Organization for Standardization) didirikan di Geneva Switzerland pada tahun 1946. Istilah ISO berasal dari bahasa Mesir yakni *isos* yang berarti *Oneness*, merupakan standar penjaminan mutu dan manajemen mutu internasional. SMM ISO sudah digunakan oleh beberapa negara dan sudah menjadi persyaratan untuk industri dan sebagian institusi nonprofit. Istilah SMM ISO 9000 di Amerika disebut dengan seri Q90 ANSI (*American Nation Standards Institute*) /ASQC (*American Society for Quality Control*), di Inggris disebut BS 5750. SMM ISO merupakan standar internasional terkini bagi manajemen mutu untuk sertifikasi sistem mutu.¹² ISO 9001 menyiapkan kerangka kerja untuk membangun praktek yang konsisten, berisi standar yang mengkafer desain produk, pengembangan, produksi, instalasi, dan servis. ISO 9000 menggabungkan siklus perbaikan berkelanjutan sebagaimana dapat dilihat dari klausul-klausul review manajemen, internal audit dan tindakan korektif.¹³ SMM ISO menurut Kadir membantu institusi dalam membuat perencanaan, manajemen, produksi dan pengembangan sumber daya manusia untuk menyediakan layanan dan produk sesuai permintaan *customer*.¹⁴

¹² James G. Peterson, *ISO 9000: Standar Kualitas Seluruh Dunia*. Jakarta: Indeks, penerj. Marianto Samosir, 2010), h. 3.

¹³ Yasemin Aksoy & Peter Schadel, *ETC Measures the Impact of ISO 9002 on Corporate Quality Inform (online)*, 10 halaman. Tersedia: <http://www.jstor.org/stable/25062299> (06/09/2011), 1997, h. 85.

¹⁴ Sity Daud, et al., *A Perception on The Effectiveness of Undergraduate and graduate Programmes Management through an ISO Certification Scope Merger*. Elsevier(Online), Tersedia: www.Sciencedirect.com, 2010, h. 552.

Standard BAN-PT

BAN-PT merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, dengan tujuan dan manfaat: 1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi; 3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.¹⁵

Penjaminan mutu pendidikan tinggi dijalankan melalui tahap-tahap yang dirangkai dalam suatu proses yaitu menetapkan visi dan misi; program studi menetapkan visi dan misi program studinya; penjabaran ke dalam standar mutu; Standar mutu dirumuskan dan ditetapkan dengan meramu visi PT; PT menetapkan organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu; Perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan manajemen kendali mutu; Perguruan tinggi mengevaluasi dan merevisi standar mutu secara berkelanjutan.

SMM ISO memfasilitasi pelaksanaan SPM-PT sebagaimana dinyatakan dalam laporan evaluasi implementasi SPMI-PT tahun 2008. Hal penting yang perlu diketahui adalah kerangka pikir, tujuan, dan kriteria dalam SPM-PT berbeda dengan SMM ISO, terutama fakta bahwa: 1. SPM-PT merancang dan menetapkan standar perguruan tinggi berdasarkan visi PT, sedangkan ISO merupakan sarana untuk melaksanakan standar yang telah ada di perguruan tinggi; 2. ISO tidak bertujuan meningkatkan standar yang justru merupakan tujuan utama SPM-PT; 3. ISO dapat digunakan sebagai salah satu alat kendali implementasi SPM-PT, namun tidak berarti bahwa ISO mampu menggantikan SPM-PT.¹⁶

Kaitan SMM ISO dengan TQM

Penerapan SMM ISO dalam suatu institusi tidak berarti identik dengan penerapan TQM. TQM merupakan filosofi manajemen mutu yang menekankan pemberdayaan seluruh *stakeholder* untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan mutu institusi. Penerapan SMM ISO dimaksudkan untuk

¹⁵ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, (Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Sarjana, Jakarta, 2008), h.5.

¹⁶ SPM-PT, Depdiknas, 2008, h.16.

membenahi mutu layanan dan mutu institusi sekaligus akan menjadi fondasi yang kokoh untuk penerapan TQM. Penerapan TQM tidak membutuhkan aplikasi standar eksternal.¹⁷ Hal senada disampaikan oleh Abramavicius penerapan SMM ISO dilakukan sebelum penerapan TQM, pada tataran empirik SMM ISO bisa menjadi penghalang penerapan TQM.¹⁸

Penerapan SMM yang kaku akan mempengaruhi moral dan kreativitas staf terutama akademisi jika itu institusi pendidikan. Karyawan yang memiliki pendidikan memadai dan bekerja dalam lingkungan akademik membutuhkan fleksibilitas, independensi dan iklim yang mendukung. Ketatnya prosedur hanya akan merusak etos, loyalitas dan dedikasi para staf. Sallis menggaris bawahi hal ini dengan pernyataannya ISO 9000 yang diaplikasikan secara kaku akan menjadi sebuah hal yang kontra produktif bagi tenaga kerja terdidik dan profesional, seperti mengajar. Perhatian yang berlebihan dan keharusan kerja terlalu keras dan kaku terhadap sistem dan prosedur dapat merusak moral dan kreativitas staf.¹⁹

Pandangan Sallis terkait posisi SMM ISO 9000 secara lengkap adalah: 1. melihat BS5750 dan ISO9000 sebagai langkah awal TQM; menangani infrastruktur prosedural yang mengawali terjadinya perubahan kultur dan perilaku; memberikan kepercayaan diri untuk melangkah ke depan untuk menangani isu-isu besar yang dihubungkan dengan TQM; 2. menempatkan BS5750 dan ISO9000 sebagai bagian inti dalam mutu terpadu; dalam model ini BS5750 dan ISO9000 menyelenggarakan TQM dan memberikan pondasi yang solid untuk kemajuan selanjutnya; 3. BS5750 dan ISO9000 memiliki peran minor dalam perusahaan yang menjalankan TQM, hanya sebatas menjamin konsistensi operasional prosedur institusi (partisipasi aktif seluruh pekerja); 4. BS5750 dan ISO9000 dipandang sebagai hal yang tidak relevan dengan atau antitetik terhadap mutu; dipandang sebagai pengacau birokratis dalam dunia pendidikan; menimbulkan sebuah kekuatan dan perasaan bermusuhan.²⁰

Pemilihan sebuah sistem mutu bukan sekedar untuk mencari citra baik atau keren-kerenan. Memperkenalkan BS5750 dan ISO9000 merupakan sebuah langkah yang mahal dan memakan waktu dan bahkan mungkin sulit untuk dilakukan, khususnya di sekolah. Standar mutu dapat memiliki peranan dalam TQM sebagai pesan aktual dan potensial kepada pelanggan bahwa institusi menggunakan mutu secara serius dan bahwa kebijakan-kebijakan dan praktek-prakteknya sesuai dengan

¹⁷ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (Jogjakarta: Ircisod, 2010, h.131).

¹⁸ Povilas Vanagas, *Developmental of Total Quality Management in Kaunas University of Technology*. 2008, h. 69. Tersedia: <http://www.jstor.org>.

¹⁹ Op.cit, Sallis, h. 133.

²⁰ Op.cit, h.131-133.

standar mutu nasional dan internasional. Ini dapat memberikan kepercayaan eksternal di samping membangun kebanggaan internal.²¹

Rizvi menilai SMM ISO 9000 merupakan fondasi untuk program mutu total. SMM ISO 9000 menekankan pada proses dan dokumentasi sehingga informasi yang ada di dalamnya dapat dijadikan acuan dalam melakukan perbaikan mutu institusi.

*ISO 9000 memberimu dasar program mutu total. Mengikuti sertifikasi ISO 9000 benar-benar memberimu pendekatan yang rapi bagi proses-proses yang akan kamu lakukan. Kamu memiliki proses dan prosedur yang khusus, dan keduanya harus tertulis. Dari sana, kamu dapat meningkatkan segalanya karena kamu melihatnya, karena ia tertulis. Kamu dapat bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang dapat saya lakukan dengan lebih baik? Ini adalah unsur kunci TQM.*²²

Penerapan SMM ISO belum berarti menjamin mutu institusi, ISO hanya sekedar proses untuk memperbaiki dan menampilkan institusi mengikuti standar tertentu. Penerapan SMM ISO 9000 tidaklah dimaksudkan untuk menjamin mutu total produk dan layanan, akan tetapi SMM ISO 9000 menjadi pintu masuk untuk penerapan TQM. SMM ISO menekankan institusi menyusun sistem mutu dan menjalankan proses institusi sesuai standar dan prosedur yang telah dibuat, sistem dokumentasi kegiatan yang ketat, serta pentingnya peningkatan yang kontinyu. Konsistensi inilah yang penting dalam ISO. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Katz:

*Sertifikasi ISO 9000 sendiri tidak menjamin Mutu Total; untuk mencapai Mutu Total, peningkatan terus menerus melampaui persyaratan minimum ISO 9000 seringkali diperlukan. Oleh karena itu, sertifikasi ISO 9000 sering kali merupakan pintu masuk/pendahuluan atau penghubung kepada TQM.*²³

Uraian tentang posisi SMM ISO 9000 dan kaitannya dengan TQM di atas menunjukkan adanya variasi pandangan yang kesemuanya mengakui bahwa SMM ISO 9000 merupakan fondasi yang kuat untuk menerapkan TQM dan upaya pemenuhan standar BAN-PT. SMM ISO memuat klausul-klausul sistem mutu yang dapat membantu operasi dan kinerja institusi lebih efisien dan efektif. Hal yang lebih penting diperhatikan adalah upaya-upaya untuk memperbaiki berbagai aspek terkait dengan SMM tersebut dalam kerangka memberikan jaminan produk

²¹ Ibid, h.134-135.

²² *ISO 9000: Handbook of Quality Standards and Compliance*, (New Jersey: Prentice-Hall,1992), h.114.

²³ *Ibid*, h.111.

dan layanan yang bermutusekaligus memastikan terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan *customer*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang diartikan sebagai prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan lisan, tulisan, pandangan serta perilaku nara sumber.²⁴ Hal yang sama juga dinyatakan oleh Miles dan Huberman bahwa data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan bukan rangkaian angka.²⁵ Esensi pandangan di atas adalah bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data dan informasi berupa pernyataan kalimat sesuai realitas yang terjadi. Hal penting dalam penelitian kualitatif adalah usaha-usaha peneliti untuk mendapatkan gambaran riil tentang keterkaitan pandangan, sikap, perilaku, dan aktivitas subjek penelitian terkait implementasi kebijakan SMM ISO di lingkungan UIN Maliki Malang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Miles dan Huberman menyebutkan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman yang diproses melalui pencatatan, pengetikan, dan penyuntingan.²⁶ Penggunaan teknik studi dokumen dalam penelitian ini merupakan langkah awal untuk melihat dan mengkaji dokumen terkait implementasi SMM ISO antara lain manual mutu, SOP, laporan realisasi sasaran mutu (sarmut) atau Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan gambaran terkait kesiapan, ketercapaian penerapan SMM dan peningkatan kinerja institusi UIN Maliki Malang. Peneliti dalam hal ini mempelajari dokumen-dokumen penting terkait implementasi SMM ISO dan melakukan kajian serta membandingkan perkembangan atau peningkatan realisasi pencapaian sasaran mutu yang terdapat dalam SMM ISO UIN Maliki Malang.

Penerapan SMM ISO

Pertimbangan Filosofis Implementasi SMM ISO

Penerapan SMM ISO dilandasi oleh beberapa alasan, yaitu *pertama*, Penerapan SMM ISO membantu banyak hal terutama pembenahan manajerial UIN. *Kedua*, tuntutan dan harapan masyarakat yang tinggi terhadap mutu lulusan; dan tantangan dunia pendidikan tinggi apalagi yang berlabel agama memang sangat

²⁴ Robert C. Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative-Research methods*, (New York: John Wiley & Sons, 1975), h.4.

²⁵ Matthew B. Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press., 1992), h.15.

²⁶ *Ibid*

berat. Ide untuk menghasilkan output yang bermutuatutlah mendapat dukungan semua pihak. Penerapan SMM ISO mendorong pimpinan untuk konsisten dengan klausul dan mekanisme PDCA sehingga institusi memahami apa yang seharusnya dilakukan. *Ketiga*, untuk meningkatkan kinerja UIN Maliki Malang.

Penerapan Klausul SMM ISO

Secara garis besar klausul SMM ISO yang diterapkan oleh UIN Malang mencakup persyaratan umum dan dokumen; *management responsibility, resource management, product realization (good, service), dan measurement, analysis and improvement*. Penerapan klausul-klausul tersebut merupakan fakta empirik dan menjadi satu mata rantai sekaligus menjadi satu kesatuan untuk upaya-upaya peningkatan mutu institusi sebagaimana pendapat Gaspersz dan Peterson yang telah diuraikan sebelumnya. Salah satu klausul yang sudah diterapkan dengan baik adalah klausul 5.2: Fokus pada Pelanggan. Inti dari klausul ini adalah adanya perhatian yang serius terkait pemenuhan kepuasan pelanggan. Para pimpinan, dosen dan staf UIN Maliki Malang dalam hal ini selalu berusaha memberikan layanan terbaik untuk customer dengan menyediakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti LCD, hotspot/internet, layanan online, ruang kerja untuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), pendidikan model ma'had, pembenahan struktur serta penyediaan SDM yang memadai. Hal ini penting dilakukan dalam kerangka membangun motivasi belajar, motivasi berprestasi dan kinerja civitas akademika baik akademik maupun non akademik. Fokus pada pelanggan merupakan kunci dalam membangun loyalitas mahasiswa dan masyarakat serta stakeholder lain. Fokus pada pelanggan juga berdampak pada terbentuknya citra kampus yang positif sekaligus untuk membangun dukungan untuk menuju *World Class University*. Salah satu hal yang menarik di UIN Maliki Malang adalah tradisi pemanfaatan taman sebagai tempat belajar yang mungkin bagi kampus lain merupakan hal aneh. Tradisi ini bermakna positif untuk menghilangkan kejenuhan mahasiswa dalam proses pembelajaran, sekaligus efisiensi tempat. Yang terpenting adalah tradisi ini tidak mengurangi makna belajar bagi mahasiswa.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan SMM ISO mampu merubah dan mendorong kinerja institusi UIN Maliki Malang. Sebagai contoh dalam hal ini adalah rata-rata kehadiran dosen untuk semua fakultas menunjukkan angka yang tinggi yakni 90,39%. Salah satu aspek penting penerapan SMM ISO adalah mendorong institusi untuk memberikan layanan pendidikan terbaik. Dari diagram berikut minimal dapat diketahui 5 hal penting. *Pertama*, semua fakultas mampu mencapai sasaran mutu SPM setiap tahunnya dengan indeks rata 3,48 untuk fakultas psikologi; 3,76 untuk

fakultas ekonomi; 3,58 untuk fakultas saintek, dan 3,44 untuk fakultas humbud. Sedangkan fakultas tarbiyah mencapai rata-rata 3,33 kurang 0,67 dari SPM 3,6 untuk tahun 2010. *Kedua*, pencapaian tertinggi sasaran mutu SPM tingkat kepuasan mahasiswa fakultas adalah fakultas ekonomi dengan indeks 3,76.

Posisi Standard BAN-PT

UIN Maliki Malang memiliki tekad yang kuat untuk mengintegrasikan SMM ISO dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT). Penerapan SMM ISO mendorong para pimpinan dan sivitas akademika untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Salah satu bukti manfaat SMM ISO adalah nilai akreditasi prodi sebagian besar A. Hal ini sebagai akibat SMM ISO memberikan kesempatan belajar lebih leluasa secara mandiri untuk memperbaiki kelemahan internal institusi. Penerapan SMM ISO mampu mendorong kemandirian institusi dalam hal menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program sehingga memberikan ruang untuk memahami dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki institusi. Penggunaan pendekatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menjabarkan SMM ISO memudahkan pencapaian akreditasi BAN-PT dan mutu institusi. Peran Standard BAN-PT dalam hal ini menjadi acuan kerja sivitas akademika dalam memberikan layanan bagi mahasiswa dan stakeholder kampus. Unsur standard BAN-PT menjadi pertimbangan penting pimpinan dalam menyusun program baik bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

Penerapan TQM

Realisasi Standard Pelayanan Minimal (SPM) UIN Maliki Malang yang relatif tinggi menunjukkan keberhasilan manajemen kampus. Hal ini juga menggambarkan komitmen yang kuat dan keterlibatan stakeholder kampus yang intens dalam setiap aktifitas institusi. Implementasi SMM ISO telah membawa banyak manfaat bagi institusi dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sivitas akademika UIN Maliki Malang khususnya terkait pentingnya peningkatan efisiensi, efektivitas dan kinerja. Bentuk nyata manfaat dimaksud adalah aktivitas pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih teratur, lebih terukur dan lebih tertata; institusi memiliki prosedur yang sistematis; sistem dokumentasi kegiatan (data dan informasi) lebih baik; memudahkan proses pemantauan, evaluasi dan perbaikan; memudahkan proses akreditasi; mendorong para dosen lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengajar; menumbuhkan kesadaran terhadap aspek-aspek lain seperti penataan ruang, kebersihan dan keindahan; mendorong kesadaran perlunya peningkatan berkelanjutan; memudahkan pencapaian tujuan institusi

baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan dampak implementasi SMM ISO adalah meningkatnya kinerja individu dan institusi; meningkatnya rasa percaya diri sivitas akademika; meningkatnya kepuasan mahasiswa, membaiknya budaya belajar, budaya kerja dosen dan staf; meningkatnya inovasi dan kreativitas institusi; serta meningkatnya citra dan daya saing institusi. Aspek-aspek tersebut merupakan fondasi yang baik untuk menerapkan TQM.

Simpulan

Implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Maliki Malang secara umum berjalan efektif. Hal ini bisa dilihat dari berbagai aspek terkait dasar pemikiran, penerapan klausul, realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan dampak kebijakan yang positif bagi seluruh sivitas akademika serta insitusi UIN Maliki Malang. Komitmen dan konsistensi pimpinan dan sivitas akademika yang kuat terhadap implementasi SMM menjadi kunci penting efektivitas kebijakan dimaksud.

Implementasi sistem penjaminan mutu di UIN menjadi media pencapaian Standard BAN-PT dan menjadi fondasi yang kuat untuk penerapan TQM. Perubahan-perubahan yang telah terjadi sebagai akibat implementasi sistem penjaminan mutu ISO sudah dirasakan oleh sivitas akademika UIN untuk mengantarkan institusi menjadi "*Center Of Excellence dan Center Of Islamic Civilization*". Sivitas akademika UIN Maliki Malang telah mampu menampilkan diri dengan praktek nilai-nilai positif yakni sikap dan perilaku yang berorientasi "*best practice, customer satisfaction, excellence services, dan continual quality improvement*". Nilai-nilai positif tersebut diarahkan untuk mewujudkan 4 kekuatan sivitas akademika yakni memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional serta menjadikan keempat nilai tersebut sebagai budaya kampus yang kuat. Kesemua nilai-nilai inilah yang menjadi kunci perubahan, dan kunci penting keberhasilan institusi UIN dalam menata dan mengembangkan mutu institusi sesuai tuntutan customer. Pencapaian kinerja UIN Maliki Malang baik individual maupun institusional merupakan cermin keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu.

Rujukan

- Aksoy, Yasemin & Peter Schadel, *ETC Measures the Impact of ISO 9002 on Corporate Quality*. *Inform (online)*, 10 halaman. Tersedia: <http://www.jstor.org/stable/25062299> (06/09/2011), 1997.
- Al Bandary, Mohammed Sulaiman (2005). *Meeting the challenges: The development of quality assurance in Oman's Colleges of Education*. Springer (online). Tersedia: <http://www.jstor.org/25068095>.
- Anderson, James E., *Public Policy-Making*, New York: CBS College Publishing, 1984
- Apps, Jerold W., *Higher Education in a learning society*, London: Jossey-Bass, 1988
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, (Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Sarjana, Jakarta, 2008..
- Billing, David (2004). *International Comparisons and Trend in External Quality Assurance of Higher Education*. Springer (Online), Vol. 47, 26 halaman. Tersedia: <http://www.jstor.org/4151559> (05/09/2011).
- Bogdan, Robert C. & Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative-Research Methods*. New York: John Wiley & Sons, 1975.
- Damme, Dirk Van, *Quality issues in the internationalisation of higher education*, (Springer (Online), Vol 41, 28 halaman. Tersedia: <http://www.jstor.org/stable/3448132>(05/09/2011), 2001).
- Daud, Sity *et al.*, *A Perception on The Effectiveness of Undergraduate and graduate Programmes Management through an ISO Certification Scope Merger*. Elsevier(Online), Tersedia: [www.Sciencedirect.com.](http://www.Sciencedirect.com), 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional (2009). *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*. Jakarta: Depdiknas.
- Hoy, Charles *et al.*, *Improving Quality in Education*, London: Falmer Press, 2005
- ISO 9000: *Handbook of Quality Standards and Compliance*. New Jersey: Prentice-Hall, 1992.
- Kevin, *Quality Assurance for Higher Education in Asia and The Pacific*, 1999.
- Khodayari, *Servis Quality in Higher Education*, (Interdisciplinary Journal of Research in Business (Online), Vol. 1, 9 halaman. Tersedia: [http://www.jstor.org/\(05/09/2011\)](http://www.jstor.org/(05/09/2011)), 2011.

- Lim, David, *Quality Assurance in Higher Education*, Sydney, Ashgate, 2001
- Majid Konting, et al., *Quality Assurance in Higher Education Institution: Exist Survey among University Putra Malaysia Graduating Student*, (International Educational Studies (online), 2009), Vol.2. Tersedia: [http://www.cosenet.org/journal/htm/\(05/09/2011\)](http://www.cosenet.org/journal/htm/(05/09/2011)).
- Miles, Matthew B. dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 1992
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPM-PT), Depdiknas, 2008.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPM-PT), Depdiknas, 2008.
- Perencanaan Pembangunan Pendidikan Islam, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, 2010.
- Peterson, James G. *ISO 9000: Standar Kualitas Seluruh Dunia*. Jakarta: Indeks, penerj. Marianto Samosir, 2010
- Randall S. Schuller, dan Drew L. Harris, *Managing Quality*, New York: Addison-Wesley Publishing Company, 1992
- Rao, Digumarti Bhaskara, *Higher Education in The 21st Century (Vision and Action)*, New Delhi: Discovery Publisihing House, 2003
- Renstra Ditjen Pendidikan Islam 2004-2009; Departemen Agama, 2007.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Penerjemah M. Djauzi Mudzakir, 2003
- Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education*, (Jogjakarta: Ircisod, 2010.
- Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (HELTS) 2003 - 2010*. Jakarta: Depdiknas, 2004.
- Vanagas, Povilas, (2008). *Developmental of Total Quality Management in Kaunas University of Technology*. Tersedia: [http://www.jstor.org\(05/09/2011\)](http://www.jstor.org(05/09/2011)).
- Vincent Gaspersz, *Total Quality Management*, Jakarta: Gramedia, 2005
- William G. Nikels, et al., *Understanding Business*, New York: Irwin, 2010

Perbandingan Konsep Adab Menurut Ibn Hajar Al-'Asqalany dengan Konsep Pendidikan Karakter di Indonesia

Indra Fajar Nurdin

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: indrafn@yahoo.co.uk

DOI : 10.14421/jpi.2015.41.159-187

Diterima: 18 Mei 2015

Direvisi: 1 Juni 2015

Disetujui: 29 Juni 2015

Abstract

Many crises that rise in our society recently, from educational perspective, showed that the national education system has not perform optimally yet in forming society that has both skill-intellectuality and also spirituality, self-control, personality, and good moral. That multi-dimension crises basically rooted from the decrease of nation moral quality e.g. the increase of corruption culture and conflict, the raise of criminality, and the decrease of work-ethos. A solution applied by Indonesian government is by implementing character education, that has similar term in Islamic education's the concept of Adab. The purpose of this research is to find out the concept about Adab by Ibn Hajar al-Asqalany, and to find out the comparison and relevance between Ibn Hajar al-Asqalany's concept of Adab with the concept of character education in Indonesia. This research concludes that the concept of Adab based on Ibn Hajar al-Asqalany's thought includes the fulfillment and development of adab to Allah Swt, adab to his/her self, and adab to another person. That concept of adab can be a basic step to determine the nine cores of character education that implemented in Indonesia.

Keywords: *Adab, Education, Character Education.*

Abstrak

Berbagai krisis yang mencuat di tengah masyarakat apabila ditinjau dari sudut pandang pendidikan memperlihatkan belum optimalnya sistem pendidikan nasional dalam membentuk masyarakat yang selain memiliki kecerdasan dan keterampilan juga memiliki spiritualitas, pengendalian diri, kepribadian, dan akhlak manusia.

Krisis multidimensi tersebut hakekatnya berakar dari menurunnya kualitas moral bangsa seperti membudayanya korupsi dan konflik, meningkatnya kriminalitas, dan menurunnya etos kerja. Salah satu solusi yang diambil pemerintah Indonesia saat ini adalah dengan menggulirkan pendidikan karakter. Senada dengan itu, pendidikan Islam sudah mengenal terlebih dahulu konsep adab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep adab menurut Ibn Hajar al-'Asqalany dan mengetahui perbandingan dan relevansi konsep adab tersebut dengan konsep pendidikan karakter di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep adab menurut Ibn Hajar al-'Asqalany mencakup pemenuhan dan pengembangan adab terhadap Allah Swt, adab terhadap diri sendiri, dan adab terhadap sesama manusia. Konsep adab tersebut bisa menjadi pijakan dasar menentukan poin-poin penjabaran sembilan inti pendidikan karakter yang saat ini dipraktekkan di Indonesia.

Kata Kunci: *Adab, Pendidikan, Pendidikan Karakter*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertujuan untuk membekali manusia dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Mengingat pentingnya keberlangsungan pendidikan, setiap negara membuat dan melaksanakan sistem pendidikannya masing-masing. Melihat urgensi dari pendidikan ini pula negara Indonesia memasukkan pasal tentang pendidikan ke dalam konstitusi negara yakni dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31, sebagai berikut:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- 2) Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Amanat konstitusi negara tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam undang-undang tersebut pada bab I Pasal 1, pendidikan didefinisikan sebagai :

“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”¹

Secara tersurat, Undang-Undang Sisdiknas tersebut menghendaki bahwa pendidikan bisa menghasilkan manusia yang memiliki hal-hal berikut: 1) spiritualitas, 2) pengendalian diri, 3) kepribadian, 4) kecerdasan, 5) akhlak mulia, dan 6) keterampilan. Dengan kata lain, pendidikan secara ideal ditujukan tidak hanya untuk membentuk kecerdasan saja tapi juga untuk pembangunan moralitas dan karakter bangsa.

Secara teoritis, apabila sistem pendidikan telah menjalankan fungsinya dengan ideal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang tersebut di atas, maka akan berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Semakin baik kualitas pendidikan maka akan semakin baik pula kualitas kehidupan masyarakat dan negara. Begitu pula sebaliknya, apabila kondisi kehidupan masyarakat dirasakan tidak baik, maka berarti pendidikan tidak bisa melaksanakan fungsi idealnya atau setidaknya tidaknya ada yang salah dalam pengelolaan pendidikan. Dengan kata lain, kualitas sebuah bangsa bisa terlihat dari kualitas dan praktek sistem pendidikannya.²

Berbagai masalah yang mencuat akhir-akhir ini di tengah masyarakat kita, baik itu masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, maupun masalah kemasyarakatan lainnya seperti kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, tawuran antarpelajar, korupsi, pornografi dan pornoaksi, serta kekerasan antarpemeluk agama apabila ditinjau dari sudut pandang pendidikan memperlihatkan belum optimalnya sistem pendidikan nasional kita dalam membentuk masyarakat yang selain memiliki kecerdasan dan keterampilan juga memiliki spiritualitas, pengendalian diri, kepribadian, dan akhlak manusia.

Menurut Ratna Megawangi, Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Krisis multidimensi tersebut hakekatnya berakar dari menurunnya kualitas moral bangsa. Adapun tanda-tanda dari penurunan kualitas moral diantaranya membudayanya praktek korupsi, sering terjadi konflik (antaretnis, agama, politisi, remaja, dsb), angka kriminalitas yang semakin menanjakan, dan penurunan etos kerja.³

¹ Anonim. *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

² A. Chaedar Alwasilah, *Islam, Cultur, and Education*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014) Hlm. 59

³ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Star Energy. 2004), Hlm. 4

Lebih jauh lagi, menurut Thomas Lickona terdapat sepuluh indikator yang harus diwaspadai oleh suatu negara. Sebab jika kesepuluh indikator tersebut telah terjadi, maka suatu negara telah gagal dalam membangun moral masyarakatnya sehingga negara tersebut sedang menuju jurang kehancuran. Sepuluh indikator tersebut adalah: 1) meningkatnya angka kejahatan dan vandalisme, 2) meningkatnya kasus pencurian, 3) membudayanya perilaku tidak jujur seperti mencontek atau berbuat curang, 4) berkurangnya rasa hormat terhadap orang lain, 5) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan, 6) fanatisme yang membabi-butakan, 7) semakin meningkatnya penggunaan bahasa kasar, 8) meningkatnya pelecehan dan kejahatan seksual, 9) meningkatnya egoisme dan berkurangnya tanggung jawab sosial atau warga negara, 10) Kebiasaan perilaku merusak diri sendiri⁴.

Problem-problem tersebut akan semakin kronis manakala dunia pendidikan sebagai produsen manusia-manusia bermoral dan berkarakter kehilangan tajinya. bukannya menghasilkan lulusan yang diharapkan, dunia pendidikan malah menjadi institusi paling bertanggungjawab terhadap problem tersebut⁵. Dalam bahasa Zubaedi, problem tersebut lahir karena dunia pendidikan sebagai produsen manusia-manusia bermoral dan berkarakter telah gagal, karena seluruh pengetahuan agama dan moral yang didapatkan di sekolah ternyata tidak berdampak terhadap perubahan perilaku.⁶

Salah satu solusi yang diambil pemerintah Indonesia saat ini adalah dengan menggulirkan pendidikan karakter. Sejak pertama kali dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada peringatan hari pendidikan Nasional pada 2010 lalu, pendidikan karakter diharapkan mampu menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan kognitif dengan kebutuhan lain sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas tahun 2003.

Terdapat lima hal pokok dalam penyelenggaraan pendidikan karakter, yaitu: 1) Membentuk manusia Indonesia yang bermoral, 2) Membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan rasional, 3) Membentuk manusia Indonesia yang inovatif dan suka bekerja keras, 4) Membentuk manusia Indonesia yang optimis dan percaya diri, dan 5) Membentuk manusia Indonesia yang berjiwa patriot.

Menurut Raharjo sebagaimana dikutip oleh Zubaedi, Pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu proses pendidikan yang holistik (menyeluruh), menghubungkan dimensi moral dengan sosial dalam kehidupan peserta didik agar

⁴ Thomas Lickona. *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam Books 1991), Hlm. 14

⁵ Adian Husaini. *Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter & Beradab* (Depok: Komunitas Nuun. 2011), hlm 38

⁶ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Kencana. 2011), hlm 2

menjadi dasar terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Maka dari itu, penekanan pendidikan karakter tidak terbatas pada transfer pengetahuan mengenai nilai-nilai yang baik saja, akan tetapi lebih dari itu yakni bagaimana menjadikan nilai-nilai tersebut menjadi tertanam dan menyatu dalam totalitas pikiran dan tindakan.

Senada dengan pendidikan karakter yang sedang digiatkan pemerintah, dunia pendidikan Islam sudah jauh terlebih dahulu mengenalkan konsep pendidikan yang bukan hanya memperhatikan aspek kognitif saja, tetapi juga lebih menekankan pada pembangunan karakter dan moral melalui pendidikan adab. Oleh karena itu, salah satu padanan kata “pendidikan” dalam Islam adalah “*ta'dib*”.⁸

Bahkan akar dari segala permasalahan atau krisis yang mendera suatu bangsa dewasa ini, menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas pada hakikatnya bermuara pada hilangnya adab (*the loss of adab*). Al-Attas merujuk pada hilangnya disiplin-disiplin raga, fikiran dan jiwa. Disiplin menuntut pengenalan dan pengakuan atas tempat yang tepat bagi seseorang dalam hubungannya dengan diri, masyarakat dan umatnya; pengenalan dan pengakuan atas tempat seseorang yang semestinya dalam hubungannya dengan kemampuan dan kekuatan jasmani, intelektual, dan spiritual seseorang.⁹

Selanjutnya menurut al-Attas, pendidikan harus menghasilkan orang yang beradab, yakni orang yang secara penuh sadar akan tanggung jawab dirinya kepada Tuhan; memahami dan menunaikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya; senantiasa meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia beradab.¹⁰

Salah satu ulama Islam yang memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan adab ini adalah Ibn Hajar al-'Asqalany. Ulama yang hidup pada masa tahun 773-852 H ini terkenal karena keahliannya di bidang bahasa, sejarah, tafsir, fiqih, dan hadits. Menurut pandangan Ibnu Hajar al-'Asqalany, adab itu meliputi empat perkara, yakni menggunakan hal-hal yang terpuji dalam ucapan

⁷ Zubaedi, *Desain*, hlm 16

⁸ Istilah *ta'dib* menjadi populer setelah Prof. Syed Naquib al-Attas menerbitkan bukunya yang berjudul *The Concept of Education in Islam* (1980). Padanan kata untuk istilah “pendidikan” lainnya adalah *tarbiyyah*, *ta'dib*, *ta'lim*, *tadris*, dan *tahdzib* yang kelima istilah tersebut dijelaskan secara panjang lebar oleh Dedeng Rosyidin (2003) dalam bukunya *Akar-akar Pendidikan Dalam al-Quran dan al-Hadits*, penerbit Pustaka Umat.

⁹ Syed Muhammad Naquib al-Attas. *Islam dan Sekularisme*. (Bandung: PIMPIN. 2011), hlm 129

¹⁰ Wan Mohammad Nor Wan Daud. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Syed M Naquib al-Attas*. (Bandung: Mizan. 2003), hlm. 174

dan perbuatan, memiliki akhlak yang mulia, berdiam (konsisten) bersama hal-hal yang baik, menghormati yang lebih tua dan kasih sayang pada yang lebih muda”¹¹

Lebih jauh lagi, dalam salah satu kitab hasil karyanya yang terkenal yakni Kitab *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Ibn Hajar al-'Asqalany membuat suatu bab khusus yang membahas hal-ihwal adab yakni *Bab al-Adab* yang terdapat dalam bagian akhir *Bulugh al-Maram* yakni dalam *Kitab Jami'*. Dalam bab tersebut, Ibn Hajar al-'Asqalany memasukkan enam belas hadits-hadits Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam yang berkenaan dengan adab. Dari rangkaian hadits-hadits tersebut bisa kita temukan pemikiran Ibn Hajar al-'Asqalany mengenai adab.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis Isi (*content analysis*) adalah teknik analisis yang mengkaji dan menganalisis secara objektif untuk menilai faktor-faktor penelitian.¹² Analisis isi digunakan untuk menganalisis kitab *Bulugh al-Maram dan Kutub Subul as-Salam, bab al-Adab* yakni bab yang berkaitan dengan konsep adab. Setelah itu, dilakukan pengelompokan menurut urutan aspek yang terkandung dalam pemikiran Ibn Hajar al-'Asqalany tentang adab. Kemudian pemikiran tersebut dibandingkan dan direlevansikan dengan konsep pendidikan karakter di Indonesia.

Pengertian Karakter dan Pendidikan Karakter

Kata “karakter” berasal dari bahasa Yunani yaitu *karasso*; juga daribahasa latin yaitukarakter, *kharassein*, *kharax* yang berarti adalah cetak biru, format dasar atau biasa juga dimaknai sebagai sesuatu yang tidak dapat dikuasai oleh intervensi manusia.¹³ Dengan kata lain sesuatu yang sudah ada di dalam diri manusia akan tetapi hanya bisa terlihat apabila terus dilatih dan dikembangkan. Makanya tidak heran, Russel Williams mengilustrasikan karakter sebagai “otot”, yang akan lembek dan kaku apabila tidak pernah dilatih, tetapi akan kuat kalau sering dipakai. Dengan demikian, hakikat karakter adalah potensi manusia yang harus dikembangkan dan dipraktikkan.¹⁴

Secara khusus potensi tersebut menurut Poerwadarminta meliputi tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang

¹¹ Ibnu Hajar al-Atsqalany. *Fathul Bary, Kitab Adab*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2003), Juz 3 Hlm. 166

¹² Fred N Kerlinger, *Foundation of Behavioral Research*, New York: Holl, Rinehart and Winston Inc, 1973), hlm. 525

¹³ Koesoema D., *Tiga Matra Pendidikan Karakter*, (Depok: BASIS 56 Juli, 2007), hlm. 7-8.

¹⁴ Abdul Majid, Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). Hlm. 119.

dengan yang lain¹⁵. Dengan demikian potensi karakter yang dimaksud adalah potensi kebaikan yang ada dalam setiap diri manusia. Lebih jelasnya, sebagaimana diungkapkan oleh Ryan dan Bohlin, potensi pokok tersebut meliputi mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*loving the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*)¹⁶.

Dikarenakan poros utama dari karakter adalah potensi kebaikan, maka selanjutnya yang dibutuhkan adalah standar dari 'kebaikan' itu sendiri. Menentukan standar kebaikan harus diambil dari nilai-nilai yang ajeg atau tidak berubah-ubah, dalam hal ini adalah ajaran-ajaran yang terkandung dari ajaran agama. Sebagai tata nilai yang bersumber dari perintah-perintah Tuhan. Maka dari itu, apabila dikaitkan dengan pengembangan potensi kebaikan dalam diri manusia, harus dimulai dari pembangkitan kesadaran akan tanggung jawab dirinya kepada Tuhan untuk selanjutnya memahami dan menunaikan keadilan dan kebaikan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Muchlas Samani, Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat dan estetika.¹⁷

Dari berbagai pendapat dan definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengembangkan dan mempraktekkan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia, sehingga hasilnya akan terlihat pada tindakan nyata seseorang dalam kehidupannya sehari-hari, diantaranya yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya.

Selanjutnya penerapan nilai-nilai dalam pendidikan karakter di Indonesia diidentifikasi berasal dari empat sumber. *Pertama*, agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama. Maka dari itu merupakan suatu kewajaran apabila nilai-nilai agama dijadikan dasar bagi nilai-nilai pendidikan karakter.¹⁸

Kedua, Pancasila. nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara bisa menjadi sumber nilai bagi penerapan karakter bagi setiap warga negara.¹⁹ *Ketiga*, budaya. Posisi budaya sebagai pokok dalam hidup bermasyarakat

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 11

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Muchlas Samani, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2012), hlm. 41

¹⁸ Zubaedi. Desain. Hlm. 73

¹⁹ *Ibid.*

mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan karakter masyarakat.²⁰

Keempat, tujuan pendidikan nasional. Tujuan dan fungsi pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan didalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 secara jelas mengarahkan pendidikan nasional supaya berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut yang dijadikan dasar nilai dari pendidikan karakter.²¹

Untuk menjabarkan konsep-konsep karakter sebagaimana diuraikan di atas ke dalam proses pendidikan karakter, Indonesia Heritage Foundation telah menyusun sembilan pilar karakter, yaitu: 1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya (*love Allah, trust, reverence, loyalty*), 2) Kemandirian dan Tanggung jawab, (*responsibility, excellence, self reliance, discipline, orderliness*), 3) Kejujuran/Amanah, Bijaksana (*trustworthiness, reliability, honesty*), 4) Hormat dan santun (*respect, courtesy, obedience*), 5) Dermawan, Suka Menolong dan Gotong royong (*love compassion, caring, empathy, generosity, moderation, cooperation*). 6) Percaya diri, Kreatif, dan Pekerja Keras (*Confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, courage, determination, and enthusiasm*), 7) Kepemimpinan dan Keadilan (*justice, fairness, mercy, leadership*), 8) Baik dan Rendah hati (*kindness, friendliness, humility, modesty*), 9) Toleransi dan Kedamaian dan Kesatuan (*tolerance, flexibility, peacefulness, unity*).²²

Konsep Adab Menurut Ibn Hajar al-Asqalany dalam Kitab Bulugh al-Maram dan Perbandingannya dengan Pendidikan Karakter

a. Ibn Hajar al-'Asqalany dan Kitab Bulugh al-Maram

Nama lengkap Ibn Hajar al 'Asqalani adalah al Imam al 'Allamah al Hafizh Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar, al Kinani, al 'Asqalani, asy Syafi'i, al Mishri. Kemudian dikenal dengan nama Ibn Hajar, dan gelarnya "al Hafizh". Adapun sebutan 'Asqalani adalah nisbat kepada 'Asqalan', sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina, dekat Ghuzzah.²³

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* hlm. 74

²² Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Star Energy. 2004), Hlm. 95

²³ Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan. tt), hlm.5

Beliau lahir di Mesir pada tanggal 22 Sya'ban 773 H, yang bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1372 M²⁴. Beliau memperoleh pendidikan pertamanya dari ayahnya sendiri yaitu Nuruddin Ali (w.777 H/1375 M), yang merupakan ulama besar yang selain dikenal sebagai mufti yang juga dikenal sebagai penulis sajak-sajak keagamaan. Pada usia 5 tahun Ibnu Hajar sudah masuk ke sekolah agama, pada tahun 782 H yakni ketika ia berumur 9 tahun telah mampu hafal al- Qur'an. Pada tahun 784 H yaitu ketika ia berusia 11 tahun belajar hadist di Makah al-Mukaramah kepada Syeh Affiuddin al-Naisabury dan belajar hadist Bukhari kepada Syeh al-Makky, disinilah ia untuk pertama kali berguru mengenai hadist.²⁵

Kitab *Bulugh al-Maram* merupakan kitab kumpulan hadits-hadits pilihan yang terkait dengan hukum Islam. Ibn Hajar tidak serta merta mengambil beberapa hadits dari beberapa kitab hadits (*al-mashadir al-ashliyyah*) yang kemudian disatukan dalam satu pembahasan, tetapi beliau telah memilih hadits-hadits terbaik yang bersanad shahih (bersumber pada tujuh kitab hadits terkenal: Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad), serta merangkainya dalam satu mozaik hukum Islam.

Daftar isi dari kitab *Bulugh al-Maram*: 1) Kitab Thaharah, 2) Kitab Shalat, 3) Kitab Jenazah, 4) Kitab Zakat, 5) Kitab Puasa, 6) Kitab Haji, 7) Kitab Jual Beli, 8) Kitab Nikah, 9) Kitab Jinayat, 10) Kitab Hudud, 11) Kitab Jihad, 12) Kitab Sumpah dan Nadzar, 13) Kitab Memutuskan Perkara, 14) Kitab Memerdekakan Budak, 15) Kitab Jami' .

b. Konsep Adab Ibn Hajar al-Asqalany dan perbandingan dengan Pendidikan Karakter

Menurut Dedeng Rosidin, *al-Adab* pada masa kejayaan Islam digunakan dalam makna yang sangat umum, yaitu bagi semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal baik yang langsung berhubungan dengan Islam maupun yang tidak langsung kemudian berkembang maknanya menjadi budi pekerti yang baik, prilaku yang terpuji dan sopan santun. Pada akhirnya makna *al-Adab* menunjukkan arti: 1) mengajar sehingga orang yang belajar mempunyai budi pekerti yang baik, 2) mendidik jiwa dan akhlak, 3) melatih berdisiplin²⁶.

²⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Min 'Alam as-Salaf*, terj. Masturi Ilham, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar. 2006), hlm.835

²⁵ Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulugh al-Maram*, (Semarang : Toha Putra, 1985), hlm.xxvii

²⁶ Dedeng Rosidin, *Akar-akar Pendidikan dalam al-Quran dan al-Hadits*, (Bandung: Pustaka Umat. 2003), hlm. 169

Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, arti *adab* pada asalnya adalah undangan untuk menghadiri suatu jamuan. Konsep *jamuan* ini menggambarkan sang tuan rumah yang mulia dan terhormat, sedangkan orang yang hadir adalah orang yang menurut tuan rumah pantas mendapatkan penghormatan atas undangan itu²⁷. Orang-orang tersebut akan menerima jamuan makanan yang lezat dari tuan rumah dan menyantapnya dengan penuh etika dan kesopanan.²⁸

Oleh karena itu *adab* merujuk pada pengenalan dan pengakuan atas tempat, kedudukan, dan keadaan yang tepat dan benar dalam kehidupan. Oleh karena itu keberadaan adab pada diri seseorang dan pada masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang mencerminkan kondisi keadilan. Dengan demikian hilangnya adab menyiratkan hilangnya keadilan.²⁹

Peran penting adab dalam pendidikan inilah yang membuat al-Attas lebih mengedepankan istilah *ta'dib* dibandingkan *tarbiyyah* ketika membicarakan pendidikan. Al-Attas berkeyakinan bahwa pokok utama dari *ta'dib* adalah penanaman dan pengokohan adab dalam diri setiap orang.

Secara etimologi, *ta'dib*-bentuk *masdar* dari kata kerja *addaba-yuaddibu-ta'diban*-diterjemahkan menjadi pendidikan sopan santun atau adab³⁰. Dari sisi etimologi ini, kita bisa memahami bahwa *ta'dib* itu berkenaan dengan budi pekerti, moral, dan etika. Dalam Islam, budi pekerti, moral, dan etika itu paralel dengan akhlak.

Arti lebih luas tentang *ta'dib* ini dijelaskan kembali oleh al-Attas. Menurutnya, kata *ta'dib* adalah:

Pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan³¹

Dari arti ini, *ta'dib* mencakup unsur-unsur pengetahuan (ilmu), pengajaran (*ta'lim*), dan pengasuhan (*tarbiyah*). Oleh karena itu menurutnya, tidak perlu mengacu pada konsep pendidikan Islam sebagai integrasi dari *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Hal ini disebabkan karena *ta'dib* telah mewakili konsep pendidikan Islam.³²

²⁷ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam*. Hlm 185

²⁸ *Ibid* hlm. 186

²⁹ *Ibid* Hlm 129

³⁰ Mahmud Yunus. *Qamus*. (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyah. 1990). Cet. Ke. 8. Hlm. 37

³¹ Abdul Mujib dan Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media group. 2008). Cet. Ke-2. Hlm. 20.

³² Zaenul Ngator. *Ta' Lim, Ta' Dib, Dan Tarbiyah*. 29 Januari 2009.

Selanjutnya Al-Bagdadi menjelaskan pendidikan akhlak (*ta'dib*) ialah penanaman akhlak yang baik, sifat yang terpuji, adab yang mulia, serta pengokohnya pada diri siswa khususnya dan muslim pada umumnya.³³ Al-Attas menyebutkan tentang *ta'dib* yang sejalan pula dengan makna di atas yaitu penanaman dan pengokohan adab pada diri manusia.³⁴ Dan pendapat Ulwan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan moral (*ta'dib*) ialah serangkaian sendi akhlak, keutamaan tingkah laku dan naluri yang wajib dilakukan anak, diusahakan dan dibiasakan sejak ia *mumayyiz* dan mampu berpikir sehingga menjadi *mukallaf*, berangsur memasuki usia pemuda dan siap menyongsong kehidupan.³⁵ Dengan demikian, *ta'dib* itu mengakhilkan anak sejak kecil agar jujur, dapat dipercaya, istiqamah, mementingkan orang lain, menolong yang lemah, menghormati yang benar, memuliakan tamu, berbuat baik kepada tetangga dan mencintai orang lain.

Penjelasan al-Attas ini menegaskan bahwa *ta'dib* ini meliputi semua konsep pendidikan dalam Islam, termasuk konsep *ta'lim* dan *tarbiyyah* yang selama ini kedua konsep ini sering dibedakan dengan konsep *ta'dib*.³⁶

Ta'dib berkenaan dengan budi pekerti, sopan santun, akhlak, moral, dan etika. Dalam konsep pendidikan, *ta'dib* ini dipahami sebagai pendidikan adab atau pendidikan akhlak. Namun *ta'dib* juga memuat juga konsep *ta'lim* dan *tarbiyyah*. Tujuan pendidikan adab ini supaya pelajar tumbuh menjadi manusia yang beradab.

Masih menurut al-Attas, pendidikan harus menghasilkan orang yang beradab, yakni orang yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Tuhan Yang Hak; memahami dan menunaikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya; terus meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia beradab.³⁷

Sedangkan menurut Ibn Hajar al-'Asqalany, adab mencakup hal-hal yang terpuji dalam ucapan dan perbuatan, memiliki akhlak yang mulia, konsisten bersama hal-hal yang baik, menghormati yang lebih tua dan kasih sayang pada yang lebih muda³⁸. Pemahaman ibn Hajar ini kemudian dituangkannya

³³ Al-Bagdâdi dalam Sâlik Ahmad Ma'ûm, *Al-Fikr al-Tarbawi'Inda al-Hatib al-Bagdâdi* (t.t: Dâr al-Hair. 1992), hlm. 155.

³⁴ M. al-Naqib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam* (Bandung: Mizan. 1996), hlm. 56.

³⁵ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulâd fi al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Salam. 1993), cet. ke-1, juz I, hlm. 177-178.

³⁶ Lihat Abdul dan Mudzakir. *Ilmu*. Hlm. 10-21. Lihat juga di Zaenul. *Ta'lim*.

³⁷ Wan Mohammad Nor Wan Daud.2003. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Syed M Naquib al-Attas*. Terj.Hamid Fahmy Zarkasy. Bandung: Mizan. Hlm. 174

³⁸ Ibnu Hajar al-Atsqalany. *Fathul Bary, Kitab Adab*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2003), Juz 3 Hlm. 166

dalam sebuah bab khusus tentang adab dalam kitab karangannya *Bulugh al-Maram*. Pada intinya dalam Bab al-Adab ini, Ibn Hajar mengkompilasikan hadits-hadits Nabi Saw yang berbicara mengenai adab atau etika. Dengan mempelajari bab al-Adab ini akan terlihat aspek-aspek apa saja yang termasuk adab seorang muslim, termasuk di dalamnya adab terhadap Allah Swt, terhadap diri sendiri, dan juga terhadap orang lain.

Ibn Hajar al-Asqalany di dalam *Bulugh al-Maram* membuat suatu bab khusus yakni *Bab al-Adab*. Di dalamnya Ibn Hajar al-Asqalany memasukkan enam belas hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

Hadits No. 1467

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ, وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْهُ, وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ, وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada enam, yaitu bila engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam; bila ia memanggilmu penuhilah; bila dia meminta nasehat kepadamu nasehatilah; bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah bacalah yarhamukallah (artinya = semoga Allah memberikan rahmat kepadamu); bila dia sakit jenguklah; dan bila dia meninggal dunia hantarkanlah (jenazahnya)”. H. R. Muslim.

Hadits ini menerangkan tentang hak sesama orang muslim. Yang dimaksud hak di sini adalah sesuatu yang tidak pantas ditinggalkan dan hukumnya bisa jadi wajib atau setidak-tidaknya *sunnah muakkadah*³⁹. Adapun hak-hak antara sesama muslim sebagaimana tercantum di dalam hadits di atas adalah sebagai berikut: 1) Mengucapkan salam ketika bertemu, 2) Menghadiri undangan, 3) Memberikan nasehat pada orang yang memintanya, 4) Mendoakan orang yang bersin yang mengucapkan “alhamdulillah”, 5) Menjenguk orang yang sakit, 6) Mengiringi jenazah orang yang meninggal.

³⁹ Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan. tt), hlm. 148

Hadits No. 1468

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(انظروا إلي من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلي من هو فوقكم، فهو
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu karena hal itu lebih patut agar engkau sekalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ini menganjurkan agar setiap muslim senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah Swt turunkan kepadanya. Menurut Ash-Shan’ani, yang dimaksud “orang yang di bawahmu” dalam konteks hadits ini adalah dalam urusan-urusan keduniaan. Seperti melihat orang yang menderita sakit, lalu ia bandingkan dengan dirinya yang masih diberi kesehatan, atau manakala melihat orang yang cacat fisik seperti buta, tuli, dan bisu maka ia melihat dirinya diberi kesempurnaan fisik sehingga seorang muslim senantiasa bersyukur kepada Allah Swt. Begitu pula dalam urusan harta benda yang dimiliki harus melihat orang yang lebih memiliki kekurangan dalam harta. Dengan demikian ia dapat menghibur dirinya dan lebih bersyukur kepada Allah karena ia tidak menderita seberat penderitaan orang lain. Akan tetapi dalam urusan keagamaan, ia harus melihat ke atas, yaitu kepada orang yang memiliki kualitas agama yang lebih tinggi sehingga ia senantiasa akan termotivasi untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah.⁴⁰

Hadits No. 1469

وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا
حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

⁴⁰ Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subul*, hlm. 151

Nawas Ibnu Sam'an Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam tentang kebaikan dan kejahatan. Beliau bersabda: "Kebaikan ialah akhlak yang baik dan kejahatan ialah sesuatu yang terdeteksi di dadamu dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya." Riwayat Muslim.

Kebaikan di sini dapat diartikan sebagai menghubungkan tali silaturahmi, bersikap jujur, lembut, bersikap baik dan bergaul dengan cara yang baik. Sedangkan akhlak adalah tabiat yang terpendam kuat sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mulia yang dilakukan dengan mudah tanpa perlu berfikir⁴¹.

Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan menurut hadits ini adalah "Sesuatu yang mengganjal dalam hatimu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya". Suatu hal yang terlintas di dalam hati tetapi hati tidak tenang manakala melakukan hal tersebut dikarenakan takut diketahui orang lain atau takut siksa Allah Swt, maka yang demikian termasuk kategori perbuatan kejahatan atau dosa.

Hadits ini juga membuktikan bahwa Allah Swt telah menanamkan fitrah pada diri seseorang sehingga dapat membedakan perkara yang baik atau halal untuk dilakukan dan mana perkara yang buruk atau haram supaya perkara tersebut ditinggalkan.

Hadits No. 1470

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَحْتَابُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila engkau bertiga maka janganlah dua orang berbisik tanpa menghiraukan yang lain, hingga engkau bergaul dengan manusia, karena yang demikian itu membuatnya susah." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.

Hadits ini menunjukkan bahwa apabila ada tiga orang, maka yang dua dilarang untuk berbisik-bisik atau mengadakan pembicaraan hanya dua

⁴¹ *ibid*

orang dengan mengabaikan yang ketiga. Namun apabila mereka lebih dari tiga orang, maka yang dua orang diperbolehkan berbisik-bisik sebab orang yang ketiga tidak akan merasa bersedih sebab tidak akan merasa terasingkan atau ada sangkaan bahwa dialah yang menjadi objek pembicaraan dari dua orang yang sedang berbisik-bisik tersebut.⁴²

Hadits No. 1471

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنَ الرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ
 تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Imran Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat tersebut, akan tetapi hendaklah ia mengatakan” berilah kelonggaran dan keluasan.” Muttafaq Alaihi.

Di dalam hadits ini diterangkan etika duduk atau mengambil tempat duduk di suatu majelis. Orang yang lebih dahulu menempati suatu tempat di masjid atau tempat lainnya untuk melaksanakan suatu ibadah atau ketaatan kepada Allah Swt maka ia lebih berhak untuk menempati tempat tersebut. Bagi orang yang datang belakangan maka haram hukumnya menyuruh orang lain pindah tempat atau bangkit dari tempat yang telah ia duduki.

Hadits ini juga mengajarkan orang untuk senantiasa saling memberikan kelonggaran dan keluasan dalam duduk bersama di suatu majelis. Orang yang tidak kebagian tempat duduk dikarenakan datang terlambat akan tetap bisa mengikuti suatu majelis dikarenakan secara sukarela orang yang telah duduk berbagi tempat dengannya , sehingga tidak ada kesan mengusir orang lain dari tempat duduknya.

Hukum yang tercantum di dalam hadits ini pun berlaku bagi tempat-tempat umum lainnya semisal tempat berdagang dan tempat keramaian lainnya.⁴³

⁴² Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subul* hlm.152

⁴³ Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subul* hlm. 153

Hadits No. 1472

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أَكَلْ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila salah seorang di antara kamu makan makanan, maka janganlah ia membasuh tangannya sebelum ia menjilatinya atau menjilatkannya pada orang lain.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ini menjelaskan tentang wajibnya menjaga keberkahan dari makanan yang kita makan. Saking pentingnya berkah dari makanan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sampai mewajibkan makanan yang terhidang di piring untuk dihabiskan jangan tersisa, baik sisa-sisa makanan yang ada di piring maupun yang melekat di tangan, bahkan saking pentingnya kalau perlu sampai dijilati sendiri atau dijilatkan kepada orang lain. Alasannya, karena kita tidak tahu dimana letak keberkahan makanan tersebut.

Berkah adalah pertumbuhan, penambahan, dan kebaikan. Maksudnya makanan yang dikonsumsi tidak menimbulkan gangguan pada dirinya dan dapat memperkuat dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Swt. Boleh jadi keberkahan ini didapatkan pada makanan yang masih menempel pada jari tangan atau pada tempat makan atau pada makanan yang terjatuh.

Hadits No. 1473

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَيْسَ الْمَسْكِينُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي)

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Hendaklah salam itu diucapkan yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang

banyak.” *Muttafaq Alaihi*. Menurut riwayat Muslim: “Dan yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan.”

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya yang lebih muda untuk memulai salam kepada yang lebih tua, supaya orang yang lebih muda menghormati dan bersikap rendah hati kepada orang yang lebih tua, walaupun bisa jadi orang yang lebih muda usianya lebih ‘alim dibandingkan dengan orang yang lebih tua.

Juga disyariatkan bagi yang berjalan agar memberikan salam kepada orang yang sedang duduk, karena bisa jadi akan muncul niat buruk dalam hati orang yang sedang duduk terhadap orang yang melintas, terutama orang yang berkendara. Jadi jika yang melintas lebih dahulu memberikan ucapan salam maka mereka akan merasa aman dari gangguan orang-orang yang sedang duduk.

Disyariatkan agar kelompok yang jumlahnya sedikit lebih dahulu memberikan salam kepada kelompok yang lebih banyak jumlahnya. Alasannya karena jamaah yang lebih banyak memiliki keutamaan yang lebih besar daripada jamaah yang jumlahnya lebih sedikit. Demikian juga apabila sekelompok orang lebih dahulu mengucapkan salam terhadap satu orang maka dikhawatirkan akan tumbuh perasaan sombong di hati orang tersebut. Untuk menghindari timbulnya kemungkinan ini maka yang lebih sedikit hendaknya lebih dahulu dalam memberikan salam.

Syariat menetapkan agar yang berkendara lebih dahulu memberikan salam kepada yang berjalan kaki untuk menghindari timbulnya perasaan sombong di hati orang yang berkendara terhadap orang yang berjalan.

Hadits No. 1474

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يُجْزَى عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزَى عَنْ الْجَمَاعَةِ
أَنْ يُرَدَّ أَحَدُهُمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ

Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Cukuplah bagi sekelompok orang berjalan untuk mengucapkan salam salah seorang di antara mereka dan cukuplah bagi sekelompok orang lainnya menjawab salam salah seorang di antara mereka.” Riwayat Ahmad dan Baihaqi.

Hadits ini menunjukkan bahwasannya cukup satu orang sebagai wakil satu kelompok dalam memberikan salam atau menjawab salam, jadi tidak usah di dalam rombongan itu semua orang yang mengucapkan salam atau menjawab salam melainkan cukup perwakilannya saja.

Hadits No. 1475

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَبَدَّؤُوا الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَصِيقِهِ)
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam, bila bertemu dengan mereka di sebuah jalan usahakanlah mereka mendapat jalan yang paling sempit.” Riwayat Muslim.

Hadits ini menerangkan tentang tidak bolehnya seorang muslim mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam memberi atau mengucapkan salam apabila kita bertemu mereka di suatu jalan. Mengingat esensi salam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah do’a agar Allah memberikan keselamatan dan keberkahan. Akan tetapi apabila mereka lebih dahulu mengucapkan salam, maka cukup dijawab dengan perkataan “wa alaikum”.

Mengenai sabda Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam, “*Desaklah mereka ke jalan yang sempit*” menunjukkan muatan dakwah kepada mereka, bahwasannya jika mereka menghendaki keleluasaan jalan maka mereka harus masuk Islam.

Hadits No. 1476

وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ
يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِالْكُم) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah, dan hendaknya saudaranya mengucapkan untuknya yarhamukallah. Apabila ia mengucapkan kepadanya yarhamukallah, hendaklah ia (orang yang bersin) mengucapkan yahdi kumullah wa yushlihu balaakum (artinya Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki hatimu).” Riwayat Bukhari.

Hadits ini menerangkan tentang tata cara bagaimana melakukan *tasmit* atau do’a bagi orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Manakala seorang muslim mengucapkan *tahmid* manakala dia bersin, maka saudara muslim yang mendengarnya harus mendoakannya dengan bacaan do’a *yarhamukallah*, kemudian orang yang bersin tadi hendaklah mendoakan saudaranya tersebut dengan do’a *yahdikumullah wa yushlihu baalakum*.

Terdapat hikmah yang besar dibalik bersin. Hadits ini menunjukkan betapa besar anugerah nikmat Allah kepada hamba-Nya, karena dengan bersin dapat menghilangkan hal-hal wabah penyakit. Kemudian Allah mensyariatkan untuk mengucapkan tahmid agar ia mendapatkan pahala. Kemudian setelah orang lain mengucapkan *tasmit* dan mendoakan kebaikan untuk dirinya, maka yang bersin pun mendoakan kebaikan untuk orang yang mengucapkan tasmit kepadanya.⁴⁴

Dengan bersin, seseorang dapat merasakan nikmat dan manfaat dengan keluarnya uap yang terhenti di otak. Seandainya uap tersebut tidak keluar tentu hal ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu disyariatkan mengucapkan *alhamdulillah* sebagai rasa syukur atas nikmat bersin tersebut dan berfungsinya organ-organ tubuh dengan baik.

Hadits No. 1477

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ
قَائِمًا) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri.” Riwayat Muslim.

⁴⁴ *Ibid.* hlm 148

Hadits ini menunjukkan larangan untuk minum sambil berdiri, sebab hukum asal dari larangan adalah haram. Hanya saja kebanyakan para ulama menyimpulkan bahwa larangan minum sambil berdiri adalah makruh (tidak menunjukkan haram), mengingat terdapat hadits lain yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhary yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah minum air zamzam sambil berdiri.

Dengan demikian, perbuatan Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam tersebut merupakan penjelasan bahwa larangan tersebut bukan menunjukkan haram.

Hadits No. 1478

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا اِنْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلِتَكُنَّ الْيَمِينُ أَوْلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ)

Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seseorang di antara kalian memakai sandal, hendaknya ia mendahulukan kaki kanan, dan apabila melepas, hendaknya ia mendahulukan kaki kiri, jadi kaki kananlah yang pertama kali memakai sandal dan terakhir melepaskannya." Muttafaq Alaihi.

Perintah mendahulukan kaki kanan ketika memakai sandal dan mendahulukan kaki kiri dalam melepas sandal menunjukkan wajib. Menurut imam al-Hulaimi bahwasannya ketika memakai sandal berarti sedang melakukan penghormatan terhadap tubuh oleh karena itu sangat pantas apabila dimulai dengan kaki kanan terlebih dahulu seperti melakukan kebaikan-kebaikan lainnya yang sering dianjurkan oleh Rasulullah dengan mendahulukan bagian yang kanan dalam memulainya.⁴⁵

Hadits ini mengandung hikmah bahwa memakai sandal adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat. Seseorang yang memakai sandal berarti telah berihitar untuk menjaga keselamatan tubuh (diri)nya.

⁴⁵ *Ibid.* hlm 157

Hadits No. 1479

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا

Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah seseorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal, dan hendaklah ia memakai keduanya atau melepas keduanya.” Muttafaq Alaihi.

Hadist ini menunjukkan haramnya memakai sandal atau alas kaki sebelah. Akan tetapi dianjurkan untuk memakai kedua alas kaki bersamaan (kanan-kiri) apabila hanya ada sebelah maka lebih baik tidak dipakai keduanya.

Hadits ini pun mengisyaratkan tentang etika berpakaian bagi seorang muslim. Tidaklah pantas bagi seorang muslim hanya memakai sandal sebelah, yang baik secara kenyamanan maupun kepastasan tidak terpenuhi.

Oleh karena itu dianjurkan seorang muslim untuk memakai pakaian yang pantas.

Hadits No. 1480

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حِيَلَاءَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Allah tidak akan melihat orang yang menjuntai pakaiannya terseret dengan sombong.” Muttafaq Alaihi.

Allah tidak melihat dalam hadits ini artinya Allah tidak akan merahmati. Yaitu Allah tidak merahmati orang yang menjulurkannya pakaiannya dikarenakan kesombongan. Yang dimaksud dengan menjulurkan pakaian adalah menjulurkannya ke tanah, sehingga kain atau pakaiannya tersebut sampai kena dan terseret di tanah.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subul*. Hlm. 160

Dengan adanya pengkaitan hukum dengan sikap sombong, maka dapat difahami bahwa bagi yang menjulurkan pakaiannya tetapi bukan karena sifat sombong maka tidak terkena ancaman ini.

Memakai pakaian dengan berbagai macam jenis bahan, bentuk, dan gaya termasuk menambahkan perhiasan bisa jadi akan memunculkan sifat sombong atau sedikit-tidaknya berlebihan. Sifat sombong dan berlebihan inilah yang dilarang untuk dikerjakan.

Hadits No. 1481

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ, وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ, وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila seseorang di antara kalian makan hendaknya ia makan dengan tangan kanan dan minum hendaknya ia minum dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya.” Riwayat Muslim.

Hadits ini menunjukkan haramnya makan dan minum dengan tangan kiri karena itu merupakan perilaku syetan. Sebagaimana ayat dalam al-Quran bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti langkah-langkah syetan. Oleh karena itu menjadi sebuah etika bagi seorang muslim untuk makan dan minum dengan tangan kanan.

Hadits No. 1482

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ, وَاشْرَبْ, وَالْبَسْ, وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ, وَلَا حَيْلَةَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاحْمَدُ, وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Amar Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Makanlah,

minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong.” Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits mu’allaq menurut Bukhari

Hadits ini menunjukkan haramnya sikap *israaf*, yakni berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam perkara makanan, minuman, berpakaian, dan bersedekah. Hadits ini semakna dengan ayat al-Quran surah al-A’raf ayat 31, Allah berfirman, “*Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan*”.

Menurut al-Baghdadi sebagaimana yang dikutip oleh ash-Shan’any, bahwa hadits ini menghimpun beberapa keutamaan seorang yang pandai mengatur dirinya sendiri. Mampu melaksanakan hal-hal yang dapat bermanfaat untuk dirinya semasa di dunia dan di akhirat. Sebab segala sesuatu yang sudah melampaui batas akan menimbulkan efek negatif terhadap tubuh. Dan sikap ini akan membahayakan kesucian jiwa karena akan menimbulkan sikap sombong.⁴⁷

Dari keenam belas hadits tersebut, dapat dilihat konsep pemikiran Ibn Hajar al-Asqalany tentang adab. Adab tersebut meliputi:

Adab kepada Allah Swt

Dari rangkaian hadits-hadits tersebut di atas, Ibn Hajar berpendapat bahwa setiap aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari ketentuan Allah Swt sehingga setiap aspek kehidupan harus senantiasa menyadarkan manusia terhadap keberadaan dan kekuasaan Allah Swt. Ini misalnya terlihat dari hadits tentang bersyukur atas nikmat Allah dalam hal bersin, anjuran saling mengucapkan salam (yang berarti menyerahkan keselamatan hidup pada Allah), menunaikan hak dan kewajiban karena Allah, melaksanakan kebaikan dan menjauhi kejahatan dikarenakan merasakan keberadaan Allah Swt di dalam hatinya.

Apabila kita bandingkan, pilar pertama dari pendidikan karakter adalah menanamkan rasa cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya (*love Allah, trust, reverence, loyalty*). Sedangkan konsep adab pertama dan utama menurut Ibn Hajar adalah menunjukkan adab kepada Allah Swt sebagai pencipta dan penguasa seluruh makhluk. Hal ini menjadi teramat penting, dikarenakan penghayatan dan pengamalan adab kepada Allah Swt, akan menjadi pondasi lahirnya adab-adab atau moral kepada diri sendiri dan sesama makhluk lainnya.

⁴⁷ Ibid

Adab kepada diri sendiri

Dari hadits-hadits yang tercantum di dalam bab al-Adab ini, bisa disimpulkan konsep adab Ibn Hajar terkait adab terhadap diri sendiri, yaitu: 1) Menyukuri setiap nikmat dan rejeki yang dianugerahkan Allah Swt. Tidak kufur nikmat dan tidak mensia-siakan atas setiap nikmat yang telah Allah turunkan. Contohnya, mensyukuri kenikmatan dalam hal harta atau rejeki yang diusahakan dan kesehatan dengan senantiasa melihat orang-orang yang kondisinya ada di bawah. 2) Adab makan. Ketika makan memakai tangan kanan sebagai bentuk penghormatan atas rizki dari Allah Swt. Menghabiskan makanan yang terhidang dengan niat mendapatkan berkah dari Allah Swt. Serta tidak berlebih-lebihan dalam urusan makanan. 3) Adab minum. Disyariatkan untuk tidak minum sambil berdiri, memakai tangan kanan, dan tidak berlebih dalam urusan minuman. 4) Adab berpakaian. Mengenai berpakaian hendaknya seorang muslim berpakaian dengan pantas dan wajar, sebagai contoh tidak memakai sandal sebelah. Kemudian memakai pakaian yang tidak berlebih atau pakaian yang memperlihatkan kesombongan sehingga ada kesan tidak menghargai keberadaan orang lain.

Dari poin pilar pendidikan karakter yang ada hubungannya dengan karakter moral terhadap diri sendiri diantaranya kemandirian dan tanggung jawab, percaya diri, kreatif, bekerja keras, dan rendah hati. Kesemua pilar karakter terhadap diri sendiri ini akan mudah diimplementasikan jika dimulai dengan hal-hal yang sifatnya kecil atau sederhana semisal cara makan dan minum. Dalam hal ini Ibn Hajar memberikan contoh yang sederhana bahwa urusan makan dan minum saja harus menunjukkan adab yang baik apalagi untuk hal-hal yang lebih besar. Sehingga sesuai dengan inti dari pendidikan karakter yakni lewat pengembangan dan pembiasaan, maka hal-hal yang sederhana seperti adab makan dan minum bisa menjadi model penerapan pendidikan karakter bagi setiap orang.

Adab kepada orang lain

Adab terhadap orang lain menurut Ibn Hajar al-Asqalany diantaranya: 1) Saling menyebarkan kasih sayang dan mendoakan keselamatan, diantaranya dengan saling mengucapkan salam dan menjawab salam, saling mendoakan ketika bersin, sakit, dan meninggal. 2) Menunjukkan kepedulian sosial dengan menghadiri undangan dan saling menasehati di dalam kebaikan. 3) Toleransi, tenggang rasa, saling menghargai dan menghormati sesama. Misalnya dalam etika berkumpul tidak berbisik-bisik di hadapan seseorang akan tetapi melibatkan semua orang dalam pembicaraan. Juga saling

berbagi tempat duduk dalam suatu majelis, tidak mengusir seseorang dari tempat duduknya melainkan saling berbagai keleluasaan.4) Menjauhi sifat-sifat sombong dari hal memperlihatkan cara berjalan, berpakaian, bahkan berinfak sekalipun tidak boleh dilakukan karena sombong dan berlebihan. 5) Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Hal ini diantaranya terlihat dari aturan mengucapkan salam.

Dalam sembilan pilar pendidikan karakter, terdapat pengembangan karakter dermawan, tolong-menolong, hormat-menghormati, keadilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan yang jika disimpulkan adalah wujud sikap menghormati orang lain. Apabila dibandingkan dengan konsep adab Ibn Hajar, bahwa pengembangan dan pembiasaan sikap hormat terhadap sesama itu bisa dilakukan dari lingkungan yang terdekat seperti keluarga atau sahabat-sahabat terdekat, untuk kemudian dikembangkan terhadap lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Apabila digambarkan akan terlihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 1

Konsep Adab Ibn Hajar al-‘Asqalany	Inti Pendidikan Karakter
Adab terhadap Allah Swt: • Syukur nikmat • menunaikan hak dan kewajiban • memilah hal yang baik atau jahat	• Cinta Tuhan dan ciptaan-Nya • Kejujuran/Amanah, Bijaksana
Adab terhadap diri sendiri: • Bersyukur, • adab makan dan minum, • adab berpakaian: sewajarnya, tidak sombong, tidak berlebihan	• Kemandirian dan Tanggung Jawab • Percaya diri, kreatif, dan pekerja keras • Baik dan rendah hati
Adab terhadap sesama: • Saling menyebarkan kasih sayang dan mendoakan keselamatan • Menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dan saling menolong • Toleransi, tenggang rasa, saling menghargai dan menghormati sesama. • Menjauhi sifat-sifat sombong dan berlebihan	• Dermawan, suka tolong-menolong • Hormat dan Santun • Kepemimpinan dan Keadilan • Toleransi, kedamaian, dan kesatuan

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa konsep adab menurut Ibn Hajar al-'Asqalany bisa mencakup kedalam sembilan inti nilai-nilai karakter yang dijadikan menu utama dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Ini artinya bahwa konsep adab Ibn Hajar tersebut sangat relevan apabila dijadikan sebagai dasar acuan kerangka nilai dalam penjabaran sembilan inti pendidikan karakter di Indonesia, selain karena sebagai negara dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam, sudah sepantasnya ajaran-ajaran Islam bisa menjadi dasar pijakan perumusan konsep pendidikan karakter. Juga dikarenakan konsep adab menurut Ibn Hajar al-'Asqalany tersebut mencakup adab hubungan yang lengkap, yakni hubungan manusia dengan Allah (*Hablumminallah*), manusia terhadap dirinya sendiri dan juga hubungan dengan orang lain (*Hablumminannas*).

Sejalan dengan pengembangan karakter diperlukan tiga komponen karakter yang baik, yaitu *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* atau perasaan (penguatan emosi) tentang moral, dan *moral action* (perbuatan bermoral). Dengan demikian karakter dikembangkan melalui tiga langkah, yakni mengembangkan *moral knowing*, kemudian *moral feeling*, dan *moral action*. Dengan kata lain, semakin lengkap komponen moral manusia, akan semakin membentuk karakter yang baik atau unggul.

Simpulan

Melalui penelaahan dalam penelitian ini, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa konsep adab menurut Ibn Hajar al-'Asqalany mencakup tiga hal, yaitu: 1) Adab terhadap Allah Swt, seperti sadar terhadap keberadaan dan kekuasaan Allah Swt., yang menghasilkan sikap senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Swt, menunaikan hak dan kewajiban dengan baik, melaksanakan kebaikan dan menjauhi kejahatan dikarenakan merasakan keberadaan Allah Swt di dalam hatinya. 2) Adab terhadap diri sendiri, seperti menyukuri setiap nikmat dan rejeki yang dianugerahkan Allah Swt, tidak kufur nikmat dan tidak mensia-siakan atas setiap nikmat yang telah Allah turunkan, menjaga sikap yang baik dan memenuhi adab-adab ketika makan, minum, dan berpakaian. 3) Adab terhadap orang lain/ sesama dengan cara saling menyebarkan kasih sayang dan mendoakan keselamatan, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dan saling menolong, toleransi, tenggang rasa, saling menghargai dan menghormati sesama, menjauhi sifat-sifat sombong dan berlebihan.

Relevansi konsep adab menurut Ibn Hajar al-'Asqalany dengan pendidikan karakter di Indonesiabahwa pendidikan karakter yang dilaksanakan di Indonesia dikembangkan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, salah satunya adalah

nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama. Sebagai salah satu ajaran agama Islam, konsep adab Ibn Hajar al-'Asqalany yang bersumber dari hadits-hadits Rasulullah Saw, bisa mencakupi sembilan inti dalam pendidikan karakter di Indonesia. Ini artinya bahwa konsep adab tersebut sangat relevan apabila dijadikan sebagai dasar acuan kerangka nilai dalam penjabaran kesembilan inti pendidikan karakter di Indonesia.

Rujukan

- Anonim. *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Aladip, Machfuddin . *Terjemah Bulugh al-Maram*, Semarang: Toha Putra, 1985
- A. Chaedar Alwasilah, *Islam, Culture, and Education*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014
- 'Asqalany. Ibnu Hajar al-*Fathul Bary, Kitab Adab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Juz 3, 2003
- 'Asqalany, Ibnu Hajar ., *Tabdzib al-tahdzib*, juz I, Libanon:Baerut
- Attas. Syed Muhammad Naquib al-. *Aims and Objectives of Islamic Education*. Hodder and Stoughton; King Abdulaziz University, 1979
- Attas, M. al-Naquib Al-. *Konsep Pendidikan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Attas. Syed Muhammad Naquib al-.*Islam dan Sekularisme*. Bandung: PIMPIN, 2011
- Daud. Wan Mohammad Nor Wan. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Syed M Naquib al-Attas*. Terj.Hamid Fahmy Zarkasy, Bandung: Mizan, 2003
- Husaini, Adian. *Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter & Beradab*. Depok: Komunitas Nuun, 2011
- Kerlinger, Fred N. *Foundationof Behavioral Research*. New York: Holl, Rinehart and Winston Inc, 1973
- Koesoema D. *Tiga Matra Pendidikan Karakter*, Depok: BASIS, 2007
- Lickona, Thomas. *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books, 1991
- Majid, Abdul dan Dian Andayani. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Megawangi, Ratna. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Star Energy, 2004
- Mujib, Abdul dan Mudzakkir.*Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008
- Samani, Muchlas. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012

Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta : Bumi Aksara, 2011

Samani, Muchlas. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Ash-. tt. *Subul al-Salam*, Bandung: Maktabah Dahlan.

Ulwan, Abdullah Nasih. *Tarbiyat al-Aulâd fi al-Islâm*. Kairo: Dâr al-Salam, 1993

Yunus. Mahmud. *Qamus*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1990

Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakte*, Jakarta: Kencana, 2011

Internet:

Zaenul, Ngator. *Ta`Lim, Ta`Dib, dan Tarbiyah*. 29 Januari 2009

Perbandingan Pendidikan Islam Perspektif Mahmud Yunus dan Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi

Juwariyah

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: juwariyah@uin-suka.ac.id

DOI : 10.14421/jpi.2015.189-207

Diterima: 23 Maret 2015

Direvisi: 25 April 2015

Disetujui: 28 Mei 2015

Abstract

The aim of the study on the thought of Mahmud Yunus and Muhammad Athiyah al-Abrasyi about the definition and components of Islamic Education is meant to know in detail and to identify their ideas about the definition and scope of Islamic education. Given that education is an activity that is required to be able to keep up with the times from the various changes and to be able to answer the challenges of the times in the future, so that the definition and education components should always be reviewed to keep up with the demands of time. Therefore, this research is expected to give a significant contribution to the effort in promoting Islamic education, especially in Indonesia and generally in Islamic world.

Keywords: *Islamic Education, Mahmud Yunus, Athiyah al-Abrasyi.*

Abstrak

Tujuan dari kajian terhadap pandangan Mahmud Yunus dan Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi tentang pengertian dan komponen-komponen Pendidikan Islam dimaksudkan untuk mengetahui secara rinci serta mengidentifikasi pemikiran-pemikiran keduanya tentang pengertian dan cakupan pendidikan Islam. Mengingat bahwa pendidikan merupakan aktifitas yang dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dari berbagai perubahan yang terjadi serta mampu menjawab tantangan-tantangan zaman di masa depan, maka tentunya pengertian serta komponen-komponen pendidikan pun perlu senantiasa ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan tuntutan zamannya. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap upaya memajukan pendidikan Islam khususnya di tanah air dan umumnya di dunia Islam.

Kata Kunci: *Pendidikan Islam, Mahmud Yunus, Athiyah al-Abrasyi*

Pendahuluan

Problematika Pendidikan Islam sebagaimana halnya pendidikan lainnya merupakan persoalan besar yang senantiasa berada dalam proses dan tidak akan pernah mencapai titik akhir. Oleh karena itu debat akademik mengenai pendidikan Islam tidak akan pernah selesai dan tidak mungkin dielakkan.¹

Perkembangan pendidikan Islam sejak masa Nabi sampai masa kejayaannya pada abad ke IV H. dapat diketahui melalui kitab-kitab sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam maupun melalui pemikiran dan pembaruan dalam Islam. Namun kegiatan penulisan sejarah perkembangan pendidikan Islam secara keseluruhan sejak zaman Rasulullah sampai sekarang baru dimulai pada abad ke XX, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi dan Mahmud Yunus. Keduanya menghimpun kembali setiap pemikiran yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam yang pernah ditulis oleh para pemikir dan pendidik seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan lain-lain.²

Dalam perkembangan sejarahnya umat Islam telah mengalami dan melalui beberapa periode yang dapat dirinci sebagai berikut: - Periode lasik (650 - 1250). -Masa kemajuan I (650 -1000). - Masa disintegrasi (1000 - 1250). - Periode pertengahan (1250 - 1500). - Masa kemunduran I (1250 - 1500). - Masa tiga kerajaan besar (1500 -1800). Fase kemajuan II (1500 - 1700). - Fase kemunduran II (1700 - 1800). Periode modern (1800).³

Jika ditinjau dari segi administrasi dan organisasi serta sistem pendidikan modern, maka pada masa kemunduran itu pendidikan Islam mengalami kemunduran pula. Hal itu dapat dilihat pada sistem pendidikan tradisional di madrasah dan pondok-pondok pesantren di mana pelajaran yang diberikan kepada siswa sangat terbatas kepada pelajaran agama dan sejarah para Nabi dengan organisasi dan administrasi yang sangat sederhana. Hal itu terjadi dikarenakan perhatian umat Islam ketika itu lebih tercurah kepada perjuangan politik untuk membebaskan

¹ Mastuhu, *Pendidikan Islam Indonesia, dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1992, hlm. 1 (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

² Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi, *At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falsafatuba*, Mesir: Isa al-Babi, 1976, hlm. 3

³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hlm. 56-89.

diri dari cengkeraman penjajah, di samping perjuangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi ekonomi.⁴

Baru pada permulaan abad XX munculah di dunia Islam tokoh-tokoh pembaharu di bidang pendidikan, di antaranya: Ahmad Dahlan, Naquib Al-Atas, Mahmud Yunus, dan Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi.

Tulisan ini akan membahas komponen-komponen pendidikan Islam dalam pandangan Mahmud Yunus dan Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi untuk melihat titik-titik persamaan dan perbedaan antara ide-ide keduanya serta relevansinya dengan pendidikan Nasional..

Sebelum masuk kepada pembahasan terhadap ide-ide keduanya tentang komponen-komponen pendidikan Islam, terlebih dahulu akan dikaji sekilas tentang riwayat hidup keduanya.

Mahmud Yunus:

Dilahirkan di desa Sungayang Batusangkar, Sumatra Barat pada hari Rabu 30 Ramadhan 1316H./ 10 Pebruari 1899 M. dan meninggal pada 16 Januari 1982. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki otak yang cerdas dan kemauan keras serta tekun dan ulet. Pendidikan dasarnya dia tempuh di desanya pada tahun 1906 - 1909, kemudian tahun 1910 - 1916 ia belajar di Pesantren. Ia memulai karirnya sebagai guru madrasah di kampungnya pada tahun 1917 -1923, Pada tahun 1924 - 1930 ia meneruskan studi ke Mesir (Kairo), tahun 1931 - 1946 mengajar di Indonesia, dan berakhir dengan menjabat sebagai Rektor pada IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 1957 - 1971. Semangat pembaruannya terutama di bidang pendidikan Islam ia peroleh dari gurunya Syaikh Muhammad Thaib Umar tokoh gerakan modern Islam di Minangkabau, di samping juga dari tokoh-tokoh pembaru yang dijumpainya selama belajar di Mesir. Sekembalinya dari Mesir ia menjadi pegawai pada Departemen Agama, sehingga dia mempunyai peluang untuk bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam mewujudkan cita-citanya melakukan pembaruan di bidang pendidikan Islam. Maka didirikanlah sekolah formal Islam, dan di situ pulalah dicetak calon-calon guru profesional yang nantinya diharapkan dapat menjadi penerus bagi perjuangannya dalam melakukan pembaruan di bidang pendidikan Islam sampai hari ini.

Karya tulisnya yang berkaitan dengan pendidikan di antaranya: *Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran, Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia, Metodik Khusus Pendidikan Agama, Sejarah Pendidikan Islam, dan Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.*

⁴ Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, Jakarta: Al-Husna, 1985, hlm. 98.

Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi:

Ia adalah pakar pendidikan yang memiliki jabatan terakhir sebagai guru besar di Dar al-Ulum dan Kairo University. Berbagai tulisan tentang pendidikan telah dihasilkannya. Diantaranya *At-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falsafatuha*, *Al-Ittijaahaat al-Hadiitsah fi at-Tarbiyah*, *Ruuh al-Islam*, *Ruuh at-Tarbiyah wa at-Ta'liim* yang merupakan karya monumentalnya. Ia menguasai beberapa bahasa di samping bahasa Arab, seperti bahasa Inggris, Ibrani, dan Suryani. Hanya saja sepanjang penelitian yang penulis lakukan terhadap karya-karya 'Athiyah al-Abrasyi, penulis belum menemukan riwayat kehidupannya secara lebih lengkap dan lebih terinci.

Mengomentari tentang 'Athiyah Al-Abrasyi, Abu Zahrah mengatakan:

Ia telah menghabiskan hampir seluruh umurnya untuk menuntut ilmu, semenjak mempelajari tentang ke-Islaman pada tingkat madrasah, sampai ke Dar al-ulum di Mesir, dan kemudian dilanjutkan ke Inggris untuk mendalami ilmu jiwa dan pendidikan. Walau demikian ia kembali ke Mesir tetap sebagai muslim yang baik, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, tidak rusak imannya sebagaimana yang dialami oleh sebagian ilmuwan yang belajar ke luar negeri.⁵

Menurunya keberhasilan pendidikan Islam dari awal sampai masa kejayaannya dapat dibuktikan dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan besar.⁶ Menurut 'Athiyah ketika itu tidak ada dikhotomi di antara ilmu, sehingga dikatakan bahwa kegiatan berfikir dan berdzikir senantiasa berjalan seiring. Para ilmuwan melakukan observasi, menggali potensi alam kreasi Tuhan untuk mempertebal keyakinan terhadap sang Maha Pencipta, sehingga negeri Mesir ketika itu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Namun ketika dunia Islam mengalami kemunduran, terlebih ketika negeri itu secara berturut-turut dijajah oleh Perancis dan Inggris maka semua bidang pemikiran, dan khususnya dunia pendidikan di negeri ini juga mengalami hal yang sama. Kenyataan inilah yang telah membangkitkan 'Athiyah untuk menggali kembali nilai nilai dan unsur-unsur pembaruan yang terpendam dalam hazanah perkembangan pendidikan Islam di masa kejayaannya. Ia mulai mencoba mencari titik persamaan dan perbedaan antara dasar-dasar pendidikan Islam dan pendidikan modern untuk mendapatkan pola-pola pendidikan baru yang dapat menjawab tantangan zaman namun tetap berpijak dan berlandaskan kepada ajaran dasar Islam.

⁵ Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi, *Ruuh al-Islam*, Mesir: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyati, 1389 H./1969 M., hlm. 390.

⁶ Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi, *At-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falsafatuha*, Mesir: Isa al-Babi, t.t., hlm. 25-51.

Pengertian dan Komponen Pendidikan Islam

Pengertian di atas mengandung makna ide, pandangan, atau dapat juga diartikan sebagai konsepsi, opini atau meaning.⁷ Sementara konsep memiliki keterkaitan erat dengan teori, sehingga terdapat saling keterkaitan antara pengertian dan teori. Hal itu sebagaimana digambarkan dalam rumusan Karlinger yang mengatakan bahwa:

*A Theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relation among variables with the purpose of explaining the phenomena.*⁸

Rumusan di atas menunjukkan bahwa suatu teori merupakan seperangkai konsep, definisi dan proposisi yang saling berhubungan dan menggambarkan suatu pandangan yang sistematis dari gejala-gejala dengan menentukan satu persatu hubungan variabel, untuk tujuan menerangkan gejala-gejala tersebut.

Sementara itu yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pendidik muslim terhadap perkembangan ruhaniyah dan jasmaniyah peserta didik pada situasi tertentu untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia melalui ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

Berangkat dari pengertian pendidikan, seorang pakar pendidikan dari Perancis Jean Jaques Rousseau sebagaimana dikutip Mahmud Yunus dalam bukunya *At-Tarbiyatu wa at-Ta'lim* mengatakan bahwa pendidikan itu memberikan atau menambahkan sesuatu kepada kita tentang sesuatu yang kita belum memilikinya pada masa kecil tetapi memerlukannya pada masa yang akan datang setelah dewasa.⁹ Sementara itu Plato memandang bahwa pendidikan itu mempersiapkan seluruh kemampuan akal/jiwa dan raga untuk menuju kepada kesempurnaan dan kebaikan.¹⁰ Sedangkan menurut Islam pendidikan itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan seorang pendidik untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada anak didik baik yang bersifat fisik *jasmaniyah* ataupun psikis *ruhaniyah bathiniyah* untuk membentuk "insan kamil" yang secara garis besar harus mengacu kepada keseimbangan antara keduanya, guna mewujudkan tujuan pokoknya yaitu kesejahteraan lahir batin, dunia dan akhirat. Oleh karena itu melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Qashash, 28: 77 Allah telah mengisyaratkan perlunya ada keseimbangan antara kebutuhan keduanya.

⁷ Wojowasito, Poerwodarmanto, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Jakarta: Hasta, 1974, hlm. 11

⁸ Fred N. Karlinger, *Foundations of Behavioral Research*, Holt, Rinehart and Winston, 1973, p. 28.

⁹ Jean Jaques Rousseau adalah seorang pakar pendidikan Perancis yang lahir tahun 1712 dan wafat tahun 1778, dia punya andil besar di dalam revolusi Perancis.

¹⁰ Plato adalah ilmuwan dari Yunani yang lahir pada tahun 429 S.M.

Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa karunia Allah yang dicari/diupayakan dan diperoleh manusia di dunia seharusnya sebagiannya diperuntukkan guna mengupayakan kesejahteraan di kampung akhirat sehingga keduanya akan dapat diperoleh dan dinikmati secara seimbang.

Sejalan dengan ayat tersebut di atas maka Seminar Pendidikan Islam se duania di Islamabad tahun 1980 telah merekomendasikan mengenai pendidikan Islam sebagai berikut:

*Education is should aim at the balanced growth of the total personality of Man. Education should , therefore, cater for the growth of man in all aspect, spiritual, training of man's spirit, intellect, the rational self, feeling and bodily senses. Education should therefore cater for the growth of Man in all its aspect: Spiritual, intellectual, imaginative, phisical, scientific, linguistic, both individually, and collectively and motivate all these aspects to wards goodness and the attainment of perfection. He ultimate aim of Muslim education lies in the realization of complete submsission to Allah on the level of individual, the community and humanity at large.*¹¹

Kata kunci dari rekomendasi di atas menurut hemat penulis adalah 'balance' (keseimbangan), sehingga usaha pendidikan akan dikatakan berhasil dengan baik ketika berbagai unsur tersebut di atas dapat dikembangkan seara berkeseimbangan, yang dari sana akan lahir produk-produk pendidikan yang handal dan siap pakai.

Dalam kaitannya dengan komponen-komponen pendidikan Islam yang meliputi: Tujuan, metode, materi, peranan guru, kedudukan peserta didik, serta pengaruh lingkungan di dalamnya, di bawah ini secara garis besar akan dijelaskan satu persatu tentang:

Tujuan Pendidikan Islam

Berangkat dari pendapat para pakar pendidikan tentang tujuan pendidikan Islam secara esensial dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di dunia ini adalah untuk beribadah, karena itu tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam itu adalah manusia yang berkualitas baik menurut al-Qur'an, yakni manusia beriman, berilmu, beramal dan bahagia. Dalam mana hal itu akan dapat diwujudkan melalui upaya pengembangan dan pemeliharaan fitrah peserta didik untuk taat kepada allah, mempersiapkannya agar memiliki kepribadian muslim, membekali dengan berbagai macam ilmu

¹¹ Unde The Auspices of King Abdul'Aziz University and Quait 'Azam University Sponsored By Ministry of Education, Government of Pakistan, *Recommendations Second World Conperence of Muslim Education, International Seminar On Islamic Concepts and Curricula*, Islamabad, 15 - 20 March, 1980.

pengetahuan dan ketrampilan, untuk mencapai kehidupan yang sempurna (seimbang antara kehidupan lahiriyah dan batiniyah).

Metode Pendidikan Islam

Terdapat beberapa metode yang digunakan oleh pendidikan Islam. Di antaranya dapat disebutkan pendapat Muhammad Qutub yang mengatakan bahwa beberapa metode dapat ditempuh dalam melaksanakan pendidikan Islam seperti: Keteladanan, nasehat, cerita, memuji keberhasilan peserta didik, memberi reward/hadiah kepada peserta didik yang berprestasi, serta memberikan sanksi/hukuman terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran, melatih kebiasaan baik serta menyalurkan bakat yang dimiliki setiap peserta didik.¹² Dalam hal ini penulis melihat bahwa menciptakan kondisi dan suasana lingkungan yang mendukung tumbuh suburnya nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik, baik di rumah, di sekolah, maupun di dalam lingkungan tempat tinggalnya merupakan persoalan yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan proses pendidikan Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum metode pendidikan Islam merupakan segala cara yang dilakukan pendidik dalam memberikan petunjuk, bimbingan, nasehat, pelajaran dalam berbagai bentuknya dengan tulus dan mengutamakan unsur keteladanan, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Materi Pendidikan Islam

Mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa materi pendidikan Islam adalah seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang menjadi dasar bagi kemajuan dan kejayaan hidup manusia. Sementara itu menurut Ibnu Sina materi pendidikan Islam itu meliputi; Pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan akal, pendidikan ketrampilan serta pendidikan sosial.¹³

Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan maka Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun telah membagi ilmu menjadi dua macam, yaitu: Pertama ilmu yang diturunkan Allah secara langsung melalui wahyu, dan Kedua ilmu yang mesti diperoleh manusia tidak secara langsung dari Allah akan tetapi harus melalui penalaran.

Lebih lanjut Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ilmu yang secara langsung diberikan Allah kepada manusia melalui wahyu kepada para Nabi-Nya itu di

¹² Muhammad Qutub, *Minhaj at-Tarbiyah al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Qalam, t.t., hlm. 19.

¹³ Tafsir Syaikh al-Ardh, *Al-Madkhal Ila Falsafati Ibnu Sina*, Beirut: Dar al-Anwar, 1976, hlm. 331.

antaranya: Ilmu al-Qur'an, (pembacaan dan penafsirannya), ilmu hadits (perkataan, perbuatan, serta sikap Nabi), ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya.¹⁴ Sementara ilmu-ilmu seperti lgika, ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu kimia, serta ilmu metafisika, masuk ke dalam klasifikasi ilmu-ilmu yang tidak secara langsung dari Tuhan, akan tetapi merupakan hazanah alam.¹⁵

Peranan Guru dalam Pendidikan Islam

Guru merupakan komponen penting yang paling menentukan dalam proses pendidikan. Karena itu ia dituntut untuk memiliki persiapan-persiapan, baik dari sisi keilmuan maupun mental. Sajjad Husain dan Ali Ashraf melihat bahwa seorang guru yang hanya memiliki ilmu saja belumlah memadai untuk dikatakan sebagai pendidik yang baik, namun dia juga dituntut untuk memiliki keimanan yang benar, berakhlak mulia, serta bertanggungjawab sebagai pengemban amanah Allah.¹⁶

Hal demikian sangat diperlukan dalam proses pendidikan Islam karena pendidikan Islam bukan sekedar aktifitas transfer ilmu pengetahuan dan informasi kepada peserta didik, akan tetapi lebih dari itu pendidikan juga dimaksudkan sebagai upaya pembentukan karakter peserta didik. Karena itu sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa guru merupakan figur sentral dalam pendidikan Islam, karena itu untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan seorang guru harus memiliki fisik, mental, akal, serta kepribadian yang sehat, karena di hadapan peserta didiknya guru adalah figur teladan yang seharusnya setiap gerak-gerik dan tingkah lakunya dapat dicontoh dan diteladani oleh peserta didiknya.

Namun demikian harus diakui bahwa sampai hari ini proses pendidikan baik utamanya pendidikan formal, baik pendidikan Islam maupun yang bukan, lebih sebagai *transfer of knowledge* dengan untuk tidak mengatakan 'tidak', kurang mempedulikan masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan moral kepribadian peserta didik, yang sesungguhnya itu menempati posisi yang tidak kalah pentingnya dengan ilmu pengetahuan sendiri. Hal itu bisa dilihat dengan banyaknya contoh di lapangan betapa merajalelanya manusia yang pintar secara keilmuan akan tetapi bodoh secara moral, mereka menjadi penjahat-penjahat kelas tinggi, menjadi pencuri-pencuri berdasi, serta pejabat-pejabat yang korupsi. Mereka itulah orang-orang terpelajar yang tidak terdidik.

¹⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Mesir: Mathba'ah Musthafa Muhammad, 779 H, hlm. 557.

¹⁵ Ibid. hlm. 558

¹⁶ Sajjad Husain dan Ali Ashraf, *Crisis in Muslim Education*, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979, hlm. 1.

Kedudukan Peserta Didik dalam pendidikan Islam

Peserta didik sebagai objek dan sekaligus subjek pendidikan sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari para pendidik. Antara keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menunjang kelancaran pelaksanaan proses pendidikan. Karena proses pendidikan akan berjalan sesuai harapan jika masing-masing pendidik dan peserta didik memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Jika pendidik berkewajiban memberikan bimbingan, nasehat, pengarahan, serta ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya maka adalah hak peserta didik untuk menerima semua itu dari pendidik. Dan jika peserta didik berkewajiban untuk memberikan penghormatan, penghargaan, serta perlakuan yang baik dan sopan terhadap pendidik maka adalah hak seorang pendidik untuk memperoleh itu semua dari peserta didik. Karena itu Ali bin Abi Thalib *karramallahu wajhahu* pernah mengatakan bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari seorang pendidik.

Demikian katanya:

أَلَا لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ سَأْنِبُكَ عَنْ جَمُوعِهَا بَيَانٍ: ذِكَاةٌ وَخِرْصٌ
وَاصْطِبَارٌ وَبُلْعَةٌ وَإِرْشَادٌ أُسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانٍ.¹⁷

Peringatan dari Ali bin Abi Thalib di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk dapat mencapai cita-citanya pencari ilmu harus memenuhi enam persyaratan yaitu cerdas, penuh harap (optimisme), shabar, berbekal, mengikuti petunjuk guru, dan memiliki waktu yang cukup.

Merujuk kepada kata-kata Ali tersebut di atas barangkali kita boleh mengatakan bahwa peserta didik adalah memang manusia yang wajib dimanusiakan dalam proses pendidikan, namun demikian ketika peserta didik tidak mentaati petunjuk dan perintah guru yang merupakan bagian dari persyaratan diperolehnya ilmu, maka ilmu yang diperolehnyapun akan menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pengaruh Lingkungan dalam Pendidikan Islam

Lingkungan dimana anak/peserta didik tinggal merupakan salah satu komponen pendidikan yang secara khusus perlu mendapatkan perhatian, karena

¹⁷ Asy Syaikh Salim bin Sa'ad bin Nuhban, *Ta'lim al-Muta'allim*, Mathba'ah Dar al-Kutub al-Ihya' al-'Arabiyah, t.t. hlm. 15.

peserta didik sebagai zon politicon (mahluk sosial) tidak mungkin memisahkan diri dari lingkungannya untuk hidup menyendiri tanpa saling pengaruh mempengaruhi, sementara sebagai anak/orang yang lebih muda, peserta didik tentunya lebih banyak terpengaruh daripada mempengaruhi, baik oleh lingkungan keluarga, sekolah, teman bermain, maupun masyarakat dimana dia hidup dan beraktifitas, sehingga orang bijak bilang bahwa *أَلْإِنْسَانُ مَدَنِيٌّ بِالطَّبَعِ* : bahwa manusia itu terbudayakan oleh lingkungannya sebagai hasil interaksi dengannya.

Oleh karena peserta didik disamping mendapatkan pendidikan dari sekolahnya mereka juga baik secara langsung maupun tidak langsung memperoleh pendidikan dari keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya maka banyak pihak harus turut bertanggungjawab dalam turut menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif untuk terealisasinya cita-cita pendidikan Islam, yaitu manusia 'utuh' dalam pengertian yang seluas-luasnya.

Pengertian dan Komponen Pendidikan Islam dalam Pandangan Mahmud Yunus dan 'Athiyah al-Abrasyi

Pandangan Mahmud Yunus

Dari hasil penelitian penulis terhadap karya-karya Mahmud Yunus tentang pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa menurutnya pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang dilakukan masyarakat Islam yang berkaitan dengan pelajaran agama Islam dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pengertian ini barangkali terlihat terlalu sederhana jika dikembalikan kepada begitu kompleksnya persoalan-persoalan yang terkait dengan pendidikan itu sendiri.

Namun demikian hal itu dapat dipahami karena situasi dan kondisi yang sangat mendesak yang dihadapi Mahmud Yunus ketika itu adalah memberikan pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah yang ketika itu masih berjalan secara tradisional dan sangat sederhana. Melihat kenyataan itu Mahmud Yunus yang pernah mengenyam pendidikan ke luar Negeri terpanggil untuk memperbaiki dan meningkatkan metode pembelajaran agama tersebut baik di sekolah, madrasah maupun pesantren dari beberapa sisi di antaranya:

Tujuan Pendidikan Islam

Menurut Mahmud Yunus ada dua tujuan pokok dari pendidikan Islam yaitu: Pertama, untuk mencerdaskan peserta didik sebagai perseorangan, dan Kedua untuk memberikan kecakapan/ ketrampilan dalam melakukan pekerjaan.

¹⁸ Walau demikian ia menambahkan bahwa penanaman akhlak mulia dalam diri peserta didik termasuk bagian penting dari tujuan pendidikan Islam. Dari beberapa metode yang lazim dipergunakan dalam pendidikan Islam menurutnya metode keteladananlah yang paling handal itu diterapkan dalam proses pendidikan Islam, karena betapapun guru menguasai materi ajar, dapat menyampaikannya secara baik runtut dan sistematis, sarana dan prasarana pendidikan memadai, akan tetapi jika mental serta akhlak guru tidak layak untuk diteladani, atau dengan kata lain guru tidak memberikan teladan yang baik kepada peserta didik maka dapat dikatakan bahwa pembentukan kepribadian peserta didik yang menjadi bagian penting dari tujuan pendidikan sulit untuk mencapai sasaran.

Metode pendidikan Agama

Dalam kaitannya dengan metode pendidikan sebagai salah satu dari komponen pendidikan Islam, Mahmud Yunus tidak menggunakan istilah pendidikan Islam sebagaimana yang digunakan 'Athiyah akan tetapi dia menggunakan istilah metode pendidikan Agama, mengapa istilah 'agama' yang dia gunakan, hal itu karena menurutnya metode pendidikan agama adalah suatu cara bagaimana guru/ pendidik mengajarkan ilmu agama kepada peserta didiknya, sehingga ia menulis metode khusus bagaimana mengajarkan agama kepada peserta didik dari semenjak kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi Islam. Walaupun metode yang diterapkan Mahmud Yunus masih relatif lebih tradisional daripada metode pendidikan Islam yang diusung oleh 'Athiyah. Karena berbeda dengan Yunus yang menggunakan istilah metode pendidikan agama, dengan maksud menunjukkan cara-cara pembelajaran agama "Islam", maka 'Athiyah secara tegas mengatakan bahwa dalam beberapa prinsip dasar, pendidikan Islam telah menunjukkan kemodernannya dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik, memperhatikan bakat, kecenderungan, fitrah, kemampuan, serta keharusan berkomunikasi dengan kasih sayang kepada peserta didik.

Materi Pendidikan Islam

Sebagai seorang pembaru yang gigih berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan proses pendidikan Islam, Mahmud Yunus berpendapat bahwa materi pendidikan Islam sudah seharusnya meliputi berbagai macam ilmu pengetahuan baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat umum. Oleh karenanya ia tidak sependapat dengan pemahaman yang membuat dikhotomi antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum, karena baginya agamawan yang baik adalah yang sekaligus ilmuwan, dan sebaliknya ilmuwan yang baik adalah

¹⁸ Mahmud Yunus, *Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1978, hlm. 11.

yang agamis. Karena itu menurutnya tidak ada alasan untuk memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, tetapi keduanya justru harus saling melengkapi.

Peranan Guru dalam Pendidikan Islam

Guru merupakan pembentuk kepribadian kedua setelah orang tuanya di dalam keluarga peserta didik, karena itu menurut Mahmud Yunus guru beserta segala perilaku dan gerak-geriknya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan dan kepribadian anak didik di lingkungan pendidikan dimana di dalamnya peserta didik mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam upaya pembentukan kepribadian peserta didik, ada beberapa sifat keutamaan yang harus dimiliki seorang guru/pendidik, diantaranya: rasa kasih sayang, perhatian, kejujuran, keadilan, ketulusan, percaya diri, sehat jasmani rohani, memiliki kemampuan dalam bidangnya, serta senantiasa mengikuti perkembangan peserta didik yang dihadapi. Mengapa hal itu sangat diperlukan bagi seorang pendidik, karena disadari atau tidak secara lambat tapi pasti bahwa gerak-gerik, tingkah laku, dan secara keseluruhan kepribadian seorang guru akan turut mewarnai kepribadian peserta didik yang menjadi asuhannya.

Sementara anak didik sebagai objek dan sekaligus subjek pendidikan menurut Mahmud Yunus diibaratkan sebagai benih dari tumbuh-tumbuhan yang untuk dapat tumbuh secara baik memerlukan tanah penyemaian yang baik pula, disamping tentu saja perawatan dan pemeliharaan yang sungguh-sungguh dari para guru/pendidik sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap pertumbuhan benih-benih yang berada dalam perawatan dan pemeliharannya, untuk menghasilkan pohon-pohon rindang yang dapat dinikmati buahnya.

Pengaruh Lingkungan Terhadap Pendidikan Anak

Berbicara masalah lingkungan dimana di dalamnya anak mendapatkan pendidikan, maka Mahmud Yunus telah merinci tempat/lingkungan pendidikan bagi anak menjadi empat kriteria yaitu: 1. Rumah/ tempat tinggal, 2. Sekolah, 3. tempat bermain, dan 4. Lingkungan pergaulan.¹⁹ Lebih dari itu ia menambahkan bahwa lingkungan bermain serta lingkungan dimana anak didik tinggal sangat bisa jadi memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap pembentukan karakter kepribadian anak didik, hal itu dikarenakan waktu yang dilalui anak di lingkungan tempat tinggal serta lingkungan bermain lebih lama daripada waktu yang dia habiskan di sekolah /lembaga pendidikan formal. Karena itu menurutnya untuk menunjang keberhasilan pendidikan di sekolah sesuai yang diharapkan, tidak bisa tidak anak didik harus diupayakan untuk tinggal di lingkungan baik keluarga

¹⁹ Mahmud Yunus, *Ibid.*, hlm. 27.

maupun masyarakat yang baik, yang selaras dan mengacu kepada nilai-nilai yang selaras dengan nilai-nilai pendidikan yang telah diterimanya di sekolah.

Pandangan Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi

Secara garis besar barangkali dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang esensial antara pandangan Yunus dengan Athiyah dalam melihat pengertian dan komponen-komponen pendidikan Islam. Namun untuk lebih dapat melihatnya secara rinci akan dikemukakan pandangan dan pendapat-pendapat 'Athiyah tentang:

Tujuan Pendidikan Islam

Menurut 'Athiyah sasaran pokok yang menjadi tujuan pendidikan Islam itu dapat disarikan dalam lima asas pokok yaitu: 1. Pendidikan akhlak, 2. Mengutamakan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, 3. Mengutamakan asas-asas manfaat, 4. Mengutamakan ketulusan/ keikhlasan, 5. Mengutamakan pendidikan ketrampilan untuk membekali peserta didik mencari rizki.²⁰ Namun diantara semua tujuan yang utama itu dia mengatakan bahwa pendidikan akhlak merupakan faktor paling utama untuk pembentukan kepribadian muslim, karena betapa banyak manusia yang pintar di bidang ilmu akan tetapi rusak akhlaknya telah membawa bencana bagi kehidupan manusia.

Sementara itu di dalam kitabnya *Ruh at-Tarbiyah wa at-Ta'lim* secara garis besar dia juga menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mempersiapkan anak didik untuk mencintai tanah air, sehat jasmani, rohani, akal fikiran serta perasaanya, lembut tutur katanya, trampil bekerja dan bermasyarakat.²¹

Metode Pendidikan Islam

Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Sina dan juga Ibnu Khaldun, 'Athiyah al-Abrasyi telah menetapkan kaidah-kaidah dasar dalam pendidikan Islam sebagai berikut: a. Tidak memberikan batasan usia kapan anak harus mulai belajar; b. Menjamin kebebasan peserta didik untuk memilih dan menentukan disiplin ilmu yang akan ditekuni sesuai dengan bakat dan kecenderungannya; c. Perlunya diadakan perbedaan metode mengajar bagi anak-anak dan orang dewasa; d. Tidak dimungkinkannya seorang pendidik mengajarkan dua disiplin ilmu yang berbeda dalam waktu yang sama; e. Adanya tuntutan bagi para pendidik untuk senantiasa mengikuti perkembangan peserta didiknya baik secara fisik, psikis, motorik maupun kognitifnya.

²⁰ Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi, *At-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falsafatuha*, Mesir: Isa al-Babi, Al-Hilyat asy-Syirkah, 1976, hlm. 22 - 25.

²¹ 'Athiyah, *Ruuh at-Tarbiyah wa at-Ta'lim*, Kairo: Daar al-Ihyaa' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1962.

Dengan mempertimbangkan beberapa kaidah dasar tersebut di atas maka 'Athiyah kemudian menyimpulkan bahwa bagi setiap materi pelajaran yang berbeda dapat diterapkan metode yang berbeda pula yang dianggap lebih sesuai dan lebih layak, dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik sebagaimana tersebut di atas. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa untuk pendidikan tingkat anak-anak sebaiknya menggunakan metode induksi, sedangkan untuk yang setingkat lebih tinggi dengan metode deduksi.

Materi Pendidikan Islam

Karya-karya Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Ibnu Sina telah banyak mewarnai pemikiran 'Athiyah tentang pendidikan. Sementara itu seperti diketahui bahwa ketiganya merupakan ilmuwan muslim yang juga menguasai ilmu-ilmu filsafat, kedokteran serta ilmu ketatanegaraan di samping ilmu agama. Dengan demikian 'Athiyah beranggapan bahwa materi pendidikan Islam tidak terbatas pada ilmu-ilmu keagamaan saja akan tetapi meliputi semua ilmu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia.

Adapun terhadap ilmu pengetahuan nonsyariat telah mengklasifikasikannya menjadi tiga kelompok yaitu: a. Ilmu yang diperoleh dengan indera dan akal, seperti: fisika, biologi, kimia, matematika, dan lain sebagainya; b. Ilmu yang diperoleh dengan keahlian dan ketrampilan, seperti: melukis, menggambar, memahat, dan lain sebagainya; c. Ilmu yang bersumber dari intuisis (perasaan), seperti: syair, puisi, seni suara, musik dan lain sebagainya.

Peranan guru, Kedudukan peserta didik, serta pengaruh lingkungan bagi pendidikan anak.

'Athiyah melihat bahwa peran guru sebagai motifator dan dinamisator di dalam proses pembelajaran cukup dominan di dalam pendidikan Islam. Hal itu karena menurutnya peserta didik yang secara simultan sebagai objek didik dan sekaligus subjek didik, merupakan amanah bagi pendidik untuk dikelola dan dibentuk sesuai dengan syariat agama yang telah diterapkan dalam sistem pendidikan Islam.

Tentang pandangannya terhadap pengaruh lingkungan bagi peserta didik, 'Athiyah melihat bahwa dari antara beberapa faktor sebagaimana telah disebut Mahmud Yunus, menurutnya faktor *lingkungan keluarga* paling penting untuk mendapatkan prioritas perhatian, karena porsi waktu yang paling banyak bagi anak didik adalah kesempatan bersama-sama keluarga di rumah, sehingga secara otomatis lingkungan keluargalah yang paling dominan memberikan warna dan model dalam pembentukan kepribadian anak.

Pengertian dan komponen-komponen pendidikan Islam sebagaimana dikemukakan Mahmud Yunus dan 'Athiyah al-Abrasyi yang mencakup Tujuan, materi, metode dan peran guru/ pendidik serta kedudukan peserta didik dalam Pendidikan Islam menurut pengamatan penulis tidak terdapat perbedaan yang esensial antara pandangan keduanya tentang pengertian dan komponen pendidikan Islam. Hanya saja terdapat hal-hal yang menurut hemat penulis belum terakomodasikan dalam pandangan keduanya, dimana pada era teknologi canggih seperti sekarang ini tidak bisa disangkal lagi bahwa peran media turut menentukan dalam menunjang keberhasilan usaha pendidikan. Walaupun kembali lagi kepada guru/pendidiklah sesungguhnya yang memegang posisi sentral dalam proses pendidikan. Oleh karena itu dengan komponen-komponen pendidikan Islam yang ditawarkan keduanya sesungguhnya pendidikan Islam masih menyimpan segudang persoalan yang perlu segera mendapat perhatian dan penanganan secara serius dan simultan oleh seluruh komponen umat Islam dan secara lebih khusus yang berkiprah di dunia pendidikan.

Harus diakui bahwa derasnya arus globalisasi yang ditandai dengan kecanggihan teknologi informasi dan telekomunikasi yang telah dengan leluasa memberikan kebebasan kepada peserta didik pada semua level dan tingkat usia untuk menikmati tontonan apa saja lewat media cetak maupun elektronik seperti audio visual yang seolah membuatnya tidak ada lagi sekat/ batas antar sudut-sudut dunia itu, tanpa disadari oleh para orang tua sesungguhnya telah merusak moral sebagian "besar" generasi muslim yang didambakan menjadi *'ibaadullah ash-ashaalihun* (hamba-hamba Allah yang saleh-saleh) yang pada gilirannya berhak untuk menjadi pewaris bumi Allah²². Karena sesuai janji Allah bahwa yang berhak mewarisi bumi ini hanyalah hamba-hamba-Nya yang saleh-saleh.

Peperangan fisik dengan senapan atau senjata laras panjang memang sudah jarang terjadi di zaman ini, akan tetapi jangan lupa bahwa setiap saat sesungguhnya telah terjadi perang urat saraf di tengah era global ini dimana ideologi umat Islam sedang terjajah oleh ideologi kapitalisme dan materialisme Barat yang menyebabkan timbulnya ketegangan, kecemasan dan kekhawatiran disana-sini, orang tua sangat mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan putra-putrinya, guru/ pendidik mencemaskan perkembangan mental anak didiknya, sebaliknya anak-anak menuduh dan mencurigai para orang tua yang dianggapnya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat diperlukannya, sehingga kedamaian menjadi barang langka, kekerasan terjadi di mana-mana, kasih sayang bertukar kehampaan, kegamangan dan kegoncangan jiwa banyak menimpa umat manusia, semuanya itu terjadi lantaran keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan lahir dan bathin,

²² Q.S. al-Anbiyaa', 21: 105. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون

jasmani dan ruhani, serta duniawi dan ukhrowi yang semuanya menjadi tujuan pendidikan Islam belum bisa mereka nikmati, karena manusia mulai mengukur kesejahteraan hidup hanya dengan semata-mata kelimpahan materi yang semu dan bersifat duniawi.

Karena itu menjawab tantangan reorientasi pendidikan Islam masa depan perlu diadakannya redesign sistem pendidikan Islam dengan memperhatikan secara proporsional tiga ranah kognisi, afeksi, dan psimotorik, atau dengan menyeimbangkan antara perkembangan Intellectual Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), dan Sipiritual Quotient (SQ), karena jika pendidikan hanya mengutamakan perkembangan kecerdasan Intellectual (IQ) peserta didik, dengan tanpa disertai upaya pengembangan kecerdasan emosinya maka yang terjadi adalah kepribadian yang membahayakan, karena dengan emosi yang tidak cerdas seseorang akan mudah melakukan tindak kriminal. Hal itu sebagaimana dikutip Karwadi dalam *Jurnal Pendidikan Islam* tentang hasil penelitian Daniel Goleman yang menyatakan bahwa Intellectual Quotient (IQ) itu hanya menyumbang 20 % bagi kesuksesan seseorang dalam kehidupannya, sisanya 80 % akan ditentukan oleh kecerdasan lainnya, yakni kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual²³ karena menurutnya orang yang cerdas secara emosi dia akan mampu menata perasaan, pikiran dan tindakan-tindakannya agar dapat sesuai dengan lingkungan dimana dia berada.²⁴ Oleh karena itu walaupun antara IQ, EQ, dan SQ, harus saling berkait kelindan untuk dapat sampai kepada sasaran pendidikan Islam, namun jika mengacu kepada hasil penelitian Daniel tersebut di atas maka pengembangan EQ dan SQ dari peserta didik justru harus lebih mendapatkan prioritas daripada pengembangan IQ.

Untuk mengintegrasikan dan interkoneksi tiga ranah kognisi afeksi dan psikomotorik, serta untuk dapat mengembangkan tiga kecerdasan IQ, EQ, dan SQ tersebut secara simultan dan berkeselimbangan bagi peserta didik, maka menurut hemat penulis perlu segera dikembangkannya sistem pendidikan Islam yang berlangsung selama 24 jam secara terus-menerus, dimana peserta didik diasramakan, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik baik dari sisi IQ, EQ, maupun SQ maupun yang bersifat ketrampilan fisik akan senantiasa dapat dipantau dan diawasi oleh pihak-pihak yang paling bertanggungjawab di dalam pengelolaan proses pendidikan. Karena harus disadari bahwa di era industrialisasi seperti sekarang ini tidak semua orang tua memiliki kemampuan dan kesempatan untuk memantau dan mengarahkan secara baik ke arah mana potensi-potensi dasar anak berkembang dan dikembangkan,

²³ Lihat Karwadi, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol III, No.1, 2006, hlm. 82.

²⁴ Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*, dalam Karwadi, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Jurusan PAI, Vol. III, No. 1, hlm. 85.

sepanjang di bawah asuhannya di dalam keluarga, disamping karena memang sebagian para orang tua mengandalkan pendidikan anak-anaknya hanya kepada lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan semisalnya.

Simpulan

Dari paparan pendapat-pendapat Mahmud Yunus dan 'Athiyah al-Abrasyi tentang arti dan komponen-komponen pendidikan Islam di atas, dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut, *pertama*, Keduanya melihat bahwa diantara lima komponen yang ditawarkan dalam pendidikan yaitu tujuan, materi, metode, dan peranan guru/pendidik serta kedudukan peserta didik, menurut keduanya komponen pendidik memegang peranan paling penting, karena dialah aktor utama dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kepada peserta didik. Walaupun tentu dengan tanpa harus mengabaikan unsur-unsur lain dari komponen pendidikan.

Kedua, Mahmud Yunus dan Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi sependapat lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh yang cukup signifikan di dalam turut membentuk kepribadian peserta didik, oleh karena itu menjadi kewajiban orang tua untuk menciptakan lingkungan yang menunjang pengembangan potensi-potensi anak secara baik. *Ketiga*, Ada persoalan yang belum terakomodasikan dalam komponen pendidikan perspektif keduanya yang perlu segera dipikirkan dan ditindaklanjuti, yaitu terkait dengan pemanfaatan media yang dapat membantu menunjang pengembangan potensi peserta didik dalam proses pendidikan, tentunya dengan tidak sampai mengarah kepada hal-hal yang merusak moral peserta didik. *Keempat*, Perlu segera dicari alternatif-alternatif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan potensi peserta didik secara optimal, yaitu dengan memperbanyak lembaga-lembaga pendidikan dengan model peserta didik diasramakan.

Rujukan

- Abdul'Aziz, Shalih. dan 'Abdul 'Azizi 'Abdul Majid, *At-Tarbiaytu wa Turuqu at-Tadriis*, Mesir: Daar al-Ma'arif, t.t.
- Abrasyi Al, Muhaammad 'Athiyah, *Al-Ittijaahaa al-Hadiitsah fi at-Tarbiyah*, Kairo: Isa al-Baabi al-Hilyati, asy-Syirkah, 1943.
- Abrasyi Al, Muhaammad 'Athiyah, *At-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falsafatuba*, Kairo: Isa al-Baabi al-Hilyati, 1976.
- Abrasyi Al, Muhaammad 'Athiyah, *Ruuh at-Tarbiyah wa at-Ta'lim*, al-Qahirah: Daar al-Ihyaa' al-Kutub al-'Arabiyah, 1962.
- al-Ardh, Syaikh. *Al-Madkhal ila Falsafati Ibnu Sina*, Beirut: Daar al-Anwar, 1976.
- Fred and Karlinger, *Fondation of Bihavioral Reearch*, Holt, Renhart and Winston, 1973.
- Goleman, Daniel. dalam Karwadi, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Jurusan PAI, Vol. III, No. 1, 2006.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*, Mesir: Mathba'ah Mushthafa Muhammad, 779 H.
- Langgulung, Hasan. *Peradaban dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1985
- Mastuhu, *Pendidikan Islam Indonesia dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1992, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Nuhban, Salim bin Sa'ad bin, *Ta'lim al-Muta'allim*, Matba'ah Daar al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Purwodarmento, Wojowasito. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Jakarta: Hasta, 1974.
- Qutub, Muhammad, *Minhaj at-Tarbiyah al-Islamiyah*, Mesir: Daar al-Qalam, t.t.
- Sajjad, Husain dan Ali Ashraf, *Crisis in Muslim Education*, Jeddah: King Abdul 'Aziz, 1979.

Yunus, Mahmud. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983

Yunus, Mahmud. *Pokok Pokok Pendidikan dan Pengajaran*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1978.

Yunus, Mahmud. *Sejarah pendidikan Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1982.

Yunus, Mahmud. *Tafsir al-Qur'an al-Kariim*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.